

KONTEKS & KERANGKA KONSEPTUAL  
KAJIAN POLITIK PENDIDIKAN

M. Sirozi

2013

Penerbit dan Percetakan



**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana  
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mekukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

---

## KONTEKS & KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN POLITIK PENDIDIKAN

---

Penulis : Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, MA, Ph.D

Layout : NoerFikri

Hak Penerbit pada Noer Fikri Offset, Palembang  
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)  
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh Noer Fikri Offset

**Noer Fikri Offset**

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

30126 Telp/Fax : 366625

Palembang - Indonesia

E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I : Oktober 2013

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN : 9786027512829

## PRAKATA PENULIS

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat-Nya penulis memiliki waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan dan mempublikasikan buku ini. Persiapan buku ini memakan waktu cukup lama, dikarenakan berbagai kesibukan saya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah dan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan judulnya, buku ini membahas konteks dan kerangka konseptual kajian politik pendidikan. Beberapa bagian dari buku ini menyajikan analisis politik pendidikan terhadap beberapa isu kependidikan di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Bagian terbesar dari buku ini menyajikan beberapa kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk melakukan kajian politik pendidikan. Beberapa kerangka konseptual tersebut dapat menjadi panduan bagi para peminat kajian politik pendidikan untuk melakukan pemetaan terhadap isu-isu politik pendidikan atau menentukan fokus kajian.

Buku ini adalah kelanjutan dari dua buku politik pendidikan yang saya tulis sebelumnya, yaitu *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Proses Penyusunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (INIS, 2004) dan *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Peyelenggaraan Pendidikan* (Rajagrafindo Press, 2005). Sebagaimana dua buku terdahulu, buku ini adalah bagian dari bahan kuliah politik pendidikan yang saya berikan di program pascasarjana IAIN Raden Fatah dan beberapa IAIN lainnya. Karena itu maka buku ini diharapkan

bermanfaat sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi para mahasiswa yang berminat mendalami masalah politik pendidikan.

Selain menyita waktu cukup lama, penyiapan dan penerbitan buku ini melibatkan banyak pihak yang namanya tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada istri saya, Eni Zahara, dan tiga buah hati kami, yaitu Imtiyazi Nabila, Izzaty Zephaniah, and Muhammad Fazal Rizvi, atas dukungan dan pengertian mereka, sehingga memungkinkan saya menyediakan cukup waktu untuk mempersiapkan buku ini. Saya juga ingin menghaturkan terima kasih kepada para kolega dan mahasiswa saya yang telah bersikap sangat aktif dan penuh inspirasi, sehingga menambah semangat dan motivasi saya untuk menyelesaikan buku ini.

Akhirnya, saya sangat berharap kiranya buku yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi semua yang membacanya. *Amin ya Rabbal Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Penulis,

**Muhammad Sirozi**

## DAFTAR ISI

Halaman Depan .....	i
Prakata Penulis .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. PENDEKATAN DAN ASUMSI DASAR KAJIAN</b>	
<b>POLITIK PENDIDIKAN .....</b>	<b>25</b>
Pendekatan Kajian .....	23
Asumsi Dasar .....	27
<b>3. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>41</b>
Teori Pemilihan dan Sekolah ( <i>Election and Schols</i> ) .....	43
Teori Kelompok Kepentingan ( <i>Interest Group Theory</i> ) .....	45
Mikropolitik Pendidikan ( <i>Micropolitics of Education</i> ) .....	47
Teori Formasi Sumber Daya Manusia Modern ( <i>Modern Human Capital Formation</i> ) .....	49
Teori Arus Jemuk ( <i>Multiple Streams Theory</i> ) .....	51
Konsep <i>Policy Innovation Diffusion</i> .....	54
Teori Rezim Kebijakan ( <i>Policy Regimes Theory</i> ) .....	58
Teori Keseimbangan Terhenti ( <i>Puctuated Equilibrium</i> ) .....	61
Urban <i>Regime Theory</i> dan <i>Community</i> Based Organizations (CBOs) .....	64
Teori Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder Theory</i> ) .....	66

Teori Jalan Keluar, Suara dan Kesetiaan ( <i>Exit, Voice, and Loyalty</i> ) .....	68
Teori Marxis Terkait Dengan Persatuan Guru ( <i>Marxist Theory Associated Teacher Unionism</i> ) .....	70
Teori Feminis ( <i>Gender Theory</i> ) .....	71
<b>4. POLITIK PENDIDIKAN DAN MUTU</b>	
<b>PENDIDIKAN .....</b>	<b>75</b>
Manfaat Kajian Politik Pendidikan .....	75
Relevansi Politik Pendidikan dan Mutu Pendidikan .....	78
Politik Pendidikan di Indonesia .....	90
<b>5. SISTEM PENDIDIKAN DAN MASA DEPAN</b>	
<b>BANGSA .....</b>	<b>111</b>
Mutu Pendidikan dan Daya Saing Bangsa .....	111
Pendidikan dan Kenegaraan .....	114
Pendidikan Sebagai Prioritas Utama .....	116
Nilai Strategi Pendidikan .....	119
<b>6. PERAN DAN MANFAAT ICT</b>	
<b>DALAM PENDIDIKAN .....</b>	<b>123</b>
ICT dan Pendidikan .....	123
Perubahan Paradigma .....	125
Manfaat ICT Bagi Pendidikan .....	128

<b>7. INTEGRASI ILMU DI PERGURUAN TINGGI</b>	
<b>AGAMA ISLAM : DARI WACANA KE AKSI .....</b>	<b>131</b>
Dinamika Integrasi Ilmu di PTAI .....	131
Rencana Aksi (Action Plan) .....	138
Membuat Desain Operasional .....	148
Menyamakan Persepsi dan Menciptakan Prakondisi .....	150
Prinsip-prinsip Utama dan Integrasi Ilmu .....	151
Kepemimpinan dan Hambatannya .....	152
<b>8. MUTU AKADEMIK DAN TRADISI ILMIAH</b>	
<b>DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM .....</b>	<b>155</b>
Membangun Visi dan Misi Kolektif .....	155
Beberapa Agenda Penting .....	157
<b>9. PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM</b>	
<b>MEMBANGUN SDM TERAMPIL DAN</b>	
<b>MANDIRI .....</b>	<b>179</b>
Merubah Paradigma Pembangunan .....	179
Profil SDM Indonesia .....	180
Peran Perguruan Tinggi .....	184
<b>10. KEKUATAN POLITIK ATAU KEKUATAN</b>	
<b>MAHASISWA : Sebuah Renungan Untk Mahasiswa ...</b>	<b>189</b>
Tentukan Arah : Menjadi Politisi atau Ilmuan ? .....	189
Peran Strategi Pendidikan Tinggi .....	194
<i>Students of Today, Leaders of Tomorrow</i> .....	197

<b>11. EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KARAKTER .....</b>	<b>201</b>
Pengertian dan Signifikansi Karakter .....	201
Karakter Bahasa Indonesia Hari Ini .....	205
Urgensi Pendidikan Karakter .....	207
Efektifitas Pendidikan Karakter .....	211
<b>12 SEKOLAH KITA BUTUH GURU</b>	
<b>BERKUALITAS, BUKAN KURIKULUM BARU .....</b>	<b>227</b>
Kurikulum 2013 Sebagai Kurikulum “Berpikir” .....	227
Prestasi Peserta Didik Menurut Teori IPO .....	230
Guru Sebagai Faktor Penentu, Bukan Kurikulum .....	233
Apa yang Salah dengan KTSP ? .....	238
<b>13 BEBERAPA CATATAN UTUK PROGRAM</b>	
<b>SEKOLAH GRATIS .....</b>	<b>245</b>
<b>14 CATATAN AKHIR : Sebuah Refleksi .....</b>	<b>253</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	257
BIODATA PENULIS .....	279





# PENDAHULUAN

*one of the most important functions of education is to help create ... 'a truly civil society' in which people relate to each other on terms of reciprocity and equality (Taylor, et al., 1997:153)*

**P**OLITIK PENDIDIKAN adalah satu kajian antar disiplin (*interdisciplinary study*) yang mengintegrasikan ilmu politik dan ilmu pendidikan, untuk melihat hubungan dinamis antara berbagai persoalan politik dan persoalan pendidikan. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan oleh para penulis untuk bidang kajian politik pendidikan adalah *the politics of education*. Melalui studi *the politics of education* atau politik pendidikan, berbagai persoalan pendidikan dilihat, dipahami, dan dianalisis dengan kombinasi perspektif ilmu politik dan ilmu pendidikan.

Tujuan utama kajian politik pendidikan adalah untuk menjelaskan hubungan atau relasi antara proses perumusan tujuan (*the production of goals*) dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapainya (*the form of their achievement*). Dalam membahas rumusan tujuan pendidikan Islam, misalnya, jika studi administrasi pendidikan hanya membahas subatansi dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, studi politik pendidikan juga membahas darimana rumusan tujuan tersebut muncul, siapa yang terlibat dalam penyusunannya, melalui

mekanisme bagaimana rumusan tujuan tersebut dibahas dan ditetapkan, nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalamnya, dan kepentingan politik atau pendidikan siapa yang direpresentasikan di dalamnya.

Kajian politik pendidikan memiliki dua saudara dekat, yaitu *education politics* dan *political education*. Meskipun sama-sama berada dalam wilayah kajian tentang relasi dinamis antara politik dan pendidikan, ketiganya memiliki fokus dan ruang lingkup kajian yang berbeda.

*Education politics* terfokus pada kajian tentang aspek-aspek politik yang terkait dengan efektifitas dan efisiensi sistem pendidikan, bentuk-bentuk tata kelola lembaga pendidikan (*school governance*), dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan lembaga-lembaga pendidikan. Menu utama studi *education politics* adalah berbagai persoalan politik yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan (*the process of policy making*), pengambilan keputusan (*the process of decision making*), dan operasionalisasi program, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pendanaan (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Dengan fokus tersebut maka kajian *education politics* banyak menyentuh aspek-aspek politik dari pengelolaan lembaga pendidikan, khususnya bidang administrasi administrasi pendidikan. Dalam kajian ini, politik pendidikan direduksi menjadi administrasi pendidikan. Dengan demikian maka *education politics* sangat mirip dengan administrasi pendidikan.

Adapun istilah *political education* lebih tepat diterjemahkan sebagai pendidikan politik, satu kajian dan atau aktivitas kependidikan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan politik. Menurut Ragnar Müller (2008), ada tiga tujuan

utama pendidikan politik, yaitu menumbuhkan ketertarikan pada politik, memberikan landasan untuk menjadi warga negara yang baik, dan memberi wawasan untuk dapat menganalisis dan menilai situasi politik secara mandiri. Dengan bekal pendidikan politik setiap warga negara diharapkan memiliki wawasan tentang bagaimana politik bekerja dan bagaimana berbagai aktivitas politik satu sama lain saling terkait (Politikdidaktik Kurzgefasst, published by the Federal Centre for Political Education, Bonn 1994: 17).

Walaupun telah menjadi kebutuhan bagi setiap negara modern, pendidikan politik sering digalakkan ketika terjadi perubahan politik atau ada agenda-agenda politik strategis yang melibatkan masyarakat luas, seperti ideologisasi, indoktrinasi, demokratisasi, dan pemilihan umum. Dalam penyelenggaraannya pendidikan politik memiliki desain, metode, dan pola yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menyelenggarakan, kapan diselenggarakan, mengapa diselenggarakan, dan apa tujuan penyelenggaraannya.

Pendidikan politik bisa diselenggarakan oleh partai politik untuk menyosialisasikan program kerja, menumbuhkan loyalitas dan komitmen politik para anggota atau pendukung, dan membangun citra partai. Pendidikan politik bisa juga dilakukan oleh pemerintah untuk membekali warga negara dengan pemahaman, kemandirian, dan kesadaran politik. Unsur-unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga sering menyelenggarakan pendidikan politik, untuk meningkatkan pemahaman, sikap kritis, dan independensi masyarakat dalam berpolitik.

Dengan tujuan-tujuannya tersebut, maka pelaksanaan pendidikan politik adalah salah satu implementasi peran

pendidikan dalam pembentukan masyarakat sipil (*civil society*). Menurut Taylor, *et al.* (1997:153), “. *one of the most important functions of education is to help create . ‘a truly civil society’ in which people relate to each other on terms of reciprocity and equality*” (salah satu fungsi terpenting pendidikan adalah membantu menciptakan masyarakat sipil dimana anggota masyarakat terlibat dalam hubungan yang setara dan saling menguntungkan).

Taylor (*et al.* 1997: 154) menambahkan, “*educational policies are progressive to the extent that they contribute to creating a truly civil society in which both equality and difference are valued simultaneously*” (kebijakan-kebijakan pendidikan bersifat progresif apabila kebijakan-kebijakan tersebut membantu menciptakan masyarakat sipil yang sebenarnya, dimana kesetaraan dan perbedaan dinilai secara simultan). Untuk membangun *civil society* dan menghantarkan warga negara menjadi sosok yang bertanggungjawab (*responsible citizens*), pendidikan politik menempuh empat langkah edukasi.

*Langkah pertama* atau paling awal adalah membekali warga negara dengan berbagai pengetahuan dasar (*basic knowledge*) yang relevan dengan kehidupan politik, agar mereka mampu melihat relevansi dan keterkaitan antara politik dengan berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk pendidikan. Langkah ini berangkat dari asumsi bahwa warga negara akan dapat mengikuti proses politik di negaranya apabila mereka mengetahui dan memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar kehidupan politik yang berlaku.

*Langkah kedua*, memberikan pemahaman tentang politik dan cara kerjanya (*undertstanding for politics*). Warga negara

dibekali dengan pengetahuan tentang apa itu politik, bagaimana cara kerjanya, apa tujuan-tujuannya, dan bagaimana implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan. Semakin baik pemahaman warga negara tentang proses politik yang sedang berjalan, maka mereka akan semakin siap mengikuti proses politik yang sedang berjalan.

*Langkah ketiga*, mengembangkan kemampuan berfikir bebas dalam berpolitik (*independent opinion*). Jika warga negara tidak memiliki sikap independen atau terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu, maka proses politik hanya akan menjadi kepura-puraan belaka. Untuk membangun proses politik yang riil, maka warga negara perlu dipandu dan dibekali pengetahuan serta sikap untuk mengembangkan cara berfikir (*mind set*) yang mandiri tentang berbagai persoalan politik, agar mereka mampu membuat keputusan atau mengambil pilihan politik berdasarkan hati nurani dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tidak sekedar ikut-ikutan atau dikendalikan oleh kepentingan politik individu atau kelompok tertentu. Jika semua warga negara telah dapat menggunakan hak-hak politiknya secara mandiri, barulah proses demokratisasi akan berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan produk-produk politik yang bermutu, yang benar-benar sesuai dengan situasi, kondisi, dan kepentingan publik.

*Langkah keempat*, mendorong keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas politik (*involvement in politics*). Esensi dari demokrasi adalah memberikan hak penuh dan ruang yang luas kepada seluruh rakyat untuk menentukan keputusan-keputusan politik, sehingga para penulis memberikan definisi yang sangat lugas untuk demokrasi, yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” Ini berarti bahwa memberikan pendidikan politik bagi seluruh rakyat adalah salah satu agenda yang sangat

penting dalam proses demokratisasi oleh siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Ini juga berarti bahwa sebelum rakyat benar-benar memahami dan sadar akan hak-hak dan peran politik mereka, maka proses demokratisasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

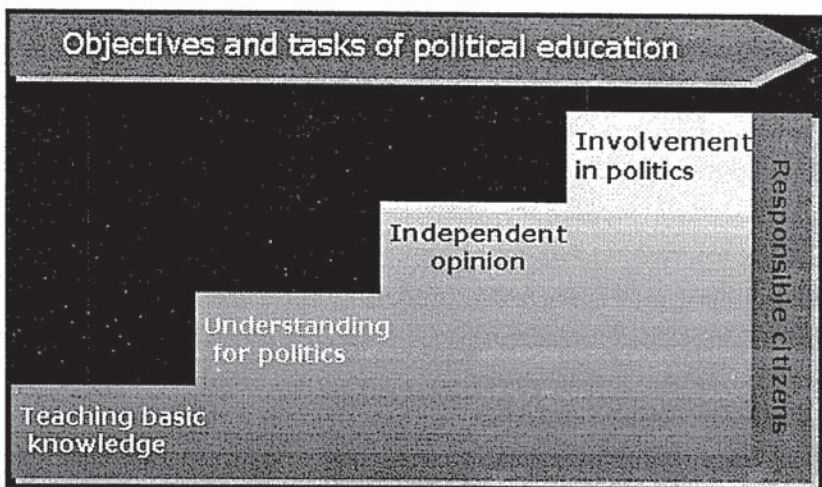
Melalui pendidikan politik seluruh rakyat diingatkan bahwa “*politics is every where and belongs to every one*” (politik ada dimana-mana dan milik setiap orang). Politik adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari seluruh rakyat. Untuk membangun kehidupan politik yang sehat, maka setiap orang harus terlibat dalam semua tahapan proses politik. Proses politik harus menyentuh semua lini kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat harus dapat secara aktif memainkan peran politiknya.

Tidak satupun anggota masyarakat atau warga negara yang dapat terbebas atau membebaskan diri dari politik. Jika mereka tidak mau masuk ke wilayah politik, maka politiklah yang akan masuk ke wilayah kehidupan mereka. Kalaupun mereka tidak suka terhadap politik, tetap saja politik akan mencari mereka, kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada. Jika mereka bersikap pasif, tentulah mereka akan menjadi objek atau komoditi atau bahkan korban politik. Tetapi jika mereka secara aktif dan independen terlibat dalam berbagai proses politik, mereka akan dapat menjadi subyek yang dapat mewarnai dan menentukan berbagai keputusan politik.

Tujuan akhir (*the ultimate goal*) dari pendidikan politik adalah membentuk warga negara yang bertanggung jawab (*responsible citizens*). Jika pendidikan politik berhasil mencapai tujuannya tersebut, maka masyarakat dengan sendirinya akan berstranformasi menjadi masyarakat sipil yang memiliki

pemahaman, sikap, dan aktivitas politik yang *genuine*, sehingga berbagai keputusan politik yang dihasilkan juga *genuine*. Secara skematik, tujuan dan tugas pendidikan politik dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1: *Tujuan dan Tugas Pendidikan Politik*



Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki pengertian, fokus, dan ruang lingkup kajian yang berbeda, education politics, political education, dan politics of education adalah tiga wilayah kajian yang satu sama lain saling melengkapi. Ketiganya sama-sama berada dalam wilayah hubungan dinamis antara dunia politik dan dunia pendidikan. Ketiganya juga sama-sama memperhatikan aspek-aspek politik dari penyelenggaraan pendidikan. Ketiganya saling membutuhkan dan saling memiliki ketergantungan. Pada bagian berikut ini dijelaskan bahwa, meskipun lebih fokus pada aktivitas dan peran kekuasaan dalam proses penyelenggaraan

pendidikan, kajian *politics of education* atau politik pendidikan tidak dapat mengabaikan aspek-aspek administratif dan edukatif dari dunia pendidikan.

Jika kajian administrasi pendidikan atau *education politicsterfokus* pada efektifitas kerja satu sistem dan tata kelola pendidikan dan kajian pendidikan politik atau *political education* fokus pada bagaimana melahirkan warga negara yang bertanggung jawab. Kajian politik pendidikan fokus pada kekuatan-kekuatan apa yang menggerakkan satu sistem atau perangkat penyelenggaraan pendidikan (*what powers the [educational] machinery*) dan bagaimana serta ke arahmana kekuatan-kekuatan tersebut mengarahkan sistem atau perangkat pendidikan yang ada (*how and where it [the machinery] is directed*).

Dengan fokus tersebut, politik pendidikan membahas secara cermat dan kritis cara-cara politik (*the political ways*) yang ditempuh oleh lembaga-lembaga pemerintahan, ideologi politik, dan berbagai kelompok kepentingan (*interest groups*), baik yang ada di dalam maupun di luar komunitas pendidikan, untuk mempengaruhi isi, bentuk, dan fungsi-fungsi berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Kajian politik pendidikan juga membahas secara mendalam cara-cara yang digunakan oleh para pemegang kekuasaan dan politisi untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh isu-isu yang terkait dengan perkembangan dunia pendidikan, seperti reformasi dan inovasi, sentralisasi dan desentralisasi, devolusi, privatisasi, suku dan etnisitas, kemiskinan dan ketidakseimbangan (*inequality*), profesionalisasi, birokratisasi, ujian, akuntabilitas, partisipasi, politisasi, dan pendanaan.



Selain itu, kajian politik pendidikan membahas bagaimana masyarakat mengelola visi dan kepentingan pendidikan yang saling bertentangan, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, dan perubahan-perubahan apa yang secara spesifik diperlukan dalam proses politik dan pemerintahan untuk menjadikan proses pembuatan kebijakan (*policy making*), proses pengambilan keputusan (*decision making*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dalam bidang pendidikan menjadi lebih baik.

Dengan fokusnya pada pola kekuasaan dalam bidang pendidikan, maka kajian politik pendidikan melihat lembaga-lembaga pendidikan sebagai representasi dari satu instrumen kekuasaan yang kuat untuk membentuk kualitas dan karakteristik generasi warga negara dan pekerja yang akan datang. Lembaga-lembaga pendidikan dipandang sebagai sumber penting untuk menunjang dan menciptakan berbagai jenis pekerjaan dan investasi bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan kombinasi perspektif ilmu pendidikan dan ilmu politik, maka ruang lingkup kajian politik pendidikan cukup luas dan bervariasi, mencakup berbagai isu yang terkait dengan hubungan dinamis, saling berkait, dan saling mempengaruhi antara dunia pendidikan dan dunia politik. Dalam kajian politik pendidikan, pembahasan terhadap isu-isu tersebut difokuskan pada bagaimana politik, secara teoritis dan praktis, mempengaruhi pendidikan dengan segala aspeknya (organisasi, kebijakan, pendanaan, pengoperasian, dan lulusan) serta bagaimana hubungan antara ide-ide dan problematika pendidikan dalam berbagai jalur, jenis, dan jenjangnya dengan

proses, dinamika, dan kepentingan politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dengan fokus dan ruang lingkup kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka kajian politik pendidikan dapat diarahkan pada berbagai isu, seperti:

1. Relasi negara dan pendidikan. Kajian politik pendidikan dapat diarahkan untuk melihat pola dan karakteristik relasi negara dan pendidikan. Pemahaman terhadap pola dan karakteristik tersebut dapat menjelaskan kaitan antara agenda-agenda negara dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi dengan isu-isu praktis yang ada di lembaga-lembaga pendidikan; bagaimana negara membangun, memelihara, dan memanfaatkan hubungan tersebut secara ideologis dan politis; dan apa implikasi hubungan tersebut terhadap perkembangan sistem pendidikan.
2. Relasi pendidikan dengan struktur dan kesadaran kelas. Kajian politik pendidikan dapat juga diarahkan pada pola, karakteristik, dan dinamika relasi antara pendidikan dan struktur serta kesadaran kelas masyarakat. Pemahaman terhadap pola, karakteristik, dan dinamika relasi tersebut dapat menjadi titik tolak untuk menjelaskan secara spesifik dan mendalam bagaimana peran dan signifikansi pendidikan sebagai media reproduksi struktur dan kesadaran kelas sosial, baik dalam konteks individu maupun kelompok dalam masyarakat. Pemahaman tersebut juga dapat menjadi titik tolak untuk menjelaskan implikasi atau dampak dari struktur dan kesadaran kelas sosial terhadap dinamika perkembangan sistem pendidikan dan tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

3. Pendidikan sebagai fungsi negara. Kajian politik pendidikan dapat juga diarahkan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan dan peran pendidikan dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Kajian terhadap kedudukan dan peran tersebut akan menjelaskan bagaimana negara menjadikan pendidikan sebagai salah satu media utama untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam berbagai hal, seperti diseminasi ideologi, nation and character building, sosialisasi sistem dan kebijakan politik, dan peningkatan daya saing bangsa. Kajian terhadap fungsi-fungsi tersebut dapat mengungkapkan intensitas pertarungan ideologi, pro dan kontra politik, politik penerimaan, dan politik penolakan yang diterapkan atau digunakan oleh negara untuk membangun dan mempertahankan hegemoninya dalam mengontrol berbagai aktivitas kependidikan.

Secara khusus, kajian terhadap fungsi-fungsi tersebut dapat mengungkapkan bagaimana pengaruh kelompok-kelompok tertentu, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, para pemilik modal, dan kelompok politik tertentu menjadikan negara sebagai *an agent and arm of interests* (agen dan perpanjangan tangan kepentingan) melalui sistem pendidikan, untuk mendorong terciptanya kondisi tertentu yang dapat memenuhi kepentingan-kepentingan (*interests*) mereka dan untuk membuka jalan agar kelompok sosial tertentu menjadi dominan.

Dalam konteks ini, kajian tentang kedudukan dan peran pendidikan sebagai fungsi negara (*state*) dapat mengungkapkan bagaimana negara secara terus menerus menjalankan perannya, tidak hanya sebagai perangkat

administratif atau pengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai perangkat yang aktif dan multifungsi. Dalam konteks ini, kajian politik pendidikan dapat mengungkapkan sifat “*administrative*”, “*educative*”, dan “*formative*” dari fungsi-fungsi negara dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan warganya, dengan menjustifikasi blok hegemoni tertentu, melalui kepemimpinan moral dan edukatif.

4. Tuntutan-tuntutan terhadap pendidikan. Kajian politik pendidikan dapat diarahkan untuk mengetahui berbagai tuntutan (*interests*) yang ditujukan oleh berbagai kelompok kepentingan kependidikan (*educational interest groups*) terhadap para pemangku kewenangan pendidikan (*educational authorities*) untuk direpresentasikan dalam berbagai jenis dan jenjang program dan peraturan perundang-undangan pendidikan.

Selain dapat memberikan pemahaman tentang berbagai jenis dan sifat dari tuntutan yang ada, kajian politik pendidikan juga dapat memberikan pemahaman tentang posisi dari berbagai tuntutan yang ada dan cara atau jalur yang ditempuh oleh masing-masing kelompok kepentingan pendidikan dalam mengajukan atau memperjuangkan tuntutan mereka.

Dalam konteks ini maka kajian politik pendidikan dapat menjelaskan tuntutan-tuntutan yang sejalan dan tidak sejalan (kontradiktif), serta jalur yang digunakan oleh berbagai kelompok kepentingan untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan mereka, formal atau informal atau non formal atau kombinasi dari ketiganya.

5. Kaitan antara pendidikan dan industri. Kajian politik pendidikan dapat dirancang untuk memahami, menjelaskan,

dan memprediksi realitas, kompleksitas, dan prospek dan implikasi hubungan antara dinamika perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dengan dinamika perkembangan yang terjadi di dunia industri. Kajian politik pendidikan, misalnya, dapat menjelaskan kaitan antara berbagai kebutuhan sumber daya manusia yang berkembang di dunia industri dengan berbagai isu sehari-hari yang berkembang di lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu, kajian politik pendidikan juga dapat mengungkapkan bagaimana dampak kinerja sistem pendidikan terhadap kinerja dunia industri dan bagaimana dampak perkembangan industri terhadap perkembangan dunia pendidikan.

Secara khusus, kajian politik pendidikan dapat mengungkapkan bagaimana taktik dan strategi yang dering digunakan oleh dunia industri dalam memanfaatkan berbagai saluran politik untuk merepresentasikan kepentingannya pada dunia pendidikan. Pada sisi lain, kajian politik pendidikan dapat mengungkapkan bagaimana para pemegang otoritas pendidikan (*educational authorities*) dan kelompok-kelompok kepentingan pendidikan (*educational interest groups*) menggunakan saluran dan pendekatan politik untuk merepresentasikan kepentingan dunia pendidikan dalam dunia industri.

6. Reproduksi struktur dan kesadaran kelas. Secara umum, kajian-kajian kependidikan hanya mampu mengungkapkan bahwa pendidikan adalah sarana mencerdaskan bangsa, yang harus terbuka bagi siapapun (*education for all*) dan menjadi tanggung jawab siapapun (*education by all*). Tetapi kajian politik pendidikan dapat mengungkapkan bagaimana kelompok masyarakat tertentu menjadikan pendidikan

sebagai sarana untuk memproduksi dan mereproduksi struktur dan kesadaran kelas. Secara lebih khusus, kajian politik pendidikan dapat mengungkapkan bagaimana kelompok masyarakat tertentu memilih lembaga pendidikan tertentu, memanfaatkan para pemegang otoritas pendidikan, mendorong munculnya desain dan pola penyelenggaraan pendidikan tertentu, dan merekayasa munculnya kebijakan-kebijakan pendidikan tertentu, yang dapat memberikan privilese kepada mereka untuk dapat memperkuat struktur dan kesadaran kelas sosial yang mereka inginkan.

7. Dominasi dan subordinasi melalui pendidikan. Kajian politik pendidikan dapat dirancang untuk mengungkapkan bagaimana kelompok politik atau masyarakat tertentu menggunakan atau memanfaatkan pendidikan sebagai sarana untuk mendominasi akses atau sumber daya tertentu dan bagaimana kelompok tertentu melakukan subordinasi terhadap kelompok-kelompok lain. Kajian politik pendidikan dapat mengungkapkan bagaimana kelompok-kelompok tersebut merancang atau merekayasa berbagai kebijakan dan program pendidikan tertentu untuk memperkuat atau membangun kembali dominasi mereka dan melakukan subordinasi terhadap kelompok masyarakat tertentu dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan ideologi. Dengan kajian politik pendidikan, rancangan dan rekayasa kebijakan atau program pendidikan untuk kepentingan dominasi dan subordinasi dapat diungkapkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, baik yang dilakukan oleh kelompok kepentingan formal (*formal interest groups*) maupun kelompok kepentingan non formal dan informal.

8. Pertarungan ideologi. Dinamika, corak, dan arah perkembangan sistem pendidikan di satu negara seringkali ditentukan oleh hiruk pikuk pertarungan ideologi antar berbagai kelompok kepentingan pendidikan (*educational interest groups*) di negara tersebut. Berbagai jenis dan bentuk perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan seringkali disebabkan oleh terjadinya pergeseran ideologis pada para pemegang otoritas pendidikan, bukan disebabkan oleh adanya rencana atau agenda strategis.

Kajian politik pendidikan dapat menjelaskan bagaimana berbagai kelompok ideologis bertarung untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan ideologis (*ideological interests*) mereka dalam berbagai kebijakan dan program kependidikan. Mereka memanfaatkan pendidikan sebagai media untuk mendiseminasikan nilai-nilai ideologis yang mereka anut, dengan mengintervensi proses perancangan berbagai perangkat penyelenggaraan pendidikan, seperti kurikulum, buku ajar, rekrutmen dan pelatihan tenaga pendidik.

Kajian politik pendidikan tidak hanya dapat mengungkapkan bagaimana proses diseminasi tersebut dilakukan, tetapi juga dapat mengungkapkan bagaimana kelompok-kelompok ideologis lain yang merasa terancam melakukan serangan balik (*counter attack*) terhadap nilai-nilai ideologis yang diseminasikan, dengan cara menghambat proses diseminasi. Dan dalam konteks ini, kajian politik pendidikan akan menjelaskan bagaimana dampak terjadinya pertarungan ideologis dalam sistem pendidikan terhadap input, proses, dan output dari sistem pendidikan itu sendiri. Kajian politik pendidikan membantu kita memahami intensitas dan ruang

lingkup dari pertarungan sengit tersebut dan mengungkapkan mengapa, kapan, oleh siapa, dan bagaimana berbagai kebijakan dan program pendidikan dipersiapkan, diperdebatkan, diimplementasi, dan dievaluasi sesuai nilai-nilai ideologis tertentu, baik sebagai upaya ideologisasi maupun deideologisasi.

9. Politik penerimaan (*the politics of acceptance*). Latar belakang, kualifikasi, dan prestasi pendidikan seringkali menjadi prasyarat untuk diterima atau tidak diterimanya seseorang di satu lembaga atau lingkungan karir atau profesi tertentu. Tetapi kriteria untuk bisa “diterima” atau “tidak diterima” seringkali tidak dibangun berdasarkan kompetensi akademik, tetapi berdasarkan kriteria atau preferensi politik. Kajian politik pendidikan dapat mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan dan program pendidikan, seperti wajib belajar, ranking, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), nilai, ijazah, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan akreditasi seringkali dibuat untuk mempertegas siapa yang “diterima” dan “tidakditerima” pada posisi atau akses tertentu.
10. Kontrol terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Karena perannya yang sangat besar dan efektif dalam mengintrodusir, mensosialisasikan, dan mendiseminasikan nilai-nilai kehidupan, maka pendidikan senantiasa mendapat perhatian yang besar dari para pemuja kekuasaan. Mereka berupaya dengan dengan berbagai cara untuk mengendalikan atau mengontrol proses penyelenggaraan pendidikan, agar tidak mengganggu kepentingan-kepentingan ideologis dan pragmatis mereka. Mereka mengontrol penyelenggaraan pendidikan untuk memastikan bahwa input, proses, dan *output* pendidikan yang diselenggarakan sesuai atau sejalan



dengan tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Untuk itu, para penguasa di berbagai negara terus mengembangkan langkah-langkah kreatif untuk dapat secara terbuka atau terselubung mengontrol proses penyelenggaraan pendidikan, seperti menetapkan berbagai aturan atau regulasi; mewajibkan kriteria, klasifikasi, persyaratan atau program tertentu; memperketat birokrasi; dan memperkuat law enforcement. Kajian politik pendidikan dapat membantu kita memahami mengapa, bagaimana, pada momentum apa, dan untuk tujuan apa para penguasa mengontrol kegiatan kependidikan, bagaimana mereka mengefektifkan proses kontrol, dan bagaimana mereka mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kontrol yang dilaksanakan. ❧

Isu-isu tersebut terkait langsung dengan dua ranah kajian, yaitu kajian pendidikan dan kajian politik. Karena itu maka kajian terhadap isu-isu tersebut membutuhkan dua perspektif keilmuan, yaitu perspektif ilmu pendidikan dan perspektif ilmu politik. Perspektif ganda inilah yang menjadi karakteristik utama kajian politik pendidikan. Dengan perspektif politik pendidikan, kajian terhadap isu-isu tersebut akan mengungkapkan motif, kepentingan, intrik, dan dinamika atau *power struggle* (adu kekuatan) politik yang terjadi dalam poses inisiasi, perancangan, pembahasan, sosialisasi, implementasi, dan perubahan sistem pendidikan.

Mengungkapkan fakta-fakta tersebut sangatlah penting untuk membongkar akar terdalam dari berbagai persoalan pendidikan yang muncul dan ada di permukaan, yang seringkali tidak dapat diungkapkan melalui kajian-kajian dengan perspektif ilmu kependidikan lainnya.

Kajian dengan perspektif manajemen pendidikan, misalnya, memang dapat mengungkapkan agar dari berbagai persoalan pendidikan yang terkait dengan bidang tatakelola, tetapi tidak cukup kuat untuk mengungkapkan akar kemuculan berbagai persoalan tatakelola yang ada. Kajian manajemen pendidikan umumnya tiba pada kesimpulan bahwa berbagai persoalan pendidikan disebabkan oleh salah satu atau gabungan dari rendah atau kurangnya sumber daya manusia (*man*), dana (*money*), sarana (*material*), dan unsur-unsur lain yang terkait dengan tatakelola, seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Solusi yang ditawarkan oleh kajian manajemen pendidikan terhadap berbagai persoalan pendidikan biasa terbatas pada solusi manajerial, seperti penambahan dana, pelatihan SDM, penambahan atau perbaikan sarana, perbaikan sistem perencanaan, dan peningkatan monitoring dan evaluasi. Berbagai solusi tersebut seringkali tidak menyelesaikan masalah pendidikan yang ada, karena solusi-solusi tersebut hanya solusi teknis yang hanya mampu merespons permasalahan pendidikan yang tampak di permukaan, sehingga tetap menyisahkan akar permasalahan yang dalam dan mendasar, yang mengkonstruksikan berbagai permasalahan pendidikan yang ada di permukaan, yaitu berbagai kepentingan politik (*political interests*) yang dititipkan oleh para penguasa, partai-partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) melalui berbagai agenda perubahan sistem pendidikan.

Keterbatasan yang sama dengan kajian manajemen pendidikan juga ada pada kajian-kajian kependidikan lainnya. Kajian pengembangan kurikulum (*curriculum development*), misalnya, memang mampu memberikan evaluasi kritis terhadap kurikulum dan menawarkan langkah-langkah pembenahan yang

dibutuhkan untuk membuat kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan para stakeholder (*need based*), lebih sejalan dengan trend perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*up to date*), dan lebih antisipatif terhadap kebutuhan masa depan (futuristik), tetapi tidak cukup kuat untuk mengungkapkan berbagai kekuatan dan kepentingan yang telah, sedang, dan akan turut mewarnai struktur dan isi kurikulum untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan yang belum tentu sejalan dengan misi luhur penyelenggaraan pendidikan. Karena itu maka kajian pengembangan kurikulum sangat efektif untuk merevisi atau mengganti nama, isi, dan struktur kurikulum, tetapi seringkali tidak mampu merekonstruksi pandangan dunia (*worldview*) yang ada di balik sebuah kurikulum. Akibatnya, perubahan atau penggantian kurikulum tidak disertai oleh perubahan atau penggantian kultur dan paradigma pendidikan. Padahal, kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*the heart of education*). Kurikulum yang baik dan “sehat” tentu akan membuat poses pendidikan berjalan tertb, teratur, dan terarah. Seperti jantung, kurikulum akan sehat apabila ada asupan gizi dan vitamin yang mencukupi serta lingkungan yang bersih. Kurikulum pendidikan akan sehat apabila tidak diintervensi atau dikontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis yang bersifat sesaat (*short term political interests*). Dalam kajian politik pendidikan, perbaikan atau penggantian kurikulum dilihat sebagai sebuah arena adu kekuatan (*political struggle*) yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan pendidikan (*educational interest groups*), yang ingin merepresentasikan keinginan dan kepentingan mereka di dalam kurikulum. Karena itu maka kurikulum tidak dilihat dan dibaca sebagai sebuah naskah akademik semata, tetapi juga dilihat dan dibaca sebagai sebuah naskah politik.

Kajian sosiologi pendidikan dapat diandalkan untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi sosial dari fenomena kependidikan, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan berbagai manuver politik dan konflik kepentingan (*conflict of interests*) yang turut mengkonstruksikan dimensi-dimensi sosial tersebut dan memanfaatkannya untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan tertentu pada sistem pendidikan. Dalam kajian sosiologi pendidikan, akses pendidikan, biaya pendidikan, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, implikasi sosial pendidikan, dan mutu pendidikan cenderung dilihat sebagai manifestasi dari sikap, pandangan, dan tindakan sosial tertentu yang ada dalam masyarakat.

Dalam perspektif kajian politik pendidikan, berbagai isu pendidikan tersebut dilihat sebagai produk dari sebuah proses politik yang berjalan di tengah masyarakat. Isu-isu seperti itu kapan saja bisa muncul dan tenggelam, karena dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu untuk tujuan-tujuan politik tertentu pula. Isu-isu tersebut terus berubah-ubah intensitasnya mengikuti dinamika perubahan politik yang terjadi.

Kajian metodologi pendidikan tentu dapat diandalkan untuk menjelaskan karakteristik sebuah metode pembelajaran dan kecocokan, nilai-nilai edukatif yang melatarbelakanginya, dan efektifitas penggunaannya, tetapi seringkali tidak cukup mampu menjelaskan kepentingan-kepentingan non edukatif yang melatarbelakangi dipilih atau ditetapkannya sebuah metode pembelajaran. Dalam konteks inilah kajian politik pendidikan akan sangat membantu, karena kajian politik pendidikan melihat perancangan, pemilihan, dan penggunaan sebuah metode pembelajaran tidak hanya sebagai sebuah keputusan akademik, tetapi juga sebuah keputusan politik.

Dengan kelebihan dan kekuatannya, kajian politik pendidikan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lembaga-lembaga akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan lembaga-lembaga non akademik, termasuk lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.

Di lembaga-lembaga akademik, kajian politik pendidikan dapat memperkaya, memperkuat, dan memperdalam pemahaman, penjelasan, dan prediksi terhadap berbagai aspek dan permasalahan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat menginspirasi berkembangnya pandang dunia (*worldview*) dan paradigma yang lebih relevan, kontekstual, aktual, objektif, dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan kependidikan.

Di lembaga-lembaga eksekutif, kajian politik pendidikan dapat menginspirasi berkembangnya cara pandang yang idealistik-futuristik dan mereduksi cara pandang yang terlalu praktis-pragmatis tentang pendidikan. Cara pandang idealistik-futuristik sangat diperlukan untuk mendorong berkembangnya kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan yang konstruktif, antisipatif, dan berkelanjutan. Kebijakan dan program seperti ini akan mendorong berkembangnya agenda-agenda pengembangan pendidikan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekedar pemenuhan janji-janji kampanye atau manifestasi dari semangat berkuasa yang cenderung bersifat sesaat saja. Kajian politik pendidikan dapat mendorong berkembangnya agenda-agenda pengembangan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan dan data (*need and data based*), tidak berbasis pada opini atau kewenangan (*opinion and authority based*). Dalam pandangan politik pendidikan, agenda-agenda pengembangan pendidikan yang dikendalikan oleh kewenangan atau kekuasaan politik semata akan cenderung

bersifat subjektif, tidak sistematis, sesaat, dan tidak berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem solving*), tetapi lebih berorientasi pada pencitraan (*image building*). Sebaliknya, agenda-agenda pengembangan pendidikan yang berbasis pada data (*survey*) dan kebutuhan (*need analysis*), akan lebih objektif, relevan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem solving*), sehingga dapat diandalkan sebagai bagian integral dari agenda strategis untuk merenda masa depan yang lebih berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lembaga-lembaga legislatif, hasil kajian-kajian politik pendidikan dapat memperlihatkan titik atau *spot* yang paling dalam dan mendasar di balik semua kebutuhan pembenahan sistem pendidikan, sehingga dapat dikembangkan regulasi yang dapat menyuburkan kreatifitas, kemandirian, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam sistem pendidikan, bukan regulasi yang justru mengkerdilkan atau bahkan mematikan kreatifitas pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Kajian-kajian politik pendidikan akan membuka mata dan hati para legislator, bahwa regulasi bidang pendidikan dituntut untuk tidak hanya menyentuh aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan, tetapi juga dituntut untuk dapat menyentuh nilai-nilai pokok (*core values*), prinsip-prinsip, dan kepentingan-kepentingan yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam sistem pendidikan.

Di lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga advokasi pendidikan, kajian politik pendidikan dapat menunjukkan dimana, dalam konteks apa, pada tingkat apa, di lembaga mana, dan pada jabatan apa berbagai persoalan penyelenggaraan pendidikan memiliki akarnya, sehingga

berbagai upaya pendampingan dan advokasi pendidikan yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan proporsional.

Sampai di sini jelaslah bahwa kajian politik pendidikan sangat relevan dan bermanfaat bagi lembaga-lembaga akademik dan non-akademik. Kajian-kajian politik pendidikan dapat merekonstruksi cara pandang kita terhadap persoalan-persoalan pendidikan dan agenda-agenda penyelesaiannya. Bagian paling esensial dari kajian politik pendidikan adalah membuat kita menyadari dan memahami bahwa akar dari sebagian besar permasalahan pendidikan tidak terdapat di lembaga-lembaga pendidikan, tetapi terbenam di pusat-pusat kekuasaan, sehingga solusinya tidak akan ditemukan di dalam batasan pagar sekolah atau tembok kampus, tetapi harus dicari dan diupayakan melalui pusat-pusat kekuasaan. ✍







## PENDEKATAN DAN ASUMSI DASAR KAJIAN POLITIK PENDIDIKAN

*“I think we have lost sight of the connection between the schooling, citizenship and democracy” (Benyamin)*

### **Pendekatan Kajian**

**S**EBAGAIMANA kajian-kajian lain, kajian politik pendidikan memerlukan beberapa pendekatan untuk dapat menyentuh dan membongkar kompleksitas isu atau permasalahan yang menjadi perhatiannya. Tentu banyak pendekatan yang dapat digunakan oleh para peminat kajian politik pendidikan untuk melakukan studi. Dalam bab ini penulis hanya memberikan tiga contoh pendekatan yang dapat digunakan dalam kajian politik pendidikan, agar kajian ini dapat mengungkapkan, menggali, menjelaskan, memahami, dan memprediksi isu-isu yang terkait dengan hubungan dinamis antara pendidikan dan politik.

Pendekatan *pertama*, dengan berkonsentrasi pada bagaimana peran negara dalam proses penyiapan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan lembaga-lembaga dan program-program kependidikan. Momentum, strategi, langkah-langkah, dan cara-cara yang digunakan oleh negara dalam mengiisiasi, merumuskan, mengelola, mengembangkan, dan mengubah berbagai kebijakan dan program kependidikan merefleksikan dinamika dan kompleksitas relasi antara politik dan pendidikan.

Intensitas peran negara dalam dan peragkatnya dalam berbagai agenda pengembangan pendidikan merefleksikan nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang ingin direpresentasikan dan tidak ingin direpresentasikan para pimpinan negara dalam sistem pendidikan, bagaimana negara akan mewujudkan kepentingan-kepentingannya melalui tujuan pendidikan, dan ke arah mana serta dengan cara apa kekuatan negara akan membawa sistem pendidikan.

Pendekatan *kedua*, dengan berupaya menjelaskan berbagai pola, kebijakan, dan proses pendidikan pada masyarakat yang berbeda-beda. Membandingkan pola, kebijakan, dan proses pendidikan di berbagai masyarakat atau bangsa akan mengungkapkan varian-varian nilai yang diadopsi, pola yang digunakan, dan strategi yang ditempuh dalam berbagai setting politik pendidikan. Selain dapat menjelaskan variasi format hubungan antara pendidikan dan politik, pendekatan ini juga dapat menjelaskan akar dan pertimbangan politik dari penerapan satu pola penyelenggaraan pendidikan dan implikasinya terhadap pola relasi antara pendidikan dan politik.

Pendekatan *ketiga*, dengan menggali berbagai asumsi, maksud, dan hasil (*outcome*) dari berbagai strategi perubahan pendidikan, karena hal-hal tersebut dapat secara eksplisit maupun implisit menjelaskan kekuatan, kepentingan, dan nilai-nilai yang terdapat dalam berbagai kebijakan dan program pendidikan, serta bagaimana berbagai kelompok politik (*political groups*) dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) menggunakan kekuatannya untuk merepresentasikan kepentingan pendidikan masing-masing pada kebijakan-kebijakan dan program-program kependidikan yang dijalankan oleh para pemegang otoritas pendidikan.

Dengan pendekatan yang tepat, kajian-kajian politik pendidikan akan memiliki distingsi yang kuat dan hasil yang berbeda, karena kemampuannya untuk mengeksplorasi, mengungkapkan, dan menjelaskan persoalan-persoalan kependidikan yang tidak dapat disentuh oleh bidang-bidang kajian keendidikan lainnya. Dengan kata lain, pendekatan yang tepat sangat dibutuhkan agar kajian politik pendidikan tidak tumpang tindih, meniru, atau mengulang kajian-kajian yang dilakukan dengan bidang kajian kependidikan lainnya.

### **Asumsi Dasar**

Setiap bidang kajian keilmuan, termasuk bidang-bidang kajian yang terkait dengan relasi antara politik dan pendidikan, seperti *education politics*, *political education*, dan *the politics of education*, bertitik tolak dari asumsi-asumsi dasar tentang fokus kajiannya. Asumsi diperlukan untuk melihat hubungan sebab-akibat atau membuat estimati tentang fakta-fakta yang ada, dan untuk memberikan basis atau pijakan dalam menyusun berbagai skenario kajian yang dibutuhkan untuk memahami dan menjelaskan berbagai situasi dan reaitas atau kemungkinan realitas yang terkait dengan fokus kajian.

Dalam studi *education politics*, struktur organisasi, proses, dan prosedur adminsitasi dan manajemen pendidikan dilihat sebagai representasi dari berbagai kepentingan politik para pemegang otoritas pendidikan dan sebagai kekuatan yang menentukan arah bagi aktivitas semua perangkat penyelenggarapendidikan. Dalam konteks ini, berbagai keputusan politik dalam bidang pendidikan dilihat sebagailandasan legal formal bagi semua proses administrasi dan manajemen pendidikan.

Dalam studi *political education* atau pendidikan politik, politik dilihat sebagai bagian integral dari proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dipandang sebagai sarana untuk merepresentasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian paling esensial dari pendidikan politik adalah menyadarkan anggota masyarakat akan hak-hak politik mereka, berbagai bentuk ketergantungan mereka pada setiap proses politik, dan tanggung jawab mereka dalam proses politik.

Dalam studi politik pendidikan, ada tiga asumsi dasar yang sering menjadi titik tolak kajian, yaitu hubungan timbal balik antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan (*knowledge and power*), politik sebagai realitas kehidupan, dan hubungan tak terpisahkan antara pendidikan dan politik.

### 1. *Knowledge and Power*

Salah satu titik tolak kajian politik pendidikan adalah tentang hubungan timbal balik antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan (*knowledge and power*), bahwa ilmu pengetahuan akan berkembang pesat apabila mendapat dukungan dari para penguasa dan para penguasa tidak dapat meraih, mengembangkan, dan mempertahankan kekuasaannya tanpa membangun sistem ilmu pengetahuan.

Dengan asumsi ini maka perkembangan ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai (*value free*), selalu padat nilai (*value loaded*). Perkembangannya selalu dipengaruhi, diwarnai, dan diarahkan oleh nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan tertentu yang ada dalam lingkungan sosial politik yang mengitarinya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam satu masyarakat sangat erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang ada, maka sebagaimana halnya perkembangan ilmu

pengetahuan, perkembangan sistem pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi dalam lingkungan sosial politiknya. Agenda-agenda pengembangan sistem pendidikan di satu masyarakat atau negara seringkali melibatkan konflik atau pertarungan kepentingan yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yang ingin memasukkan atau merepresentasikan kepentingan-kepentingan mereka ke dalam sistem pendidikan.

Asumsi tentang hubungan timbal balik yang dinamis antara sistem ilmu pengetahuan dan sistem kekuasaan banyak menginspirasi karya-karya seorang filosof sejarah asal Prancis, Michel Foucault. Dalam buku *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writin 1972-1977* yang diedit oleh Colin Gordon, Foucault menjelaskan bahwa “*power is based on knowledge and makes use of knowledge; on the other hand, power reproduces knowledge by shaping it in accordance with its anonymous intentions. Power (re-) creates its own fields of exercise through knowledge*” (kekuasaan berbasis pada ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya; di pihak lain, kekuasaan mereproduksi ilmu pengetahuan dengan membuatnya sejalan dengan maksud-maksud yang tersembunyi).”

Bagi Foucault, “*power are always entangled with each other in historically specific circumstances, forming complex dynamics of . pouvoir-savoir, or “power-knowledge”* (kekuasaan selalu saling berkaitan dalam lingkungan historis yang spesifik, membentuk dinamika kekuasaan-ilmu pengetahuan yang dinamis). Foucault menambahkan; “*Both power and knowledge are to be seen as de-centralised, relativistic, ubiquitous, and unstable (dynamic) systemic phenomena*” (kekuasaan dan ilmu pengetahuan sama-sama dapat

dilihat sebagai fenomena yang desentralistik, relatif, ada dimana-mana, dan tidak stabil). Dengan demikian, Foucault menyimpulkan, ilmu tidak pernah netral, karena ilmu menentukan relasi-relasi kekuasaan. Karena tidak adanya netralitas dalam sistem ilmu pengetahuan dan kekuasaan, dia mengingatkan agar konsep hubungan power-knowledge diterapkan dengan sikap kritis dalam konteks-konteks yang normatif.

Sebelum dikembangkan dan dipopulerkan oleh Michel Foucault, konsep *knowledge and power* sudah ditulis oleh Francis Bacon pada tahun 1597 dalam bukunya *Meditationes Sacrae*. Menurut Bacon, "*knowledge itself is power*" (pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah kekuatan." Dia menjelaskan bahwa "*with knowledge or education one's potential or abilities in life will certainly increase*" (ilmu pengetahuan atau pendidikan membuat potensi atau kemampuan seseorang meningkat). Bacon menambahkan: "*having and sharing knowledge is widely recognised as the basis for improving one's reputation and influence, thus power*" (memiliki dan berbagi ilmu telah diketahui secara luas sebagai basis peningkatan reputasi dan pengaruh serta kekuatan seseorang).

Besarnya peran ilmu pengetahuan dalam proses sosial politik tergambar dalam pepatah berikut ini: "*A wise man has great power, and a man of knowledge increases strength*" (orang bijak memiliki kekuatan yang besar, dan orang berilmu menambah kekuatan). Dalam pandangan filsafat idealis, ilmu pengetahuan adalah kekuatan yang dapat memanipulasi realitas ("*if the world exists solely as the content of consciousness, then knowledge itself can be used to directly manipulate the content of reality*").

Tentu saja kapasitas dan kualitas keilmuan seseorang tidak terlepas dari pendidikan yang ia jalani. Pendidikan memberi kesempatan padanya untuk mempelajari, mengetahui, menyadari, dan memahami hal-hal baru. Pengetahuan dan pemahaman baru melahirkan cara berfikir baru (*new mindset*), kapasitas pribadi lebih besar (*bigger personal capacity*), dan kemampuan yang lebih baik (*better ability*) untuk membuat keputusan, berfikir, dan menyelesaikan masalah. Bertambahnya pengetahuan membuat seseorang menjadi sosok yang lebih bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat lingkungannya. Dia memiliki jaringan sosial dan intelektual lebih luas serta peluang lebih besar untuk maju dan berkembang. Ilmu pengetahuan selalu menyertai pemilikyakemanapun ia pergi, dan membentuk cara pandanganya tentang dunia.

Dalam khazanah pemikiran Islam, konsep hubungan dinamis antara perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan sistem kekuasaan sangat dominan. Hanya saja ada perbedaan yang mendasar antara konsep hubungan ilmu dan kekuasaan dalam khazanah pemikiran Islam dengan konsep serupa yang berkembang dalam khazanah pemikiran sekuler.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam empat hal. Perbedaan pertama terkait dengan spektrum manfaat dan pengaruh ilmu terhadap kehidupan. Jika dalam khazanah pemikiran Barat sekuler spektrum pengaruh ilmu pengetahuan hanya menjangkau kehidupan duniawi, dalam khazanah pemikiran Islam spektrum pengaruh ilmu pengetahuan menjangkau kehidupan duniawi dan ukhrowi. Hal ini dapat dilihat pada salah satu hadits Rasulullah Saw berikut ini: "*Barang siapa yang menghendaki dunia maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka hendaklah ia berilmu dan barang siapa yang*

*menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu.” (HR. Tabrani). Dapat dipahami dari hadits ini bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu instrumen penting yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memiliki kualitas, daya saing, dan kesuksesan, tidak hanya dalam kehidupan duniawi, tetapi juga untuk kehidupan ukhrowi. “Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.” (HR Muslim).*

Perbedaan kedua terkait dengan ada atau tidaknya prasyarat agar ilmu pengetahuan membawa pengaruh positif terhadap kehidupan. Dalam khazanah pemikiran Barat sekuler, ilmu pengetahuan dapat secara langsung memberikan dampak positif terhadap kehidupan. Tetapi dalam khazanah pemikiran Islam, ilmu pengetahuan akan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan jika ada prasyarat iman. Keimanan adalah landasan yang diperlukan agar ilmu pengetahuan membawa dampak positif pada kualitas hidup seseorang. Prasyarat ini dijelaskan dalam surat Al Mujadalah ayat 11 berikut ini: “... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa iman dan ilmu bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Keduanya saling melengkapi dan saling menunjang. Iman akan menyempurnakan ilmu dan ilmu akan menyempurnakan iman. Jika dipisahkan, masing-masing akan kehilangan pengaruh terhadap kepribadian dan kehidupan seseorang. Seorang ulama Mesir, tokoh Ikhwanul Muslimin, Yusuf Qardawi, mengilustrasikan bahwa seorang ilmuan yang tidak memiliki iman tidak obahnya seperti orang gila yang



memegang pisau dan berjalan di tengah keramaian. Dia akan menggunakan pisau di tangannya secara membabi buta dan melukai banyak orang. Sebaliknya, iman tanpa ilmu pengetahuan akan mudah terjebak ke dalam fanatisme sempit dan membenaran diri (*self fulfilling truth*). Dalam ungkapan Albert Einstein (14 March 1879 – 18 April 1955), "*science without religion is lame. Religion without science is blind*" (sains tanpa agama akan lumpuh, agama tanpa sains buta).

Perbedaan ketiga terkait dengan kaitan antara ilmu dan amal. Dalam khazanah pemikiran Barat sekuler, ilmu dan amal adalah dua hal yang dipandang bisa berdiri sendiri. Seorang ilmuwan tetap saja dinilai hebat walaupun dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam, ilmu dan amal harus seiring dan sejalan, bahwa ilmu harus sejalan dengan amal dan begitu juga sebaliknya, iman harus ditunjang oleh ilmu. Dalam tradisi Islam, ilmu yang tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Meskipun cenderung melihat ilmu dan amal sebagai dua hal yang berdiri sendiri, kesadaran akan pentingnya ilmu sebagai andasan amal dan pentingnya amalan sebagai aktualisasi keilmuan sudah tumbuh dengan kuat di dalam tradisi masyarakat Barat sekuler. Hal ini ditandai oleh munculnya konsep-konsep pendidikan dan aktifitas akademik yang mengintegrasikan ilmu dan amal, misalnya, *applied knowledge* (ilmu terapan) dan riset terapan (*applied research*) dan riset aksi (*action research*). Beberapa konsep pendidikan menengah, seperti *vocational schools* dan konsep-konsep pengembangan pendidikan tinggi, seperti *polytechnics*, *community colleges*, dan program *interenship* juga diinspirasi oleh kesadaran akan pentingnya

perpaduan antara ilmu dan amal untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan keempat antara pemahaman tentang konsep ilmu dalam khazanah pemikiran Barat sekuler dan khazanah pemikiran pendidikan Islam terletak pada status ilmu. Dalam khazanah pemikiran Barat sekuler, ilmu dipahami sebagai modal (*capital*) yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan materi. Seorang ilmuan dapat menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa karya keilmuannya memberikan manfaat finansial secara maksimal padanya, misalnya dengan cara menerbitkan hak paten atau menerapkan sistem royalti. Sebaliknya dalam khazanah pemikiran Islam, ilmu dipahami sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus digunakan untuk tujuan ibadah pada-Nya. Seorang ilmuan Muslim harus terus menyadari bahwa dia mengemban amanah dari Allah dan harus terus mempertanyakan apakah amanah ilmu yang dia dapatkan telah digunakan sesuai kehendak Allah Swt. Pentingnya seorang Muslim menjaga amanah ilmu yang diberikan padanya diingatkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal ayat 26 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

## *2. Politics is Everywhere and Belongs to Every One*

Asumsi dasar kedua dalam kajian politik pendidikan (the politics of education) adalah politik sebagai realitas kehidupan yang tidak dibatasi oleh ruang (*spaceless*) dan menyentuh semua kelas sosial (*classless*). Politik dipandang sebagai bagian tak

terpisahkan dari realitas kehidupan seseorang kapanpun dan dimanapun dia berada. Dalam ungkapan Abernethy dan Combe (1965, 287), "*politics is everywhere and belongs to every one*" (politik ada dimana-mana dan milik setiap orang). Dalam kajian politik pendidikan, semua bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan, tidak pernah dan tidak akan pernah bisa terbebas dari hiruk pikuk politik. Dunia pendidikan, baik pada tingkat mikro (kelembagaan) maupun tingkat makro (kenegaraan), akan selalu dihiasi oleh dinamika politik, dipengaruhi oleh ideologi politik, dan diramaikan oleh konflik-konflik kepentingan politik para penguasa dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). Semakin besar satu lembaga pendidikan dan semakin kompleks sistem pendidikan di satu wilayah atau negara, maka akan semakin luas spektrum politik dari berbagai isu kependidikan, sehingga semakin dinamis proses politik yang ada di dalamnya.

Kajian politik pendidikan juga menekankan bahwa politik selalu hadir dalam kehidupan dan aktivitas semua orang, termasuk para praktisi atau pengelola pendidikan. Mereka tidak punya jalan sedikitpun untuk membebaskan diri atau menghindari dari dinamika politik. Tugas-tugas, hak, kewajiban, dan perjalanan karir mereka banyak dipengaruhi dinamika politik pendidikan yang terjadi di tingkat mikro dan makro. Jika mereka menghindari, maka politiklah yang akan mengejar mereka dan hadir untuk mewarnai, mengarahkan, dan mengendalikan tugas-tugas atau aktivitas mereka. Jika tidak mampu memberikan respons yang tepat terhadap dinamika politik yang ada, maka para praktisi pendidikan dan pengelola lembaga-lembaga pendidikan bisa terkooptasi menjadi alat politik, dan atau menjadi objek politik, dan atau menjadi korban

politik, sehingga fokus kegiatan sehari-hari mereka bukan pada pengembangan potensi peserta didik atau peningkatan mutu layanan pendidikan, tetapi lebih cenderung pada peningkatan layanan bagi para politisi. Jika hal ini terjadi, maka berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan akan banyak berorientasi pada kepentingan-kepentingan politik (politisasi), bukan pada kepentingan-kepentingan peningkatan mutu akademik. Politisasi pendidikan akan membuat kebijakan-kebijakan pendidikan cenderung bersifat simbolik dan retorik, tidak riil, karena dibuat berdasarkan opini (*opinion based*) dan berbasis kewenangan (*authority based*), tidak berdasarkan analisis kebutuhan (*need analysis*) dan pertimbangan akademik. Pada saat bersamaan, program-program pendidikan cenderung bersifat manipulatif dan dijadikan sebagai media pencitraan, dengan sasaran jangka pendek, bersifat sporadis, dan asal-asalan, tanpa perencanaan, strategi, dan sasaran jangka panjang.

### *3. Education and Politics are Inextricably Linked*

Asumsi dasar ketiga yang sering menjadi titik tolak kajian politik pendidikan adalah hubungan tak terpisahkan antara pendidikan dan politik. Pendidikan dan politik dilihat sebagai dua entitas yang ingin selalu bersama, saling merindukan, dan saling membutuhkan. Keduanya disatukan oleh realitas dan tidak bisa dipisahkan oleh kekuatan apapun. Dalam ungkapan Abernethy dan Combe (1965, 287), “*education and politics are inextricably linked.*”

Menurut *The New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Language*, Canadian Edition 1988, *inextricable* adalah kondisi dimana terjadi hubungan kait

kelindan yang tidak dapat lagi diurai atau dilepaskan. Dengan pengertian ini maka Abernethy dan Combe ingin menegaskan bahwa pendidikan dan politik terkait sangat erat dan tak terpisahkan. Keterkaitan tersebut dapat diilustrasikan seperti keterkaitan antara unsur “air” dan unsur “rasa manis” yang ada dalam secangkir teh manis. Jika dihirup maka keduanya akan terhirup, dan jika ditumpahkan maka keduanya akan tumpah. Jika unsur “air” menguap, maka unsur “rasa manis” juga ikut menguap. Jika unsur “air” tercemar, maka unsur “rasa manis” juga ikut tercemar. Keduanya akan selalu bersama dalam suka maupun duka. Keduanya, menurut Abernethy dan Combe, sama-sama berperan penting dan “*supporting one another in forming the characteristics of a society*” (saling mendukung dalam membentuk karakteristik masyarakat).

Pendidikan dan politik adalah dua kekuatan besar yang saling menopang dalam membentuk karakteristik satu masyarakat. Fungsi-fungsi pendidikan dalam satu masyarakat akan berjalan efektif apabila ditopang oleh kemauan dan komitmen politik (*political will*) para penguasa, dan sebaliknya, sistem politik dalam satu masyarakat akan berjalan efektif apabila ditopang oleh kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan yang relevan. Komitmen dan dukungan politik merupakan faktor utama dan sebagai penentu dalam upaya memajukan pendidikan. Sebaliknya, kinerja atau kualitas pendidikan adalah faktor utama dan faktor penentu dalam upaya memajukan kehidupan politik. Dalam konteks hubungan saling menopang ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa karakteristik satu masyarakat adalah cermin dari kinerja sistem pendidikan dan politiknya. Keterdidikan, kedewaan, dan kestabilan masyarakat mengindikasikan adanya sistem politik

yang baik dan efektif. Begitupun sebaliknya. Sistem politik yang problematik akan melahirkan masyarakat yang problematik pula.

Hubungan saling menopang antara pendidikan dan politik dijelaskan oleh Thomas Jefferson ketika ia menggambarkan kaitan antara sistem pendidikan dan perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Dia menulis: “*There is a profound connection between the Bill of Rights--the document embodying the rights of citizens --and education as the foundation which made democracy work and made the Bill of Rights work*” (ada kaitan mendasar antara undang-undang tentang hak-hak warga negara dan pendidikan sebagai fondasi yang membuat demokrasi dan undang-undang tersebut berjalan). Besarnya peran pendidikan dalam membangun sistem politik juga digambarkan oleh Benjamin R. Barber (1992). Dia menulis dalam bukunya *An Aristocracy of Every One: “The founding of the common school, the public school, in America was the foundation for an effective and successful democracy”* (penemuan sekolah umum di Amerika adalah fondasi bagi efektifitas dan keberhasilan demokrasi).

Menurut Benjamin (1992), menapikan keterkaitan antara sistem sekolah, karakteristik kewarganegaraan, dan perkembangan demokrasi adalah satu kesalahan. Ketika mengkritisi lemahnya nilai-nilai demokrasi dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat, diaberpendapat bahwa hal itu terjadi karena hilangnya kesadaran bahwa nilai-nilai demokrasi tidak terlepasdari sistem sekolah dan kewarganegaraan. Dia menulis: “*I think we have lost sight of the connection between the schooling, citizenship and democracy*” (saya pikir kita telah kehilangan wawasan tentang kaitan antara sekolah, kewargaan, dan demokrasi). Benjamin juga menegaskan bahwa dia telah

menulis satu buku khusus, yaitu *An Aristocracy of Every One* (1992) untuk menegaskan kembali pentingnya koneksi antara sistem pendidikan (public education) dan kesadaran politik warga negara (*public citizenship*).<sup>28</sup>





# 3

## KERANGKA KONSEPTUAL

*Politik pendidikan memerlukan kerangka konseptual (conceptual framework) agar kajian yang dilakukan memiliki landasan teoritis dan metodologi yang kuat.*

SEBAGAIMANA LAYAKNYA satu kajian keilmuan, maka kajian politik pendidikan juga memerlukan kerangka konseptual (*conceptual framework*), agar kajian yang dilakukan memiliki landasan teoritis yang kuat, didukung oleh metodologi yang teruji (*reliable*), terarah pada fokus yang spesifik, dan menghasilkan pemahaman, penjelasan, dan prediksi yang orisinal, autentik, dan bermanfaat, baik untuk pengembangan keilmuan maupun untuk kebutuhan pengembangan kebijakan-kebijakan dan program-program yang terkait dengan dinamika hubungan antara politik dan pendidikan.

Para peminat kajian politik pendidikan sangat menyadari dan harus menyadari kebutuhan ini, agar kajian-kajian yang dilakukan memiliki landasan dan orientasi keilmuan yang jelas. Mereka perlu menyadari sepenuhnya bahwa relevansi, akurasi, dan reliabilitas kajian-kajian politik pendidikan sangat ditentukan oleh ketepatan kerangka konseptual yang digunakan. Karena itu maka salah satu program yang secara terus menerus dilakukan oleh para peminat kajian politik pendidikan, baik

secara individu maupun kelompok, misalnya yang tergabung dalam *The Politics of Education Association* (PEA), adalah mengkaji, mengembangkan, dan mendiseminasi kerangka konseptual yang relevan dengan kajian-kajian politik pendidikan.

Para peminat kajian politik pendidikan yang tergabung dalam PEA telah berhasil memperkenalkan 14 kerangka konseptual yang telah teruji dan dapat digunakan oleh para peminat kajian politik pendidikan, seperti mahasiswa, dosen, dan peneliti, untuk merencanakan, merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan kajian-kajian mereka: (1) Pemilihan dan Sekolah (*Elections and Schools*), (2) Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*), (3) Teori Kelompok Kepentingan (*Interest Group Theory*), (4) Mikropolitik Pendidikan (*Micropolitics of Education*), (5) Formasi Sumber Daya Manusia Modern (*Modern Human Capital Formation*), (6) Arus Majemuk (*Multiple Streams*), (7) Difusi Inovasi Kebijakan (*Policy Innovation Diffusion*), (8) Teori Rezim Kebijakan (*Policy Regimes Theory*), (9) Keseimbangan (*Punctuated Equilibrium*), (10) Teori Rezim Urban (*Urban Regime Theory*) dan Organisasi Berbasis Komunitas (*Community-Based Organizations, CBOs*), (11) Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*), (12) Jalan Keluar, Suara, dan Loyalitas (*Exit, Voice, and Loyalty*), (13) Teori Marxis Persatuan Guru (*Marxist Theory Associated with Teacher Unionism*), dan (14) Teori Feminis (*Feminist Theory*).

Berikut ini satu per satu dari 14 kerangka konseptual menurut mazhab PEA tersebut diuraikan, dengan berbagai

latarbelakang, kriteria, keunggulan, dan kelemahan masing-masing.

### **Teori Pemilihan dan Sekolah (*Elections and Schools*)**

Teori Pemilihan dan Sekolah (*Elections and Schools*), selanjutnya disingkat ES, sering juga disebut dengan nama lain, seperti teori Representasi (*Representation*), teori Responsi (*Responsiveness*), dan teori Tatakelola Demokratis (*Democratic Governance*). Teori ES adalah teori yang menggunakan studi tentang pemilihan yang lazim digunakan dalam ilmu politik sebagai kerangka untuk memahami bagaimana struktur pemilihan di sekolah dan pengaruhnya terhadap representasi dan suara dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making*) di tingkat sekolah. Hal ini dimungkinkan karena dua alasan. Pertama, karena sekolah atau lembaga pendidikan lainnya adalah lembaga pelayanan publik, sehingga kebijakan dan program yang dikembangkan dituntut untuk memenuhi selera publik. Kedua, para praktisi dan pengelola lembaga pendidikan adalah pelayan publik. Mereka dituntut untuk memenuhi kriteria dan kinerja yang diinginkan publik. Mereka dituntut untuk dapat memiliki kredibilitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas di mata publik.

Teori ES sangat relevan untuk sekolah-sekolah yang dalam tatakemelolanya mengharuskan pemilihan atau penyeleksian para pengelolanya melibatkan lembaga-lembaga publik atau masyarakat, baik melalui mekanisme rapat persatuan orang tua, asosiasi pemangku kepentingan, dewan sekolah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang relevan dan memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan. Sebaliknya, teori ES kurang relevan untuk digunakan sebagai kerangka konseptual kajian politik pendidikan pada sistem tatakelola sekolah (*school*

governance) dimana kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, dan unsur-unsur lainnya tidak dipilih oleh masyarakat atau diangkat melalui kewenangan jabatan yang ada pada struktur birokrasi tertentu, seperti Kepala Dinas Pendidikan.

Dalam kajian ilmu politik pada umumnya, teori pemilihan (*election theory*) telah banyak digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana struktur pemilihan: apakah pemilihan berbasis pada satu kota (*ward-based* atau *city-based*) atau diselenggarakan dalam bentuk pemilihan umum (*general elections*) atau dalam bentuk pemilihan khusus (*special elections*). Teori pemilihan juga dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi dampak struktur pemilihan terhadap para pemberi suara (*voters*) dan representasi suara dalam keputusan-keputusan yang ditetapkan.

Dalam kajian politik pendidikan, teori pemilihan telah digunakan oleh para peminat kajian ini untuk meneliti isu-isu politik dan kekuasaan yang terdapat dalam keputusan-keputusan yang dibuat di tingkat sekolah, dan bagaimana politik mempengaruhi isu-isu kesetaraan (*equity*) di sekolah. Karena para pengelola sekolah adalah unit pembuat kebijakan di tingkat lokal, maka struktur dan prosedur yang terkait dengan bagaimana mereka dipilih secara signifikan dapat mempengaruhi upaya-upaya untuk mewujudkan tatakelola yang demokratis, representasi, suara, kesetaraan, dan kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan di tingkat sekolah (*school decision-making*).

Teori pemilihan sudah banyak dibahas dan dikembangkan, baik oleh para peminat kajian ilmu politik pada umumnya maupun oleh para peminat kajian politik pendidikan khususnya. Pembahasan dan pengembangan tersebut dapat disimak pada

karya-karya Campbell, A., Converse, P., Miller, E., & Stokes, D. E. (1960); Downs, A. (1957); Lijphart, A. (1997); Lodge, M., & Steenbergen, M. (1995); dan Wolfinger, R. E., & Rosenstone, S. J. (1980).

Aplikasi teori Pemilihan dan Sekolah sebagai kerangka konseptual kajian politik pendidikan dapat dilihat pada karya Allen, A. & Plank, D.N. (2005); Berkman, M.B. & Plutzer, E. (2005); Feuerstein, A. (2002); Lutz, F., & Iannacone, L. (1978); McDermott, K. A. (1999); Meier, K. (2002); Meier, K. J. & England, R.E. (1984); dan Meier, K.J., Stewart, J., & England, R.E. (1989). Meskipun pada umumnya menyajikan contoh aplikasi teori Pemilihan dan Sekolah untuk kasus-kasus politik pendidikan yang terjadi di Eropa dan Amerika, contoh-contoh tersebut dapat digunakan untuk merancang kajian terhadap kasus-kasus politik pendidikan di negara-negara lain, termasuk di Indonesia.

### **Teori Kelompok Kepentingan (*Interest Group Theory*)**

Dalam khazanah kajian ilmu politik, teori Kelompok Kepentingan atau *Interest Group Theory* sering juga disebut Teori Kelompok Penekan (*Pressure Group Theory*), Teori Koalisi Kelompok Kepentingan (*Interest Group Coalition Theory*), dan Kelompok Kekuatan Politik (*Political Power Groups*). Meskipun memiliki beberapa perbedaan dalam proses memilih dan memilah masalah, asumsi dasar dan pendekatan yang digunakan oleh teori-teori tersebut melihat kasus-kasus politik pendidikan memiliki banyak kesamaan.

Menurut perspektif Teori Kelompok Kepentingan, politik pendidikan adalah sistem kelompok kepentingan yang kompleks

dan berubah-ubah (*complex, changing systems of interest groups*), bentuk-bentuk pluralisme yang sedang berjalan (*forms of pluralism at work*), yang satu sama lain saling usil (*fussing*) dan saling menjatuhkan (*tumbling*), ketika mereka meredefinisi isu-isu terkait dan mengambil langkah-langkah untuk merapat pada kelompok-kelompok simpatisan lain. Mereka satu sama lain sering bertarung untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mereka inginkan. Karena itu, menurut Bentley (1908: 214), bagian paling esensial dari teori kelompok kepentingan dapat direpresentasikan dalam kalimat sebagai berikut: “*there is no way to get hold of one group interest except in terms of others*” (tidak ada cara untuk mempertahankan kepentingan satu kelompok kecuali dengan melihat kepentingan kelompok-kelompok lain). Pertarungan antar kelompok-kelompok kepentingan cenderung tidak dalam format saling menutupi, tetapi dalam format saling memahami, menyesuaikan, atau kompromi.

Penerapan teori kelompok kepentingan dalam kajian politik pendidikan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup atau spektrum permasalahan yang akan dikaji. Bisa diterapkan untuk melihat persoalan politik pendidikan di tingkat lokal, nasional, regional, bahkan internasional. Ketika pendidikan masih berada dalam domain komunitas lokal, dikelola dengan aturan-aturan lokal, dan hanya menjadi ajang konflik kepentingan (*conflict of interests*) kelompok-kelompok lokal, maka teori kelompok kepentingan digunakan untuk melihat dinamika pergulatan politik untuk representasi kepentingan pendidikan di tingkat lokal.

Karena pendidikan telah bergeser dari semata-mata hanya aktivitas komunitas lokal menjadi aktivitas atau fungsi negara

yang diatur dengan peraturan negara, dengan program-program berskala nasional, seperti wajib belajar, pemerataan pendidikan, pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin, pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, standar nasional, ujian nasional, dan pendidikan untuk anak-anak warga negara asing, dan menjadi ajang konflik kepentingan antara kelompok-kelompok atau koalisi-koalisi kepentingan tingkat nasional, maka skala dan “lokasi” penerapan teori kelompok kepentingan juga dapat diperluas ke tingkat nasional atau negara.

Dengan demikian maka penerapan teori kelompok kepentingan dalam kajian politik pendidikan perlu mencatat bahwa struktur kelompok kepentingan selalu berubah-ubah, program-program mereka berubah-ubah, dan interaksi mereka juga berubah-ubah. Ketika pendidikan berkembang menjadi aktivitas berskala nasional dan internasional, menurut pengamatan Bentley (1908: 214), maka kelompok-kelompok kepentingan lokal yang kecil akan memberi jalan bagi kekuatan-kekuatan regional dan nasional yang lebih besar.

Berbagai pola dan ruang lingkup penerapan teori kelompok kepentingan dalam kajian politik pendidikan dapat dilihat pada karya-karya Bentley, A. F. (1908); Berry, J. M. (1984); Cibulka, J. F. (2001); Crick, B. (2000); Crick, B. (1959); Dowling, R. E. (1960); Thomas, C. S., & Hrebenar, R. (1992); Odegard, P. H. (ed.), (1967); Opfer, V. D., Young, T. V., & Fusarelli, L. D. (2008); dan Salsbury, R. H. (1990).

### **Mikropolitik Pendidikan** (*Micropolitics of Education*)

Dalam berbagai publikasi yang terkait dengan kajian politik pendidikan, Istilah *micropolitics of education* (mikropolitik

pendidikan) sering disejajarkan oleh para penulis dengan *interpersonal politics*, *school site politics*, *power relations*, dan *small organizational politics*. Dilihat dari namanya, teori-teori ini sama-sama mengarah pada persoalan-persoalan yang muncul dalam dinamika politik pendidikan di tingkat kelembagaan, yang melibatkan aktor-aktor yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Ungkapan “*micropolitics of education*” pertama kali digunakan oleh Iannaccone (1975) untuk menjelaskan “*the politics that takes place in and around schools*” (politik yang berlangsung di sekolah dan di sekitar sekolah). Fokus kajian mikropolitik pendidikan, menurut Iannaccone (1975: 43) adalah “interaksi dan ideologi-ideologi politik dari sistem sosial para guru, administrator, dan peserta didik yang ada dalam bangunan sekolah.”

Beberapa peneliti politik dan politik pendidikan mendefinisikan mikropolitik sebagai “penggunaan kekuasaan secara strategis oleh individu-individu dan kelompok-kelompok dalam berbagai organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Bacharach & Lawler 1980; Ball 1987; Blasé 1989, 1991a; Hoyle 1986; dan Pfeffer 1981). Para peneliti lain menggabungkan konsep-konsep yang ada dalam berbagai literatur ilmu politik, seperti *polity*, *power* (kekuasaan), *influence* (pengaruh), *authority allocation of scarce yet valued resources* (otoritas pengalokasian sumber daya), *dominant coalitions* (koalisi dominan), dan lainnya, sebagai alat untuk melakukan analisis keorganisasian (lihat Bacharach & Lawler 1980; Cyert & March 1963; Marshall & Scribner 1991; Mintzberg 1983; Morgan 1986; Pfeffer 1981, 1992; dan Pfeffer & Salancik 1978).



Menurut Owens (2006), meningkatnya diversifikasi penduduk dan semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya, membuat upaya-upaya politik untuk mendapatkan atau menguasai sumber daya berharga menjadi lebih aktif, agresif, dan melibatkan nilai-nilai dan ideologi-ideologi berbeda-beda dan penuh pertentangan.

Pengembangan teori *micropolitics of education* sebagai salah satu kerangka konseptual kajian politik pendidikan telah melibatkan beberapa penulis atau peneliti, seperti Bacharach, S. B., & Lawler, E. J. (1980); Ball, S. J. (1987); Cyert, R. M., & March, J. G. (1963); Hoyle, E. (1986); Iannaccone, L. (1975); Marshall, C., & Scribner, J. (1991); Mintzberg, H. (1983); dan Morgan, G. (1986).

Adapun aplikasi teori *micropolitics of education* dalam kajian politik pendidikan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Blasé, J.J. (1989 dan 1991a); Johnson, B. L. (2001); Johnson, B. L. (2003); Malen, B. (1995); Salo, P. (2008); dan Scribner & D. H. Layton (Eds.). Meskipun suda cukup berumur, karya-karya tersebut dapat menjadi bacaan awal (*preliminary readings*) bagi para peneliti yang ingin melihat kasus-kasus politik pendidikan yang ada di tingkat lembaga atau sekolah.

### **Teori Formasi Modal Manusia Modern (*Modern Human Capital Formation*)**

Dalam literatur kajian politik politik pendidikan, istilah *modern human capital formation* (formasi modal manusia modern), selanjutya disingkat FM3, sering overlapping atau diparalelkan dengan beberapa istilah lain, seperti *human capital framework* (kerangka modal manusia), *economics of education*

(ekonomi pendidikan), *social benefits of education* (manfaat sosial pendidikan), dan *social rates of return* (nilai sosial hasil). Istilah-istilah tersebut sering digunakan oleh para penulis untuk menjelaskan peran pendidikan dalam hubungan antara politik pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan dinamika perkembangan ekonomi.

Menurut perspektif teori FM3, lembaga-lembaga pendidikan tidak menghasilkan siswa atau bahkan lulusan, tetapi menghasilkan modal manusia (*human capital*), berupa ilmu pengetahuan dan ketrampilan baru yang ditanamkan pada siswa selama proses pendidikan. Modal manusia ini menghasilkan keuntungan dalam siklus kehidupan setelah lulus, tidak hanya selama berada di pasar kerja, tetapi juga memberi berbagai manfaat non-pasar. Di rumah atau dalam kehidupan keluarga, menurut teori FM3, pendidikan yang baik dapat membuat kesehatan keluarga lebih baik. Anak-anak dapat lebih sehat dan lebih terdidik. Dalam kehidupan komunitas, menurut teori FM3, pendidikan yang baik dapat mendorong dan memberikan kemampuan atau kapasitas pada seseorang untuk terlibat atau berpartisipasi dalam mengurus atau mengelola lembaga-lembaga sosial dan sejenisnya.

Dengan berbagai manfaat non-pasar yang diberikannya, menurut teori FM3, pendidikan yang baik dapat menjadi fondasi bagi bangunan institusi-institusi yang demokratis, menurunkan tingkat kriminalitas dan berbagai problema sosial lainnya. Semua manfaat tersebut, menurut perspektif teori FM3, dapat diestimasi dan dikaitkan dengan biaya. Misalnya, seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap tingkat kesenangan dan status sosial seseorang dan atau keluarga, dan atau kelompok masyarakat.

Penghitungan ini adalah kriteria utama untuk mengestimasi kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berbagai tujuan pembangunan lainnya. Dengan demikian maka penghitungan rating sosial dari keuntungan yang diperoleh sangat fundamental bagi kebijakan pendidikan (*education policy*). Rating sosial dari keuntungan yang diperoleh tidak hanya merefleksikan tingkat efisiensi internal, tetapi juga efisiensi eksternal, dan dengan demikian kontribusi bersih pendidikan terhadap kesejahteraan sosial bersifat menyeluruh. Kontribusi efisiensi ini terpisah dari kontribusi terhadap kesetaraan (*equity*), walaupun dalam kasus pendidikan keduanya seringkali *overlappingg* (tumpang tindih).

Filosofi, konteks, dan relevansi teori FM3 dapat dilihat pada karya Becker, G. (1976); McMahan, W. (2006); dan McMahan, W. (2009). Adapun karya McMahan, W. (2002); McMahan, W. (2007); dan McMahan, W. (2009) memperlihatkan metode atau teknik penerapan teori FM3 sebagai kerangka konseptual kajian politik pendidikan.

### **Teori Arus Majemuk (*Multiple Streams Theory*)**

Teori arus majemuk (*multiple streams theory*), selanjutnya disingkat teori MS, adalah salah satu teori yang banyak digunakan dalam kajian politik, khususnya kajian kebijakan public (*public policy*). Teori ini juga sering disebut dengan nama *teori garbage can decision-making* (tong sampah pembuatan keputusan).

Teori MS dikembangkan oleh Kingdon dan dikenal sebagai salah satu teori formasi kebijakan (*policy formation*) yang paling banyak dikutip, namun dalam aplikasinya teori ini kurang

sistematik. Para peminat teori MS ingin menjelaskan proses perubahan agenda kebijakan pemerintah, khususnya tentang bagaimana dan mengapa beberapa isu masuk ke dalam agenda dan mempengaruhi materinya.

Dengan melakukan kajian terhadap kasus-kasus pembuatan kebijakan tingkat pusat dalam bidang transportasi dan kesehatan yang melibatkan 247 interviu dengan para pembuat kebijakan dalam jangka waktu empat tahun, Kingdon mengembangkan penjelasan tentang perubahan kebijakan yang mengakomodasikan beberapa elemen rasionalisme dan incrementalisme. Dengan kajian tersebut dia menolak model *problem-solving* dan *incremental* tradisional untuk menjelaskan formasi kebijakan, karena menilainya tidak memadai.

Dalam perspektif teori MS, Kingdon menjelaskan, pemerintah pusat adalah arena mengalirnya tiga “arus” aktivitas secara simultan. Dalam konteks ini, arus permasalahan terdiri dari kondisi-kondisi yang telah dipilih oleh para pembuat kebijakan untuk diinterpretasikan sebagai permasalahan. Dalam konteks ini juga, arus kebijakan terdiri dari berbagai “solusi” yang dikembangkan oleh para spesialis dalam komunitas kebijakan yang jumlahnya sangat banyak, yang mengitari dan mengeping ibu kota negara.

Di tingkat pusat, Kingdon menjelaskan lebih lanjut, arus politik terdiri dari berbagai perkembangan yang mencakup kondisi-kondisi politik makro, seperti *mood public*, politik kelompok kepentingan (*interest group politics*), dan dinamika yang terjadi di cabang-cabang kantor administratif dan legislatif. Dalam konteks Amerika Serikat, menurut Kingdon, arus permasalahan, kebijakan, dan politik mengalir melalui sistem

pemerintahan federal yang satu sama lain bersifat independen, sesuai dengan dinamika internal masing-masing negara bagian.

Hasilnya, Kingdon menyimpulkan, perubahan dalam satu arus bisa terjadi secara terpisah dari perubahan yang terjadi pada arus lain. Menurut Kingdon, inilah asumsi utama kajian dengan model MS. Dalam formulasi MS, dia menambahkan, sebuah isu akan mendapat jalur lintasan pada agenda kebijakan jika tiga arus aktivitas yang terpisah itu ditemani oleh satu peluang pilihan. Arus aktivitas yang berpasangan tersebut membentuk fitur terpenting dari model kajian *multi streams* (MS).

Penggabungan arus (*stream-convergence*) bisa terjadi apabila ada peluang (*window of opportunity*) yang terbuka, yang memberi kesempatan kepada para pengembang kebijakan (*policy entrepreneurs*) untuk memberikan perhatian pada berbagai problem yang mereka kemukakan dan solusi-solusi yang mereka inginkan. Menurut Kingdon (1995), para pengembang kebijakan “bersantai sambil menunggu di dalam dan di sekitar pemerintah dengan membawa solusi-solusi yang sudah mereka siapkan, sambil menunggu mencuatnya berbagai masalah dimana mereka akan menawarkan solusi-solusi mereka, sambil menunggu perkembangan arus politik yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri” (1995: 165).

Walaupun kekuatan-kekuatan yang mengarahkan aktivitas yang terjadi dalam berbagai arus politik yang ada memiliki pola yang terlihat, ada kualitas tertentu yang tidak direncanakan dalam proses konvergensi arus. Mengutip Cohen, March, dan Olsen (1972) dalam menggambarkan proses penyusunan agenda pembalasan yang terjadi secara intuitif, dimana terdapat berbagai pilihan mencari isu-isu, Kingdon menjelaskan bahwa berbagai problem mencari situasi-situasi keputusan dimana berbagai

problem yang ada dapat dikemukakan, solusi-solusi mencari problem-problem dimana mereka bisa menjadi jawaban, dan para politisi mencari problem-problem atau kebijakan-kebijakan mainan yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan karir.

Uraian tentang teori Multiple Streams (MS) ini dapat dibaca dalam karya Cohen-Vogel, L. & McLendon, M. (2009). Selain itu, penjelasan tentang teori Multiple Streams (MS) dapat juga dibaca dalam karya-karya Kingdon, J. W. (1995, 1994, dan 1984). Untuk melihat aplikasi teori MS dalam kajian politik pendidikan, dapat dibaca sumber-sumber sebagai berikut: Cohen-Vogel, L. & McLendon, M. (2009); DeBray-Pelot, E. (2007); dan McDermott, K. (2005).

### **Kosep *Policy Innovation Diffusion***

Konsep *policy innovation diffusion* (difusi inovasi kebijakan), dalam tulisan ini disingkat PID, diperkenalkan oleh Lora Cohen Vogel dan Michael Mc Lendon dan juga dikenal dengan nama *innovation diffusion* (difusi inovasi), *regional diffusion* (difusi regional), dan *internal determinants* (*determinasi internal*).

Di kalangan ilmuan politik pada umumnya dan di kalangan para sarjana kebijakan negara (*state policy*) khususnya, konsep PID dikenal luas sebagai lensa untuk studi kebijakan publik. Ini terbukti dengan dimasukkannya konsep PID dalam buku *Theories of Policy Process* karya Paul Sabatier(1999a dan 2007). Dari waktu ke waktu kerangka kajian ini telah disempurnakan secara konseptual dan metodologikal. Kerangka kajian ini sudah digunakan oleh para peminat kajian kebijakan publik untuk

menjelaskan inovasi kebijakan atau faktor-faktor yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi sesuatu yang baru.

Dalam edisi kelima dari karyanya *Diffusion of Innovations*, Everett Rogers (2003:11) mendefinisikan *innovation diffusion* sebagai “*process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system*” (proses yang berlangsung dari waktu ke waktu untuk mengkomunikasikan inovasi kepada para anggota sistem sosial melalui saluran-saluran tertentu).

Dalam konteks kajian kasus-kasus kebijakan di Amerika Serikat, McLendon (2003b) mencatat bahwa para ilmuwan politik di negara tersebut telah mengadaptasikan definisi yang dibuat oleh Rogers dengan melihat “sistem sosial” sebagai satu entitas yang terdiri dari pemerintah di 50 negara bagian. Dalam ilmu politik (*political science*) dan studi kebijakan (*policy studies*), yang menjadi unit utama analisis adalah pemerintah tingkat lokal, provinsi, dan nasional. Walaupun beberapa ilmuwan politik telah mengkaji transfer kebijakan dan program antara sesama pemerintah lokal, misalnya, Clarke, Wilson, Cummings, & Hyland (1999); Perry & Kraemer (1979); dan Samuels & Glantz (1991), dan bahkan antar bangsa (*cross-nationally*), misalnya, Collier & Messick (1975); Dolowitz & Marsh (1996); Robertson & Waltman (1993); dan Rose (1991). Sebagian besar karya mereka berkonsentrasi pada adopsi kebijakan pada tingkat negara bagian atau provinsi. Dalam karya-karya tersebut inovasi didefinisikan sebagai satu kebijakan yang baru bagi negara bagian yang mengadopsinya, berapapun usianya, apakah kebijakan itu ada di tempat lain, atau bagaimana negara-negara bagian lain mengadopsinya (Berry & Berry (1990); Gray (1973 dan 1994); dan Walker (1969).

Sejak terbitnya karya pelopor milik Jack Walker pada tahun 1969, riset tentang inovasi kebijakan negara berkembang sangat pesat. Sejak tahun 1990 saja, sudah terbit lebih dari 40 kajian yang menguji kekuatan penjelasan kerangka kajian *policy innovation diffusion* di negara-negara berkembang (Berry & Berry, 2006). Dalam kajian-kajian tersebut utamanya para sarjana telah menggunakan kerangka PID untuk mengidentifikasi pengaruh internal negara (*intra-state*) dan pengaruh antar negara (*inter-state*) terhadap adopsi kebijakan. Dengan mempelajari adopsi kebijakan lintas tempat dan waktu (*across space and time*), mereka mempertanyakan bagaimana kaitan antara faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosio-demography negara, dan bagaimana dinamika difusi pola-pola adopsi kebijakan sesama negara-negara bagian di Amerika (McLendon, 2003b). Dua sisi pertanyaan ini mencerminkan dua penjelasan utama tentang apakah dan bilakah negara-negara bagian melakukan inovasi (Berry & Berry 1990; Clark 1985; Mintrom & Vergari 1998; Nice 1994; dan Savage 1985).

Penjelasan tentang faktor-faktor determinan internal mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan inovasi manakala ada lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung (Gray 1994). Para peneliti menemukan bahwa pada umumnya adopsi terjadi lebih cepat di negara-negara bagian yang lebih besar dan kaya, yang memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan eksperimen atau di negara-negara bagian yang menerapkan sistem pemilihan yang lebih kompetitif, dimana terjadi intensitas persaingan politik yang tinggi. Inovasi juga terjadi lebih cepat di negara-negara bagian yang memiliki lebih banyak anggota legislatif dari kalangan profesional, dan di negara-negara bagian yang masyarakatnya



lebih urban dan terdidik (Berry & Berry1990; Morgan & Watson1991; dan Walker1969).

Asumsi dasar dari model kajian PID ini, “bahwa negara-negara bagian tidak secara signifikan saling mempengaruhi” (McLendon, 2003b: 113). Sebaliknya, penjelasan-penjelasan tentang difusi menjelaskan bahwa “inovasi kebijakan secara intrinsik terjadi antarnegara (intergovernmental), yaitu antar negara-negara bagian yang mengemulasi perilaku adopsi kebijakan di negara-negara bagian lainnya” (McLendon, 2003b: 113).

Model difusi regional memperkenalkan inovasi kebijakan satu negara bagian pada perilaku kebijakan dari tetangga-tetangga terdekatnya. Pada tahun 1969, Walker mendokumentasikan pola *clustering regional*, dan mendiskripsikan perilaku negara dalam pembuatan kebijakan sebagai satu sistem emulasi (*system of emulation*) (1969: 898). Dia menjabarkan pola-pola regional dalam inovasi kebijakan di negara-negara bagian yang mengimitasi negara-negara bagian terdekat. Dalam beberapa kajian yang dilakukan oleh Walker (1969), negara-negara bagian tertentu muncul sebagai *opinion leaders* di masing-masing wilayah Amerika Serikat. Manakala para *opinion leaders* ini mengadopsi program atau kebijakan baru, negara-negara bagian lain yang ada di wilayah tersebut ikut menyesuaikan” (Diringkas dari McLendon, M., & Cohen-Vogel, L. 2008).

Berbagai pandangan filosofis dan teoritis yang terkait dengan kerangka konsep *policy innovation diffusion* (PID) dapat dibaca pada beberapa sumber sebagai berikut: Gray, V. 1973 dan 1994; Mintrom, M. 1997; Mooney, C. Z. 2001; Nice, D. C. 1994; dan Walker, J. L. 1969. Aplikasi kerangka konsep PID

dalam kajian-kajian politik pada umumnya dan politik pendidikan khususnya dapat dilihat pada sumber-sumber sebagai berikut: Cohen-Vogel, L. & Ingle, K. 2007; Cohen-Vogel, L., Ingle, K., Albee, A., & Spence, M. 2008; Ingle, K., Cohen-Vogel, L. & Hughes, R. 2007; McLendon, M. K., Hearn, J. C., & Deaton, R. 2006; Mintrom, M. 2000; Mintrom, M., & Vergari, S. 1998; dan Mooney, C. Z., & Lee, M. H. 1995.

### **Teori Rezim Kebijakan (*Policy Regimes Theory*)**

*Policy regimes theory* (teori rezim kebijakan), dalam tulisan ini disingkat TRK, dikembangkan oleh Lora Cohen-Vogel dan Michael McLendon. Menurut catatan Dougherty dan Pfaltzgraff (1997) dan Kratochwil dan Ruggie (1997), "*the policy regime approach is the newest of the synthetic models, and grew out of the international relations literature*" (pendekatan Rezim Kebijakan adalah salah satu dari model sintetik terbaru, yang berkembang melalui literatur hubungan internasional). Para peminat teori ini perlu lebih cermat mengikuti aplikasinya dalam berbagai kajian, karena dalam aplikasinya TRK sering menggunakan nama lain. Walaupun sebagian besar kajian yang terkait dengan TRK berkonsentrasi pada rezim internasional, banyak ilmuan politik yang menerapkan model rezim ini pada pembuatan kebijakan di tingkat urban (perkotaan) (Stone, C., 1989), presidensial (lihat Skowronek, 1993), dan regulasi di Amerika Serikat (lihat Harris & Milkis, 1996).

Wilson (2000) mencatat bahwa kajian rezim kebijakan banyak diarahkan pada isu-isu spesifik dalam bidang tertentu, seperti proteksi lingkungan (*environmental protection*), hak-hak sipil (*civil rights*), atau pendidikan, dan terdiri dari tiga dimensi,

yaitu pengaturan kekuasaan (*power arrangement*), paradigma kebijakan (*policy paradigm*), dan pengaturan keorganisasian (*organizational arrangement*).

Dalam konteks pengaturan kekuasaan (*power arrangements*), rezim kebijakan bisa melibatkan aktor-aktor dari kalangan pemerintah dan nonpemerintah, kepentingan yang tunggal atau majemuk, kelompok-kelompok yang secara tradisional akrab atau kompetitif, dan para pemanfaat kebijakan. Selanjutnya, paradigma-paradigma kebijakan membentuk cara-cara pendefinisian masalah, misalnya, sebab dan akibatnya, dan bagaimana masalah-masalah tersebut seharusnya diatasi dan siapa yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya pengaturan keorganisasian merujuk pada konteks prosedural dan institusional dimana keputusan-keputusan tentang kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Dengan demikian maka satu kebijakan akan merefleksikan konsepsi yang dimiliki oleh satu rezim tentang cara dan akhir dari tindakan pemerintahan, pengaturan kelembagaan yang menentukan struktur pembuatan dan implementasi kebijakan dalam bidang tertentu, dan tujuan para anggota rezim (McGuinn 2006). Menurut Wilson (2000), setiap dimensi rezim kebijakan membantu stabilitas kebijakan jangka panjang.

Pengaturan kekuasaan itu sendiri cenderung stabil. Paradigma orang-orang yang sedang berkuasa diperkuat melalui liputan media dan pidato, dan mempromosikan persepsi publik bahwa pengaturan yang ada adalah rasional. Akhirnya, dengan aturan kelembagaan, regulasi dan rutinitas, organisasi-organisasi cenderung bersikap resisten terhadap perubahan dan inovasi (Wilson, 1989). Bagaimanapun, menurut teori rezim kebijakan, stabilitas dapat diganggu ketika kondisi yang ada menginginkan

perubahan rezim. Perubahan rezim kebijakan tidak dilakukan secara sponstan, tetapi terjadi secara gradual; “*when regimes become stressed, alternative policy paradigms arise, legitimacy crises occur, and shifts in power become evident*” (manakala beberapa rezim dalam keadaan tertekan, muncul paradigma kebijakan alternatif, terjadi krisis legitimasi, dan terjadi pergeseran kekuasaan (Wilson, 2000: 266).

Faktor-faktor yang sering memberikan tekanan pada satu rezim adalah kehancuran alamiah atau kehancuran yang dilakukan manusia (*natural and man-made disasters*), proses-proses kumulatif seperti pergeseran demografi, temuan-temuan baru, atau skandal. Oleh Cobb dan Elder (1983), faktor-faktor penekan itu disebut “*trigger events.*” Oleh Sabatier (1999b) faktor-faktor penekan itu disebut “*external perturbations,*” dan oleh Jones, Baumgartner, dan True (1995) disebut “*exogenous shocks.*” Faktor-faktor tersebut dapat memberikan tekanan pada pengaturan keorganisasian, mengabaikan paradigma kebijakan yang dominan, dan meningkatkan visibilitas masalah-masalah baru, sehingga mendorong terjadinya pergeseran paradigma.

Pergeseran paradigma terjadi manakalah berbagai peristiwa atau faktor-faktor penekan yang muncul tidak sejalan dengan narasi kebijakan yang dominan. Jika hal ini terjadi, paradigma atau wacana baru bisa muncul atau alternatif yang ada (tetapi terhenti) mungkin mendapatkan daya tarik. Terkadang faktor-faktor penekan dan pergeseran paradigma berinteraksi, menghasilkan krisis legitimasi. Dengan mempertanyakan riwayat, imej, dan otoritas yang menjadi basis bangunan rezim, para politisi dan pemimpin nonpemerintahan bisa secara perlahan mendorong hilangnya konfidensi publik pada mereka (Stone, D.1988 dan 1989). Terkadang pergeseran kekuasaan

dimungkinkan oleh faktor-faktor penekan, pergeseran paradigma, dan legitimasi krisis, tetapi bisa juga terjadi secara alamiah (*naturally*).

Di Amerika Serikat, pergeseran kekuasaan bisa terjadi bersama perubahan-perubahan pada komposisi Kongres atau Gedung Putih, melalui penyeberangan blok elite kebijakan, atau karena mobilisasi koalisi advokasi (Wilson, 2000). Uraian tentang teori rezim kebijakan ini disarikan dari Cohen-Vogel, L. dan McLendon, M. 2009. *New approaches to understanding federal involvement in education*. Dimuat dalam D. Plank, G. Sykes, dan B. Schneider (Eds.), *Handbook of Education Policy Research. A Handbook for the American Educational Research Association*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Berbagai pembahasan tentang filosofi dan metodologi kajian dalam teori rezim kebijakan dapat dibaca pada sumber-sumber sebagai berikut: Stone, C. 1989; Skowronek, S. 1993; Harris, R. A., & Milkis, S. M. 1996; dan Wilson, C. 2000. Adapun pola-pola aplikasi teori rezim kebijakan dalam studi politik pendidikan dapat dilihat pada Cohen-Vogel, L. & McLendon, M. 2009 dan Lawrence Erlbaum dan McGuinn, P. J. 2006.

### **Teori Keseimbangan Terhenti**(*Punctuated Equilibrium*)

Dalam perkembangan kajian politik pendidikan, teori keseimbangan terhenti (*punctuated equilibrium*) dipopulerkan oleh Lora Cohen Vogel dan Michael McLendon. Ungkapan “*punctuated equilibrium*” telah dikenal luas sejak seorang paleontologists bernama Niles Eldredge dan Stephen Jay Gould (1972) memperkenalkannya sebagai alternatif terhadap model

Darwinian tentang *phyletic gradualism* yang mendominasi teori evolusi sepanjang abad ke-20 M.

Awalnya penggunaan ungkapan “*punctuated equilibrium*” menandai perubahan evolusioner (*evolutionary change*) yang berlangsung dalam periode “*stasis*” yang panjang, dimana berbagai species tetap tidak berubah, ditentukan waktunya (“*punctuated*”) oleh perubahan yang terjadi secara intens dalam periode-periode yang singkat. Manakalah species baru diperkenalkan, species yang lama menjadi punah dan species yang ada mengalami permutasi atau transformasi secara tiba-tiba.

Sementara pandangan tradisional tentang evolusi berpendapat bahwa ada *speciation process* yang gradual dan linier, dimana nenek moyang dan anak cucunya dihubungkan oleh sekuensi yang terjadi secara berkelanjutan, “*long sequence of continuous, insensibly graded intermediate forms*” (Eldredge dan Gould, 1972: 89), catatan tentang fosil mengungkapkan satu pola interupsi dalam proses tersebut.

Dengan mengedepankan ketidaksesuaian ini, maka konsep “*punctuated equilibrium*” ala Eldredge dan Gould menjadikan natural history (sejarah alamiah) sebagai salah satu dari periode panjang stabilitas dan gradualisme, yang dibatasi oleh episode perubahan intensif yang cepat dan transformatif. Pada tahun 1980-an, ide-ide serupa mendapat tempat dalam ilmu politik, dimana para analis mulai mengelaborasinya dalam upaya memberikan penjelasan yang lebih baik tentang dinamika perubahan dalam sistem pemerintahan Amerika. Dalam konteks ini, istilah *punctuated equilibrium* lalu merujuk pada “*sudden, transformative change in an otherwise stable system*”

(perubahan transformatif yang terjadi secara tiba-tiba dalam sistem yang stabil) (Kelly,1994: 165).

Teori *punctuated equilibrium* adalah milik Baumgartner dan Jones(1991, 1993). Menurut penilaian Sabatier (1999b), teori ini muncul sebagai aplikasi prinsip keseimbangan yang paling komprehensif, matang (*well-developed*), dan utama. Dengan banyak merujuk pada kasus kebijakan nuklir masyarakat sipil (*civilian nuclear policy*) sejak Perang Dunia II, Baumgartner dan Jones (1991, 1993) berpendapat bahwa, jika dipandang dalam jangka panjang, kebijakan publik di Amerika memperlihatkan periode-periode yang terbatas, yang dipisahkan oleh episode-episode perubahan yang terjadi secara dramatis, tidak tetap, dan dapat diprediksi.

Uraian tentang teori PE diatas disarikan dari Cohen-Vogel, L. dan McLendon, M. (2009), *New approaches to understanding federal involvement in education* yang dimuat dalam D. Plank, G. Sykes dan B. Schneider (Eds.), *Handbook of Education Policy Research. A Handbook for the American Educational Research Association*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Untuk lebih memahami teori ini, beberapa sumber sebagai berikut sangat membantu: Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. 1991; Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. 1993; Eldredge, N., & Gould, S. J. 1972; dan True, J. L., Jones, B. D., & Baumgartner, F. R. 1999. Aplikasi teori PE dalam studi politik pendidikan dapat dilihat pada beberapa sumber sebagai berikut: True, J. L. 2000; McLendon, M., & Cohen-Vogel, L. 2008; Kelly, S. Q. 1994; Orr-Bement, D. M. 2002, November 21; Robinson, S. E. 2004; Sims, C. H., & Miskel, C. G. 2001, March; dan Sims, C. H., & Miskel, C. G. 2003.

## *Urban Regime Theory dan Community Based Organizations (CBOs)*

Pengenalan teori urban rejim (UR) atau rezim kota dan *community based organizations* (CBOs) atau organisasi berbasis komunitas sebagai salah satu kerangka konseptual dalam kajian politik pendidikan dilakukan oleh Diosdado G. Gica. Oleh para penulis, teori ini sering disebut dengan beberapa nama lain, seperti *urban regime theory application, contingency theory, government and governance, initiative implementation, community based organizations*.

Seperti teori *contingency*, teori urban rezim menggabungkan semua faktor kontekstual dari situasi yang ada. Dengan demikian maka rezim urban atau teori *contingency* tidak terlalu terfokus pada para anggota organisasi atau koalisi, tetapi pada bagaimana variabel-variabel situasional berdampak terhadap hubungan para anggota tersebut. Dalam karyanya, *Urban Regime Theory and the Reform of Public Schools: Governance, Power, and Leadership*, Shipp (2008) berpendapat bahwa rezim dibentuk oleh konteks politik, ekonomi, dan budaya. Dalam karyanya tersebut secara panjang lebar dia menggambarkan kaitan antara kelompok-kelompok eksternal dan herarki jabatan/birokrasi yang dipilih, antara kekuasaan struktural dan kekuasaan posisional, dan pada akhirnya antara para pemimpin formal dan calon-calon pemimpin.

Tidak ada entitas publik yang memiliki semua sumber daya untuk mencapai tujuannya, khususnya dalam pendidikan dimana dana dan dukungan terbatas. Kolaborasi adalah kunci, khususnya kolaborasi antar sektor yang ada di luar pemerintahan. Pemerintah kota harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok kepentingan sipil lainnya untuk membangun



kelangsungannya. Dalam penerapan teori rezim urban pada YMCA, salah satu dari Community-Based Organizations (CBO) yang ada di kota New York, dapat disimpulkan bahwa satu organisasi harus melakukan tiga hal. *Pertama*, membangun kepercayaan (trust) dengan partner komunitas. *Kedua*, memahami komunitasnya dan kebutuhan mereka, serta mengembangkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. *Ketiga*, mempersiapkan perubahan transformasional organisasi dengan mengembangkan standarisasi.

Dapat juga disimpulkan dari kasus YMCA bahwa kemampuan organisasi ini untuk memperbaiki kehidupan para pendatang baru dan imigran tidak hanya dengan melayani kebutuhan mendesak para anggota komunitas yang baru, tetapi juga kebutuhan komunitas yang menerima (*the receiving community*) mereka serta komunitas yang lebih luas (*extended communities*).

Kemampuan ini sangat penting bagi definisi teori rezim urban, karena di dalamnya dipertimbangkan hubungan antara berbagai organisasi, koalisi-koalisi mereka, dan komunitas secara luas, yaitu faktor-faktor terkait yang menentukan stabilitas rezim. Pada akhirnya stabilitas ini ditentukan oleh kemampuannya untuk dapat mengimplementasikan reformasi kebijakan yang mengintegrasikan para pendatang baru dan imigran ke dalam organisasi, partner-partnernya, dan komunitas secara luas.

Berbagai pembahasan tentang teori rezim urban dapat dilihat pada beberapa sumber-sumber sebagai berikut: Avolio, B. J. 2007; Burns, P. 2003; Gica, D. G. 2009; Goodson, J. R., McGee, G. W., Cashman, J. F. 1989, December; Mossberger, K., Stoker,

G. 2001; Northouse, P. G. 2007; Rejai, M., Phillips, K. 2004; Shippy, D. 2008; Sims, H. P., Faraj, S., Yun, S. 2009; Souza, R., Voss, A. C. 2008; Stoker, G. 1998; dan Vroom, V.H., Jago, A.G. 2007, January.

### **Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Penggunaan teori pemangku kepentingan (PK) dalam kajian politik pendidikan dipromosikan oleh Alexander Ott dan dikembangkan oleh Freeman. Menurut Freeman (1984), dalam arti luas Pemangku Kepentingan (PK) adalah “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an organization’s purpose*” (setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan satu organisasi).

Menurut definisi Freeman (1984), teori PK adalah “*an approach to organizational management and governance that emphasizes the importance of considering organizational stakeholders when making leadership decisions*” (satu pendekatan terhadap manajemen dan tata pamong organisasi yang menekankan pentingnya mempertimbangkan para pemangku kepentingan organisasi ketika para pimpinan membuat keputusan).

Menurut Phillips, Freeman, & Wicks (2003), teori PK secara eksplisit membuat klaim moral atau etika keorganisasian, dengan mendorong organisasi-organisasikorporasi atau pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, untuk memperhatikan pihak-pihak yang terpengaruh oleh tindakan-tindakan keorganisasian.

Namun demikian, menurut Freeman, teori PK lebih dari sekedar panggilan terhadap etika keorganisasian, karena memperhatikan para pemangku kepentingan sangat esensial bagi efektifitas manajemen strategik dalam dunia yang semakin kompleks, yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok dan individu yang berpengaruh dan terpengaruh oleh tindakan-tindakan keorganisasian.

Isu utama dalam manajemen strategis PK adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan para PK ketika memutuskan distribusi output organisasi. Walaupun tidak memberikan arahan yang jelas tentang isu ini, teori PK memberikan beberapa alat. Phillips (2003), misalnya, membuat perbedaan yang jelas antara apa yang dia sebut PK “*normative*”, mereka yang menjadi sasaran kewajiban moral, dan PK “*derivative*”, yaitu kelompok atau individu lain yang wajib diperhatikan atas dasar kemampuan mereka mempengaruhi organisasi. Distingsi ini akan membantu jika mempertimbangkan klaim-klaim yang saling bertentangan dari PK tentang output organisasi.

Selain terfokus pada distribusi output organisasi, teori PK memperhatikan proses organisasi. Apa yang diterima oleh kelompok PK dari organisasi sama pentingnya dengan proses yang melahirkan keputusan-keputusan organisasi yang penting (Phillips, Freeman, & Wicks, 2003). Misalnya, apakah para PK utama memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, apakah mereka dibekali dengan informasi penting yang terkait dengan proses pengambilan keputusan, dan apakah mereka menilai proses pengambilan keputusan berlangsung secara fair? Walaupun secara inheren output organisasi adalah *a zero-sum game* (hasil yang diperoleh oleh satu kelompok adalah kehilangan bagi kelompok lainnya), suara dalam pengambilan

keputusan tidak terbatas pada cara tersebut. Semakin banyak suara dan informasi yang diberikan pada PK, maka akan semakin fair proses pengambilan keputusan dalam pandangan mereka (Phillips, Freeman, & Wicks).

Teori PK dapat dipelajari lebih lanjut melalui beberapa sumber bacaan sebagai berikut: Ehrensals, P. A. L., & First, P. F. (2008); Freeman, R. E. (1984); Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983); Phillips, R. (2003); dan Phillips, R., Freeman, R. E., & Wicks, A. C. (2003).

Aplikasi teori PK dalam studi politik pendidikan dapat dilihat pada sumber-sumber bacaan sebagai berikut: Gibbs, P., Zopiatis, A., & Iacovidou, M. (2009); Gordon, M. F., & Louis, K. S. (2009); Hauser, G. M., Choate, K., & Thomas, T. P. (2009); Powell, B. (2008); Ruch-Ross, H. S., Mason, M., William, D., & Cartland, J. (2008); dan Tincher-Ladner, L. (2009).

### ***Teori Jalan Keluar, Suara, dan Kesetiaan (Exit, Voice, and Loyalty)***

Pemanfaatan teori *Exit, Voice, and Loyalty* (EVL) untuk kajian politik pendidikan juga diperkenalkan oleh Alexander Ott. Menurut Hirschman (1970), semua organisasi, apakah organisasi ekonomi, politik, atau sosial, cenderung mengalami pembusukan. Individu-individu yang mengelola organisasi seperti korporasi, partai politik, dan sekolah dapat saja salah (*fallible*) dan keliru dalam keputusan dan perilaku mereka. Kesalahan-kesalahan ini menyebabkan penurunan kualitas pelayanan organisasi pada para pelanggan, anggota, atau siswa/mahasiswa.

Walaupun kelalaian manusia (human error) dan penurunan mutu tidak bisa dihindari, kata Hirschman, satu organisasi bisa memperbaiki kesalahan, agar dapat mencegah dan bahkan memulihkan kualitas. Hirschman (1970) fokus pada dua mekanisme feedback yang utama-*exit* dan *voice*-yang bisa menginformasikan satu organisasi tentang kesalahan-kesalahannya, sehingga memberi kesempatan pada organisasi tersebut untuk memperbaiki perilakunya. *Exit* terjadi manakalah individu-individu mengundurkan diri dari satu hubungan, seperti ketika seorang pelanggan memutuskan untuk tidak membeli produk dari korporasi tertentu, seorang pemilih membatalkan afiliasinya dengan satu partai politik, atau orang tua menarik anaknya dari satu sekolah. *Voice* terjadi manakalah individu-individu memilih untuk melakukan komplain, protes, agitasi, atau sebaliknya menyuarakan ketidakpuasan mereka. Loyalty adalah faktor ketiga yang berinteraksi dengan exit dan voice, berpotensi untuk mempengaruhi kekuatan masing-masing sebagai mekanisme *feedback* (umpan balik).

Pembahasan tentang teori EVL banyak ditemukan dalam sumber-sumber sebagai berikut: Barry, B. (1974); Birch, A. H. (1975); Clark, W. R., Golder, M., & Golder, S. (2006); Dowding, K., John, P., Mergoupis, T., & Vugt, M. (2000); Hirschman, A. O. (1970); Hirschman, A. O. (1986); dan Laver, M. (1976).

Aplikasi teori EVL dalam studi politik pendidikan dapat dilihat pada beberapa sumber sebagai berikut: Elis, R. (2006); Garth-McCullough, R. (2007); Healy, M. (2007); Labaree, D. F. (2000); dan Wilson, D. (2009).

## **Teori Marxis terkait dengan Persatuan Guru (*Marxist Theory Associated with Teacher Unionism*)**

Penggunaan Marxist Theory (MT) dalam kajian politik pendidikan dipromosikan oleh Darrin Porcher. Pada tahun 1848, Karl Marx dan Friedrich Engles bekerjasama untuk melahirkan *Das Kapital*, yang menggambarkan pertarungan antara kaum borjuis dan proletar dalam masyarakat. Marxisme adalah filsafat politik dan pandangan ekonomi berdasarkan pada interpretasi materialis tentang sejarah dan perubahan sosial. Marxisme melahirkan semangat bersatu (*unionization*) berdasarkan ketakutan, dalam kaitannya dengan *bargaining* (perundingan) antara pihak manajemen dan para pekerja. Pendidikan adalah bagian dari perubahan sosial. Dengan demikian maka pertarungan masyarakat juga diserap oleh para pendidik.

Marxisme menyatakan bahwa konflik antara para pekerja dan pihak manajemen bersifat konstan dan bisa menyulut terjadinya revolusi. Marxisme tidak mampu meramal masa depan dan tidak bisa memprediksi penerimaan *collective bargaining* (perundingan kolektif). Perundingan kolektif memberikan proteksi yang seimbang bagi manajemen dan para pekerja. Dengan demikian maka aspek revolusi menghilang dari para pekerja. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan negara Rusia yang baru tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan Marxisme. Bangsa-bangsa lain di dunia juga mengikutinya. Sejak saat itu, secara umum Marxisme atau Komunisme radikal tidak lagi menjadi kekuatan politik utama dalam politik global, dan sebagian besar digantikan oleh sosialisme demokratik dengan versi yang lebih moderat atau, lebih umum, oleh kapitalisme neoliberal. Marxisme juga telah terlibat dalam perkembangan gerakan

lingkungan hidup. Penggabungan Marxisme, sosialisme, ekologidan environmentalismetelah berhasil dan melahirkan apa yang dikenal dengan nama *Eco-socialism*.

Secara tradisional, guru-guru takut dieksploitasi oleh pihak manajemen dan para pemimpin eksekutif dalam bidang pendidikan. Bagian eksekutif yang menangani pendidikan khawatir terjadinya stagnasi produksi oleh fakultas. Guru-guru mengadopsi persatuan (*unionism*) dan perundingan kolektif karena mereka mengalami tekanan ekonomi yang menyebabkan sekolah memangkas dana, dan guru-guru ingin mencegah terjadinya pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Gerakan persatuan dalam bidang pendidikan terus meluas, dan persatuan guru telah menjadi entitas yang kuat dan berpengaruh dalam bidang pendidikan. Gerakan persatuan guru lebih didedikasikan untuk perundingan kolektif, ketimbang untuk revolusi untuk mencapai tujuan-tujuan para guru yang menjadi anggotanya.

Relevansi teori marxis dan persatuan guru terhadap kajian politik pendidikan banyak dibahas dalam sumber-sumber sebagai berikut: Closson, D. (2006); Conley, D.T. (Ed.). (2003); Cooper, B.S. (1998); Cooper, B.S., & Liotta, M. (2001); Cooper, B. S., Cibulka, J., & Fusarelli, B. (2008); Cooper, B. S., & Sureau, J. (2008); Cresswell, A. S. (1993); Etzioni, A. (1969); Fine, S. (1969); Fusarelli, L. D., & Cooper, B. S. (1999); Kelso, L. (2007); Keppler, J. (1994); Kerchner, C.T., & Cooper, B.S. (2003); Marx, K. (1887); McLellan, D. (2007); dan Shanker, A.L. (1976).

### ***Teori Feminis (Gender Theory)***

Penggunaan teori feminis sebagai salah satu kerangka kajian politik pendidikan dipromosikan oleh Rakeda A. Leaks. Dalam

berbagai sumber, teori ini juga sering disebut dengan nama Teori Gender (*Gender Theory*).

Gender dalam pendidikan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Teori feminis memberikan wawasan untuk memahami sejarah ini. Teori feminis bertujuan untuk (1) mendekonstruksi asumsi-asumsi yang salah tentang wanita, (2) mengedepankan kontribusi-kontribusi penting dari kaum wanita, dan (3) membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persamaan dan perbedaan antara pria dan wanita (Marshall & André-Bechely2008). Teori feminis membahas ketidaksetaraan gender yang inheren dalam praktik dan struktur kekuasaan Patriarchal yang secara sistematis merugikan kaum wanita dan membatasi pilihan bagi pria dan wanita.

Praktik dan struktur kekuasaan Patriarchal mempertahankan tatanan dan peran gender yang dikonstruksi secara sosial. Secara tradisional, norma-norma kultural telah mendorong praktik pendidikan yang berbeda bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Praktik-praktik seperti itu telah membatasi pilihan pendidikan dan karir bagi anak perempuan. Teori feminis menolak stereotype berdasarkan sex dan perbedaan berdasarkan gender di sekolah. Menyatukan teori feminis ke dalam riset dan analisis kebijakan akan menyingkap ketidaksetaraan gender seperti itu. Teori feminis menawarkan kajian alternatif tentang ilmu dan analisis dari perspektif wanita atau perspektif netral gender untuk lebih memahami ketidaksetaraan gender.

Relevansi dan pendekatan penerapan teori feminis atau teori gender dalam kajian politik pendidikan dapat dibaca pada sumber-sumber sebagai berikut: AAUW Educational Foundation(1998); Belenky, M.F., Clincy, B., Goldberger, N., & Tarule, J. (1986); Bem. S. (1993); Code, L. (1991); Collins, P.H.



(1990); Collins, P.H. (1991); Connell, R. W. (1987); David, M. E. (1993); Gilligan, C. (1982); Harding, S. (Ed.). (1987); Hull, G.T., Scott, P.B., & Smith, B. (Eds.)(1982); Kalbfleisch, P. (Ed.). (1995); Lloyd, E. (1995); Lugones, M. & Spelman, E. (1983); Marshall, C., & André-Bechely, L. (2008); Fusarelli (Eds.); Spelman, E. (1988); Thorne, B. (1999); Tong, R. (1989); Weis, L. & Fine, M. (Eds.) (1993); dan Wing, A.K. (Ed.)(1997)✍





## POLITIK PENDIDIKAN DAN MUTU PENDIDIKAN

*Negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya baik, kinerja pendidikannya akan baik (Paulo Freire)*

### **ManfaatKajian Politik Pendidikan**

**S**EBAGAI BIDANG KAJIAN yang memiliki sejarah, tradisi, dan kerangka konseptual tersendiri, kajian politik pendidikan dapat memberi manfaat yang tidak bisa diperoleh dari kajian kependidikan lain. Sesuai namanya, kajian politik pendidikan mengintegrasikan tradisi kajian ilmu politik dan tradisi kajian ilmu pendidikan untuk melihat berbagai persoalan yang terkait dengan hubungan dinamis antara politik dan pendidikan.

Kajian ini berkembang bersama tumbuhnya kesadaran empiris bahwa politik dan pendidikan adalah dua domain publik yang satu sama lain selalu saling melihat, saling membutuhkan, saling mengajak, saling mempengaruhi, dan bisa juga saling menarik atau mendorong. Keduanya tidak pernah berpisah dan tidak mungkin dipisahkan. Di semua masyarakat atau negara, setiap gejala politik berkaitan dengan gejala pendidikan dan sebaliknya, setiap gejala pendidikan berkaitan dengan gejala politik. Kajian politik pendidikan diperlukan untuk dapat

mengetahui dinamika, karakteristik, dan implikasi dari keterkaitan antara gejala politik dan gejala pendidikan.

Dengan perspektif ilmu pendidikan saja, kita akan melihat berbagai persoalan pendidikan sebagai entitas tersendiri yang tidak punya kaitan dengan dunia luar. Pandangan ini melihat lembaga-lembaga pendidikan sebagai entitas yang terisolasi atau terpisah dari entitas-entitas lain yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini akan melihat persoalan-persoalan pendidikan sebagai persoalan tersendiri dan terpisah, yang tidak memiliki konteks apapun dengan lingkungannya. Dengan pandangan seperti ini kita hanya dapat melihat dan memahami persoalan-persoalan pendidikan dalam konteks input, proses, dan output pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, tanpa melihatnya dalam konteks sosial dan politik.

Tanpa perspektif ilmu politik, berbagai persoalan pendidikan hanya akan dilihat atau dikaitkan dengan mutu dan relevansi input, proses, dan output pendidikan. Misalnya, penurunan mutu pendidikan dilihat sebagai akibat dari rendahnya tingkat kecerdasan peserta didik, rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, terbatasnya sarana dan prasarana, dan atau kurikulum yang kurang relevan. Padahal, akar utama dari berbagai persoalan yang mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan seringkali tidak berada di lingkungan sekolah, tetapi berada di pusat-pusat kekuasaan politik (*education authorities*) atau pusat perumusan kebijakan (*policy making*), seperti kantor bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan kajian politik pendidikan, maka berbagai persoalan kependidikan akan diposisikan sebagai bagian integral dari

persoalan-persoalan yang ada di dunia politik. Dengan cara inilah kajian politik pendidikan dapat membantu kita melihat, memahami, dan menjelaskan aspek-aspek politik dari berbagai persoalan pendidikan. Kajian politik pendidikan membantu kita melihat, memahami, dan menjelaskan aspek-aspek kependidikan dari berbagai persoalan politik dan sebaliknya, aspek-aspek politik dari berbagai persoalan pendidikan.

Dengan manfaat tersebut maka kajian politik pendidikan dapat membantu para praktisi, ilmuwan, dan pemegang otoritas pendidikan untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang lebih luas dan mendalam tentang berbagai persoalan pendidikan dalam konteks hubungan dinamis antara dunia pendidikan dan dunia politik. Kajian politik pendidikan membuktikan bahwa berbagai persoalan yang ada dalam berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kualitas input, proses, dan output, tetapi lebih banyak berkaitan dengan karakteristik atau kultur politik pendidikan yang mengitarinya.

Bagi para pembuat kebijakan (*decision makers*) atau legislator, kajian politik pendidikan mengingatkan bahwa kecerobohan dan kesalahan sekecil apapun dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan dapat membawa dampak negatif yang sangat serius, meluas, dan destruktif terhadap dunia pendidikan. Mereka akan menyadari bahwa sumber utama berbagai persoalan yang melanda sistem pendidikan bukanlah kurangnya dana, tetapi karena kebijakan atau sistem pengelolaan yang salah, yang diakibatkan oleh kultur politik pendidikan yang tidak baik.

## Relevansi Politik Pendidikan dan Mutu Pendidikan

Bagian paling esensial dari politik pendidikan adalah kekuatan yang mengendalikan proses penyelenggaraan pendidikan, bagaimana pengendalian itu dilaksanakan, dan ke arah mana kekuatan tersebut akan membawa agenda-agenda pengembangan pendidikan. Menurut Agus Suwignyo (2008), politik pendidikan adalah penggunaan kekuasaan untuk mendesak kebijakan pendidikan dengan cara-cara yang keras (dengan kekuatan fisik) dan lunak (dengan taktik dan strategi).

Adapun menurut Riri Satria (2009), politik pendidikan adalah skenario untuk membawa pendidikan ke arah tertentu. Apapun pengertiannya, Paulo Freire, dalam bukunya *The Politics of Education*, mengatakan bahwa politik pendidikan di satu negara sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan di negara tersebut, dan karakteristik politik pendidikan di satu negara menentukan karakteristik perkembangan pendidikan di negara tersebut. Freire menyimpulkan dalam buku tersebut, bahwa “negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya baik, kinerja pendidikannya akan baik.”

Politik pendidikan dikatakan baik manakala para penguasa memiliki visi pengembangan pendidikan yang jelas, realistis, dan terukur, memiliki kemauan politik (*political will*) untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, dan dengan penuh komitmen berupaya memanfaatkan dan atau menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mendorong dan memfasilitasi kemajuan pendidikan. Mereka mendukung, mensubsidi, mengapresiasi, dan mendanai berbagai aktivitas kependidikan semata untuk memajukan pendidikan. Mereka

memiliki tekad dan komitmen yang tinggi serta kebijakan yang riil untuk mendorong kemajuan pendidikan.

Mereka tidak menggunakan isu-isu kependidikan sebagai komoditi politik dan tidak pernah menomorduakan pendidikan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Mereka selalu menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda atau prioritas utama dalam menjalankan kekuasaannya. Begitu berkuasa, mereka secara terus menerus dan sekuat tenaga menggunakan kekuasaannya untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan, baik ditagih maupun tidak ditagih oleh rakyat. Mereka menempatkan sektor pendidikan sebagai bagian inti dari perencanaan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mereka memberikan otonomi dan ruang gerak seluas-luasnya kepada para penyelenggara pendidikan untuk melakukan berbagai kreasi dan improvisasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Mereka memanfaatkan kekuasaan untuk pendidikan, bukan sebaliknya, memanfaatkan pendidikan untuk tujuan kekuasaan. Salah satu contoh politik pendidikan yang baik diberikan oleh Tony Blair sewaktu menjadi Perdana Menteri Inggris.

Ketika seorang anggota parlemen menanyakan prioritas beliau sebagai seorang perdana menteri Inggris, Tony Blair sampai tiga kali menjawab bahwa prioritas utamanya adalah : "Education." Meskipun terkesan agak retorik, jawaban tersebut merefleksikan adanya visi pendidikan yang jelas dan kemauan politik yang sangat kuat untuk memajukan dunia pendidikan. Karena diucapkan oleh sosok yang kuat dan berpengaruh, maka visi dan kemauan politik tersebut secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi dan menginspirasi semua jajaran pemerintahan Tony Blair serta seluruh pihak yang peduli pada

pendidikan untuk lebih bersungguh-sungguh membangun sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Di atas semua itu, pernyataan Tony Blair dan pernyataan serupa dari tokoh-tokoh kuat dan berpengaruh lainnya dapat secara cepat menumbuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Kalau semua pemimpin di dunia memiliki visi pendidikan dan kemauan politik seperti Tony Blair, maka dimana-mana mutu pelayanan pendidikan akan cepat meningkat, karena terfasilitasi dengan baik, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan bermutu, yang mampu menjadi bagian dari pemecahan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat lingkungannya. Bukan sebaliknya, menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Politik pendidikan dapat dikatakan buruk apabila para penguasamenggunakan atau memanfaatkan isu-isu atau program-program pendidikan untuk mendapatkan, memperkuat, dan atau melanggengkan kekuasaannya. Mereka menjadikan isu-isu kependidikan sebagai komoditi politik dan menangani berbagai persoalan pendidikan dengan pendekatan dan pamrih politik. Isu-isu dan kegiatan kependidikan sering menjadi pelengkap retorika politik dan menjadi salah satu menu utama dalam kegiatan kampanye politik. Mereka tidak memiliki tekad dan komitmen yang nyata untuk memajukan sektor pendidikan. Kepedulian mereka pada pendidikan baru tampak ke permukaan apabila ada tuntutan atau desakan dari masyarakat. Mereka hanya bersikap reaktif dan menjalankan program-program kependidikan secara sporadis dan selektif mengumbar janji pendidikan untuk pencitraan politik. Mereka tidak memiliki rencana yang jelas dalam bidang pendidikan dan cenderung



memanfaatkan sektor pendidikan untuk mencapai berbagai tujuan politik jangka pendek.

Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia memperlihatkan bahwa bangsa yang dapat melakukan loncatan perubahan adalah bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik, dan sistem pendidikan yang baik hanya akan terwujud apabila ada lingkungan politik pendidikan yang baik. Bangsa Romawi pernah menguasai dunia karena mereka memiliki para kaisar yang sangat peduli terhadap pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para filosof diberi kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membangun lembaga-lembaga pendidikan. Mereka diberi otonomi dan sarana yang diperlukan untuk melahirkan warisan keilmuan yang luar biasa dan para pemikir yang melegenda, seperti Plato, Aristoteles, dan Sokrates. Meskipun telah berabad-abad meninggal dunia, pemikiran mereka masih menjadi rujukan utama di berbagai pusat akademik dunia.

Hanya dalam waktu lebih kurang 20 tahun Nabi Muhammad bersama para sahabatnya mampu mentransformasi jazirah Arab dari wilayah jahiliyah yang barbarian menjadi wilayah madani berperadaban tinggi. Mereka mendorong perubahan kehidupan sosial dan politik dengan mewajibkan kaum Muslimin mencari ilmu; "Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim" (HR. Ibnu Adi dan Baihaqi). Mereka yakin sepenuhnya dengan janji Allah bahwa iman dan ilmu adalah dua kekuatan fundamental yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Firman Allah: "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat." ( TQS al-Mujadalah, 58: 11).

Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah surut dan berhenti mendorong para pengikutnya untuk menuntut ilmu, menstransfer, dan mengembangkannya, karena mereka juga yakin sepenuhnya bahwa aktivitas menuntut ilmu adalah aktivitas yang sangat mulia. Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga." (HR. Muslim dan at-Turmudzi). Mereka menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah aktivitas tanpa henti, yang hanya bisa diakhiri oleh kematian: "Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat."

Rasulullah dan para sahabatnya juga menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk memfasilitasi berbagai kegiatan kependidikan dan mendukung aktivitas para ilmuwan. Meskipun berkuasa penuh, mereka tidak menggunakan aset publik untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi menggunakannya untuk memfasilitasi aktivitas kependidikan. Aset yang terkumpul di Baitul Mal, misalnya, tidak digunakan untuk berfoya-foya dan memperkaya diri, tetapi untuk membiayai berbagai aktivitas kependidikan. Mereka memberikan tempat dan apresiasi yang layak bagi para pendidik. Mereka menghimpun dan menyediakan dana secara tidak terbatas untuk pengadaan berbagai fasilitas kependidikan, seperti membangun madrasah, laboratorium, dan perpustakaan dan memberikan insentif pada para guru. Rasulullah menjadikan pelajaran baca tulis sebagai tebusan tawanan Badar. Beliau menugaskan Abdullah bin Said bin al Ash untuk mengajarkan tulis menulis di Madinah dan memberi mandat kepada Ubadah bin as-Shamit untuk mengajarkan tulis-menulis.

Kepedulian dan komitmen Rasulullah yang sangat tinggi terhadap kegiatan kependidikan dan keilmuan benar-benar

menjadi *uswah hasanah* bagi para sahabat dan pengikut beliau. Tatkala Khalifah Harun Al Rasyid (786-809) merebut Ankaradan Khalifah Al Ma'mun (814-833) meraih kemenangan atas Kaisar Romawi Timur bernama Michel II, kedua pemimpin Islam tersebut tidak menuntut ganti rugi peperangan, kecuali penyerahan manuskrip-manuskrip kuno. Khalifah Umar ibn al-Khaththab ra menugaskan tiga orang guru untuk mengajar baca-tulis kepada penduduk kota Madinah, dengan gaji yang dikeluarkan dari Baitul Mal. Saat itu, pada abad ke-7, gaji yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khatab kepada ketiga orang guru tersebut masing-masing sebesar 15 dinar setiap bulannya (1 dinar = 4,25 gram emas). Bandingkan berapa gaji yang diberikan pemerintah Indonesia untuk guru-guru pada abad ke-21 ini.

Pada masa Khalifah al-Makmun dari Bani Abbasiyah, berdiri lembaga ilmiah pertama di dunia yang dinamakan *Darul Hikmah*, pada waktu itu perpustakaan terbesar dan terlengkap di dunia. Lalu diikuti oleh lembaga ilmiah kedua, yaitu Lembaga Ilmiah *an-Nizhamiah* yang menjadi cikal bakal perkembangan sistem pendidikan madrasah di seluruh dunia. Pada tahun 640 Hijriyah, Khalifah al-Mustansir al-'Abasi mendirikan lembaga pendidikan bernama al-Mustansiriyah. Inilah lembaga pertama yang menjadi perintis adanya rumah sakit untuk mata kuliah kedokteran atau konsep *teaching hospital*.

Apa yang terjadi di semenanjung Arabia juga terjadi di benua Amerika. Pemerintah dan rakyat Amerika tidak pernah berhenti mendukung dan memfasilitasi lembaga-lembaga pendidikan di negara tersebut untuk semua jalur, jenis, dan jenjangnya. Para pemimpin mereka percaya bahwa pendidikan adalah kekuatan maha dahsyat yang sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan.

Salah seorang Senator terkenal, J. William Fulbright, menegaskan: "*Education is a slow moving but powerful force.*" Kalimat ini telah menginspirasi bangsa Amerika tentang arti strategis pendidikan bagi masa depan mereka. Pendidikan selalu menjadi instrumen utama dalam proses penataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dinamika politik dalam negeri, kinerja bidang pendidikan selalu menjadi tolok ukur utama akuntabilitas kinerja para pemimpin USA.

Dalam dinamika politik luar negeri, pendidikan telah menjadi salah satu instrumen diplomasi yang banyak digunakan oleh semua presiden Amerika. Telah berpuluh-puluh tahun Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Amerika Serikat bahu membahu menggunakan jalur pendidikan untuk memuluskan diplomasi politik dan ekonomi dengan banyak negara. Diplomasi tersebut dikemas dalam berbagai bentuk program kerjasama, seperti bantuan pendidikan, penyediaan beasiswa studi (*scholarship*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), kunjungan para sarjana (*visiting scholars*), kursus singkat (*short course*), dan bantuan mengajar (*teaching allowance*).

Para pemimpin Amerika memahami sepenuhnya bahwa pendidikan bukan untuk pendidikan itu sendiri, tetapi sebagai landasan untuk membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Salah satu Presiden Amerika, Thomas Jefferson, misalnya menegaskan arti penting pendidikan untuk membangun kesadaran hukum dan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Dalam kalimat Jefferson: "*There is a profound connection between the Bill of Rights-- the document embodying the rights of citizens--and education as the foundation which made democracy work and made the Bill of Rights work.*"

Pentingnya peran pendidikan dalam membangun nilai-nilai demokrasi ditegaskan juga oleh salah seorang penulis terkenal di Amerika Serikat, Benjamin R. Barber (1992). Menurut Barber, sekolah-sekolah di Amerika dibangun sebagai landasan bagi berkembangnya demokrasi di negara itu. Dalam kalimat Barber: *“the founding of the common school, the public school, in America was the foundation for an effective and successful democracy* (lihat bukunya *An Aristocracy of Every One*).

Untuk jenjang pendidikan yang sangat strategis, yaitu pendidikan tinggi, pemerintah dan rakyat Amerika selalu berupaya melahirkan yang terbaik, berapapun dana yang dibutuhkan. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi (*higher education institutions*) di Amerika Serikat adalah syurga bagi para sarjana dan peneliti, karena di sana mereka memiliki kebebasan akademik (*academic freedom*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), rekan kerja (*peer group*), sarana riset terbaik di dunia, dan sistem promosi karir dan insentif yang mengacu pada kualifikasi, kompetensi, dan performa berstandar internasional. Banyak akademisi dan peneliti dari berbagai negara di Asia dan Eropa yang belum merasa mencapai puncak karir jika belum berhasil menenbus persaingan karir dan karya di Amerika Serikat. Tidak mengherankan apabila lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan riset di Amerika menjadi tempat berkumpul para ilmuwan terbaik di dunia, menjadi home base bagi para peraih hadiah nobel, dan selalu mendominasi posisi 10 terbaik dalam berbagai versi ranking universitas terbaik di dunia.

Sebagai nenek moyang bangsa Amerika, bangsa-bangsa Eropa telah berhasil membangun tradisi akademik yang kuat sejak era revolusi pada abad ke-18 dan 19. Revolusi industri di

Jerman, Inggris, dan Prancis dilandasi, diawali, dan dipicu oleh terjadinya perubahan cara pandang (paradigma) keilmuan. Para ilmuwan dan pemimpin di negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat, terus bersinergi mendorong perkembangan tradisi akademik dan aktivitas riset ilmiah, sehingga telah banyak menghasilkan karya-karya keilmuan kelas dunia dan tetap menjadi kiblat perkembangan sains dan teknologi dunia. Selain berbagai pusat riset, basis utama perkembangan sains dan teknologi di negara-negara tersebut adalah lembaga-lembaga pendidikan tinggi kelas dunia yang dibangun atas dasar kesadaran dan komitmen tanpa batas dari para pemimpin dan ilmuwan.

Kesadaran dan komitmen tanpa batas yang dimiliki oleh para pemimpin di negara-negara tersebut terhadap pendidikan telah membuat negara mereka menjadi kiblat pendidikan dunia pada abad ke-21. World University Rankings 2010 yang diterbitkan oleh *Times Higher Education* memperlihatkan bahwa lima universitas terbaik di dunia ada di Amerika Serikat, yaitu Harvard University (Ranking 1), California Institute of Technology (Ranking 2), Massachusetts Institute of Technology (Ranking 3), Stanford University (Ranking 4), dan Princeton University (Ranking 5), diikuti oleh perguruan tinggi yang ada di Eropa, yaitu University of Cambridge (Ranking 6) dan University of Oxford (Ranking 7). Hingga ranking ke-20 semuanya diduduki oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Eropa. (*CampusAsia* October-December 2010: 54). Perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa Barat terus mendominasi prestasi dalam bidang transfer ilmu pengetahuan dan riset. Merekalah yang menjadi rumah (*base*) bagi profesor-profesor terbaik di dunia, merekalah

yang menerbitkan jurnal ilmiah bermutu tinggi yang menjadi rujukan para ilmuwan di seluruh dunia, merekalah yang melahirkan para pemenang hadiah nobel, dan merekalah yang menjadi tuan rumah (*host*) bagi ribuan mahasiswa dan ilmuwan internasional yang ingin meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik mereka.

Hubungan erat antara kesadaran dan komitmen para penguasa terhadap pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan juga terjadi di benua Asia. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi terjadi melalui penerapan politik pendidikan yang baik. Di Jepang, revolusi Meiji telah melambungkan bangsa Jepang dari bangsa yang hancur lebur menjadi abu oleh bom atom, menjadi salah satu super power sains dan ekonomi dunia. Para penguasa negara Sakura tidak larut dalam keterpurukan, tetapi dengan sangat cepat menggunakan pengaruh dan kekuasaan mereka untuk membangun kembali lembaga-lembaga pendidikan. Mereka mengirim para pemuda Jepang sebanyak-banyaknya untuk belajar di negara-negara Eropa dan Amerika dengan menggunakan dana negara, menerbitkan dan menterjemahkan buku-buku terbaik dalam bidang sains dan teknologi ke dalam bahasa Jepang, serta memfasilitasi para ilmuwan dan atau peneliti dengan perpustakaan dan laboratorium terbaik di dunia. Pada tahun 2010, dua perguruan tinggi Jepang masuk dalam daftar 100 perguruan tinggi terbaik didunia menurut versi *Times Higher Education*, yaitu University of Tokyo (Ranking 26) dan Kyoto University (Ranking 57) (*Campus Asia*, October-December 2010: 54).

Di Korea Selatan, dari generasi ke generasi para pemimpin di negara ginseng tersebut mempergunakan kekuasaannya untuk mempercepat dan mengoptimalkan pendidikan, khususnya

pendidikan tinggi, bagi warga negaranya, sehingga pada tahun 2009 tercatat 91% penduduk usia 19 hingga 23 tahun di negara tersebut telah mengenyam pendidikan tinggi. Tidaklah berlebihan apabila sebagian pengamat pendidikan mengatakan bahwa penduduk Korea Selatan mengalami surplus pendidikan (*over educated*). Bandingkan dengan Indonesia yang pada tahun yang sama baru bisa menempatkan 22.55% dari penduduk usia 19 hingga 23 tahun di perguruan tinggi. Komitmen tinggi para penguasa terhadap pembangunan pendidikan tinggitelah berhasil menempatkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Korea Selatan sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lain di dunia. Pada tahun 2010, empat perguruan tinggi di Korea Selatan masuk dalam daftar 27 perguruan tinggi terbaik di Asia, yaitu Pohang University of Science and Technology (Ranking 3), Korea advanced Institute of Science and Technology (Ranking 10), Seoul National University (Ranking 12), dan Yonsei University (Ranking 26) (*Campus Asia*, October-December 2010: 60).

Di China, perubahan kualitas hidup masyarakat terjadi secara sangat cepat setelah berpuluh-puluh tahun para penguasa di negeri tersebut memaksimalkan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi untuk memperkuat sektor pendidikan. Sejak awal tahun 1980-an pemerintah China menaikkan anggaran pendidikan secara signifikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas perguruan tinggi, dan memanggil pulang ribuan profesor dan doktor asal China yang bekerja di perguruan tinggi dan pusat-pusat riset di negara-negara Eropa dan Amerika, untuk mengelola pusat-pusat riset dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) perguruan tinggi di negara asal mereka. Praktik politik pendidikan inilah yang telah menghantarkan China



menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan menempatkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di negara tersebut pada daftar perguruan tinggi terbaik di dunia. Kemajuan pendidikan tinggi di China bisa dilihat dari dua indikator, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan ranking World Class Universities. Pada tahun 2010 APK pendidikan tinggi China sudah mencapai 21 %. Dengan jumlah penduduk lebih dari satu miliar, APK tersebut adalah sebuah pencapaian luar biasa. Pada tahun yang sama tiga perguruan tinggi di China masuk dalam daftar 100 universitas terbaik di dunia menurut versi *Times Higher Education*, yaitu Peking University (Ranking 37), University of Science and Technology of China (Ranking 49), dan Tsinghua University (Ranking 58) (*Campus Asia*, October-December 2010: 54).

Di India, perbaikan ekonomi dan kemajuan sains dan teknologi dicapai setelah berpuluh-puluh tahun para penguasa di negeri itu mengoptimalkan sumber daya politik untuk memfasilitasi lembaga-lembaga pendidikan dengan sarana bermutu, mengirim dan memberi kesempatan seluas-luasnya pada para pemuda-pemuda untuk melanjutkan studi ke negara-negara maju, dan seperti pemerintah China, melakukan *brain gain* dengan memulangkan ribuan doktor dan profesor asal India yang bekerja di negara-negara Eropa dan Amerika untuk pulang, mengabdikan diri di tanah air mereka. Pendidikan bermutu dan para ilmuwan berdedikasi tinggi telah menghantarkan India menjadi salah satu pusat rekayasa sains komputer di dunia, dengan Bangalore sebagai pusatnya. Meskipun belum cukup berhasil menempatkan perguruan tinggi mereka pada daftar terbaik dunia, pemerintah India telah berhasil memesonakan dunia internasional dengan beberapa pencapaian fantastis dalam

bidang teknologi, khususnya teknologi komputer. Saat ini, reputasi Bangalore sebagai pusat rekayasa software dan teknologi komputer sudah dapat mengimbangi reputasi Silicon Valey di California, Amerika Serikat.

Negara-negara di benua Amerika, Eropa, dan Asia yang telah diuraikan di atas mampu memacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan politik pendidikan yang baik, yang memberikan lingkungan yang kondusif bagi bekerjanya sistem pendidikan mereka. Para penguasa di negera-negara tersebut menempatkan pendidikan sebagai sektor kehidupan publik yang sangat utama dan tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik praktis yang bersifat sesaat. Demi kemajuan bangsa, mereka tidak “mengobok-obok” dunia pendidikan untuk mencapai tujuan politik. Sebaliknya, mereka secara sadar, terencana, dan sistematis, menggunakan kekuasaan politik untuk mengefektifkan kinerja sistem pendidikan nasional mereka. Para pemimpin atau penguasa di negara-negara tersebut tidak menggunakan pendidikan sebagai alat untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan, tetapi menggunakan kekuasaan untuk mendorong kemajuan sektor pendidikan.

### **Politik Pendidikan di Indonesia**

Politik pendidikan atau dalam bahasa Inggris disebut *the politics of education*, adalah bidang kajian yang relatif baru di Indonesia. Walaupun sudah mulai berkembang di negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia sejak awal tahun 1960-an, di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bidang kajian ini relatif belum banyak berkembang. Perkembangan kajian ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sistem politik,

perkembangan pendekatan penelitian, minat keilmuan, dan kultur akademik.

Perkembangan sistem politik sangat menentukan perkembangan kajian politik pendidikan, karena karakteristik sistem politik di satu negara menentukan ketersediaan informasi dan perkembangan wacana politik pendidikan di negara tersebut. Karena banyak menyentuh dimensi-dimensi politik dari berbagai persoalan pendidikan dan dimensi-dimensi pendidikan dari berbagai persoalan politik, maka perkembangan studi politik pendidikan banyak ditentukan oleh karakteristik sistem politik dan kepekaan politik para ilmuan pendidikan serta kepekaan pendidikan para ilmuan politik di satu negara. Studi politik pendidikan cenderung berkembang pesat dalam sistem politik yang lebih terbuka, dimana berbagai kebijakan dan pelayanan publik dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara terbuka di ruang publik.

Perkembangan pendekatan penelitian dalam disiplin ilmu politik dan ilmu pendidikan juga sangat menentukan perkembangan kajian politik pendidikan di satu negara. Kajian politik pendidikan adalah kajian antar disiplin (*interdisciplinary study*) yang memadu disiplin ilmu politik dan ilmu pendidikan. Kajian politik pendidikan hanya akan berkembang apabila para ilmuan politik di satu negara memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan kependidikan yang terkait dengan dunia politik dan sebaliknya, jika para ilmuan pendidikan di negara tersebut memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan politik yang terkait dengan dunia pendidikan. Minat keilmuan juga sangat menentukan. Kajian politik pendidikan di satu negara tidak akan berkembang apabila para ilmuan politik di negara tersebut tidak berminat terhadap dunia pendidikan dan

sebaliknya, jika para ilmuwan pendidikan di negara tersebut tidak berminat terhadap dunia politik.

Kultur akademik sangat fundamental bagi perkembangan kajian politik pendidikan. Kajian ini akan berkembang pesat dalam kultur akademik yang kritis dan memiliki tingkat otonomi atau independensi tinggi. Semakin kritis dan otonom kultur akademik di satu negara atau lingkungan sivitas akademik, maka akan semakin cepat dan pesat perkembangan kajian politik pendidikan di sana.

Sebagaimana di negara asalnya, Amerika Serikat, perkembangan kajian politik pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, beriringan dengan perkembangan sistem politik, perkembangan pendekatan penelitian, minat keilmuan, dan kultur akademik. Di Indonesia, kajian politik pendidikan mulai mendapat tempat dan mengalami perkembangan cukup signifikan seiring dengan terjadinya reformasi politik pada akhir tahun 2000. Selain telah mendorong berkembangnya sistem politik yang lebih terbuka, gerakan reformasi juga telah mendorong berkembangnya wacana politik pendidikan yang lebih terbuka dan kritis. Seiring dengan sistem politik yang lebih terbuka, otonomi keilmuan dan budaya akademik juga semakin dinamis, kritis, dan terbuka, mengiringi wacana politik pendidikan yang semakin mengemuka. Semua ini memberikan lingkungan yang nyaman bagi para ilmuwan politik untuk melihat secara kritis berbagai aspek pelayanan publik, termasuk pendidikan dan pada saat bersamaan, memberikan lingkungan yang nyaman bagi para ilmuwan pendidikan untuk melihat berbagai persoalan pendidikan dengan spektrum yang lebih luas. Dalam sistem politik yang terbuka, isu-isu kependidikan dan isu-isu politik berkait kelindan dalam wacana

publik, sehingga terintegrasi menjadi satu paket persoalan yang tak terpisahkan. Lingkungan politik yang terbuka membuat kedua jenis isu tersebut selalu beriringan dan menjadi

Berbagai kajian pendidikan tidak lagi terbatas pada isu-isu yang ada dalam lingkup “pagar sekolah”, tetapi telah menyentuh spektrum berbagai permasalahan pendidikan yang lebih luas dan bervariasi dalam ranah publik, termasuk hubungan dinamis antara pendidikan dan politik. Isu-isu sehari-hari yang muncul di sekolah tidak lagi hanya dilihat dalam konteks input, proses, dan output, tetapi juga dilihat dalam konteks kebutuhan, kepentingan, dan perubahan politik. Misalnya, mutu pelayanan pendidikan tidak hanya dikaitkan dengan ketersediaan SDM dan kelengkapan sarana, tetapi juga dikaitkan dengan komitmen dan kemauan politik para penguasa untuk memajukan pendidikan. Simpul-simpul persoalan pendidikan tidak hanya dilihat dalam lingkup “pagar sekolah”, tetapi juga dilihat dalam lingkup sistem pembuatan kebijakan (*policy making*) dan pola pengambilan keputusan (*decision making*) di sektor pendidikan.

Dengan spektrum kajian yang lebih luas, maka berbagai persoalan pendidikan tidak lagi hanya dikaitkan dengan relevansi kurikulum, dukungan sarana, ketepatan metode pembelajaran, mutu calon siswa/mahasiswa, mutu guru/dosen, dan mutu administrasi/manajemen, tetapi juga dikaitkan dengan pola pelayanan publik (*public service*). Proses penyelenggaraan berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan tidak lagi semata-mata dilihat sebagai proses pedagogi untuk melahirkan insan-insan terdidik, tetapi juga dilihat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diberikan oleh para pemegang otoritas pendidikan kepada rakyat. Dalam konteks ini, rakyat tidak lagi dilihat sebagai pihak yang hanya “nrimo”, tetapi

sebagai pihak yang memiliki hak terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berbagai persoalan pendidikan juga dilihat dalam konteks kebijakan publik (*public policy*). Realitas berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tidak lagi hanya dikaitkan dengan relevansi dan mutu input-proses-output pendidikan, tetapi juga dilihat sebagai konsekuensi dari mutu proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi berbagai kebijakan bidang pendidikan. Berbagai persoalan pendidikan, mulai dari persoalan teknik hingga filosofis, telah menjadi topik hangat dalam dialog-dialog atau perbincangan politik di tingkat lokal maupun nasional. Sebaliknya, berbagai persoalan, agenda, dan peristiwa politik secara terbuka telah sering masuk ke dalam perbincangan dan praktik politik.

Politik pendidikan sering menjadi faktor yang sangat menentukan arah perkembangan pendidikan di tingkat micro (kelembagaan) maupun macro (nasional dan internasional). Di tingkat kelembagaan, efektifitas kegiatan pembelajaran lebih banyak ditentukan oleh bagaimana kepala sekolah dan para wakilnya mengimplementasikan kewenangan mereka; nilai-nilai apa yang mereka terapkan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program; bagaimana format hubungan yang mereka terapkan di lingkungan lembaga pendidikan yang mereka kelola, ke arah mana mereka akan mendorong perkembangan lembaga yang mereka pimpin.

Di tingkat daerah atau nasional, kinerja sistem pendidikan adalah cermin politik pendidikan di daerah / negara tersebut. Dan di tingkat internasional perkembangan dunia pendidikan banyak ditentukan, jika tidak didikte, oleh politik pendidikan

yang diterapkan oleh negara-negara kuat yang sistem pendidikannya sudah baik dan menjadi kiblat pengembangan sistem pendidikan. Rancangan dan implementasi berbagai aktivitas kependidikan yang terjadi di tingkat internasional, seperti internasionalisasi, kerjasama, pertukaran siswa/mahasiswa (student exchanges), mobilitas siswa/mahasiswa (student mobility), beasiswa, bantuan, kunjungan professor (visiting professor), dan research fellow seringkali didikte atau didominasi oleh negara-negara kuat. Meskipun memberikan manfaat yang cukup besar bagi politik pendidikan negara-negara yang menjadi peserta atau partner, namun sejatinya berbagai aktivitas tersebut lebih merepresentasikan kepentingan dan nilai-nilai politik dan pendidikan negara-negara kuat.

Misalnya, program beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat, beasiswa AusAid dari pemerintah Australia, beasiswa Monbuso dari pemerintah Jepang, Asia Fondation, dan Ford Fondation, memang telah menghantarkan ribuan dosen dan tenaga profesional lainnya ke jenjang pendidikan magister dan doktor. Mereka telah banyak yang menjadi tenaga inti di lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintahan. Sejak kejatuhan komunis pada tahun 1965, setiap tahun Fulbright menyediakan sekitar 120 beasiswa untuk mahasiswa asal Indonesia. Hingga saat ini, sudah ada 2000 sarjana S2 dan S3 yang didanai oleh Fulbright (*Campus Asia*, October-December 2010: 82).

Berbagai jenis beasiswa tersebut telah membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengembangkan SDM di berbagai bidang. Secara keseluruhan, 24% (800) dari penyandang gelar Ph.D. di Indonesia adalah lulusan Amerika Serikat, disusul oleh lulusan Jepang sebanyak 594 orang (18%),

17% (571 orang) lulusan Australia, 12% (412 orang) lulusan Francis, 9% (312 orang) lulusan Jerman, 8% (267 orang) lulusan Inggris, 4% (134 orang) lulusan Philipina, 4% (128 orang) lulusan Malaysia, 2% (87 orang) lulusan Belanda, dan 2% (59 orang) lulusan Belgia (*CampusAsia*, October-December 2010, hlm. 82). Para lulusan Ph.D tersebut merepresentasikan 11 bidang studi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan pembangunan di tanah air. Sebagian besar (34%) dari mereka adalah penyandang gelar Ph.D. dalam bidang Engineering & Technology, disusul oleh Ph.D. dalam bidang Social & Political Science (12%), Education (12%), Biological & Chemical Science (11%), Business & Administrative Studies (10%), Medical & Health Studies (9%), Mathematical & Physical Science (6%), Law & Legal Studies (2%), Languages (2%), Computer Science (1%), and Creative Arts & Design (1%) (*Campus Asia*, October-December 2010: 82).

Dilihat dari luas wilayah, besaran jumlah penduduk, dan variasi kebutuhan pembangunan Indonesia, tentu saja jumlah dan bidang-bidang keahlian para lulusan Ph.D lulusan luar negeri tersebut masih jauh dari cukup. Tetapi keberadaan mereka tentu saja dapat membawa manfaat yang sangat banyak (*multiplier effects*) bagi bangsa Indonesia. Mereka dapat menjadi pendorong perkembangan mutu dan budaya akademik di lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Mereka juga dapat menjadi motor pengembangan aktivitas riset. Selain itu, para sarjana bergelar Ph.D lulusan luar negeri dapat menjadi pelaku transfer sains dan teknologi. Tugas pemerintah dan para pimpinan lembaga pendidikan tinggi adalah membuat kebijakan-kebijakan dan mengembangkan pola manajemen yang dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada para sarjana tersebut



untuk melakukan aktivitas-aktivitas keilmuan. Jika tidak ada ruang kreasi dan inovasi yang cukup, mereka akan sulit mengembangkan kegiatan-kegiatan keilmuan, sehingga potensi keilmuan yang mereka miliki sulit berkembang dan manfaat keberadaan mereka bagi bangsa Indonesia menjadi tidak maksimal.

Tanpa ruang kreasi dan dukungan yang cukup, para lulusan Ph.D tersebut bisa saja “kabur” ke negara lain dimana mereka merasa diberi ruang berkreasi yang cukup, sehingga Indonesia akan menghadapi masalah *brain drain*. Terjadinya *brain drain* tidak perlu terlalu dikhawatirkan apabila pemicunya adalah pertimbangan-pertimbangan pragmatik, seperti ingin segera mendapat pekerjaan, ingin gaji besar, dan ingin mencari pengalaman. Tetapi jika penyebabnya adalah ketiadaan rasa cinta dan pengabdian pada tanah air, maka *brain drain* patut dicemaskan sebagai satu bentuk kerugian negara.

Para ilmuwan atau peneliti yang meninggalkan tanah air karena alasan pragmatis suatu saat akan kembali dan mengabdikan untuk negeri tercinta. Dengan pengalaman yang lebih banyak dan wawasan keilmuan yang lebih luas, yang diperoleh dari perantauan, maka pada saat kembali ke tanah air mereka adalah *brain gain* bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini akan mendapat keuntungan yang besar, karena pengalaman dan wawasan keilmuan yang mereka miliki setelah bertahun-tahun di negeri orang dapat menjadi pendorong terjadinya *transfer of science and technology*. Tetapi jika para ilmuwan dan peneliti tersebut terus menetap di negeri orang, maka itu benar-benar menjadi kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia.

Untuk kemajuan bangsa, maka diperlukan *political will* yang kuat dan kebijakan-kebijakan yang mengikat (*affirmative*

*policies*) untuk dapat mengurangi terjadinya *brain drain* dan mendorong terjadinya *brain gain* di kalangan ilmuwan dan peneliti. Keinginan para ilmuwan dan peneliti untuk meninggalkan tanah air dapat dicegah dan keinginan mereka untuk pulang ke tanah air dapat diperbesar dengan cara meningkatkan kualitas dan fasilitas kegiatan keilmuan, seperti perpustakaan dan laboratorium; membangun budaya akademik yang sehat; dan meningkatkan apresiasi serta insentif bagi para ilmuwan dan peneliti yang aktif dan produktif.

Tetapi harus pula dipahami dan disadari bahwa sesungguhnya yang mendapat manfaat terbesar dari para mahasiswa dan lulusan internasional tersebut adalah negara-negara yang mendanai pendidikan mereka. Mereka telah menjadi bagian integral dari upaya negara-negara donor untuk melakukan diplomasi soft power terhadap negara-negara berkembang, baik untuk tujuan politik maupun untuk tujuan sosial, budaya, dan ekonomi, bahkan agama. Inilah alasannya mengapa program-program beasiswa tersebut tidak dikelola oleh departemen pendidikan, tetapi oleh departemen perdagangan dan departemen luar negeri. Tidak ada yang salah dengan semua ini. Kita hanya perlu memahami dan menyadari bahwa berbagai bantuan kependidikan yang kita terima dari negara-negara maju dan kuat bukan semata bertitik tolak dari konsep kedermawanan atau charity, tetapi merupakan bagian integral dari kegiatan diplomasi dan ekonomi. Pemberian beasiswa hanyalah pancingan saja.

Dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, negara-negara maju telah berhasil mencuri perhatian para orang tua dari kalangan the have di negara-negara berkembang untuk mengirim putra-putri mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi di sana dengan biasa sendiri atau sebagai private

students. Jumlah mahasiswa internasional kategori private students jauh melebihi jumlah mahasiswa internasional kategori beasiswa. Mereka harus membayar uang kuliah dalam jumlah besar, menyewa, bahkan banyak yang membeli flat atau apartemen, sehingga menjadi sumber devisa yang cukup signifikan bagi negara-negara yang mereka tuju.

Kinerja sistem pendidikan nasional Indonesia adalah cermin politik pendidikan di negeri ini. Jika ada sisi baik dari sistem pendidikan di negeri ini, bisa dipastikan bahwa hal itu adalah dampak dari sentuhan politik pendidikan yang baik. Pada masa orde baru, politik pendidikan yang baik telah menghasilkan beberapa terobosan penting dalam pembangunan pendidikan, seperti program wajib belajar 9 tahun dan pembangunan SD Inpres yang telah secara signifikan menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan tingkat literasi di Indonesia. Dengan politik pendidikan yang baik pula pemerintah orde baru berhasil membangun fondasi legal formal bagi sistem pendidikan nasional, dengan menetapkan undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan undang-undang ini, maka ketiadaan landasan legal formal sistem pendidikan nasional Indonesia selama 44 tahun berakhir.

Di era reformasi, politik pendidikan yang baik juga melahirkan beberapa terobosan penting, seperti menetapkan minimal 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Salah satu langkah fundamental di era ini adalah ditetapkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003, revisi undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 menegaskan, “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”

Walaupun belum sepenuhnya efektif, ketentuan tersebut adalah langkah penting dalam upaya perbaikan kinerja sistem pendidikan nasional. Ketentuan tersebut tidak mungkin terwujud dan berjalan efektif tanpa komitmen politik dari pihak pemerintah maupun DPR. Substansi dari ketentuan tersebut sangat positif, tetapi efektifitasnya masih perlu diuji. Jika motivasinya adalah kepentingan-kepentingan politik, maka lambat atau cepat akan terbukti bahwa ketentuan tersebut tidak akan berjalan efektif. Tetapi jika motivasinya adalah untuk mempercepat peningkatan mutu pelayanan pendidikan, maka pihak pemerintah dan DPR akan melakukan segala cara agar ketentuan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten.

Tanda-tanda kurangnya kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk secara konsisten menerapkan ketentuan undang-undang tersebut mulai terlihat ketika beberapa waktu yang lalu pihak Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa jumlah minimal 20% dari APBD dan APBN termasuk gaji guru. Dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sangat signifikan. Di beberapa daerah, khususnya di kota-kota besar, dana 20% yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebagian besar habis terpakai untuk gaji guru, karena jumlah guru di wilayah perkotaan sangat besar, sebagai akibat dari pola penempatan dan mutasi guru yang sering intervensi oleh kepentingan kekuasaan. Selama berpuluh-puluh tahun guru-guru yang memiliki koneksi atau jalur khusus dengan para pejabat dapat dengan mudah meminta penempatan dan atau mutasi di wilayah perkotaan.

Era reformasi juga ditandai oleh beberapa langkah penting dan positif dalam bidang pendidikan, seperti ditetapkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian direvisi menjadi PP nomor 66 tahun 2010; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tanpa bermaksud menapikan banyaknya praktik politik pendidikan yang baik dengan hasilnya yang juga baik, kita tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak praktik politik pendidikan yang buruk, yang berdampak buruk pula terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Praktik-praktik buruk politik pendidikan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

*Pertama*, pendidikan dan kampanye politik. Seharusnya para politisi memanfaatkan kekuasaan (*power*) mereka untuk mengkampanyekan program-program pendidikan. Tetapi di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya, dimana para politisi berupaya sedapat mungkin memanfaatkan isu-isu kependidikan untuk kampanye politik, dalam rangka mendongkrak popularitas mereka untuk meraih kekuasaan politik. Hal ini terlihat jelas pada setiap musim kampanye, baik untuk posisi politik di lembaga legislatif maupun eksekutif, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Para calon anggota legislatif dan pimpinan eksekutif sering menjadikan tema-tema pendidikan sebagai menu kampanye. Mereka sering berpidato berapi-api dalam acara kampanye, menampilkan diri sebagai sosok yang sangat peduli pada pendidikan dan menyadari arti penting pendidikan bagi pembangunan masyarakat. Tidak jarang mereka berjanji, bahkan menandatangani kontrak politik, untuk berupaya secara maksimal meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Tetapi setelah terpilih dan duduk di kursi kekuasaan, mereka sering lupa pada janji-janji kampanye tersebut dan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan dana dan pertimbangan skala prioritas, lalu menomorduakan sektor pendidikan dalam kegiatan pembangunan. Bahkan tidak sedikit penguasa pusat dan daerah yang menjadikan sektor pendidikan sebagai lahan untuk memperkaya diri, dengan menyalahgunakan atau menilep berbagai jenis dana pendidikan.

*Kedua*, politisasi peraturan perundang-undangan. Banyaknya penguasa atau politisi yang ingin memanfaatkan berbagai peraturan perundang-undangan pendidikan untuk kepentingan politik sering membuat proses penyiapan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tidak mengacu pada pertimbangan akademik, tetapi lebih mengacu pada pertimbangan politik. Misalnya, pada tahun 2009 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2009, hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan pemilu presiden. Adalah sangat wajar jika sebagian masyarakat, termasuk para guru dan guru besar, menangkap adanya sinyal politik yang kuat dari penetapan PP

tersebut. Tidak berlebihan jika mereka menafsirkan bahwa jadwal penetapan tersebut sengaja diatur sedemikian rupa untuk memberikan efek positif pada pencitraan calon presiden incumbent. Begitupun halnya dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan tentang kenaikan gaji guru dan pengangkatan guru honor, seringkali diberlakukan pada saat ada kepentingan politik dari para penguasa.

Ketiga, kerancuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya kepentingan politik praktis yang masuk ke wilayah pendidikan juga mengakibatkan proses penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan sering tidak terkoordinir, sehingga satu sering terjadi tumpang tindih (*overlapping*), bertentangan (*conflicting*), dan inkonsisten, sehingga kurang efektif dan sering menimbulkan mispersepsi dan conflict of interest and authority.

Tumpang tindih peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada beberapa kasus. Misalnya, di satu pihak diterapkan otonomisasi pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Tetapi berbagai bentuk pendanaan dan fasilitasi pendidikan dasar dan menengah, seperti pengadaan buku ajar dan pengalokasian dana BOS masih diatur sepenuhnya oleh kantor Kemendiknas di Jakarta. Kemudian, otonomisasi sekolah dan sentralisasi madrasah dan UN untuk pemetaan mutu atau untuk penentuan kelulusan serta overlapping pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

Inkonsistensi dapat dilihat pada beberapa kasus. Seperti inkonsistensi penerapan peraturan perundang-undangan dan inkonsistensi penerapan pendidikan agama. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan agama adalah salah satu

mata pelajaran pokok yang harus ada pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 12 (1) UU tersebut menegaskan: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Selanjutnya pada Pasal 37 ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara jelas menegaskan pentingnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat tidak konsisten. Sebagai mata pelajaran wajib seharusnya pendidikan agama menjadi unsur penting dalam proses pendidikan. Namun dalam kenyataannya, pendidikan agama cenderung dinomorduakan, bahkan diabaikan sama sekali.

Selain diberi alokasi waktu yang sangat terbatas dan sistem evaluasi yang alah kadarnya, pendidikan agama bahkan tidak mendapat tempat sama sekali dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN), sehingga posisi dan peran guru agama menjadi tidak signifikan dalam proses pembelajaran dan peserta didik tidak terlalu termotivasi untuk mengikuti pendidikan agama. Dalam praktiknya, seringkali evaluasi pendidikan agama hanya sekedar memenuhi tuntutan Standar Ketuntasan Belajar (SKBM).

Selanjutnya, terjadi inkonsistensi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) dan birokratisasi pendidikan dan inkonsistensi otonomi pendidikan dan pengelolaan sekolah RSBI dan BIserta inkonsistensi penerapan ciri khas keagamaan pada madrasah. Kemudian terjadi pula inkonsistensi dewan pendidikan dan komite sekolah dengan



sistem pendanaannya dan inkonsistensi penerapan pendidikan keagamaan.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan atau pendidikan berciri khas agama adalah satu varian khusus yang memiliki karakteristik dan tujuan yang sedikit berbeda dari pendidikan umum. Pasal 30 (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa “pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.” Ditegaskan pula pada ayat 3 pasal yang sama bahwa “pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.” Pada ayat 4 pasal yang sama dijelaskan bahwa “pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.”

*Conflicting* peraturan perundang-undangan juga dapat dilihat pada beberapa kasus. Misalnya, konflik antara kebijakan otonomisasi dan sentralisasi serta KTSP versus Ujian Nasional. Pertentangan juga terjadi antara kebijakan penerapan Kurikulum Berbasis Satuan Pendidikan (KTSP) dan penerapan Ujian Nasional. Di satu pihak penerapan KTSP memberikan peran dan tanggung jawab yang sangat besar kepada guru masing-masing sekolah untuk merancang, mempersiapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pembelajaran. Tetapi di pihak lain, Ujian Nasional menuntut adanya penyeragaman dalam rancangan, persiapan, implementasi, dan evaluasi program-program pembelajaran. Akibatnya, kreatifitas dan improvisasi yang dilakukan guru-guru

di sekolah menjadi kurang berarti dan mereka “terpaksa” tunduk pada kepentingan penyelenggaraan Ujian Nasional.

Alih-alih menjadi guruyang aktif, kreatif, partisipatif, dan bertanggung jawab sebagaimana dikehendaki dalam konsep KTSP, mereka justru menjadi “budak” Ujian Nasional. Hari-hari mereka lebih banyak dihabiskan untuk mempersiapkan peserta didik agar berhasil dalam UN. Aktivitas belajar didominasi oleh kegiatan pembahasan soal-soal dan try out UN. Pada saat pelaksanaan UN, guru-guru dan semua unsur yang ada di sekolahterlibat langsung sebagai anggota “tim sukses” yang tugas utamanya adalah untuk memastikan agar jangan ada peserta didik yang gagal dalam UN.

Meskipun sangat kasat mata dan didukung oleh banyak bukti, praktik “tim sukses” dalam penyelenggaraan UN tidak mendapat sanksi apapun, karena praktik tersebut sarat dengan kepentingan politik para penguasa. Di Jakarta, Presiden dan Mendiknas tentu tidak ingin menjadi sasaran kemarahan orang tua murid jika banyak putra dan putri mereka yang tidak lulus. Begitu juga para kepala dinas pendidikan, bupati, walikota, dan gubernur di seluruh Indonesia. Mereka tentu tidak mau menjadi sasaran kemarahan rakyat jika banyak anak yang gagal dalam UN. Para penguasa tersebut tentu menginginkan agar pelaksanaan UN berjalan lancar dan tidak mengecewakan para orang tua. Jika semua berlancah dan sukses, mereka dapat mengklaim bahwa keberhasilan UN adalah prestasi mereka.

Untuk itulah maka tidak mengherankan apabila tekad untuk sukses dalam penyelenggaraan UN bukan hanya menjadi tekad peserta didik dan orang tua, tetapi juga menjadi tekad para kepala daerah dan kepala negara. Agar tidak kehilangan muka di mata rakyat, presiden memastikan pada Mendiknas bahwa UN

harus berhasil. Sebagai pembantu presiden, Mendiknas memastika para kepala dinas pendidikan agar mempersiapkan segala sesuatu secara cermat untuk keberhasilan UN. Sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, tentu kepala dinas tidak ingin mengecewakan pimpinan mereka. Mereka tentu memastikan agar semua kepala sekolah menyadari arti penting UN dan keberhasilannya, tidak hanya bagi masa depan pendidikan nasional, tetapi juga bagi masa depan kursi kekuasaan para pimpinan daerah. Sebagai pelaksana yang baik, tentu para kepala sekolah ingin membuat para kepala dinas senang. Mereka punya para wakil dan guru-guru yang dapat dikerahkan untuk menyukseskan UN.

Dengan tim sukses yang bekerja dengan baik, maka jadilan UN sebagai dagelan nasional yang membuat semua orang, terutama siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, dan para pejabat, tersenyum bahagia, karena semua daerah dan sebagian besar sekolah berhasil mencapai hasil maksimal. Padahal, banyak yang ragu apakah hasil yang dicapai melalui UN adalah hasil sesungguhnya atau hasil rekayasa.

*Keempat*, program berbasis proyek, tidak berbasis riset. Saratnya kepentingan politik dalam program-program kependidikan membuat program-program tersebut tidak dipersiapkan dengan baik. Beberapa program berskala nasional yang menelan dana sangat besar, seperti program sertifikasi guru dan dosen, program kualifikasi guru, program ujian nasional, program akreditasi, dan program sekolah berstandar internasional, tidak diawali dengan studi kelayakan (*feasibility study*) atau *pilot project* yang memadai, sehingga terkesan dipaksakan. Program-program tersebut dilaksanakan secara serabutan dan dengan pendekatan “hantam kromo”, sehingga

sangat boros, dan kurang terkontrol. Terlalu banyak kendala teknis di lapangan yang tidak diantisipasi, sehingga pelaksanaannya kurang efektif dan tidak efisien.

*Kelima*, politisasi pendanaan. Kewajiban mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pembangunan Nasional (APBN) dan Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) telah secara signifikan meningkatkan dana pendidikan. Di beberapa daerah yang cukup kaya, dana yang dialokasikan untuk pendidikan lebih dari 20%. Tetapi efektifitas penggunaan dana tersebut untuk pendidikan patut dipertanyakan, karena pengalokasiannya sering ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ada pemerintah daerah yang memaksakan program sekolah gratis untuk memenuhi janji kampanye, sementara masih banyak gedung sekolah dan sarana pendidikan yang tidak layak pakai. Ada juga kepala daerah yang didemo oleh guru-guru, karena menggunakan uang gaji atau honor guru untuk biaya kampanye Pilkada. Ada kepala daerah yang dituntut mundur, karena tidak mau mengalokasikan minimal 20% dari dana APBD untuk pendidikan, dengan alasan masih ada prioritas pembangunan yang lebih diutamakan.

*Keenam*, birokratisasi manajemen. Semakin hari, manajemen lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, terutama yang berstatus negeri, tidak kreatif, karena terkungkung oleh birokrasi yang ketat, baik dalam bidang administrasi pada umumnya maupun dalam bidang administrasi keuangan. Intervensi pemerintah daerah terhadap manajemen sekolah sangat kuat, sehingga membuat para kepala sekolah bekerja seperti boneka (*puppet*) atau robot, cenderung menunggu instruksi dan kurang berani mengambil inisiatif, karena takut disalahkan dan atau dipecat.

Ketakutan ini disebabkan oleh terlalu besarnya otoritas kepala daerah dalam proses pengangkatan, pemutasian, dan pemecatan kepala sekolah dan guru. Agar terhindar dari hukuman kepala daerah, para pengelola sekolah cenderung cari aman (*safety first*), terlalu hati-hati, takut bertindak, dan bersikap Asal Bapak Senang (ABS). Kepala sekolah cenderung lebih memilih loyal kepada kepala dinas atau kepala daerah, ketimbang mendengar aspirasi dan keinginanguru-guru dan orang tua. Guru-guru yang ingin aman cenderung “ambil muka” di hadapan kepala sekolah ketimbang memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Begitu banyak cerita tentang kepala sekolah dan guru yang memiliki hubungan khusus dengan kepala daerah ditempatkan di sekolah-sekolah yang “bagus” di daerah-daerah yang mereka inginkan. Sementara kepala sekolah dan guru yang dinilai kurang loyal sering ditempatkan di sekolah yang kurang bagus di daerah yang terpencil.

Karena penempatan guru sering dipengaruhi oleh hubungan khusus dengan kepala daerah, maka hampir semua daerah di Indonesia menghadapi distribusi guru yang tidak proposional. Di satu pihak, daerah-daerah terpencil terus mengeluh kekurangan guru. Di pihak lain, sekolah-sekolah di kota-kota besar menghadapi kelebihan guru.

*Ketujuh, lemahnya law enforcement.* Banyaknya pertimbangan-pertimbangan politik dalam penyelenggaraan pendidikan membuat pemerintah tidak dapat bersikap tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pendidikan. Belum banyak pelanggaran peraturan perundang-undangan mendapat sanksi. Peraturan tentang penggunaan gelar, kelas jauh, akreditasi, pendirian

program studi, dan kualifikasi dosen belum diberlakukan secara efektif, sehingga terus dilanggar



## SISTEM PENDIDIKAN DAN MASA DEPAN BANGSA

*“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” (Nelson Mandela)*

### **Mutu Pendidikan dan Daya Saing Bangsa**

**S**ETIAP BANGSA tentu mempunyai visi tentang masa depan. Visi itu biasanya tergambar pada berbagai rencana strategis yang telah ditetapkan. Tetapi gambaran masa depan yang ada dalam rumusan visi pengembangan tetap saja tidak cukup untuk meyakinkan satu bangsa tentang masa depannya, karena ketepatan dan keterwujudan satu visi sangat tergantung pada agenda-agenda pengembangan yang menyertainya, dan efektifitas dari agenda-agenda tersebut sangat ditentukan oleh validitas data, ketepatan perhitungan, dan akurasi prediksi. Salah satu cara yang sangat mudah untuk memprediksi masa depan satu bangsa adalah dengan berkaca pada sistem pendidikannya. Melihat dan memahami sistem pendidikan satu bangsa sama halnya dengan menepi masa depan bangsa tersebut. Apa yang terjadi hari ini dalam sistem pendidikan satu bangsa mencerminkan apa yang akan terjadi pada bangsa tersebut di masa yang akan datang.

Bangsa yang memiliki sistem pendidikan bermutu dapat diperkirakan akan menjadi bangsa yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sebaliknya, bangsa yang sistem pendidikannya tidak

bermutu dapat diperkirakan akan menjadi bangsa yang lemah. Dengan sistem pendidikan bermutu, satu bangsa tidak hanya mampu mengubah peruntungannya untuk menjadi bangsa yang lebih baik, tetapi juga akan mampu mengubah dunia. “*Education,*” kata Nelson Mandela, “*is the most powerful weapon which you can use to change the world.*”

Sebaliknya, bangsa yang sistem pendidikannya amburadul atau karut marut akan menjadi bangsa pesakitan, tanpa keunggulan, martabat, dan kedaulatan. Bangsa seperti ini akan selalu kalah sebelum berperang dan gampang dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Jangankan mengubah dunia, bangsa seperti ini tidak akan mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Sistem pendidikan yang bermutu akan melahirkan generasi muda bangsa yang bermutu pula, yaitu generasi muda yang beriman, berilmu, dan berkarakter, yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memahami berbagai permasalahan yang dihadapi bangsanya, dan memiliki komitmen serta kompetensi tinggi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsanya. Generasi muda bermutu akan menjadi bagian dari pemecahan masalah (*part of problem solvers*) bagi bangsanya.

Pada saatnya, generasi muda bangsa yang beriman, berilmu, dan berkarakter akan menjadi pemimpin yang visioner dan mampu menginspirasi bangsanya untuk terus bekerja keras dan cerdas, dengan penuh semangat, motivasi, komitmen, dan disiplin tinggi. Mereka akan menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan lokomotif pengembangan bagi bangsanya menuju destinasi masa depan yang lebih baik, sebagai bangsa yang unggul, berdaulat, bermartabat, dan berperadaban tinggi.



Sebaliknya, sistem pendidikan yang tidak bermutu akan melahirkan generasi muda bangsa yang tidak bermutu pula, yaitu generasi yang tidak beriman, tidak berilmu dan tidak berkarakter. Generasi muda seperti ini tidak punya visi yang jelas tentang masa depan bangsanya. Mereka tidak memahami siapa dirinya, permasalahan bangsanya, dan apa yang harus dilakukan untuk bagsanya. Mereka akan selalu menjadi bagian dari masalah (*part of the prolems*). Ketika kelak menjadi pemimpin, generasi bangsa yang tidak bermutu akan menjadi pemimpin yang selalu ragu, cemas, dan berkeluh kesah, karena tidak memahami apa yang terjadi, tidak tahu pasti apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan, dan selalu tidak siap menerima resiko dari keputusan dan tindakannya.

Para pemimpin seperti ini tidak akan mampu menjadi penyemangat dan inspirator bagi bangsanya untuk maju dan berubah. Mereka hanya akan berkeluh kesah, saling menyalahkan, dan meratapi setiap permasalahan. Mereka tidak punya landasan idiil untuk menatap masa depan bangsanya. Mereka tidak punya karakter untuk secara disiplin, konsisten, adil, dan bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan bangsanya. Mereka tidak punya agenda strategis untuk mengubah peruntungan bangsanya. Pada saatnya para pemimpin seperti ini hanya akan mewariskan bangsa yang “penakut,” “peniru,” dan “pengekor,” yang masa depannya ditentukan atau didikte oleh bangsa lain, sehingga lambat laun akan menjadi bangsa yang “tergadai” dan “terjajah.”

Hubungan antara mutu sistem pendidikan kita hari ini dan masa depan bangsa kita sangatlah jelas dan akan terbukti. Hubungan tersebut dilandasi oleh logika yang sangat sederhana, bahwa pendidikan bermutu akan melahirkan SDM bermutu pula,

dan SDM bermutu dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, dan untuk membangun peradaban bangsa. Dengan logika tersebut, jelaslah bahwa pendidikan yang bermutu adalah *elan vital* bagi kemajuan satu peradaban. Bangsa-bangsa berperadaban tinggi adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem pendidikan sangat bermutu. Membangun sistem pendidikan bermutu adalah satu-satunya cara untuk membangun bangsa yang kuat dan berperadaban tinggi.

### **Pendidikan dan Kenegarawanan**

Bangsa yang ingin berkembang menjadi bangsa yang besar, unggul, berdaulat, bermartabat, dan berperadaban tinggi, dituntut untuk secara bersungguh-sungguh dan konsisten meningkatkan mutu sistem pendidikannya. Para pemimpinnya dituntut untuk dapat memanfaatkan semua sumber daya dan kekuasaan yang dimiliki demi terwujudnya sistem pendidikan yang bermutu. Mereka harus mengenyampingkan semua bentuk ego, *vested interest*, dan kesombongan demi kemajuan sistem pendidikan. Mereka harus siap mengatasi semua rintangan, menghadapi semua resiko, dan berkorban, demi kemajuan pendidikan. Misi utama mereka adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi bangsanya, dan menghantarkan bangsanya ke masa depan yang lebih baik. “*The task of the leader,*” kata Henry A. Kissinger, “*is to get his people from where they are to where they have not been.*”

Para pemimpin harus siap mempertaruhkan segalanya demi lahirnya generasi muda bangsa yang beriman, berilmu dan berkarakter. Mereka adalah para pemimpin yang visioner, yang akan mengesampingkan semua kepentingan politik sesaat demi kepentingan masa depan bangsa dan negara. Mereka adalah

negarawan, bukan politisi. "Negarawan," menurut Tanri Abeng, "berpikir generasi berikutnya, sedangkan politisi berpikir pemilu berikutnya." Bagi mereka, kekuasaan adalah alat pengabdian, bukan tujuan. Mereka berusaha memanfaatkan kekuasaan untuk mewariskan kebaikan dan kemajuan sebanyak mungkin bagi bangsanya.

Demi lahirnya generasi muda bangsa yang bermutu, seorang negarawan tidak akan pernah bereksperimen dalam urusan pendidikan. Setiap kebijakannya selalu bertitik tolak pada analisis kebutuhan (*need assessment*), kondisi riil, tujuan yang jelas, strategi yang matang, dan uji coba atau pilot project yang cukup. Mereka membuat keputusan berdasarkan data atau berbasis riset (*research based decisions*), tidak berdasarkan praduga atau opini atau kepentingan kekuasaan (*authority based*).

Seorang negarawan tidak akan pernah menyalahgunakan anggaran pendidikan untuk kepentingan pribadi atau politik atau kelompok. Dia tidak akan membiarkan problematika pendidikan terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut tanpa solusi. Dia tidak akan pernah mengangkat pejabat publik dalam bidang pendidikan hanya karena sebuah loyalitas politik. Untuk ranah pendidikan, dia senantiasa bertindak profesional dan menginginkan yang terbaik. Dia hanya memberi amanah kepada orang yang tepat (*the right man on the right place*).

Mengamanahkan urusan pendidikan kepada orang-orang yang memahami pendidikan, mencintai pendidikan, dan berkomitmen terhadap kemajuan pendidikan adalah langkah awal yang sangat penting bagi para pemimpin satu bangsa, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Sebaliknya, mengamanahkan urusan pendidikan kepada orang-

orang yang tidak memahami dan mencintai pendidikan adalah awal bagi kehancuran sistem pendidikan, yang pada akhirnya secara perlahan akan menyebabkan kehancuran bangsa.

Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia, mulai dari era Yunani Kuno hingga era globalisasi sekarang ini, membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang maju dan unggul adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik, dan bangsa-bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik adalah bangsa-bangsa yang memiliki pemimpin yang memiliki komitmen dan kemauan politik untuk memajukan pendidikan bangsanya. Mereka secara *all out* dan konsisten menggunakan kewenangan dan kekuasaan politik untuk memajukan pendidikan. Mereka terus berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan program-program pendidikan yang riil, yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, bukan program-program pendidikan yang hanya ada dalam retorika kampanye atau disimbolisasikan dalam acara-acara seremonial belaka.

Dengan penuh pemahaman dan kesadaran, mereka tidak mau dan tidak pernah memanfaatkan atau memeralat pendidikan untuk kepentingan-kepentingan politik atau untuk tujuan pencitraan (*education for politics*). Sebaliknya, mereka menggunakan kekuasaan politik untuk berbuat yang terbaik untuk kemajuan pendidikan (*politics for education*).

### **Pendidikan sebagai Prioritas Utama**

Bagi para pemimpin yang visioner dan memiliki karakteristik kenegarawanan, kepentingan pendidikan adalah hal yang paling utama. Pendidikan menjadi “panglima” dalam

agenda-agenda besar mereka, selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan-kebijakan mereka. Visi ini dimiliki oleh banyak pemimpin di dunia, antara lain, Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Setiap kali ditanyakan tentang prioritas utamanya, pria yang memiliki nama lengkap Anthony Charles Lynton Blair ini selalu menjawab: "*Education, education, education.*" Selama menjadi Perdana Menteri Inggris, Blair menambah dana pendidikan, memperbaiki dan mengupgrade sarana dan prasarana pendidikan, mengintegrasikan TIK dalam sistem pelayanan pendidikan, meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan dan menaikkan gaji mereka.

Pada masa kepemimpinan Tony Blair, jumlah penambahan tenaga pendidik dan kependidikan di Inggris melebihi jumlah penambahan tenaga kerja dalam bidang militer. Pada masa itu, hampir 75% dari pekerja di Inggris adalah tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga rasio guru-murid di Inggris menjadi satu berbanding 11, jauh lebih baik dari rasio guru-murid di negara-negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, dimana rasio guru-murid adalah satu berbanding 24. Meskipun belum sepenuhnya berhasil meningkatkan prestasi anak-anak di Inggris dan mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di negaranya, komitmen dan kemauan politik Tony Blair untuk kemajuan pendidikan patut diapresiasi dan diteladani.

Visi pendidikan Blair juga dimiliki oleh para pemimpin dunia lainnya. Mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, misalnya, menegaskan bahwa satu-satunya cara bagi satu bangsa untuk dapat bersaing di abad ke-21 ini adalah dengan membangun sistem pendidikan yang bermutu. Dalam ungkapan beliau: "*You see, we'll never be able to compete in the 21st century unless we have an education system that doesn't quit on*

*children, an education system that raises standards, an education that makes sure there's excellence in every classroom.”*

Bagi Bush, membenahi sistem pendidikan adalah langkah awal sebagai titik tolak bagi langkah-langkah berikutnya untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Dia mengatakan: *“Think about every problem, every challenge, we face. The solution to each starts with education.”* Berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang melanda satu bangsa, seperti kemiskinan, keputusasaan, kepasrahan, dan ketidaksabaran, dan kebodohan, umumnya bermuara pada satu hal, yaitu sistem pendidikan, sehingga hanya dapat diatasi melalui penataan sistem pendidikan dan meningkatkan efektifitas lembaga-lembaga pendidikan. *“He who opens a school door,”* kata Victor Hugo, *“closes a prison”*.

Ada hubungan yang erat antara sistem pendidikan dan sistem politik di satu negara. Sistem pendidikan akan mewarnai sistem politik, dan begitu juga sebaliknya, sistem politik akan mewarnai sistem pendidikan. Realitas sistem pendidikan satu bangsa adalah refleksi dari realitas sistem politiknya, dan realitas sistem politik satu bangsa adalah refleksi dari sistem pendidikannya.

Carut marut kehidupan politik adalah bukti paling autentik dari kegagalan sistem pendidikan, dan karut marut sistem pendidikan adalah bukti autentik dari kegagalan sistem politik. Pendidikan dan politik bahu membahu membentuk karakter satu bangsa dan mewarnai masa depannya. Bersama-sama, pendidikan dan politik membentuk dan mewarnai cara berpikir, bersikap, dan bertindak satu bangsa. Wajah bangsa kita hari ini adalah refleksi dari wajah pendidikan dan politik kita pada masa lalu, dan wajah bangsa kita di masa yang akan datang dapat kita bayangkan pada wajah pendidikan dan politik kita hari ini.

## Nilai Strategis Pendidikan

Ada beberapa nilai strategis yang membuat pendidikan begitu penting bagi satu bangsa dan menentukan masa depannya.

*Pertama*, pendidikan adalah katalisator untuk mengubah informasi menjadi ilmu pengetahuan, baik pengetahuan yang ada dalam buku-buku teks, maupun pengetahuan yang ada dalam kehidupan. Pendidikan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada ilmunya, dan dengan ilmu, kita dapat melakukan pencerahan (*enlightenment*) dan membuat setiap individu memiliki rasa percaya diri (*self confidence*) untuk mengambil setiap keputusan, menghadapi kehidupan, dan untuk menerima keberhasilan dan kegagalan. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan (*knowledge is power*) yang dapat menjadi senjata pamungkas untuk menaklukkan medan kehidupan menuju masa depan.

Kekuatan dan daya saing satu bangsa tidak ditentukan oleh uang dan senjata, tetapi ditentukan oleh mutu sistem pendidikan dan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang menguasai dunia saat ini dan akan menguasai dunia pada masa yang akan datang, bukanlah bangsa yang memiliki persenjataan lengkap, tetapi bangsa yang memiliki sistem pendidikan bermutu tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Kedua*, pendidikan adalah jendela dunia (*window of the world*). Pendidikan menuntun kita untuk menjelajah, memahami, dan memaknai dunia di sekitar kita. Dari penjelajahan, pemahaman, dan pemaknaan itu kita akan mendapatkan perspektif untuk menjalani kehidupan dan mengembangkan pemikiran serta pandangan tentang hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini, pendidikan membuat kita

memiliki kemampuan untuk menginterpretasi berbagai hal yang ada di sekitar kita dengan benar.

Pendidikan yang baik menjauhkan kita dari berbagai illusi dan menghapus semua bentuk keyakinan yang salah dalam pikiran kita. Pendidikan membantu kita menciptakan gambaran yang jelas dan menghapus kebingungan kita tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Pendidikan mengungkap berbagai pertanyaan dan juga membantu kita mendapatkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut.

*Ketiga*, pendidikan adalah jendela kesempatan (*window of opportunities*). Pendidikan mengembangkan potensi diri kita dan membekali kita dengan berbagai kompetensi dan karakter yang kita butuhkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kompetensi dan karakter secara bersama-sama membuka pintu-pintu kesempatan bagi kita untuk menentukan dan mengembangkan karir, dalam rangka merenda masa depan yang kita inginkan. Semakin baik dan strategis pendidikan yang kita dapatkan, maka akan semakin baik dan strategis pula jendela kesempatan yang terbuka untuk kita.

Semua jenis pekerjaan membutuhkan orang-orang yang terdidik (*well-educated*), yaitu orang-orang yang berilmu (*knowledgeable*), terampil (*skillful*), kreatif, inovatif, dan berkarakter. Menurut Jean Piaget (1896-1980), seorang ahli psikologi kognitif (*cognitive psychologist*) asal Swiss, "*the principal goal of education is to create men who are capable of doing new things, not simply of repeating what other generations have done*" (tujuan utama pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang mampu mengerjakan sesuatu yang baru, tidak hanya mengulang apa-apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya).



*Keempat*, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial. Semua bentuk kualifikasi, kompetensi, dan prestasi yang diraih melalui pendidikan adalah energi positif yang akan mendorong seseorang ke posisi sosial tertentu. Pendidikan yang baik akan memberikan kompetensi keilmuan dan ketrampilan yang baik, lalu kompetensi keilmuan dan ketrampilan yang baik akan membuka kesempatan bagi pekerjaan atau profesi yang lebih baik, pekerjaan atau profesi yang lebih baik tentu saja menjanjikan insentif atau kepercayaan (*trust*) lebih baik pula, dan tingkat pengakuan yang terus meningkat akan menaikkan status sosial.

*Kelima*, pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*). Setiap warganegara membutuhkan pendidikan dan harus diberi akses pendidikan (*education for all*), dan semua komponen bangsa harus berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan (*all for education*).

Mengabaikan hak-hak pendidikan warga negara dan tidak memberikan kontribusi apapun dalam kegiatan pendidikan adalah sebuah tindakan yang egois dan tidak bertanggung jawab. Jika kebutuhan pendidikannya dipenuhi, maka rakyat akan siap untuk berubah dan membangun. Sebaliknya, jika kebutuhan pendidikannya tidak terpenuhi masyarakat tidak akan siap untuk berubah, apalagi membangun. Masyarakat yang tidak terdidik akan mudah frustrasi, pemarah, dan cenderung apatis terhadap lingkungannya.

*Keenam*, pendidikan adalah peta jalan (*road map*) menuju masa depan. Setiap individu, masyarakat, dan bangsa membutuhkan pendidikan sebagai peta jalan (*road map*) untuk menyongsong masa depan. Pendidikan membuka mata kita tentang corak masa depan yang bagaimana yang seharusnya kita

wujudkan, mengapa kita harus menuju ke sana, jalan mana yang harus kita tempuh untuk tiba di sana, dan bagaimana atau dengan kendaraan jenis apa seharusnya kita menuju ke sana.

Dengan beberapa nilai strategis yang dimilikinya, maka pendidikan benar-benar menjadi faktor yang menentukan (*determinant factor*) bagi masa depan satu bangsa. Bangsa yang membiarkan sistem pendidikan nasionalnya terpuruk dan penuh problematika adalah bangsa yang tidak bertanggung jawab dan pasrah terhadap masa depannya. Mencermati kondisi pendidikan nasional kita hari ini secara seksama bukanlah upaya mencari-cari kesalahan, tetapi sebuah langkah penting untuk menemukan rancangan yang tepat bagi masa depan kita.

Merancang dan menata sistem pendidikan berarti merenda masa depan. Jika hari ini kita belum puas dengan sistem pendidikan nasional kita dan terus membiarkan kita tidak puas dengannya, dapat dipastikan bahwa masa depan yang tidak bahagia telah menanti kita. Jika kita menginginkan sebuah masa depan yang bahagia bagi bangsa kita, maka hanya ada satu cara, yaitu memastikan bahwa hari ini kita memiliki sistem pendidikan nasional yang bermutu, yaitu sistem pendidikan yang membahagiakan dan membanggakan kita. ✍



## PERAN DAN MANFAAT ICT DALAM PENDIDIKAN

*Tradisi belajar akan menentukan tingkat literasi. Di era informasi, tingkat literasi yang dibutuhkan oleh satu masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing sangat tinggi dan bervariasi*

### **ICT dan Pendidikan**

**I**STILAH Information and Communications Technology (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah yang relatif baru dalam wacana komunikasi. Menurut kamus Wikipedia, istilah ICT mulai digunakan oleh para peneliti akademik pada tahun 1980-an dan menjadi populer sejak digunakan oleh Dennis Stevenson pada tahun 1997 dalam laporannya kepada pemerintah Inggris tentang perkembangan pendidikan. Istilah ICT semakin dikenal luas setelah digunakan dalam laporan tentang revisi Kurikulum Nasional untuk Inggris, Wales, dan Irlandia Utara pada tahun 2000.

Pengertian ICT terus berkembang mengikuti perubahan yang terjadi pada teknologi dan aplikasinya dalam berbagai konteks dan kebutuhan komunikasi. Saat ini, menurut Wikipedia, istilah ICT digunakan untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi audio-visual dan jaringan telephone dengan jaringan komputer melalui kabel tunggal (*a single cabling*) atau sistem jaringan (*link system*). Menurut rumusan United Nation Development

Programme (UNDP), ICT adalah “seperangkat sumber daya dan peralatan teknologi yang digunakan untuk mengkomunikasikan, menciptakan, mendiseminasi, menyimpan, dan mengelola informasi.” Peralatan teknologi dimaksud antara lain komputer, internet, teknologi penyiaran (radio dan televisi), dan telephone.

Sarana ICT membuat berbagai aktivitas komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Aplikasi ICT dalam berbagai konteks dan kebutuhan komunikasi dapat mempercepat proses dan menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Misalnya, aplikasi ICT dapat meminialisir, bahkan mengeliminir biaya telephone dan intensitas penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK).

Aktivitas kependidikan pada dasarnya adalah aktivitas komunikasi multi dimensi dan multi media yang melibatkan berbagai sumber belajar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan juga melibatkan banyak aktor, seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan para pemangku kepentingan pendidikan, terutama para orang tua atau wali, para lulusan, para pengguna lulusan, tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), tokoh pendidikan (topen), dan tokoh pemerintahan (topem). Efektifitas semua dimensi komunikasi yang terjadi dalam proses pendidikan sangat ditentukan oleh aktor yang terlibat beserta sumber dan media komunikasi yang diunakan.

Dengan dukungan ICT, proses komunikasi di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Jika diintegrasikan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, ICT dapat menjadi instrumen yang sangat efektif, efisien, kreatif, produktif, dan menyenangkan. Sarana ICT dapat berperan sebagai instrumen utama bagi para pendidik dan peserta didik dalam mencari (*searching*), menghimpun

(*classifying*), menghubungkan (*connecting*), menginterpretasi (*interpreting*), dan menyajikan (*presenting*) informasi secara cepat dan menarik, untuk ditransformasikan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Fungsi-fungsinya yang begitu banyak dan perannya yang begitu penting dalam proses pembelajaran membuat ICT menjadi salah satu sarana utama yang harus ada di setiap lembaga pendidikan. Semua lembaga pendidikan perlu difasilitasi dengan sarana ICT yang *up to date* dan relevan dengan berbagai kebutuhan pelayanan pendidikan, baik pada aspek perangkat keras (*hardwares*) maupun perangkat lunak (*softwares*).

### **Perubahan Paradigma**

Era informasi dan pengenalan ICT di dunia pendidikan telah mengubah paradigma pembelajaran. Di era ini, menurut UNESCO, lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk mendorong peserta didik untuk belajar (*to learn*), tetapi juga dituntut untuk dapat mendorong peserta didik untuk belajar menguasai ilmu (*learning to acquire knowledge*), mempromosikan aktivitas belajar bertindak (*learning to act*), belajar hidup bersama (*learning to live together*), dan belajar untuk kehidupan (*learning for life*), dengan paradigma belajar sepanjang hayat (*life long learning*).

Di tengah arus informasi yang mengalir deras dan semakin muda diakses, lembaga-lembaga pendidikan tidak bisa lagi sekedar menjadi tempat berlangsungnya transmisi informasi dari guru kepada murid dalam periode waktu dan batasan ruang tertentu. Lembaga-lembaga pendidikan dituntut untuk dapat berperan sebagai fasilitator bagi para pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran yang *mobile*,

dinamis, dan menembus batasan ruang (*spaceless*), batasan waktu (*timeless*), dan batasan kenegaraan (*borderless*).

Dukungan ICT memungkinkan proses pembelajaran terjadi kapanpun dan dimanapun. Dalam konteks ini maka guru tidak lagi menjadi figur sentral dan sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya lingkungan belajar bagi peserta didik. Guru dan sekolah hanyalah fasilitator dan mediator pembelajaran. Sarana ICT membuat proses pembelajaran bersifat multi dimensi dan multi purposes.

Perubahan paradigma pembelajaran beriringan dengan perubahan paradigma tentang literasi (melek huruf). Di era informasi, menurut seorang futurist, Alvin Toffler (1990), orang yang disebut buta huruf bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi orang yang tidak bisa belajar (*learn*), tidak bisa mengubah kebiasaan (*unlearn*), dan tidak bisa belajar kembali (*relearn*). Toffler agaknya ingin mengingatkan kita bahwa masyarakat yang hidup di era informasi dituntut untuk memiliki tradisi belajar yang kuat, agar para anggotanya mampu menyerap, mengelolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan selektif.

Masyarakat yang kuat dan unggul di era informasi adalah masyarakat yang menguasai atau mengendalikan informasi, dan masyarakat yang menguasai informasi adalah masyarakat yang menguasai ICT. Jika tidak disertai dengan tradisi belajar yang kuat, penguasaan ICT hanya akan memberikan kesenangan, tidak memberikan ilmu pengetahuan. Dengan tradisi belajar yang kuat, semua anggota masyarakat memiliki kemauan keras untuk belajar, selalu siap untuk berubah (*open minded*), dan terus belajar sampai akhir hayat (*lifelong education*). Pentingnya tradisi belajar yang kuat bagi satu masyarakat diingatkan pula

oleh salah satu Presiden Amerika Serikat, Benjamin Franklin, melalui ungkapannya sebagai berikut: “Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn” (menjadi orang yang enggan belajar lebih memalukan daripada menjadi orang yang tidak tahu apa-apa).

Tradisi belajar akan menentukan tingkat literasi. Di era informasi, tingkat literasi yang dibutuhkan oleh satu masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing sangat tinggi dan bervariasi. Di era ini, menurut Alvin Toffler (1990), seseorang dituntut untuk melek dalam enam aspek. *Pertama*, melek fungsional (*functional literacy*) atau melek visual (*visual literacy*), yaitu memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan mengekspresikan ide-ide melalui berbagai media, termasuk penggunaan images, graphics, video, dan charts. *Kedua*, melek ilmiah (*scientific literacy*), mampu memahami aspek-aspek teoritis dan aplikatif dari sains dan matematika. *Ketiga*, melek teknologi (*technological literacy*), berkompeten dalam menggunakan berbagai teknologi komunikasi dan informasi. *Keempat*, melek informasi (*information literacy*), mampu menggali, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara tepat, termasuk dengan menggunakan TIK. *Kelima*, melek budaya (*cultural literacy*), mengapresiasi keragaman budaya. *Keenam*, kesadaran global (*global awareness*), memahami bagaimana berbagai bangsa, korporasi, dan komunitas di seluruh dunia terhubung satu sama lain.

Tingkat literasi yang sangat tinggi dan bervariasi menuntut lembaga-lembaga pendidikan untuk tidak hanya berperan sebagai pusat belajar (*center for learning*), tetapi juga sebagai pusat budaya (*center for culture*), dan pusat peradaban (*center for civilization*).

## Manfaat ICT bagi Pendidikan

Tingkat literasi yang tinggi dan bervariasi, menurut Toffler, sangat terkait dengan trend kehidupan abad ke-21 dan fungsi-fungsi serta aplikasi ICT. Karena itu, sarana ICT sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat manusia di abad ke-21, tentu saja termasuk aktivitas dalam bidang pendidikan. Dengan sarana ICT yang *up to date* dan relevan, lembaga-lembaga pendidikan dapat memaksimalkan perannya sebagai pusat belajar, pusat budaya, dan pusat peradaban yang dapat melahirkan anggota masyarakat yang tidak hanya melek huruf, tetapi juga melek udaya, dan melek peradaban.

Peran yang sangat penting dan strategis sebagai pusat belajar, pusat budaya, dan pusat peradaban menuntut lembaga-lembaga pendidikan untuk dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran yang memiliki paradigma yang jelas dan daya jangkau yang luas. Dalam konteks inilah sarana ICT menjadi sangat urgen, karena sarana ICT memberikan nilai manfaat yang sangat banyak. Menurut penelusuran UNESCO (2013), ada lima manfaat yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikan: (1) mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan; (2) meningkatkan kesetaraan pendidikan (*equity in education*); (3) meningkatkan mutu pembelajaran (*the delivery of quality learning and teaching*); meningkatkan profesionalisme guru (*teachers' professional development*); dan (4) meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan.

Mengetahui dan menyadari besarnya manfaat ICT bagi dunia pendidikan, para ahli UNESCO menganjurkan agar semua negara, khususnya negara-negara berkembang, meningkatkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mengelaborasi ICT



dalam berbagai kebijakan, strategi, dan aktivitas pendidikan. Untuk tujuan tersebut, secara khusus mereka telah meminta UNESCO membangun *Institute for Information Technologies in Education* (IITE) di Moscow. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk mendorong dan mempromosikan pertukaran informasi (information exchange) serta menggalakkan berbagai riset dan pelatihan yang terkait dengan integrasi ICT dalam sistem pelayanan pendidikan. Untuk Asia dan Pacific, tugas ini diamanahkan kepada kantor cabang UNESCO di Bangkok.

Meskipun berhadapan dengan banyak kendala, upaya UNESCO dan lembaga-lembaga kependidikan lainnya untuk mengintegrasikan ICT ke dalam sistem pengelolaan dan pelayanan pendidikan sudah cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai oleh munculnya berbagai jargon berawalan *e*, mulai dari *e-book*, *e-learning*, *e-laboratory*, *e-education*, *e-library*, dan sebagainya. Awalan *e* pada jargon-jargon tersebut bermakna *electronics* yang secara implisit dimaknai *berdasar teknologi elektronika digital*.

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan internet, maka muncullah beberapa jargon baru, seperti *computer based teaching and learning*, *Internet-based learning* atau *web-based learning*. Keberhasilan UNESCO juga dapat dilihat pada beberapa kebijakan pengembangan pendidikan. Sarana ICT telah menjadi salah satu fokus utama dalam format akreditasi semua jalur, jenis, dan jenjang lembaga pendidikan di negara-negara berkembang. Di Indonesia, misalnya, ketersediaan sarana ICT, intensitas pemanfaatannya, dan komitmen terhadap pengembangannya dalam pengelolaan lembaga pendidikan sudah menjadi bagian penting dalam proses akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Sudah banyak sekolah dan perguruan

tinggi yang secara eksplisit mencantumkan ICT sebagai salah satu kata kunci dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target pengebangannya. Mereka terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana ICT dan memperkuat SDM pengelolannya.

Selain menggambarkan fenomena integrasi ICT ke dalam sistem pendidikan yang terus berkembang dan meluas, jargon-jargon dan berbagai perkembangan yang ada juga menggambarkan betapa dahsyatnya pengaruh perkembangan ICT terhadap dunia pendidikan, khususnya terhadap pergeseran paradigma pembelajaran dan paradigma pengelolaan lembaga pendidikan. Fenomena ini mengingatkan kita betapa ironisnya jika di era informasi sekarang ini masih ada lembaga-lembaga pendidikan dan aktivitas pebelajaran yang tidak tersentuh oleh ICT atau jika masih ada pendidik dan peserta didik yang tidak terekspose pada aplikasi ICT dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Dan yang lebih ironis lagi jika di era informasi ini masih ada penentu kebijakan pendidikan (educational policy maker) yang memomorduakan atau mengabaikan sarana ICT dalam berbagai agenda pembangunan pendidikan.



## INTEGRASI ILMU DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM: DARI WACANA KE AKSI

*Integration of sciences means the recognition that all true knowledge is from Allah and all sciences should be treated with equal respect whether it is scientific or revealed(M. Amir Ali)*

### Dinamika Integrasi Ilmu di PTAI

**A**DA BANYAK agenda dan model integrasi ilmu, tetapi tidak banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana tentang integrasi ilmu. Menurut M. Amir Ali, “integrasi keilmuan adalah suatu pengakuan bahwa semua ilmu yang benar datang dari Allah dan semua ilmu harus diperlakukan sama, baik ilmu-ilmu sekuler maupun ilmu-ilmu keagamaan (*integration of sciences means the recognition that all true knowledge is from Allah and all sciences should be treated with equal respect whether it is scientific or revealed*).” Penggunaan kata *true knowledge* merujuk pada ayat “*Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*” Menurut M. Amir Ali, ayat ini menegaskan bahwa semua ilmu yang benar diwahyukan oleh Allah kepada manusia. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa semua yang diwahyukan Allah sama sucinya dengan al-Qur’an and Sunnah. Dalam ungkapan Usman Hassan, ilmu adalah cahaya yang datang dari Allah (*knowledge is the light that comes from Allah*). Dengan cara pandang tersebut maka integrasi ilmu

dapat dilihat sebagai langkah penyetaraan ilmu-ilmu sekuler dan ilmu-ilmu keagamaan dalam hal sikap maupun pemahaman.

Integrasi ilmu sudah berkembang menjadi topik penting dalam agenda pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia. Perhatian terhadap integrasi ilmu sudah muncul seiring dengan penerapan dual sistem dalam pembangunan nasional di sektor pendidikan. Berkembangnya pola pendidikan dua arah, umum dan keagamaan, telah bermplikasi pada politik pendidikan, pandangan keilmuan, dan pola pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Di lingkungan PTAI topik integrasi ilmu semakin mengedepan pada awal tahun 1990-an, ketika muncul ide transformasi kelembagaan beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Ide integrasi ilmu menjadi penting ketika ada pertanyaan dari pemerintah dan masyarakat tentang distingsi UIN dari universitas yang sudah ada. Pertanyaan tersebut membuat para pemegang otoritas pendidikan tinggi di Kementrerian Agama dan para rektor IAIN dan UIN tertantang untuk menjadikan PTAI, khususnya UIN menjadi institusi-institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Pencarian terhadap karakteristik tersebut akhirnya mengerucut pada gagasan integrasi ilmu. Secara perlahan, gagasan tentang integrasi ilmu terus bergulir dan berkembang di masing-masing lembaga PTAI, dengan pola yang dirancang oleh pimpinannya masing-masing. Namun demikian perlu dicatat bahwa gagasan tentang itegrasi ilmu memang telah menyentuh lembaga-lembaga PTAI secara luas, tetapi hingga saat ini perkembangannya masih cenderung terfokus pada tiga institusi

PTAI, yaitu UIN Syarif Hidayaulah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan inspirasi dari rektor masing-masing, tiga UIN tersebut telah mengembangkan konsep integrasi ilmu dengan desain yang berbeda, tetapi memiliki satu tujuan bersama, yaitu mendorong pergeseran paradigma keilmuan (*paradigm shift*) dari paradigma keilmuan “*dichotomistics-atomistics*” menuju paradigma keilmuan “*integrative-interdisciplinary*.”

Di UIN Jakarta, Azyumardi Azra (2004: 3) menggagas ide “reintegrasi ilmu,” bukan “integrasi ilmu”. Menurut Azyumardi, “konversi IAIN Jakarta menjadi UIN Jakarta bertitik tolak pada ide reintegrasi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sekuler.” Di UIN Jakarta, ia menjelaskan, “semua ilmu secara epistemologis datang dari Tuhan, Yang Maha Mengetahui, melalui ayat-ayat al-Qur’an (‘ayat Qur’aniyyah) dan ayat-ayat Tuhan yang tersebar di seluruh alam (‘ayat kauniyah).” Azyumardi menjelaskan lebih lanjut bahwa “semua Muslim perlu mempelajari ‘ayat Qur’anyyah dan ‘ayat kauniyah secara bersamaan, karena dengan mempelajari ayat-ayat tersebut kaum Muslimin akan dapat menguasai berbagai jenis dan bidang ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan mereka.” Di UIN Jakarta, menurut Azyumardi (2004: 4), konsep reintegrasi ilmu dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada tingkat epistemologi, kurikulum, dan fakultas/program studi.

Di UIN Yogyakarta, Profesor Amin Abdullah secara kontiniu dan konsisten memperkenalkan konsep “integrasi dan interkoneksi” keilmuan. Konsep tersebut divisualisasikan dalam bentuk jaring laba-laba. Dalam konsep tersebut Amin Abdullah sangat menekankan pendekatan multidisiplin dalam studi-studi keislaman. Bagi Pak Amin, beberapa disiplin ilmu-ilmu sosial,

seperti antropologi, psikologi, sosiologi, hermenetik, dan ekonomi sangat diperlukan untuk mengembangkan sudi-studi keislaman dan untuk menggeser paradigma keilmuan dari paradigma yang “*dichotomistics-atomistics*” menuju paradigma yang “*integrative-interdisciplinary*.”

Ia menekankan bahwa ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keagamaan harus terintegrasi secara epistemologis, untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang lebih baik. Dalam pandangan Pak Amin, agama yang baku (*fixed religion*) perlu direkonsiliasikan dengan alam dunia yang dinamis (*a dynamics world*) Untuk itu, menurut Pak Amin, *ulum al-din, al-fikr al-Islamiy, dandirasat Islamiyyah* atau sama lain harus terkoneksi, tidak terpisah, apalagi dihadap-hadapkan atau dipertentangkan (*juxtaposed*). Dengan paradigma ini, menurut Pak Amin, dapat dikembangkan koneksi antara “*hermenetika Islam*” dan budaya populer (*pop culture*), dan pendekatan hermenetik dapat digunakan untuk mempelajari fatwa-fatwa keagamaan.

Dalam berbagai kesempatan Pak Amin menekankan pentingnya para sarjana Muslim membangun keseimbangan antara otoritas teks dan salaf dengan otoritas ilmu-ilmu alam (*kauniyyah*), *aql (aqliyyah)*, dan intuisi (*wijdaniyyah*). Dalam pandangan Pak Amin, *bayan* atau tradisi tekstual tidak mampu merespons realitas kultural-sosiologis agama. Tradisi tekstual menurut Pak Amin, cenderung dogmatik, defensif, apologetik, dan polemik.

Dalam pandangan Pak Amin, tradisi tekstual hanya melahirkan *al-ilm al-taufiqi*, bukan *al-ilm al-huduri* dan *al-ilm al-husuli*. Alasannya, menurut Pak Amin, karena dalam tradisi *bayani*, *aql* selalu dipersepsikan negatif dan hanya digunakan untuk menjustifikasi otoritas teks, bukan untuk menilai relevansi

dan konteks teks dalam pengalaman hidup yang riil. Menurut tradisi *Bayani* terlalu menekankan *qiyas alillah* untuk fiqh dan *qiyas al-dalalah* for kalam. Bagi Pak Amin, tradisi *Bayani* terlalu banyak mengandalkan epistemologi tekstual-*lughawiyah* (*al-asl wa al-far; al-lafz wa al-makna*) dan kurang memperhatikan epistemologi konteks - *bahtsiyyah* dan epistemologi *irfaniyyah-batiniyya*. Untuk mengembangkan pemahaman dan penjelasan yang lebih baik tentang Islam, Pak Amin menganjurkan agar para sarjana ilmu-ilmu keislaman lebih memperhatikan epistemologi *burhani* dan *irfani* dalam karya-karya mereka.

Di Malang, Pak Imam Suprayogo telah mengembangkan pendekatan yang lebih pragmatis untuk integrasi ilmu, dengan model Pohon Ilmu yang menggambarkan struktur keilmuan yang terdiri dari akar, pohon, dan ranting yang saling mengisi dan menguatkan untuk menghasilkan buah berupa ulul albab.

Dinamika menuju integrasi ilmu yang terjadi di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Malang juga terjadi di lembaga-lembaga PTAI lain, dengan model yang beragam, tetapi dengan satu tujuan, yaitu mengilangkan dikotomi imu dan melahirkan para sarjana atau ilmuwan yang berkualitas.

Berkenaan dengan cara pandang umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan, dikalangan masyarakat Islam berkembang suatu kepercayaan bahwa hanya ilmu-ilmuagama Islamlah yang pantas dan layak dikaji atau dipelajari oleh umat Islam, terutama anak-anak dan generasi mudanya. Sementara ilmu-ilmu sekuler dipandang sebagai sesuatu yang bukan bagian dari ilmu-ilmu yang layak dan patut dipelajari.

Cara pandang dengan menggunakan perspektif *oposisi biner* terhadap ilmu secara ontologis tersebut kemudian berimplikasi

juga terhadap cara pandang sebagian umat Islam terhadap pendidikan. Sebagian umat Islam hanya memandang lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam yang akan mampu mengantarkan anak-anak dan generasi mudanya mencapai cita menjadi Muslim yang sejati demi mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan "umum" dipandang sebagai lembaga pendidikan sekuler yang tidak kondusif mengantarkan anak-anak dan generasi muda Islam menjadi Muslim sejati yang diidolakan orang tua.

Kontras dengan cara pandang di atas adalah pandangan yang juga dimiliki oleh sebagian umat Islam. Mereka lebih cenderung memilih lembaga-lembaga pendidikan umum dengan pertimbangan jaminan mutu serta jaminan pekerjaan yang bakal diperoleh setelah lulus. Bagi mereka ini, lembaga pendidikan yang berlabel Islam cenderung dipandang sebagai tradisional, ketinggalan zaman, dan oleh karena itu mutu dan kesempatan kerja setelah lulus tidak terjamin.

Realitas cara pandang umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan itu, kemudian berimplikasi kepada respon para pembuat kebijakan pendidikan (baca: pemerintah) yang menetapkan adanya dua versi lembaga pendidikan, yakni pendidikan umum dan pendidikan agama, yang dalam implementasinya seringkali menimbulkan perlakuan diskriminatif. Bukti dari perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan umum di satu sisi dengan pendidikan keagamaan di sisi lain, adalah pada kebijakan dua kementerian/departemen, di mana Departemen Pendidikan Nasional mengurus lembaga-lembaga pendidikan umum dengan berbagai fasilitas dan dana yang relatif



"melimpah", sementara Departemen Agama mengelola lembaga-lembagapendidikan keagamaan dengan fasilitas dan pendanaan yang "amat terbatas".

Keterbatasan dana, fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kebanyakan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pendidikan di banyak madrasah dan lembaga pendidikan sejenisnya. Akibatnya, pengelolaan madrasah tidak dapat optimal dan seringkali menyebabkan mutu lulusan madrasah kurang mampu bersaing dengan lembaga-lembagasetingkat yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional.

Dampak lain yang tidak kalah seriusnya dari dikhotomi keilmuan antara ilmu-ilmu agama Islam di satu sisi dengan ilmu-ilmu umum di sisi lain adalah terhadap kerangka filsafat keilmuan Islam. Kendati dikhotomi keilmuan Islam telah terjadi semenjak beberapa abad yang lampau, namun dampaknya terhadap kerangka filsafat keilmuan Islam dirasakan semakin serius pada masa-masa kemudian. Salah satu kerangka keilmuan Islam yang kurang "lazim" bila dibandingkan dengan kerangka filsafat keilmuan "sekuler" adalah kurang dikenalnya konsep paradigma, normal sains, anomali, dan revolusi sains, yang selama ini "mengatur" perkembangan dan pertumbuhan sains modern.

Kerangka keilmuan Islam justru dihindangi romantisisme yang menjadikan masa lalu justru sebagai kerangka utama--kalau bukan satu-satunya, pola berpikir umat Islam. Romantisisme dalam arti yang sederhana memang diperlukan, terutama untuk menghindari terjadinya proses pencabutan pemikiran kontemporer dengan sejarah keilmuan masa lampau. Tetapi apabila romantisisme

mendominasikerangka berpikir keilmuan umat Islam, maka dinamika dan revolusi keilmuan Islam tidak akan pernah terwujud.

Implikasi lain dari dikhotomi keilmuan terhadap kerangka filsafat keilmuan Islam adalah berkembangnya pemikiran yang mempertentangkan secara diametral antara rasio dan wahyu serta antara ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah. Di kalangan umat Islam berkembang pemikiran bahwa wahyu adalah sumber utama ilmu sembari mendiskriminasi fungsi dan peran rasio sebagai sumber ilmu. Di kalangan umat Islam juga berkembang suatu kesadaran untuk menjadikan ayat-ayat qauliyah sebagai objek kajian pokok, tetapi mengabaikan ayat-ayat kauniyah yang justru menyimpan begitu banyak misteri dan mengandung khazanah keilmuan yang kaya.

Menyadari bahwa dampak dualisme atau dikhotomi keilmuan Islam telah begitu besar, para pemikir Muslim mulai menggagas konsep integrasi keilmuan Islam, yang mencoba membangun suatu keterpaduan kerangka keilmuan Islam, dan berusaha menghilangkan dikhotomi ilmu-ilmu agama di satu pihak dengan ilmu-ilmu umum di pihak lain.

### **Rencana Aksi (*Action Plan*)**

Wacana integrasi ilmu sudah muncul dan berkembang di Indonesia pada umumnya dan di lingkungan PTAI khususnya, tetapi hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah kongkrit dilakukan, baik oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebagai pemangku otoritas tertinggi peminatan PTAI maupun oleh para pimpinan PTAI. Hingga saat ini upaya yang dilakukan baru terbatas pada penyelenggaraan diskusi, seminar, dan konferensi. Dalam lima tahun terakhir

topik tentang integrasi ilmu selalu dibahas oleh banyak pembicara dalam *Annual Conference on Islamic Studies (AICIS)* yang diselenggarakan oleh pihak Dirjen Pendis Kemenag.

Perubahan paradigma keilmuan dari dikotomi ke integrasi hanya akan terwujud jika wacana yang ada diterjemahkan dalam bentuk rencana aksi (*action plan*) yang baik. Sebuah rencana aksi sangat diperlukan agar langkah-langkah menuju interaksi ilmu di lingkungan PTAI benar-benar terencana, terarah, terukur, dan terlaksana dengan efektif.

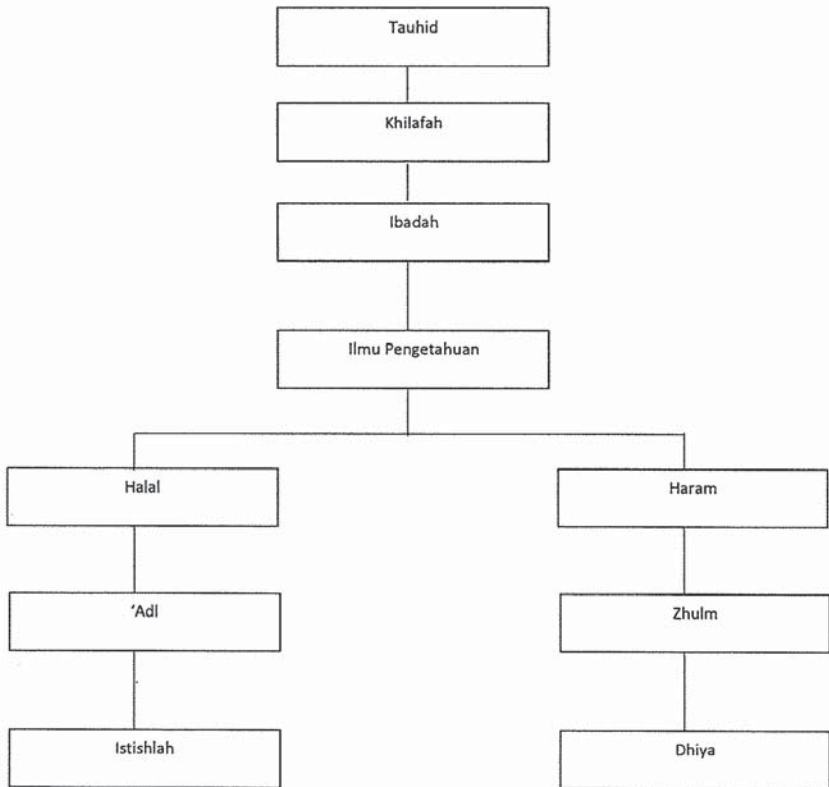
Sebelum program integrasi ilmu digulirkan, perlu disiapkan sarana aksi (*action vehicles*) dan mekanisme atau struktur yang dapat mendorong terjadinya perubahan dan melembagakannya. Saat ini banyak sekali model integrasi ilmu yang dikembangkan oleh para sarjana atau ilmuwan Muslim di berbagai lembaga dan negara. Tanpa harus seragam, masing-masing lembaga perlu memantapkan model integrasi yang mana yang akan diimplementasikan. Model tersebut bisa diadopsi atau diadaptasi dari model yang sudah ada, bisa juga merupakan sintesis dari beberapa model yang telah ada, dan bisa juga merupakan model yang benar-benar baru atau berbeda dari model-model yang sudah ada, yang jumlahnya sangat banyak.

Thoyar (2013) mengidentifikasi 10 model integrasi ilmu yang berkembang di berbagai negara dan lembaga Islam, yaitu;

#### *1. Model IFIAS*

Thoyar (2013) mencatat bahwa model integrasi ilmu ala IFIAS (*International Federation of Institutes of Advance Study*) terlahir pada seminar tentang "*Knowledge and Values*" di Stockholm pada bulan September 1984. Model tersebut divisualisasikan dalam gambar 2.

Gambar 2: Model Integrasi Keilmuan IFIAS



## 2. Model Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)

Model integrasi ilmu ala Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) pertama kali muncul pada bulan Mei 1977. Menurut observasi Thoyar (2013), model ini adalah model integrasi ilmu yang penting di Malaysia, karena model ini terlahir dari kerjasama parailmuwan Muslim di Malaysia yang pertama untuk “menghidupkan tradisikeilmuan yang berdasarkan pada ajaran kitab suci al-Qur’an. Model integrasi ala ASASI ini “ingin

mendukung dan mendorong pelibatan nilai-nilaidan ajaran Islam dalam kegiatan penelitian ilmiah; menggalakkan kajiankeilmuan di kalangan masyarakat; dan menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasidan petunjuk serta rujukan dalam kegiatan-kegiatan keilmuan.

Menurut konsep ASASI, bahasa Arab adalah bahasa al-Qur'an yang harus menjadi bahasa ilmu pengetahuan di seluruh Dunia Islam, danbahasa persatuan bagi para ilmuan Muslim, untuk memajukan sains dan teknolog dalam masyarakatIslam. Konsep integrasi ilmu model ASASI banyak merujuk pada epistemologi Islam yang dikembangkan oleh para ulama klasik, seperti al-Ghazali, yang padaumumnya menggunakan pendekatan fiqh di satu sisi dan pendekatan para filosofseperti al-Farabi di sisi lain.

Model integrasi ilmu ala ASASI berpijak pada pandangan klasik bahwa ilmu bisa bersifat *ilmufard 'ain* (wajib bagi setiap manusia Islam), *ilmu fard kifayah* (wajib olehmasyarakat Islam yang perlu dikuasai oleh beberapa orang individu, ilmu mubah yangmelebihi keperluan, dan ilmu sia-sia yang haram. Model ASASI menggagas kesatuandan integrasi keilmuan sebagai satu ciri sains Islam yang berdasarkan Keesaan Allah.

### 3. Model Islamic Worldview

Model *Islamic Worldview* (IW) berangkat dari pandangan bahwa pandangan dunia Islam (*Islamicworldview*) merupakan dasar bagi epistemoligi keilmuan Islam secara menyeluruh danintegral. Dua pemikir Muslim yang secara intens menggagas dan mengembangkanmodel ini adalah Alparslan Acikgenc, Guru Besar Filsafat pada Fatih University,Istanbul Turki. Ia

mengembangkan empat pandangan dunia Islam sebagai kerangkakomprehensif keilmuan Islam, yaitu:

- a. Iman sebagai dasar struktur dunia (*worldstructure, îmân*).
- b. Ilmu sebagai struktur pengetahuan (*knowledge structure, al-'ilm*).
- c. Fikih sebagai struktur nilai (*value structure, al-fiqh*).
- d. Kekhalifahan sebagaistruktur manusia (*human structure, khalifah*).

#### 4. Model Struktur Pengetahuan Islam

Model Struktur Pengetahuan Islam (SPI) banyak dibahas dalam berbagaitulisan Osman Bakar, Professor of Philosophy of Science pada University of Malaya. Menurut Osman Bakar, secara sistematis ilmu telah diorganisasikan dalam berbagai disiplin akademik. Baginya, membangun SPI adalah bagian integral dari upaya mengembangkan pola integrasi ilmu. Menurut Osman Bakar, ilmu dan agama memiliki hubungan yang komprehensif. Ia sangat yakin bahwa integrasi ilmu dan agamahnya mungkin dilakukan jika umat Islam mengakui kenyataan bahwa pengetahuan (*knowledge*) secara sistematis telahdiorganisasikan dan dibagi ke dalam sejumlah disiplin akademik.

Osman Bakar mengembangkan empat komponen yang ia sebut sebagaistruktur pengetahuan teoretis (*the theoretical structure of science*). Komponen pertama, berkenaan dengan apa yang disebut dengan subjek dan objek matter ilmu yang membangun tubuh pengetahuan dalambentuk konsep (*concepts*),

fakta (*facts, data*), teori (*theories*), dan hukum atau kaidah ilmu (*laws*), serta hubungan logis yang ada padanya.

Menurutnya untuk membangun kerangka pengetahuan ke-Islam-an, keempatstruktur pengetahuan itu, perlu diformulasikan dengan menghubungkannya dengan tradisi keilmuan Islam (*Islamic sciences*) seperti teologi (*theology*), metafisika (*metaphysics*), kosmologi (*cosmology*), dan psikologi (*psychology*).

### 5. Model Bucaillisme

Model ini menggunakan nama salah seorang ahli medis Perancis, Maurice Bucaille, yang pernah mengejutkan dunia Islam ketika menulis suatu bukuyang berjudul "*La Bible, le Coran et la Science*", yang juga telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Model ini bertujuan mencari kesesuaian penemuan ilmiah dengan ayat al-Qur'an. Model ini banyak mendapat kritik, lantaran penemuan ilmiah tidak dapat dijamin tidak akan mengalami perubahan di masa depan.

Menganggap al-Qur'an sesuai dengan sesuatu yang masih bisa berubah berarti menganggap al-Qur'an juga bisa berubah. Model ini di kalangan ilmuwan Muslim Malaysia biasa disebut dengan "Model Remeh" karena sama sekali tidak mengindahkan sifat kenisbian dan keabadian penemuan dan teori sains Barat dibanding dengan sifat mutlak dan abadi al-Qur'an. Penemuan dan teori sains Barat berubah-ubah mengikut perubahan paradigma, contohnya dari paradigma klasik Newton yang kemudian berubah menjadi paradigma quantum Planck dan kenisbian Einstein. Model ini mendapat kritik tajam karena, apabila ayat al-Qur'an dinyatakan sebagai bukti kebenaran suatu teori dan teori tersebut mengalami perubahan,

maka kewibawaan al-Qur'an akan rusak karena membuktikanteori yang salah mengikuti paradigma baru ini.

#### 6. Model Integrasi Keilmuan Berbasis Filsafat Klasik

Model Integrasi Keilmuan Berbasis Filsafat Klasik berusaha menggali warisanfilsafat Islam klasik. Salah seorang sarjana yang berpengaruh dalam gagasan model iniadalah Seyyed Hossein Nasr. Menurut Seyyed Hossein Nasr pemikir Muslim klasikberusaha memasukkan *tawhîd* ke dalam skema teori mereka. Prinsip *tawhîd*, yaituKesatuan Tuhan dijadikan sebagai prinsip kesatuan alam *tabi'i (thabi'ah)*<sup>1</sup>. Parapendukung model ini juga yakinbahwaalam *tabi'i* hanyalah merupakan tanda atau ayatbagi adanya wujud dan kebenaran yang mutlak. Hanya Allah-lah Kebenaran Sebenar-benarnya,dan alam *tabi'i* ini hanyalah merupakan wilayah kebenaran terbawah. Bagi Seyyed Hossein Nasr, ilmuwan Islam moden hendaklah mengimbangi dua pandangantanzîh dan *tasybih* untuk mencapai tujuan integrasi keilmuan ke-Islaman.

#### 7. Model Integrasi Keilmuan Berbasis Tasawuf

Pemikir yang terkenal sebagai penggagas integrasi keilmuan Islam yang dianggap bertitik tolak dari tasawuf ialah Syed Muhammad Naquib al-Attas, yangkemudian ia istilahkan dengan konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan (*Islamization of Knowledge*). Gagasan ini pertama kali muncul pada saat konferendi Makkah, di mana pada saat itu, Al-Attas mengimbau dan menjelaskan gagasan "Islamisasi Ilmu Pengetahuan". Identifikasinya yang meyakinkan dan sistematis mengenai krisisepistemologi umat Islam sekaligus formulasi jawabannya



dalam bentuk Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini yang secara filosofis berkaitan, benar-benar merupakan prestasi inovatif dalam pemikiran Islam modern.

Formulasi awal dan sistematis ini merupakan bagian integral dan konsepsinya mengenai pendidikan dan universitas Islam serta kandungan dan metode umumnya. Karena kebaruan ide-ide yang dipresentasikan dalam kertas kerjanya di Makkah, tema-tema gagasan ini diulaskembali dan dijelaskan panjang lebar pada Konferensi Dunia yang Kedua mengenai Pendidikan Umat Islam pada 1980 di Islamabad.

Dalam karya-karyanya, ia mencoba menghubungkan deislamisasi dengan westernisasi, meskipun tidak secara keseluruhan. Dari situ, ia kemudian menghubungkan program Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini dengan dewesternisasi. Predikat ilmu masa kini sengaja digunakan sebab ilmu pengetahuan yang diperoleh umat Islam yang berasal dari kebudayaan dan peradaban pada masa lalu, seperti Yunani dan India, telah diislamkan.

Gagasan awal dan saran-saran yang konkret ini, tak pelak lagi, mengundang pelbagai reaksi dan salah satunya dari almarhum Isma'il al-Faruqi dengan agenda Islamisasi Ilmu Pengetahuannya.

#### *8. Model Integrasi Keilmuan Berbasis Fiqh*

Model ini digagas oleh almarhum Ismail Raji al-Faruqi. Pada tahun 1982 ia menulis sebuah buku berjudul *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan* diterbitkan oleh *International Institute of Islamic Thought*, Washinton. Menjadikan al-Faruqi sebagai penggagas model integrasi

keilmuan berbasis fiqh memang tidak mudah, lebih-lebih karena ia termasuk pemikir Muslim pertama yang mencetuskan gagasan perlunya Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

Masalahnya pemikiran integrasi keilmuan Islam al-Faruqi tidak berakar pada tradisi sains Islam yang pernah dikembangkan oleh al-Biruni, Ibnu Sina, al-Farabi dan lainnya, melainkan berangkat dari pemikiran ulama fiqh dalam menjadikan al-Qur'an dan Assunnah sebagai puncak kebenaran. Kaidah *fiqh* ialah kaedah penentuan hukum *fiqh* dalam ibadah yang dirumuskan oleh para ahli *fiqh* Islam melalui deduksi al-Qur'an dan keseluruhan korpusal-Hadits. Pendekatan ini sama sekali tidak menggunakan warisan sains Islam yang dipelopori oleh Ibn Sina, al-Biruni dan sebagainya. Bagi al-Faruqi, "sains Islam" seperti itu tidak Islami karena tidak bersumber dari teks al-Qur'an dan Hadis.

### 9. Model Kelompok Ijmali (*Ijmali Group*)

Pendekatan *ijmali* dipelopori oleh Ziauddin Sardar yang memimpin sebuah kelompok yang dinamainya kumpulan *ijmali* (*ijmali group*). Menurut Ziauddin Sardar tujuan sains Islam bukan untuk mencari kebenaran akan tetapi melakukan penyelidikan sains menurut kehendak masyarakat Muslim berdasarkan etos Islam yang digali dari al-Qur'an. Sardar yakin bahwa sains adalah sarat nilai (*value bounded*) dan kegiatan sains lazim dijalankan dalam suasana pemikiran atau paradigma tertentu.

Pandangan ini mengikuti konsep paradigma ilmu Thomas Kuhn. Sardar juga menggunakan konsep '*adl* dan *zulm*' sebagai kriteria untuk menentukan bidang sains yang perlu dikaji dan

dilaksanakan. Walaupun Sardar yakin dengan pendekatan Kuhn yang bukan hanya merujuk kepada sistem nilai saja, tetapi kebenaran sains itu sendiri, namun ia tidak langsung membicarakan kebenaran teori sains Barat itu sendiri.

Pandangan Sardar ini seakan-akan menerima semua penemuan sains Barat modern dan hanya prihatin terhadap sistem nilai atau etos yang mendasari sains tersebut. Dengan menggunakan beberapa istilah dari al-Qur'an seperti *tawhîd*, *'ibadah*, *khilafah*, *halal*, *haram*, *taqwa*, *'ilm* dan *istislah*. Hampir senada dengan al-Faruqi, konsep-konsep yang dikemukakan oleh Sardar tidak merujuk pada tradisi sains Islam klasik. Bagi Sardar sains adalah "*is abasic problem-solving tool of any civilization*" (perangkat pemecahan masalah utamasetiap peradaban).

Sardar juga menolak gagasan Nasr tentang islamisasi ilmu yang berpangkal dari tradisi filsafat Islam klasik. Menurut Sardar, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Raghav, *Sardar dismisses Nasr's formulations as inadequate and one-sided, advising us: "The exponents of Islamic science must go beyond gnosis to produce something that is clearly distinguishable as science"*. Kendati keduanya sepakat bahwa ilmu tidak netral, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Gill.

#### 10. Model Kelompok Aligargh (Aligargh Group)

Model ini dipelopori oleh Zaki Kirmani yang memimpin Kelompok Aligargh University, India. Model Kelompok Aligargh menyatakan bahwa sains Islam berkembang dalam suasana *'ilm* dan *tasykir* untuk menghasilkan gabungan ilmu dan etika. Pendek kata, sains Islam adalah sekaligus sains dan etika. Zaki Kirmani menetapkan model penelitian yang

berdasarkan wahyu dan takwa. Ia juga mengembangkan struktur sains Islam dengan menggunakan konsep paradigma Thomas Kuhn. Kirmani kemudian menggagas makro paradigma mutlak, mikro paradigma mutlak, dan paradigma bayangan.

## Membuat Desain Operasional

Harus diakui bahwa saat ini hampir semua sepakat bahwa integrasi ilmu adalah solusi yang tepat bagi problematika keilmuan di PTAI. Mantan Menteri Agama, Surya Dharma Ali, bahkan sangat yakin bahwa integrasi ilmu adalah format pengembangan keilmuan masa depan di lembaga-lembaga pendidikan Islam dan dapat menjadi distingsi studi-studi keislaman di Indonesia. Tetapi semangat tersebut belum diimbangi dengan langkah-langkah yang riil menuju integrasi ilmu. Untuk itu maka diperlukan sebuah desain operasional yang jelas, realistis, dan *workable*. Desain operasional tersebut perlu merumuskan ruang lingkup dan atau jenjang program integrasi ilmu.

Desain operasional program integrasi ilmu perlu memuat hal-hal berikut:

1. Rumusan dan definisi semua langkah dan kegiatan integrasi ilmu yang jelas dan yang harus dikerjakan.
2. Ada struktur manajemen yang diperlukan dan *task force* yang menjadi *leading sector* dalam menjalankan program integrasi ilmu.
3. Ada beberapa strategi untuk membangun komitmen dan mekanisme untuk mengkomunikasikan perubahan.
4. Ada distribusi sumber daya yang dimiliki secara tepat.

5. Skema dan pola keterlibatan semua anggota sivitas akademika, baik langsung maupun tidak langsung, dalam semua aspek dan tahapan program integrasi ilmu. Pastikan bahwa setiap langkah menuju integrasi ilmu melibatkan dan memberdayakan para anggota sivitas akademik.
6. Mekanisme dan sarana untuk menginformasikan secara terbuka setiap tahap perkembangan yang terjadi dalam proses menuju integrasi ilmu.
7. Integrasi ilmu harus menyentuh semua aktifitas Tri Dharma dan melibatkan semua unsur terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu untuk efektifitas agenda integrasi ilmu diperlukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Pastikan bahwa program-program integrasi ilmu tidak berbelit-belit atau bertele-tele, sehingga dapat menjemukan dan membosankan.
  - b) Perlu ada tim khusus yang memonitor dan menilai setiap tahapan program menuju integrasi ilmu. Dalam hal ini maka perlu ada fasilitasi terhadap upaya-upaya perbaikan.
  - c) Pastikan bahwa program-program yang terkait dengan integrasi ilmu terlaksana secara efisien (*low cost*), tidak *high cost* atau menghambur-hamburkan uang, agar tidak mengganggu program-program lain.
  - d) Untuk menjaga semangat dan antusiasme, maka perlu ada pengakuan (*recognition*) dan perayaan (*celebration*) bagi setiap prestasi dan kemajuan yang dicapai dalam upaya menuju integrasi ilmu.

- e) Setiap tahapan langkah integrasi ilmu perlu memiliki tujuan yang jelas dan acuan mutu yang baku (*quantified goals and benchmarking*).
- f) Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program integrasi ilmu harus tetap fokus pada proses yang dijalankan dan rencana-rencana perbaikan yang telah disusun.

### **Menyamakan Persepsi dan Menciptakan Prakondisi**

Program integrasi ilmu tidak mungkin berjalan efektif apabila masih ada miskomunikasi, kesalahfahaman, keengganan, dan *like and dislike* diantara anggota sivitas akademika. Untuk itu, sebelum program integrasi ilmu digulirkan, para pimpinan PTAI dan anggota sivitas akademikanya telah sepakat untuk menjadikan integrasi ilmu sebagai agenda bersama (*collective agenda*) dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi keilmuan di PTAI.

Program integrasi ilmu bukanlah program rutin, tetapi merupakan bagian dari peta jalan (*road map*) menuju perubahan paradigma keilmuan, menurut Amin Abdullah, dari paradigma “*dichotomistics-atomistics*” menuju paradigma keilmuan “*integrative-interdisciplinary*”. Karena itu program integrasi ilmu membutuhkan banyak waktu, pemikiran, dan komitmen.

Sebelum mengimplementasikan program integrasi ilmu, lakukan penilaian terhadap realitas kekinian yang ada di lembaga PTAI, misalnya, beberapa prakondisi yang terkait dengan sejarah kelembagaan, kebutuhan kekinian, kegiatan-kegiatan pendahuluan yang mengawali integrasi ilmu, dan kualitas kerja para anggota sivitas akademika. Jika realitas kekinian yang ada

tidak memenuhi kebutuhan prakondisi, maka program integrasi ilmu perlu ditunda sehingga kondisi kelembagaan ada dalam posisi yang memungkinkan agenda integrasi ilmu berjalan sukses.

Agar setiap aspek dan tahapan program ntegrasi ilmu dapat berjalan efektif dan efisien. Prakondisi tersebut perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kemauan para pimpinan PTAI untuk berubah (*the will to change*) dan komitmen mereka untuk memfasilitasi dan mendukung agenda-agenda menuju integrasi ilmu.
2. Kesiapan para anggota sivitas akademika di PTAI untuk menerima program integrasi ilmu dengan sikap positif (*positif thinking*) dan pandangan terbuka (*open minded*).
3. Mantapkan Pemahaman bahwa mengembangkan paradigma integrasi lmu adalah sebuah program jangka panjang, bukan program jangka pendek.

### **Pinsip-prinsip Utama dalam Integrasi Ilmu**

Program integrasi ilmu perlu memiliki pronsp-prinsip yang dapat menjadi patokan kerja semua unsur yang terlibat di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), misalnya, melalui proses penilaian dan pengukuran sistematis (*systematic measurement*) dan atau PDCA: Plan (*drive, direct*), Do (*deploy, support, participate*), Check (*review*), Act (*recognize, communicate, revise*).
2. Pemberdayaan staf, misalnya melalui pelatihan, dorongan, pengukuran dan pengakuan.

3. Pengambilan keputusan berbasis fakta (*fact based decision making*), dengan memanfaatkan data statistik, bukan berbasis opini atau kewenangan semata.
4. Mengatasi setiap masalah secara bersama-sama, misalnya, dengan menerapkan TOPS (*Team Oriented Problem Solving*).
5. Jangan pernah berkompromi soal kualitas dan terapkan standar sesuai kebutuhan dan tuntutan integrasi ilmu.

### **Kepemimpinan dan Hambatannya**

Untuk merealisasikan integrasi ilmu di PTAI, seyogyanya para pimpinan PTAI harus menjadi penggerak utama dan terlibat langsung dalam mempromosikan ide integrasi ilmu dan harus dapat meyakinkan semua pihak bahwa integrasi ilmu akan menghantarkan semuanya menuju cita-cita yang telah digantungkan. Di sinilah, pimpinan PTAI harus terlibat secara penuh sebagai pemimpin, bukan hanya mengandalkan staf tertentu yang ditugaskan.

Selain itu, pimpinan PTAI perlu mengkomunikasikan setiap perubahan yang terjadi dengan mengembangkan mekanisme komunikasi yang tidak biasa, misalnya, melalui rapat khusus yang melibatkan semua anggota sivitas akademika dan atau menerbitkan *newsletters* integrasi ilmu. Dengan demikian, ia perlu memastikan bahwa Integrasi ilmu adalah strategi yang tepat untuk pengembangan paradigma keilmuan di PTAI. Untuk itu maka perlu analisis yang cermat untuk memastikan apa kebutuhan untuk berubah dan apakah integrasi ilmu adalah strategi yang tepat.

Pastikan juga bahwa gaya kepemimpinan dan struktur kelembagaan sejalan dengan semangat integrasi ilmu. Jika tidak



maka struktur tersebut harus diperbaiki atau jika tidak bisa diperbaiki maka agenda integrasi ilmu perlu ditunda atau dibatalkan sampai ada kondisi yang benar-benar memungkinkan untuk menggulirkan agenda integrasi ilmu.

Dan yang terpenting harus diingat betul, bahwa integrasi ilmu adalah sebuah proses jangka panjang (*a long-term process*), sulit, dan komprehensif. Karena itu maka para pimpinan PTAI perlu memberikan dukungan dan komitmen terus menerus, tidak bersifat sesaat saja. Para pimpinan PTAI perlu memastikan bahwa program integrasi ilmu memiliki tujuan yang jelas (*purpose driven*) dan terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari (*day-to-day activities*) di PTAI.

Mewujudkan integrasi ilmu tentu bukanlah suatu hal mudah dan instan. Karenanya, berbagai hambatan pasti terjadi akan menggagalkan proyek integrasi ilmu ini. Ada beberapa hal yang dapat menggagalkan program integrasi ilmu, di antaranya;

1. Kurangnya perhatian terhadap perencanaan strategis (*strategic planning*) dan kompetensi utama (*coe competencies*).
2. Budaya organisasi yang kaku dan usang (*outdated*), sehingga menghambat komunikasi internal.
3. Kurangnya pemberdayaan anggota sivitas akademika dan kurangnya kepercayaan (*trust*) mereka terhadap pimpinan.
4. Adanya pandangan bahwa integrasi ilmu adalah sebuah perubahan yang cepat terwujud.
5. Tidak adanya *long term financial support*.
6. Adanya intrik-intrik politik





## MUTU AKADEMIK DAN TRADISI ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

*Mutu akademik yang baik dan kuat akan menumbuhkan tradisi ilmiah yang baik, dan tradisi ilmiah yang baik akan berkembangnya berbagai kegiatan keilmuan*

### **Membangun Visi dan Misi Kolektif**

**S**ETELAH MENDAPAT legitimasi melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 30, Pendidikan Tinggi Keagamaan, dengan segala variannya, universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi atau ma'had aly, pasraman, dan seminari, menghadapi tugas berat, yaitu membuktikan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) bukan perguruan tinggi tinggi "kelas dua" atau "pelengkap penderita" dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, tetapi merupakan perguruan tinggi alternatif yang memiliki kredibilitas dan akutabilitas tinggi untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan masyarakat Indonesia yang cerdas dalam tatakelolah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kepercayaan (*trust*) dari pemerintah dan masyarakat akan diperoleh apabila lembaga-lembaga pendidikan tinggi

keagamaan, termasuk PTAI, menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, lembaga-lembaga pendidikan tinggi mengemban tiga fungsi utama, yaitu: “*a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora*” (lihat Pasal 4).

Untuk dapat menjalankan tiga fungsi tersebut, seluruh anggota sivitas akademika yang ada di lingkungan PTAI dituntut untuk membangun visi dan misi kolektif dalam rangka meningkatkan mutu akademik, yaitu “*sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi*” (Pasal 11 UU 12, 2012). Berbagai aspek pelayanan akademik dan kegiatan Tri Dharma di PTAI harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berorientasi pada masa depan, dengan mengacu pada standar yang tinggi dan teruji.

Para anggota sivitas akademika dituntut untuk dapat mengambil peran dalam mengembangkan mutu akademik melalui interaksi sosial yang dilakukan dalam berbagai kegiatan Tri Dharma dan “*memperlakukan ilmu pengetahuan dan teknologisebagai proses dan produk serta sebagai amal danparadigma moral* (Pasal 11 (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012). Mereka juga dituntut untuk secara sistematis,

bertahap, dan berkelanjutan membangun ruang dan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya mutu akademik.

Mutu akademik adalah fondasi bagi semua aspek pengembangan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Mutu akademik yang baik dan kuat akan menumbuhkan tradisi ilmiah yang baik pula, dan tradisi ilmiah yang baik akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai kegiatan keilmuan. Tradisi ilmiah yang baik adalah lingkungan yang kondusif bagi para anggota sivitas akademika untuk menjalankan berbagai aktifitas keilmuan, karena hanya tradisi ilmiah yang dapat secara optimal memberikan kebebasan berfikir, berkarya, dan berpendapat.

Tradisi ilmiah yang baik memotivasi dan menginspirasi para ilmuwan untuk terus berkarya, menghasilkan yang terbaik. Tradisi ilmiah yang baik juga memberikan kesempatan yang sama kepada para ilmuwan untuk mengoptimalkan aktivitas, kreativitas, dan produktifitas mereka, siapapun mereka dan apapun latar belakang mereka. Mereka bebas berkarya sesuai minat dan kemampuan masing-masing dalam suasana komunitas yang sehat dimana mereka satu sama lain saling menakar dan mengapresiasi performa masing-masing berdasarkan prestasi dan kinerja, tidak berdasarkan koneksi atau kedekatan atau latar belakang sosial, ekonomi, dan politik.

### **Beberapa Agenda Penting**

Peningkatan mutu dan pengembangan tradisi ilmiah di lingkungan PTAI harus dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan dan agenda kongkrit yang diintegrasikan dengan rencana pengembangandan program kerja di semua jenis, jalur,

dan jenjang institusi yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan pengembangan PTAI.

Berikut ini adalah beberapa agenda yang diperlukan untuk dapat mendorong peningkatan mutu akademik dan pengembangan tradisi ilmiah di lingkungan PTAI.

### 1. Perjelas Pembidangan Ilmu dan Gelar Kesarjanaan

Saat ini peningkatan mutu akademik di lingkungan PTAI cukup “terganggu” atau “terkendala”, untuk tidak mengatakan “terhambat” oleh Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 36 tahun 2009 tentang *Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama (PTA)*. Sejak diberlakukan pada tanggal 19 Nopember 2009, Permenag tersebut sudah menjadi “buah bibir” para pengelola PTAI karena beberapa karakteristik dari Permenag tersebut kurang bersahabat dengan realitas atau dinamika dan trend perkembangan keilmuan di PTAI. Berikut beberapa catatan terkait dengan Permenag tersebut:

#### a) *Lingkup Isi dan Kewenangan*

Dilihat dari judulnya Permenag Nomor 36 tahun 2009 hanya mengatur bidang ilmu dan gelar akademik di lingkungan PTA. Tetapi pada lampirannya ternyata Permenag tersebut juga mengatur nama-nama prodi dan gelar kejarjanaan yang mnyertainya. Terkait dengan lampirannya, Permenag Nomor 36 tahun 2009 tidak hanya mengatur bidang, prodi, dan gelar kejarjanaan untuk ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mengatur bidang, prodi dan gelar kejarjanaan untuk ilmu-ilmu umum.

Lingkungan pengaturan tersebut tidak jadi masalah jika pihak Kemendikbud tidak mengatur hal yang sama. Tetapi

ketika pihak Kemdikbud juga mengatur hal yang sama, yaitu melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 163/DIKTI/Kep/2007 tentang *Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi*, maka Permenag Nomor 36 tahun 2009 menjadi bermasalah dan menimbulkan tanda tanya: Apakah ada batasan kewenangan Kemdikbud dan Kemenag terkait dengan pengaturan bidang ilmu? Jika ada, dimana batasan tersebut? Kejelasan dan kepatuhan terhadap batasan tersebut sangat penting, karena terkait dengan kepastian hukum, dan kepastian hukum sangat diperlukan agar para pengelola PTAI dapat memastikan bidang ilmu, prodi, dan gelar akademik apa yang masuk dalam domain kewenangan Kemdikbud dan Kemenag.

*b) Konservatif dan Kurang Progressive*

Permenag Nomor 36 tahun 2009 cenderung berorientasi ke masa lalu dan masa kini, belum berorientasi ke masa depan. Permenag tersebut mengatur bidang-bidang keilmuan yang sudah ada (*existing fields of knowledge*), kurang mengantisipasi bidang-bidang keilmuan yang potensial untuk terus berkembang (*prospective fields of knowledge*). Permenag tersebut bagaikan palu godam yang menghantam para pengelola PTAI yang terlanjur “kreatif” dalam pengembangan bidang ilmu. Pada saat bersamaan, Permenag tersebut mengunci atau menutup peluang bagi tumbuh dan berkembangnya pembedaan ilmu dan program studi di lingkungan PTAI.

Selain mematikan kreatifitas keilmuan di PTAI, Permenag tersebut juga bertentangan dengan sifat dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus bertambah dan berkembang. Agar

dapat diterima (*acceptable*) dan dapat diterapkan (*applicable*) di PTAI, Permenag Nomor 36 tahun 2009 perlu direvisi agar tidak hanya mengatur bidang-bidang ilmu yang saat ini sudah ada dan berkembang di lingkungan PTAI, tetapi hendaknya juga lebih futuristik atau berorientasi ke masa depan, mengatur potensi berkembangnya bidang ilmu dan prodi baru di lingkungan PTAI.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan sulitnya penerapan Permenag Nomor 36 tahun 2009 di lingkungan PTAI adalah karena sifat dan isinya yang tidak merepresentasikan dinamika perkembangan dan harapan yang terjadi di lingkungan PTAI. Jika tidak direvisi, Permenag tersebut akan terus mengecewakan dan bahkan membuat frustrasi siapapun yang ingin melihat PTAI terus berkembang dan mampu merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menjawab tuntutan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Jika Permenag Nomor 36 tahun 2009 tidak direvisi, maka lembaga-lembaga PTAI akan selalu *out of date* dan frustrasi, bahkan depresi, karena tidak dapat merespons dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjawab tuntutan masyarakat. Akibatnya, lembaga-lembaga PTAI akan selalu tertinggal menjadi perguruan tinggi “kelas dua”, dan dilupakan masyarakat. Permenag tersebut perlu direvisi agar tidak hanya mengatur bidang-bidang ilmu yang sudah ada di lingkungan PTAI, tetapi juga mengatur bidang-bidang ilmu yang akan ada dan diharapkan ada di PTAI.

### *c) Kurang Proporsional*

Dari perspektif politik hukum Permenag Nomor 36 tahun 2009 sangat kuat, tetapi kurang proporsional, terlalu tinggi atau



ketinggian, karena di lingkungan Perguruan Tinggi Umum (PTU) pembedangan ilmu diatur dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 163/DIKTI/Kep/2007 tentang *Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi*.

Walaupun lebih rendah dari perspektif hukum, Keputusan Dirjen Dikti tersebut lebih *workable*, *flexible*, dan *adaptable*, karena merevisi atau menegasi Keputusan Dirjen tentu saja lebih mudah dari merevisi atau menegasi Peraturan Menteri. Agar lembaga-lembaga PTAI memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi dalam dinamika perkembangannya, sebaiknya masalah pembedangan ilmu dan penetapan gelar akademik untuk lembaga-lembaga PTAI tidak diatur dengan Permenag, tetapi cukup dengan Keputusan Dirjen Pendis saja.

#### d) *Overlapping*

Karena turut mengatur nama-nama program studi dan gelar akademik, Permenag Nomor 36 tahun 2009 *overlapping* dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 163/DIKTI/Kep/2007 tentang *Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi*, khususnya terkait dengan nama-nama program studi dan gelar akademik untuk program studi umum yang ada di lingkungan PTAI. Beberapa program studi yang diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti diatur juga dalam Permenag dengan kriteria jenjang keserjanaan dan gelar akademik yang berbeda.

Agar para pengelola PTAI tidak bingung dan tidak mendua, dan sebelum ada otoritas pengaturan bidang keilmuan yang lebih luas bagi Kemenag, sebaiknya Permenag hanya mengatur bidang ilmu-ilmu keislaman saja beserta gelar kesarjanaannya.

## 2. Pertegas Orientasi Pendidikan

Selain membenahi skema pembidangan ilmu dan gelar kesarjanaannya, langkah fundamental yang perlu dilakukan oleh PTAI untuk meningkatkan mutu akademik dan membangun tradisi ilmiah adalah mempertegas orientasi pendidikan di berbagai program studi yang telah dan akan diselenggarakan.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi adalah “kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.” Dijelaskan bahwa “pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”; “Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan”; dan “Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.”

Semua program studi yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, termasuk PTAI, adalah bagian terdepan dan paling menentukan dari proses pendidikan tinggi

yang diberikan. Kompetensi, gelar akademik, dan daya saing para lulusan perguruan tinggi banyak ditentukan oleh mutu pelayanan pendidikan yang mereka terima dari program studi. Mereka dilihat, dinilai, dan diuji oleh masyarakat berdasarkan kompetensi yang dijanjikan oleh program studi yang melahirkan mereka. Kompetensi tersebut direfleksikan oleh desain kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan oleh para dosen.

Jika dilihat dari namadan tujuannya, berbagai prodi yang diselenggarakan di lingkungan PTAI sudah cukup jelas orientasi pendidikannya, tetapi jika dilihat dari kurikulum, desain kegiatan perkuliahan, dan kompetensi para lulusannya, banyak program studi yang tidak jelas orientasi pendidikannya. Belum ada penegasan apakah prodi-prodi tertentu menyelenggarakan pendidikan vokasional atau pendidikan profesional atau pendidikan akademik. Meskipun beberapa prodi sangat jelas merupakan pendidikan profesional, tetapi prodi-prodi tersebut cenderung diperlakukan sebagai program pendidikan akademik. Dengan ketidakjelasan ini, sangat sulit bagi para pengelola PTAI untuk mengintegrasikan visi pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran dengan kompetensi lulusan.

Ketidakjelasan orientasi pendidikan di berbagai prodi yang ada di lingkungan PTAI sudah berlarut-larut dan disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan non akademik. Misalnya, konservatisme dan romantisme masa lalu. Masih banyak pengelola PTAI yang berpendapat bahwa apa yang telah dirumuskan oleh para pendahulu mereka pada tahun 1960-an adalah format terbaik yang telah teruji oleh perubahan zaman. Karena itu, kelompok ini berpendapat, tidak ada alasan untuk merombak, apalagi menghapus prodi yang sudah ada.

Ada juga pengelola PTAI yang menyusun dan mengembangkan kurikulum dengan semangat bagi-bagi tugas dan bagi-bagi rezeki, bukan semangat peningkatan kompetensi keilmuan. Bagi mereka, mengakomodir kepentingan-kepentingan personal para dosen dalam kurikulum adalah lebih penting dan urgen ketimbang peningkatan relevansi keilmuan dan kompetensi lulusan.

### 3. Pertajam Kurikulum

Menurut pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, “kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.” Kurikulum pendidikan tinggi, menurut undang-undang tersebut, “dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.”

Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*the heart of education*). Seperti manusia, jantung yang sehat akan membuat pemiliknya sehat dan dapat beraktifitas dengan baik. Sebaliknya, jika jantung mengalami gangguan, maka pemiliknya akan merasa tidak nyaman dan tidak dapat beraktifitas dengan baik. Jantung yang sehat terpancar pada wajah yang cerah dan penuh gairah. Di lembaga pendidikan, kurikulum yang baik akan memberikan arah yang jelas, dinamika yang terukur, dan hasil yang diinginkan. Kurikulum yang tepat dan relevan dengan kompetensi prodi akan membuat prodi tersebut penuh dinamika

dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sebaliknya, kurikulum yang kurang relevan atau kurang tepat akan membuat prodi tidak punya *elan vital* untuk berkembang dalam rangka mewujudkan kompetensi keilmuan dan meahirkan lulusan yang berkualitas.

Jika dihitung secara matematis, hampir 45% isi kurikulum program studi yang ada di lingkungan PTAI tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kurikulum semua fakultas dan prodi belum sepenuhnya merepresentasikan visi masing-masing Prodi dan standar kompetensi lulusan yang dimiliki.

#### 4. Benahi Perpustakaan

Perpustakaan adalah fondasi utama bangunan sebuah lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan tinggi. Di salah satu dinding perpustakaan utama Universitas Berkeley terbetang sebuah hiasan dinding yang terbuat dari perunggu yang memuat tulisan yang dikutip dari ucapan salah seorang pendiri universitas tersebut: "*Give Me a Good Library, then I will Develop a Good University.*" Selain menegaskan betapa pentingnya perpustakaan bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi, ungkapan tersebut juga menegaskan betapa tidak mungkin kita dapat membangun lembaga pendidikan tinggi, meningkatkan mutu akademik, dan membangun tradisi ilmiah, jika kita menomorduakan, apalagi menyepelkan perpustakaan.

Pengalaman saya sebagai asesor BAN-PT membuktikan bahwa perpustakaan program sarjana dan pascasarjana di lingkungan PTAI memiliki sarana yang sangat minim dan koleksi yang sangat sangat terbatas. Misalnya, ada perpustakaan PPs yang tidak punya koleksi jurnal internasional dan atau

proceeding seminar dan atau disertasi yang relevan dengan kompetensi Prodi.

Perpustakaan yang kuat, lengkap, dan nyaman akan memberikan ruang gerak yang banyak dan kesempatan yang luas bagi para akademisi untuk mempelajari, mengembangkan, dan mendiseminasi ilmu pengetahuan. Di lembaga-lembaga pendidikan tinggi terkemuka di dunia, perpustakaan tidak pernah sepih dari pengunjung, karena perpustakaan adalah rumah kedua bagi para dosen dan mahasiswa. Untuk memfasilitasi kebutuhan akan perpustakaan, banyak perguruan tinggi yang membuka perpustakaannya 24 jam dan melengkapinya dengan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti ruang sanitasi, ruang istirahat, ruang makan, dan bahkan ruang mandi (*shower room*). Para pengelola lembaga-lembaga pendidikan tinggi seharusnya terus bekerja keras untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang paling nyaman di lingkungan kampus. Tata ruangnya, pencahayaannya, warna catnya, dan suhu udara diatur dan diukur sedemikian rupa, sehingga membuat para pengunjungnya merasa betah dan selalu rindu untuk kembali.

Faktanya, salah satu bagian terindah dan paling berkesan bagi para dosen dan mahasiswa adalah saat-saat mereka bekerja keras, berjuang melaksanakan segala aktifitas akademik di perpustakaan. Orang yang paling dikenal di lingkungan kampus bukanlah rektor atau dekan, tetapi para pustakawan, karena merekalah yang setiap saat melayani para dosen dan mahasiswa dengan penuh kecintaan dan dedikasi.

Sebaliknya, di sebagian besar kampus PTAI hari ini, bagian paling nyaman di lingkungan kampus adalah ruang para dekan dan rektor. Adapun perpustakaan, adalah tempat yang paling tidak menarik dan membosankan.

Jika suasana perpustakaan dapat mencerminkan mutu dan tradisi akademik di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, maka suasana perpustakaan di kampus-kampus PTAI saat ini mencerminkan bahwa mutu akademik dan tradisi ilmiah di lingkungan PTAI saat ini belum cukup berkembang.

#### 5. Ciptakan Keseimbangan antara Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Salah satu kendala terbesar untuk percepatan perkembangan lembaga PTAI di seluruh Indonesia adalah ketidakseimbangan antara kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Banyak agendapeningkatan mutu akademik berjalan sangat lambat atau tidak berjalan sama sekali karena lemahnya dukungan dari tenaga kependidikan. Saat ini terdapat kesenjangan yang lebar antara perkembangan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan perkembangan kualifikasi serta kompetensi tenaga kependidikan di lembaga-lembaga PTAI.

Kesenjangan ini adalah dampak dari kesalahan kolektif para pengelola PTAI. Selama ini, para pengelola PTAI terus berupaya mengembangkan berbagai program untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi para dosen atau tenaga pendidik, tetapi para karyawan atau tenaga kependidikan hanya dapat menunggu giliran atau panggilan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian yang intensitas dan kapasitasnya sangat-sangat terbatas. Akibatnya, banyak karyawan yang bertahun-tahun tidak pernah tersentuh oleh pelatihan yang benar-benar relevan dengan tugas pokok dan fungsi mereka di tempat kerja, sehingga kualifikasi dan kompetensi mereka dalam bekerja kurang dapat mengikuti

berbagai langkah peningkatan mutu akademik yang dijalankan oleh para pimpinan PTAI.

Dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi moderen, sangat diperlukan sinergi antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena itu perlu ada rancangan pembinaan dan fasilitasi yang sinergis pula untuk dua kategori tenaga tersebut, baik dalam hal kualifikasi maupun dalam hal kompetensi.

#### 6. Perbanyak dan Aktifkan Asosiasi Keilmuan

Mutu akademik di lingkungan PTAI akan tumbuh dan berkembang apabila para dosen, penulis, dan peneliti giat berkarya, berkomunikasi dan beriteraksi. Saat ini sebagian besar dosen atau ilmuan di lingkungan PTAI bekerja sendiri dan menikmati sendiri hasil karyanya. Mereka jarang terlibat dalam dialog-dialog keilmuan, sehingga cenderung merasa hebat dan merasa benar sendiri serta terisolasi dari komunitas keilmuan.

Untuk bisa berkembang dan menyatu dengan berbagai komunitas keilmuan, mereka perlu difasilitasi dengan berbagai bentuk forum yang memungkinkan mereka melakukan dialog-dialog keilmuan. Karena itu, agenda-agenda keilmuan perlu diperbanyak, baik di tingkat lembaga, daerah, nasional, dan internasional. Saat ini para ilmuan di lingkungan PTAI hanya memiliki satu event tahunan yang cukup besar untuk melakukan dialog-dialog keilmuan, yaitu *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS). Dengan segala keterbatasannya, AICIS telah berkembang menjadi sarana dialog keilmuan bagi para dosen dan peneliti PTAI.

Dengan segala keterbatasannya, AICIS hanya dapat memfasilitasi sekitar 100 makalah untuk didialogkan dan sekitar



700 dosen sebagai peserta. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari harapan. Karena itu masing-masing kelompok ilmuwan di lingkungan PTAI perlu difasilitasi untuk dapat mengembangkan event-event berskala nasional dan internasional sesuai bidang dan minat keilmuan masing-masing.

Dengan demikian, masing-masing bidang ilmu yang berkembang di lingkungan PTAI akan mendapatkan ruang dan waktu yang merata dan seimbang untuk dikomunikasikan atau didialogkan. Kita berharap akan ada *Annual Conference on Islamic Education (ACIE)*, *Annual Conference on Islamic Law (ACIL)*, *Annual Conference of Islamic Phylosophy (ACIF)*, dan *Annual Conference on Muslim Social Scientits (ACMSS)*.

Berbagai event tersebut akan terwujud apabila masing-masing kelompok ilmuwan diberi kesempatan untuk berasosiasi dan mengembangkan aktifitas keilmuan yang benar-benar sesuai dengan minat dan kompetensi mereka.

## 7. Pacu Penerbitan Jurnal

Berbagai event keilmuan, seperti diskusi, seminar, konferensi, dan simposium hanyalah wadah untuk mempresentasikan dan mendialogkan agenda-agenda dan gagasan-gagasan terbaru di kalangan ilmuwan. Untuk membuat agenda-agenda dan gagasan-gagasan tersebut menjadi artefact ilmu pengetahuan yang bernilai tinggi, maka diperlukan sarana publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah. Hanya dengan publikasi para ilmuwan akan diketahui dan dapat mengklaim otoritas keilmuannya, "publish or perish." Jika tidak melakukan publikasi, seorang ilmuwan tidak punya landasan yang meyakinkan untuk mengklaim otoritas keilmuannya. Publikasi

adalah ukuran yang digunakan oleh para anggota komunitas ilmunan untuk menakar perkembangan bidang ilmu yang mereka geluti.

## 8. Perbaiki Mutu Dosen

Para dosen adalah “*the men behind the gun.*” Merekalah yang akan menentukan maju mundurnya mutu akademik di lingkungan PTAI. Pasal 12 (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa dosen adalah anggota sivitas akademika yang bertugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Ayat (2) dari pasal yang sama menjelaskan bahwa “dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.” Selanjutnya ayat (3) dari pasal yang sama menjelaskan bahwa “dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan mutu akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.”

Mutu para dosen akan menentukan mutu berbagai kegiatan keilmuan di lembaga pendidikan tinggi tempat mereka mengabdikan. Untuk meningkatkan mutu akademik dan membangun tradisi ilmiah di lingkungan PTAI, berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan mutu dan kinerja para dosen PTAI perlu terus dibenahi, yaitu;

### *a. Benahi Pola Rekrutmen Dosen*

Pola rekrutmen dosen dapat dibenahi, antara lain (1) dengan memperjelas, meningkatkan, dan memperketat persyaratan penerimaan dosen, baik dari segi kualifikasi maupun kompetensi; (2) menghentikan atau menutup pintu mutasi dari tenaga kependidikan ke tenaga pendidik, terutama bagi tenaga kependidikan yang hanya ingin memperlambat masa pensiun; (3) mencegah mewabahnya dosen *inbreeding*; dan (4) menghentikan pengangkatan dosen melalui jalur *data base*.

Pola rekrutmen yang kurang baik telah menghasilkan beragam jenis dosen di lingkungan PTAI. Ada “dosen tidak sengaja,” yaitu dosen yang awalnya tidak niatan untuk menjadi dosen, tetapi coba-coba atau iseng-iseng ikut test dosen ternyata lulus. Dalam aktivitas sehari-hari biasanya dosen-dosen kategori ini mengajar dan datang ke kampus seperlunya saja. Mereka tidak mau ambil pusing dengan hiruk pikuk yang terjadi di lingkungan kampus. Waktu dan tenaga mereka lebih banyak didedikasikan untuk aktifitas lain yang lebih mereka minati di luar kampus. Ada yang sibuk berbisnis, ada yang sibuk berkebun, ada yang sibuk mengurus ormas, dan ada pula yang sibuk mengurus LSM. Mereka inilah yang sering disindir sebagai kelompok dosen “biasa di luar.”

Ada juga dosen “terpaksa,” yaitu dosen yang memang sengaja dan niatan menjadi dosen karena melihat prestise yang ada dalam profesi dosen, bukan karena berprestasi atau berpotensi untuk menjadi dosen. Biasanya dosen kelompok ini diterima menjadi dosen karena faktor KKN atau keberuntungan. Bisa jadi mereka diterima sebagai dosen karena ada faktor koneksi atau karena dia hanya satu-satunya yang mendaftar untuk formasi dosen bidang tertentu. Dosen-dosen kategori ini

cukup rajin mengajar dan datang ke kampus, tetapi bagi mereka hal itu hanyalah sebuah rutinitas belaka. Mereka menjalani profesi secara apa adanya dan alakadarnya, tanpa motivasi, tanpa kreatifitas, dan tentu saja tanpa prestasi.

Kategori ketiga adalah dosen serius atau sungguhan. Dosen yang masuk kategori ini jumlahnya tidak banyak. Mereka diterima menjadi dosen melalui jalur prestasi, karena mereka berhasil lulus seleksi dengan baik. Mereka umumnya memiliki potensi akademik tinggi, *self achieveent motivation*, dan inisiatif serta kreatifitas untuk selalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik. Dose-dosen seperti ini hanya membutuhkan satu hal, motivasi dan fasilitasi dari para pengelola perguruan tinggi. Mereka inilah yang dapat diharapkan menjadi lokomotif peningkatan mutu akademik dan pengembangan tradisi keimuan d PTAI. Dengan fasilitas dan kepemimpinan dosen-dosen kategori ini akan berkembang menjadi ilmunan-ilmuan yang aktif, kreatif, tangguh, dan berprestasi.

### *b. Benahi Pola Penempatan Dosen*

Hentikan penempatan dosen yang tidak sejalan dengan kompetensikeilmuannya. Saat ini banyak dosen yang bertugas di prodi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya, dosen fiqh bertugas di Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). Selain kurang menguntungkan bagi prodi yang bersangkutan, hal ini juga kurang menguntungkan bagi dosen yang bersangkutan. Bagi prodi, memiliki dosen-dosen yang bidang keahliannya kurang relevan dengan kompetensi prodi dapat mengurangi nilai akreditasi, karena beberapa pertanyaan dalam format akreditasi prodi terkait dengan relevansi bidang keahlian dosen dengan

mata kuliah yang diasuhnya dan kompetensi prodi tempat ia bertugas.

Bagi para dosen, bertugas pada prodi yang kompetensinya kurang atau tidak relevan dengan bidang keahlian dapat mengurangi kesempatan untuk mengembangkan kegiatan akademik. Kerugian ini semakin nyata manakala berbagai kegiatan Tri Dharma, seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sudah dikembangkan berbasis prodi. Untuk penelitian, misalnya, setiap prodi diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengusulkan kegiatan penelitian dengan judul atau topik yang sejalan dengan kompetensi prodi. Dengan demikian, hanya dosen-dosen yang memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi prodi yang dapat memanfaatkan kesempatan penelitian tersebut secara optimal.

### *c. Tingkatkan Mutu dan Relevansi Pelatihan Dosen dan Karyawan*

Agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, kompetensi keilmuan para dosen dan karyawan harus terus menerus ditingkatkan mutu dan relevansinya. Mereka harus terekspose secara sistematis dan berkelanjutan terhadap berbagai jenis pelatihan yang relevan dengan kompetensi keilmuan dan tanggung jawab akademik mereka. Untuk itu maka perlu dilakukan beberapa langkah pembenahan sebagai berikut:

- 1) Kembangkan Model Pelatihan. Perlu ada modul pelatihan yang relevan dengan tugas, fungsi, dan jenjang pengalaman para dosen dan karyawan. Sebagian besar dosen dan karyawan di lingkungan PTAI hanya mengandalkan bakat alam dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Hal ini

disebabkan karena belum adanya sistem atau model pelatihan dan pembinaan yang teruji, sistematis, kontiniu, dan berjenjang untuk para dosen dan karyawan. Ada dosen dan karyawan yang langganan menjadi peserta pelatihan atau workshop karena yang bersangkutan sangat dekat dengan para pejabat terkait, atau rajin meminta penugasan, atau memang hobi mengikuti pelatihan. Kondisi atau pola tersebut harus dihentikan. Selain tidak efektif, hal itu menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan, sehingga sering menyulut kecemburuan, konflik, dan ketidakharmonisan di kalangan dosen dan karyawan.

- 2) Terapkan *Preservice* dan *Inservice Training*. Untuk membangun mutu akademik yang kuat, dosen dan karyawan PTAI perlu diberi kesempatan mengikuti pelatihan atau workshop secara kontiniu dan berjenjang. Dosen-dosen rekrutan baru yang baru merintis karir profesionalnya (*early career*) perlu mendapat pelatihan penghantar tugas (*preservice training*), agar mereka benar-benar siap menjadi fasilitator aktivitas pembelajaran di dalam maupun di luar ruang kuliah. Adapun bagi dosen-dosen yang sedang giat-giatnya menjalankan dan meningkatkan karir profesionalnya sebagai akademisi (*mid career*) diperlukan pelatihan dalam tugas (*inservice training*), agar mereka senantiasa *updated* dengan berbagai perkembangan mutakhir dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta metodologi pembelajaran.
- 3) Perbanyak dan perluas kesempatan bagi para dosen dan karyawan untuk mengikuti pelatihan, workshop dan memperluas serta mengupdate wawasan keilmuan, misalnya, dengan memperbanyak program academic reahcharging di dalam dan di luar negeri.

- 4) Perbaiki Sarana dan Prasarana Dosen. Mutu akademik akan tumbuh dan berkembang jika para ilmuwan aktif berkarya dan pandai mengapresiasi karya-karya keilmuan. Akifitas dan kreatifitas berkarya akan berkembang apabila ada sarana yang memadai dan lingkungan yang kondusif. Untuk itu maka para dosen, penulis, dan peneliti di lingkungan PTAI perlu didukung dengan sarana yang memadai dan lingkungan yang kondusif.

Hingga saat ini hanya sebagian kecil dosen dan peneliti di lembaga-lembaga PTAI yang memiliki sarana kerja yang paling pokok, misalnya, ruang kerja. Setiap tahun banyak pimpinan PTAI yang hanya sibuk membangun dan merehab ruang kerja untuk jabatan mereka sendiri, bukan menyediakan ruang kerja bagi para dosen. Sudah saatnya pengadaan ruang kerja dosen menjadi salah satu prioritas utama dalam program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan PTAI.

#### 9. Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Tri Dharma

Sebagai salah satu anggota sivitas akademika, mahasiswa harus dilibatkan dalam semua kegiatan Tri Dharma. Selama ini ada kecenderungan yang luas hampir di semua lembaga pendidikan tinggi bahwa mahasiswa hanya dilibatkan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan PkM, meskipun baru terbatas pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Untuk meningkatkan mutu akademik dan membangun tradisi ilmiah, para mahasiswa seharusnya selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Keinginan untuk menjadikan para mahasiswa sebagai *active learners* dan *knowledge seeker* tidak

mungkin dapat terwujud tanpa melibatkan mereka dalam banyak kegiatan penelitian.

#### 10. Tingkatkan Peran dan Otonomi Program Studi

Dalam sistem pendidikan tinggi modern, prodi adalah lokomotif peningkatan mutu akademik dan pengembangan tradisi ilmiah. Prodi adalah tempat penyemaian (*the breeding ground*) bagi benih sikap dan tradisi akademik. Karena itu, prodi dituntut untuk tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi akademik, tetapi juga dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat penyemaian mutu akademik dan pengembangan tradisi ilmiah. Fungsi ini hanya dapat dilakukan apabila institusi prodi memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola berbagai fungsi organisasi, fungsional, dan publik. Kewenangan dan otonomi Prodi perlu diperluas, kriteria kualifikasi dan kompetensi para pengelola Prodi perlu ditinjau dan tugas serta fungsi prodi perlu diperluas.

#### 11. Relevansi Kegiatan Penelitian dan PkM

Dijelaskan pada Pasal 45(1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan “untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Dijelaskan pula bahwa “penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan mutu akademik”.

Ditambahkan bahwa penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetensi. *Output* kegiatan penelitian diharapkan bermanfaat untuk: a). penguasaan ilmu pengetahuan



dan teknologi sertapembelajaran;b). peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;c). peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;d). pemenuhan kebutuhan strategis pembangunannasional; dane). perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.(2) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh perguruan tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Dengan pengaturan tersebut maka kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi diharapkan relevan dan terintegrasi dengan visi, misi, dan kompetensi prodi dimana si peneliti bertugas.

Sebagaimana kegiatan penelitian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) hendaknya juga disesuaikan dengan kompetensi prodi. Kegiatan PkM hendaknya “merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Kegiatan PkM adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan Tri Dharma lainnya. Karena itu hasil kegiatan PkM hendaknya digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

## 12. Perluas Jaringan Kerjasama Keilmuan

Berbagai upaya peningkatan mutu akademik dan pengembangan tradisi ilmiah perlu merujuk pada standar, *benchmark*, dan *success stories*, agar apa yang dihasilkan dari

upaya-upaya tersebut mendapat pengakuan dari dunia akademik. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pendidikan tinggi perlu memperluas dan memperkaya rujukan untuk peningkatan mutu akademik dan tradisi ilmiah dengan terus memperluas jaringan kerjasama keilmuan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kerjasama dapat dilakukan dengan sesama lembaga pendidikan tinggi dan dengan asosiasi-asosiasi keilmuan.

### 13. Tingkatkan Kapasitas Lembaga Penjaminan Mutu

Untuk mengefektifkan upaya peningkatan mutu akademik dan pengembangan tradisi ilmiah, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perlu diberi kewenangan dan peran lebih besar dalam merumuskan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi standar mutu akademik.

Kesempatan untuk lebih memberdayakan LPM dalam meningkatkan mutu akademik dan pengembangan tradisi ilmiah di lingkungan PTAI sangat terbuka dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2013 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja lembaga-lembaga PTAI, baik untuk cluster STAIN, IAIN, dan UIN. Di dalam Permenag tersebut, LPM memiliki posisi yang cukup kuat dan strategis dalam organisasi dan tata kerja lembaga PTAI.



## PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN SDM TERAMPIL DAN MANDIRI

*Keterampilan dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan peluang dan kemandirian diperlukan untuk dapat menciptakan peluang. Keduanya sangat dibutuhkan oleh para lulusan perguruan tinggi*

### **Merubah Paradigma Pambangunan**

**I**NDONESIA MASA DEPAN diharapkan menjadi Indonesia yang maju, kuat, dan besar. Harapan ini tercermin pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia, yaitu “mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”. Visi ini tentu saja harus dipahami dan diusung oleh seluruh komponen bangsa agar benar-benar menjadi visi kolektif (*collective vision*), sebagai sumber energi, inspirasi, dan bintang penerang (*the guiding star*) untuk mempersiapkan masa depan bangsa. Masing-masing komponen bangsa dituntut untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam rumusan visi tersebut.

Tentu banyak hal yang perlu disiapkan agar semua komponen dapat berperan secara optimal untuk menghantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kuat, dan besar.

Namun salah satu faktor terpenting yang perlu disiapkan secara terencana dan sungguh-sungguh adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM terampil dan mandiri, yang mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang muncul dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan. Hampir dapat dipastikan bahwa tanpa SDM yang berkualitas berbagai kegiatan pembangunan tidak akan berjalan secara efektif. Ketersediaan SDM yang berkualitas adalah salah satu faktor penentu (*determinant factor*) dan pengendali (*driving force*) kegiatan pembangunan.

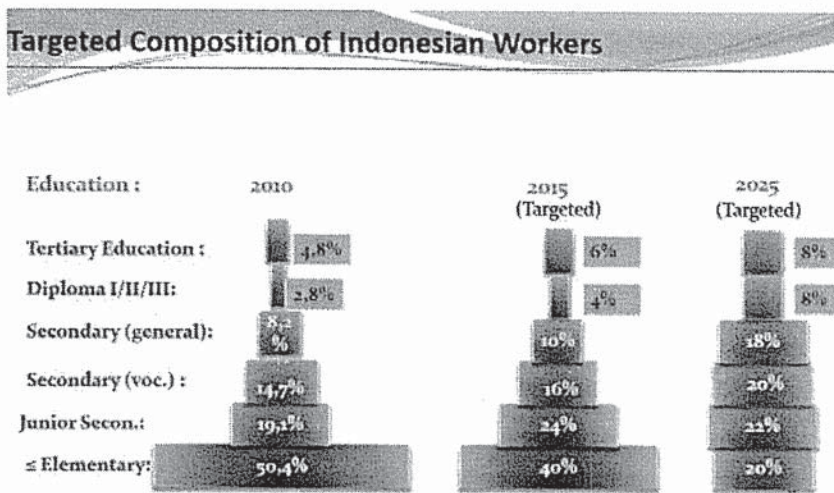
Menyadari penting dan krusialnya peran SDM dalam kegiatan pembangunan, maka banyak bangsa di dunia yang telah mengubah paradigma pembangunan, dari pembangunan berbasis sumber daya alam menjadi pembangunan berbasis sumber daya manusia. Dalam konteks perubahan paradigma ini maka pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas pertama dan utama yang tidak boleh terkendala oleh alasan apapun, apalagi sampai terhenti. Konsekwensinya, berbagai faktor yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan SDM, seperti lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, terutama lembaga-lembaga pendidikan tinggi, harus mendapat perhatian utama dalam *grand design* pembangunan.

## **Profil SDM Indonesia**

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Agus Salim (2012) mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa sebagian besar SDM yang dimiliki Indonesia saat ini adalah lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang lulusan perguruan tinggi, dan yang lebih memprihatinkan, bahwa komposisi tersebut belum akan mengalami perubahan secara

signifikan dalam 15 tahun ke depan dikarenakan target pengembangan yang sangat minim (lihat Grafik 3).

**Grafik 3: Targeted Composition of Indonesian Workers**



Komposisi angkatan kerja pada grafik 3 tersebut sejalan dengan kualitas penduduk sebagaimana tergambar pada tabel 4 hasil rangkuman Lutfi Agus Salim (2012), bahwa 60% penduduk Indonesia hanya tamat SD atau lebih rendah, dengan angka harapan hidup antara 68-72 tahun dan angka pengangguran 7.14%.

**Tabel 4: Aspek Kualitas Penduduk**

1.	MMR : 228/100.000 kelahiran hidup
2.	IMR : 34 per 1.000 kelahiran hidup
3.	60% penduduk hanya tamat SD atau lebih rendah
4.	HDI peringkat ke 108 dari 188 Negara (thn 2009) dan urutan ke 6 dari 10 Negara ASEAN
5.	Angka Harapan Hidup Indonesia: 68/72 Tahun
6.	Angka kemiskinan: 31,02 juta jiwa (13,3% dari total penduduk Indonesia) <i>(BPS 2010)</i>
7.	Indikator kesejahteraan sosial lainnya <ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Pembangunan Gender: 66,38 % (thn 2008)</li><li>• Indeks Pemberdayaan Gender: 62,27% (thn 2008)</li></ul>
8.	Angka pengangguran: 7,14% dari angkatan kerja 116,5 juta <i>(BPS, Agustus 2010)</i>

Lutfi Agus Salim (2012) mengingatkan bahwa tantangan peningkatan ketrampilan dan kemandirian SDM Indonesia ke depan akan semakin besar, karena trend pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Ini berarti bahwa kebutuhan akan akses pendidikan, lapangan kerja, dan pelayanan publik lainnya juga akan semakin meningkat. Jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja maka dapat dipastikan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran juga akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Dengan struktur, kualitas dan trend pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja sebagaimana tergambar pada grafik 3 di atas, maka sangat sulit bagi bangsa Indonesia untuk dapat berkembang menjadi bangsa yang maju, kuat, dan besar seperti negara-negara industri, karena untuk berkembang menjadi

negara industri bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki SDM dengan kualifikasi pendidikan, ketrampilan, dan kemandirian yang lebih tinggi.

Dengan model struktur tenaga kerja yang diperkenalkan oleh Johanson (2004) sebagaimana dapat dilihat pada grafik 5, angkatan kerja Indonesia saat ini adalah tipikal angkatan kerja di negara-negara berkembang, yaitu angkatan kerja kategori tidak terampil (*unskilled*) dan semi terampil (*semi skilled manpower*). Untuk bisa berkembang menjadi negara industri yang maju, kuat, dan besar, bangsa Indonesia dituntut untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja kategori terampil (*skilled manpower*) dan sangat terampil (*highly skilled manpower*).

Sumber Daya Manusia yang terampil dan mandiri sangat dibutuhkan agar bangsa Indonesia bisa bersaing di tengah kehidupan abad ke 21 yang dilanda arus globalisasi yang mengalir sangat deras dan penuh tantangan. Kehidupan di era ini berjalan sangat dinamis dan cepat, karena didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi transportasi. Di era ini, tantangan adalah menu sehari-hari yang arus dihadapi dalam semua profesi, dan tantangan adalah milik mereka yang sigap, tanggap, trampil dan mandiri. Mereka yang lamban, kurang tanggap, tidak terampil, dan tidak mandiri akan tergerus oleh arus perubahan yang begitu cepat dan terlindas di tengah-tengah persaingan yang cepat dan ketat.

**Grafik 5: Model Struktur Tenaga Kerja (Johanson, 2004)**



### **Peran Perguruan Tinggi**

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 58, menegaskan bahwa fungsi dan peran perguruan tinggi adalah sebagai: (1) wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; (2) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; (3) pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan (5) pusat pengembangan peradaban bangsa.

Dengan fungsi dan peran tersebut, lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia adalah sentra pembangunan SDM. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan SDM Indonesia ditentukan oleh mutu perguruan tinggi di negeri ini. Tidak juga berlebihan apabila bangsa Indonesia sangat



berharap pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk dapat melahirkan generasi yang terampil dan mandiri. Profil para lulusan perguruan tinggi di Indonesia akan menentukan daya saing bangsa ini dalam menghadapi dinamika persaingan global. Era globalisasi membutuhkan SDM yang tidak hanya pandai memanfaatkan peluang, tetapi juga mampu menciptakan peluang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Ketrampilan dan kemandirian adalah dua sisi dari satu mata uang. Ketrampilan dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan peluang dan kemandirian diperlukan untuk dapat menciptakan peluang. Keduanya sangat dibutuhkan oleh para lulusan perguruan tinggi untuk bisa mengatasi berbagai tantangan, memanfaatkan berbagai peluang, dan menghadapi berbagai bentuk kompetisi yang terjadi di tingkat lokal, regional, dan internasional.

Tanpa ketrampilan dan kemandirian, para lulusan perguruan tinggi atau sarjana pasti akan menghadapi banyak kesulitan untuk bisa bersaing di dunia kerja dan mengembangkan profesi. Kerampilan dan kemandirian yang rendah akan membuat mereka hanya bisa menunggu dan bergantung pada formasi pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS). Inilah gambaran sebagian besar lulusan perguruan tinggi saat ini di Indonesia. Ketika ada instansi pemerintah yang membuka pendaftaran penerimaan pegawai, maka dapat dipastikan ribuan sarjana akan tumpah mendaftarkan di sana, meskipun mereka sudah tahu bahwa jumlah formasi PNS yang tersedia sangat terbatas. Banyak diantara mereka yang rela bertahun-tahun menjadi pengangguran demi menunggu kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), meskipun mereka tahu betapa kecilnya gaji yang akan mereka terima sebagai seorang PNS nantinya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau 7,61 juta orang. Adapun menurut data Kamar Dagang dan Industri (KADIN), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9 juta orang.

Tentu banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran tersebut. Salah satunya, menurut Ketua Umum KADIN, Suryo Bambang Sulisto (2012), adalah kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penambahan lapangan pekerjaan. Menurut Suryo, pertumbuhan tenaga kerja Indonesia setiap tahun mencapai 2,91 juta orang, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia hanya 1,6 juta orang. Setiap tahun, Suryo menambahkan, ada 1,3 juta orang yang kemungkinan menjadi pengangguran terbuka di Indonesia.

Ternyata tingkat pengangguran erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, menurut Suryo (2012), dari 8,14 juta pengangguran terbuka, 20 persen berpendidikan SD, 22,6 persen tamatan SMP, 40,07 persen tamatan SLTA, 4 persen tamatan diploma, sedangkan 5,7 persen tamatan sarjana".

Ternyata hampir 10% dari kelompok pengangguran di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi (diploma dan sarjana). Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja banyak jawaban yang dapat diberikan untuk pertanyaan tersebut. Namun demikian salah satu penyebab utamanya adalah karena rendahnya ketrampilan dan kemandirian para lulusan perguruan tinggi di tanah air. Banyak diantara mereka yang dilanda wabah *ANS Minded*, hanya siap menjadi PNS. Jika tidak segera diterafi, wabah *ANS Minded* akan semakin parah dan kronis, menjadi wabah yang berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia,

karena hal itu pasti akan menambah jumlah pengangguran di negeri ini.

Sebagai pusat pembinaan SDM bangsa, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk memainkan peran utama dalam memberantas waba *ANS Minded* tersebut, dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan Tri Dharma yang dapat memacu peningkatan ketrampilan dan kemandirian para mahasiswa. Dalam konteks ini maka sudah saatnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi memberikan perhatian lebih besar pada pendidikan karakter dan penanaman sikap wirausaha (*entrepreneurship*), baik dalam bentuk program kurikuler maupun kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Fokus dan rancangan berbagai kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler dapat diarahkan sedemikian rupa, sehingga menunjang pengembangan keterampilan, karakter, dan sikap wirausaha (*entrepreneurship*).*☞*





## KEKUATAN POLITIK ATAU KEKUATAN MAHASISWA: SEBUAH RENUNGAN UNTUK PARA MAHASISWA

*Jika kita ingin bangkit menjadi bangsa yang tangguh dengan generasi pemimpin yang dapat diandalkan, kita harus mengubah keadaan dan budaya akademik di lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita*

### **Tentukan Arah: Menjadi Politisi atau Ilmuwan?**

ETIAP HARI kita menyaksikan di tingkat lokal, nasional, dan Sinternasional betapa banyak orang yang terlibat dalam berbagai konflik, mulai dari konflik kata-kata hingga konflik bersenjata, untuk meraih atau memperebutkan kursi kekuasaan politik. Mereka tampak begitu yakin bahwa kursi kekuasaan politik akan memberikan kekuatan untuk meraih berbagai keinginan mereka. Mereka rela mengorbankan apa saja, bahkan mengorbankan harga diri, dan banyak pula yang tega menyebarkan fitnah dan mendzolimi teman atau koleganya dengan melakukan berbagai betuk provokasi dan *black campaign*, demi untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperkuat kursi atau kekuasaan politik di lembaga-lembaga eksekutif ataupun legislatif. Mereka begitu yakin bahwa kursi atau kekuatan politik akan membuat mereka dihormati, sejahtera, kaya raya, dan bahagia.

Meskipun pandangan dan sikap tersebut sudah sering terbukti salah dan berakhir tragis, masih saja banyak orang yang

tergila-gila dengan kursi atau kekuasaan politik. Tidak sedikit dari mereka yang secara sadar mengorbankan harta benda dan karir yang sudah mapan demi untuk meraih kursi atau kekuasaan politik. Tentu saja cukup banyak dari mereka yang berhasil. Tetapi sangat banyak dari mereka yang gagal, lalu frustrasi dan bagi yang tidak kuat menanggung rasa malu dan kecewa, lalu gila.

Kalau kita sedikit saja mempelajari sejarah peradaban dunia, banyak sekali bukti sejarah yang menunjukkan bahwa faktor penentu (*determinant factor*) dalam setiap proses perubahan diri, masyarakat, dan bangsa bukanlah kekuatan politik, tetapi kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan-perubahan besar dalam sejarah perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia selalu dimotori oleh para ilmuan dan para kreator dan inovator sains dan teknologi. Para politisi memang dapat mengubah struktur politik, skema pendanaan, dan infrastruktur, tetapi mereka tidak dapat mengubah cara berfikir, cara bersikap, dan cara bekerja masyarakat.

Padahal, energi besar yang selalu dibutuhkan untuk menginisiasi satu perubahan bukanlah struktur politik, penambahan dana, dan pergantian pejabat, tetapi perubahan cara berfikir, bersikap, dan bertindak para anggota masyarakat. Pola berfikir, sikap atau karakter, dan etos kerja masyarakat hanya dapat diubah dengan mengembangkan, mengintrodusir, dan mendiseminasi sistem nilai dan visi kehidupan, bukan dengan mengubah struktur politik, menambah dana, dan atau pergantian pejabat politik.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam peradaban Yunani kuno yang sangat monumental dan melegenda, dipicu oleh kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemikiran para filosofinya yang sangat terkenal dan penuh dedikasi. Begitu

banyak nama-nama besar filosof dan pemikir yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kejayaan peradaban Yunani kuno, antara lain, Socrates, Plato, Aristoteles, Rene Descartes, dan lain-lain. Perkembangan dan kejayaan peradaban Yunani bertumpuh pada pemikiran, konsep-konsep, dan ide-ide yang mereka bangun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad lamanya, bukan pada kekuatan senjata para raja atau kaisar.

Di era peradaban Islam, peran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pendorong perubahan dan inspirator kemajuan semakin jelas dan nyata. Nabi Muhammad mengawali transformasi dunia Arab dari zona jahiliyah menjadi zona peradaban madani tidak dengan kekuatan politik, tetapi dengan memperkenalkan semangat belajar dan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Beliau mewajibkan semua umat Islam menuntut ilmu, meminta mereka untuk pergi menuntut ilmu, sekalipun di tempat yang jauh. Bagi beliau, seorang Muslim harus menghabiskan sepanjang hidupnya untuk menuntut ilmu, “dari buayan hingga ke liang lahat”.

Dari abad ke delapan hingga ke 12 Hijriyah, ketika ummat Islam disebut-sebut mencapai puncak kejayaannya mewujudkan era keemasan Islam, *the golden age of Islam*, yang menjadi lokomotif perubahan dan pembangunan masyarakat pada waktu itu adalah para ulama atau ilmuan, bukan para politisi. Para ilmuan yang dulu menjadi motor penggerak perkembangan peradaban Islam, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rush, Ibnu al Arabi dan nama-nama lain yang tidak mungkin disebut satu per satu dalam tulisan ini, sungguh melegenda, karena besarnya peran mereka dalam mendorong perubahan peradaban manusia, tidak hanya di tanah Arab, tetapi juga di daratan Eropa. Karya-karya mereka dalam bidang filsafat, kedokteran, dan fisika diterjemahkan ke

dalam banyak bahasa dan tetap menjadi rujukan bagi para ilmuwan di era modern sekarang ini.

Di negara-negara Eropa, fase-fase penting perubahan peradaban juga ditandai oleh peran para ilmuwan. Nama-nama seperti Galileo, Thomas Alfa Edison, dan Montgomey Watt, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari era kebangkitan di negara-negara Eropa. *Aufklarung* di Jerman, *Renaissance* di Prancis, dan *Industrial Revolution* di Inggris adalah buah perubahan cara berfikir, cara bersikap, dan cara bekerja yang diperkenalkan oleh para ilmuwan, bukan para politisi.

Begitupun halnya dengan perubahan-perubahan penting di belahan dunia lain, termasuk di Asia. Di China, India, dan Indonesia, para ilmuwan selalu menjadi generator, inspirator, dan lokomotif perubahan. Di Jepang, Restorasi Meiji atau *Meiji Ishinyang* terjadi pada tahun 1866 sampai 1869, meskipun banyak diwarnai oleh dinamika politik, seperti Perjanjian Shimoda dan Perjanjian Towsen Harris yang dilakukan oleh Komodor Matthew Perry, pada hakekatnya adalah sebuah perubahan cara pandang dan sistem nilai rakyat dan para pemimpin Jepang yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Para politisi memang bisa mengubah struktur kehidupan sosial dan politik, tetapi mereka tidak pernah bisa mengubah cara berfikir masyarakat, dan mereka pun tidak pernah bisa mengembangkan ide-ide dan gagasan kreatif untuk membangun kualitas hidup masyarakat jika tidak ada intervensi ilmu pengetahuan. Waktu, energi, dan pemikiran mereka selalu dan akan selalu banyak dihabiskan untuk memikirkan kepentingan meraih, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan. Untuk merumuskan kebijakan dan tindakan yang tepat dan relevan,



para politisi senantiasa membutuhkan ide dan inspirasi dari para ilmuwan.

Pada saat para pemimpin dan ilmuwan bekerja keras memikirkan bagaimana nasib generasi yang akan datang (*the next generation*), para politisi sibuk memikirkan pemilu yang akan datang (*the next general election*). Pada saat para pemimpin dan ilmuwan bekerja keras memikirkan apa yang dapat mereka sumbangkan bagi negaranya, para politisi sedang bekerja keras memikirkan bagaimana cara yang paling efektif dan aman untuk mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan melanggengkan kekuasaan. Pada saat para pemimpin dan ilmuwan bekerja keras dan berfikir keras untuk melayani rakyat, para politisi juga sedang bekerja dan berfikir keras bagaimana memeralat atau memperdayakan rakyat untuk kepentingan kekuasaan.

Jika kita benar-benar mau beritibar pada sejarah perkembangan peradaban manusia, maka kita tidak akan pernah menomorduakan ilmu pengetahuan, dan jika kita namar-benar yakin dengan kekuatan ilmu pengetahuan sebagai alat perubahan, maka kita tidak akan pernah menomorduakan pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Pendidikan dasar yang baik dan bermutu memang sangat diperlukan sebagai fondasi bagi jenjang pendidikan berikutnya. Pendidikan jenjang menengah sama pentingnya untuk menghasilkan tenaga-tenaga teknis yang sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor pembangunann. Tetapi untuk membuat masyarakat dan bangsa kita memiliki daya saing tinggi, kita memerlukan pendidikan tinggi yang bermutu, yang dapat menghasilkan para ilmuwan, peneliti, dan perekayasa yang kreatif dan mandiri. Pendidikan tinggi yang bermutu akan menghasilkan para perancang,

perencana, analisis, kreator, perekayasa, dan inovator pembangunan yang bermutu pula.

### **Peran Strategis Pendidikan Tinggi**

Daya rekayasa dan inovasi satu bangsa dapat dilihat dari tingkat penguasaan sains dan teknologi. Menurut Jeffrey Sachs dalam bukunya *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time* (2005), dalam konteks perkembangan sains dan teknologi, ada empat kategori masyarakat atau bangsa, yaitu bangsa yang terisolasi dari sains dan teknologi, bangsa pengguna atau operator sains dan teknologi, dan bangsa kreator dan inovator sains dan teknologi.

Bangsa yang terisolasi dari perkembangan sains dan teknologi adalah bangsa yang belum tersentuh oleh sains dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Bangsa kategori ini belum mengenal sains dan teknologi, apalagi mengaplikasikannya dalam berbagai aktifitas sehari-hari. Bangsa yang menjadi pengguna (*user* atau operator) sains dan teknologi adalah bangsa yang sudah cukup teresponse pada perkembangan sains dan teknologi, tetapi belum mampu memproduksi sains dan teknologi. Bangsa yang masuk kategori ini adalah bangsa yang sudah cukup mengenal sains dan teknologi serta mampu mengaplikasikannya dalam berbagai aktifitas sehari-hari, tetapi mereka belum mampu menciptakan atau memproduksi perangkat teknologi.

Dengan kata lain, bangsa-bangsa kategori ini mampu membeli, bisa memakai, tetapi belum mampu membuat atau menciptakan teknologi. Kategori ketiga adalah bangsa-bangsa penemu dan pengembang sains dan teknologi. Bangsa-bangsa

kategori ini adalah bangsa-bangsa yang sangat giat menciptakan dan menghasilkan perangkat-perangkat teknologi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka adalah bangsa producer dan inovator.

Untuk menjadi bangsa pengguna sains dan teknologi kita tidak perlu pendidikan tinggi, karena untuk itu kita cukup memiliki pendidikan dasar. Bahkan orang yang buta hurufpun akan bisa menggunakan teknologi jika dilatih dan dibiasakan. Jika kita ingin menjadi bangsa yang hanya bisa menggunakan dan mengoperasional kan produk-produk sains dan teknologi, kita tidak perlu repot-repot membangun sistem pendidikan tinggi atau menghabiskan waktu bertahun-tahun dan uang berjuta-juta, karena untuk menjadi operator produk sains dan teknologi cukuplah kita memiliki pendidikan tingkat menengah dan mengikuti berbagai bentuk pelatihan atau *short courses*.

Kita perlu membangun sistem pendidikan tinggi yang bermutu dan membekali generasi muda kita dengan pendidikan tinggi yang bermutu, agar kita menjadi bangsa yang tidak hanya bisa menggunakan dan mengoperasionalkan produk-produk sains dan teknologi, tetapi menjadi bangsa yang dapat menghasilkan dan mengembangkan produk-produk tersebut. Untuk menjadi bangsa yang mampu mengembangkan dan memperbahau produk-produk sains dan teknologi, kita tidak hanya perlu membangun sistem pendidikan tinggi jenjang S1, tetapi juga harus membangun sistem pendidikan tinggi jenjang S2 dan S3 yang bermutu.

Jika hal itu masih menjadi cita-cita kolektif kita sebagai satu bangsa, maka saatnya kita harus merunduk, berkomitmen untuk bekerja keras dan bertekad untuk bangkit, dengan meningkatkan mutu lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang kita miliki dan

memberikan kesempatan seluas-luaskan kepada generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu. Mereka harus difasilitasi dan diingatkan untuk mengenyam pendidikan tinggi, untuk menguasai sains dan teknologi, bukan untuk mendapatkan ijazah semata.

Saat ini kondisi pendidikan tinggi kita sungguh jauh dari harapan. Jangankan masuk ranking *World Class Universities*, menghadapi akreditasi BAN-BPT saja banyak lembaga pendidikan tinggi kita yang tidak berdaya. Padahal BAN-PT hanya menerapkan standar minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi. Masih banyak lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang mendirikan lembaga pendidikan tinggi sebagai unit usaha keluarga. Masih banyak tokoh-tokoh politik dan pemerintahan yang mendirikan lembaga pendidikan tinggi sebagai simbol komitmen politik, dan masih banyak para pengelola lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang hanya mencari nafkah dan menjual ijazah. Dan yang sangat memprihatinkan, masih banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dan dana berjuta-juta hanya untuk membeli atau mendapatkan selebar ijazah, bukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan menguasai sains dan teknologi. Mereka terjebak dalam budaya gila gelar yang melanda banyak tokoh masyarakat di negeri ini.

Jika kita ingin bangkit menjadi bangsa yang tangguh dengan generasi pemimpin yang dapat diandalkan, kita harus mengubah keadaan dan budaya akademik di lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita. Kita perlu mengingatkan para penguasa di negeri ini agar bersungguh-sungguh membangun sistem pendidikan tinggi dan tidak menjadikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi sebagai sarana untuk membangun citra politik.

Kita juga perlu mengingatkan tokoh-tokoh masyarakat kita untuk tidak lagi mendirikan lembaga pendidikan tinggi sebagai badan usaha. Mari kita bertekad untuk menjalani pendidikan tinggi secara sungguh-sungguh untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan, bukan generasi yang hanya mengejar ijazah dan gelar keserjanaan.

### *Students of Today, Leaders of Tomorrow*

Para mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Jika anda menginginkan masa depan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih berkualitas, manfaatkan kesempatan yang sangat mahal ini untuk mengembangkan potensi diri sesuai bidang dan minat-masing-masing. Kesempatan hanya datang satu kali dan masa depan yang akan kita hadapi adalah masa depan yang lebih kompetitif. Hanya orang-orang yang siap dan memiliki keunggulan ilmu pengetahuan yang dapat bersaing dan memenangkan persaingan. Orang-orang yang biasa-biasa saja hanya akan menjadi pengekor, jika tidak menjadi pesakitan.

Para mahasiswa perlu menyadari sepenuhnya bahwa kalian semua adalah orang-orang terpilih. Kalian semua telah mendapat restu dan dukungan penuh dari orang tua, serta mendapatkan kepercayaan dari almamater untuk menjadi bagian dari kelompok terdidik (*educated groups*) yang jumlahnya masih sangat sedikit. Menurut data yang dipublikasikan oleh pihak Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kemdikbud, saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi rata-rata nasional baru 25% dan APK Pendidikan Tinggi Sumsel masih jauh di bawah rata-rata nasional, yaitu 13%. Dengan persentase APK tersebut maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa para mahasiswa hari ini, baik yang studi di Sumsel maupun di

luar Sumsel, adalah bagian dari generasi muda yang sangat sangat beruntung.

Keberuntungan itu sangatlah patut untuk disyukuri agar kesempatan yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rasa syukur itu tidak cukup diekspresika dengan mengulang-ulang lafaz *tahmid*, *alhamdulillah*, tetapi perlu diekspresikan dalam bentuk kesungguhan dan kesabaran. Kesungguhan akan melahirkan komitmen dan kerja keras, dan kesabaran akan mendatangkan hasil dan pertolongan Tuhan. *Man jadda wa jada* (siapa bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil), demikian Rasulullah mengingatkan dalam salah satu haditsnya.

Tumbuh dan berkembanglah menjadi para ilmuan dan pemimpin yang cerdas, kreatif, dan penuh pengabdian bersama almamater masing-masing, karena almamater adalah orang tua yang akan mendampingi, memfasilitasi, dan mengawasi berbagai aktifitas keilmuan para mahasiswa. Almamater berasal dari dua kata Latin, *alma* yang berarti susu dan *mater* yang berarti ibu. Bagi para mahasiswa, *almamater* adalah *ibu susuan* yang selalu peduli dengan kondisi dan kesuksesan kalian. Jika kalian berprestasi dan menjadi orang hebat, maka sang *ibu susuan* akan turut bangga dan bahagia. Sebaliknya, jika kalian gagal dan terpuruk, sang ibu susuan juga akan sangat sedih dan kecewa. Jangan abaikan masa depan anda, jangan khianati dukungan orang tua anda, dan jangan membuat ibu susuan anda sedih.

Buatlah amamater kalian bahagia dan bangga dengan mendedikasikan berbagai prestasi, karena prestasi para anggota sivitas akademika, terutama para mahasiswa dan alumni akan membuat almamater terus berkembang dan mendapat kepercayaan (trust) yang tinggi dari masyarakat. Tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap satu almamater akan paralel dengan kepercayaan masyarakat terhadap para mahasiswa dan lulusannya. Kesuksesan para mahasiswa adalah juga kesuksesan almamater, dan kesuksesan almamater adalah juga kesuksesan para mahasiswa. Sebaliknya, kegagalan para mahasiswa adalah juga kegagalan almamater, dan kegagalan almamater akan memicu kegagalan pula di kalangan mahasiswa dan alumninya.







## EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KARAKTER

*Akhlak atau karakter mendapat kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan Islam, karena penyempurnaan akhlak adalah misi utama kerasulan Muhammad SAW*

### Pengertian dan Signifikansi Karakter

**K**ARAKTER YANG BAIK adalah salah satu modal dasar yang diperlukan oleh satu bangsa untuk berkembang menjadi bangsa yang unggul dan dihormati (*It is the refinement of character, or the development of collective discipline which adopts integrity, honesty, industry, respect and humaneness for the young, the elderly and the disabled that a people rise up to nobility and honor*) (<http://aplaceinthisworld.tumblr.com>). Kata karakter atau *character* berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*charassein*” yang berarti mengukir untuk membentuk suatu pola (Bohlin dan D. Farmer 2001). Secara harfiah, menurut Wikisource, karakter adalah “stempel, atau yang tercetak, yang terbentuk dipengaruhi oleh faktor endogeen/dalam diri dan faktor exogeen/luar diri.”

Dengan pengertian tersebut, maka pendidikan karakter adalah upaya menanamkan nilai-nilai karakter positif pada diri peserta didik sehingga nilai-nilai tersebut benar-benar “menempel” atau “tercetak” pada kepribadiannya. Adapun menurut Wikisource, karakter adalah “*the stable and distinctive*

*qualities built into an individual's life which determine his response regardless of circumstances* (suatu kualitas yang mantap dan khusus (pembeda) yang terbentuk dalam kehidupan individu yang menentukan sikap dalam mengadakan reaksi terhadap rangsangan dengan tanpa mempedulikan situasi dan kondisi).

Rumusan Wikisource tersebut sejalan dengan rumusan tiga pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawaih, al-Ghazali, dan Ahmad Amin, bahwa akhlak adalah “perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu” (Rahmat Djatnika 1996: 27). Menurut salah seorang penulis ilmu pendidikan Islam, Nasih A. Ulwan (1992: 177), pendidikan karakter adalah “suatu usaha yang sengaja dilakukan agar obyek didik memperoleh sekumpulan prinsip-prinsip budi pekerti, karakter yang mulia dan keutamaan-keutamaan perilaku dan perasaan, lalu terbiasa dengannya sejak dini sampai ia dewasa dan bergumul dengan kehidupan nyata.”

Dalam kamus Wikipedia dijelaskan bahwa karakter yang baik mencakup sejumlah atribut yang terkait dengan perilaku atau kebiasaan baik, termasuk keluhuran (*virtues*), integritas (*integrity*), keberanian (*courage*), konsistensi (*fortitude*), kejujuran (*honesty*), dan kesetiaan (*loyalty*). Dalam khazanah pendidikan Islam, karakter dapat disetarakan dengan akhlak atau *khuluq*, yaitu adat kebiasaan (*al-adat*), perangai, tabiat (*al sajiyyat*), watak (*al thab*), adab/sopan santun (*al muru'at*), dan agama (*al-din*).

Akhlak atau karakter mendapat kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan Islam, karena penyempurnaan akhlak adalah misi utama kerasulan Muhammad SAW. Disebutkan

dalam al-Qur'an, surat al-Qalam ayat 4: "*Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung.*" (al-Qalam: 4). Lalu dijelaskan pada surat al-Ahzab ayat 21: "*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian*" (al-Ahzab: 21). Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad Saw menyatakan: "*Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak.*" (HR.Ahmad). Misi utama Nabi Muhammad SAW adalah mencegah *akhlakul madzmumah*, yaitu perkataan dan perbuatan tercela dan mendorong *akhlakul mahmudah/karimah*, yaitu perbuatan mulia yang keluar dari kekuatan jiwa tanpa keterpaksaan. Tujuan pendidikan, menurut Mahmud Yunus (1942: 12-15), adalah untuk (1) mempermudah mencari rezki (*kasbu al-rizqi*), (2) memperoleh ilmu pengetahuan (*al-ilm*), dan (3) membentuk karakter atau akhlak mulia.

Bagi seorang Muslim, berupaya memiliki akhlak yang baik adalah bagian integral dari upaya memelihara keimanan, karena "orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya." (HR Tirmidzi). Akhlak yang baik adalah salah satu prasyarat untuk bisa masuk syurga. Abu Hurairah r.a. berkata: "suatu saat rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. Beliau menjawab : 'Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik.' (H.R. Tirmidzi). Kualitas akhlak seseorang dapat dilihat dalam berbagai konteks dan ruang lingkup kehidupan, yaitu kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan beragama.

Pentingnya karakter atau akhlak sebagai landasan keberhasilan hidup manusia dikatakan juga oleh Aristoteles. Bagi filosof Yunani ini, ada dua jenis keistimewaan yang dapat menghantarkan manusia menjadi makhluk yang unggul, yaitu

keistimewaan pemikiran (*excellences of thought*) dan keistimewaan karakter (*excellences of character*)(dikutip dalam Sambutan Presiden, 2011). Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa orang-orang yang memiliki dua keistimewaan tersebut akan sangat kuat dan mampu beradaptasi pada setiap perubahan dan menemukan solusi bagi setiap permasalahan. Keistimewaan pemikiran adalah modal utama untuk menemukan dan merumuskan ide-ide perubahan dan keistimewaan karakter adalah kombinasi kualitas moral yang membuat seseorang dikagumi, memiliki harga diri (*self-esteem*), dan percaya diri (*self-confidence*). Jika dipahami dalam perspektif akhlak, maka memiliki karakter yang baik adalah salah satu keistimewaan yang harus dimiliki oleh manusia dalam mengekspresikan dirinya dan menjalani kehidupannya sebagai makhluk terbaik (*ahsan at-taqwim*).

Menurut rumusan Lubbock Christian University (2007), karakter akan terbangun pada diri seseorang apabila ada enam pilar yang menyanggahnya, yaitu kepercayaan (*trustworthiness*), kehormatan (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), keadilan (*fairness*), kepedulian (*caring*), dan kewargaan (*citizenship*). Dengan enam pilar tersebut, menurut LCU, karakter akan menjadi bekal kehidupan yang sangat berharga, yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dan bertahan di tengah kerasnya terjangan gelombang kehidupan.

Mengacu pada nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, Pancasila, dan rumusan tujuan pendidikan nasional, Pusat Kurikulum Kemendiknas mengidentifikasi 18 nilai pendidikan karakter, yaitu (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13)

bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. (Kemendiknas, 2011: 8).

### **Karakter Bangsa Indonesia Hari Ini**

Globalisasi telah menjadi kekuatan maha dahsyat yang telah mengubah peta ekonomi dan politik serta perkembangan dan penyebaran teknologi dunia, khususnya teknologi informasi, seperti internet dan cellular phone. Globalisasi telah membuat proses interaksi sosial dan budaya terjadi sangat cepat dan melintas batas-batas kenegaraan (*crossing borders*), sehingga mendorong terjadinya pertukaran budaya (*cultural exchange*).

Secara perlahan-lahan globalisasi telah menggeser sistem nilai dan mengubah pandangan hidup bangsa-bangsa di dunia. Menurut pengamatan Jeffrey Sachs (2011), globalisasi memang telah mendorong globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, penyebaran sains dan teknologi, dan percepatan demokratisasi. Tetapi pada saat bersamaan globalisasi telah memunculkan “pemenang” dan “pecundang.” Para pemenangnya adalah masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi, daya tahan budaya, dan kualitas pendidikan. Masyarakat yang tidak memiliki tiga kekuatan tersebut dapat dipastikan menjadi korban globalisasi dan menjadi pecundang. Para pecundang globalisasi tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi dan politik, tetapi juga terus menerus menghadapi tekanan budaya dan teknologi, sehingga secara perlahan-lahan kehilangan jati diri atau karakter.

Banyak bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia, terhanyut oleh arus globalisasi, sehingga limbung, tidak memahami posisinya, tidak lagi mengenal dirinya, tidak tahu

harus berbuat apa, dan tidak jelas harus kemana. Mereka mulai kehilangan rasa kebangsaan, patriotisme, moralitas, dan daya saing. Secara perlahan, nilai-nilai luhur menghilang dari kehidupan sehari-hari mereka dan berganti dengan nilai-nilai baru yang asing, sehingga menimbulkan cultural shock, split personality, dan sikap reaktif serta agresif.

Wajah dan warna kehidupan para pecundang globalisasi mengalami perubahan secara drastis. Sikap lemah lembut dan sopan santun telah berganti dengan tindak kekerasan dan kekejaman. Integritas menjadi barang langka dan berganti dengan kepura-puraan dan sandiwara. Keberanian menurun dan berganti dengan sikap penakut dan nekad. Konsistensi dan komitmen berganti dengan kepentingan sesaat. Kejujuran dan loyalitas telah berganti dengan kebohongan dan penghianatan. Akibatnya, mereka tidak lagi memiliki rasa hormat (*self esteem*) dan rasa percaya diri (*self confidence*) sebagai satu bangsa.

Menurut pengamatan Wikisource, saat ini “mereka [bangsa Indonesia] telah tidak mampu lagi membedakan antara peri laku yang terhormat dan terpuji dengan perbuatan yang hina dan tidak bermartabat.” Wikisource menambahkan bahwa saat ini bangsa Indonesia “tidak memahami atau tidak peduli terhadap perbuatan yang dinilai memalukan dan hina. Mereka juga tidak peduli atau tidak mampu membedakan antara perbuatan yang mulia dan nista.” Akibatnya, Wikisource menjelaskan, “tata hubungan masyarakat menjadi sangat rancu.” “Apabila hal ini berlanjut,” menurut analisis Wikisource, masyarakat Indonesia bisa “berkembang menjadi masyarakat anarkis atau anomi, .. yang menghalalkan segala cara, sehingga akan menjadi masyarakat homo homini lupus. (<http://id.wikisource.org>).

## Urgensi Pendidikan Karakter

Sebenarnya evaluasi dan analisis tentang daya saing bangsa Indonesia sudah lama dan banyak dilakukan. Hanya saja cara pandang yang digunakan lebih didominasi oleh cara pandang ekonomi dan politik. Berbagai permasalahan bangsa sering dikaitkan dengan kebijakan ekonomi dan politik, sehingga solusi yang dipilih seringkali perbaikan sistem ekonomi dan politik. Di awal tahun 2011 ini muncul carapandang “baru”, yaitu melihat korelasi antara kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan karakter bangsa.

Cara pandang yang “baru” ini menjelaskan bahwa berbagai permasalahan bangsa akan bisa diatasi dan masa depan bangsa akan lebih baik, apabila dilakukan pembenahan terhadap karakter bangsa (*nation character building*). Cara pandang ini dijelaskan oleh Presiden SBY dalam sambutannya pada puncak peringatan Hardiknas tahun 2011 di Jakarta melalui rangkaian kalimat sebagai berikut:..., *saya mengingatkan kepada para pendidik, ... Bahwa sasaran pendidikan bukan hanya kepintaran, kecerdasan, ilmu, dan pengetahuan. Tetapi juga moral, budi pekerti, watak, nilai, perilaku, mental, dan kepribadian yang tangguh, yang unggul, dan yang mulia. Dan yang kedua inilah sesungguhnya karakter, karakter manusia, yang akhirnya menjadi karakter masyarakat dan karakter bangsa* (Sambutan Presiden, 2011: 1).

Presiden SBY menegaskan bahwa masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh kemandirian, daya saing, dan keagungan karakternya. Dalam ungkapan beliau: “*. ada tiga syarat yang harus kita penuhi agar Negara kita menjadi Negara maju di abad ke-21 ini. Syarat yang pertama, kemandirian bangsa harus makin tinggi, syarat yang kedua, daya saing*

*bangsa juga harus makin tinggi, sedangkan syarat yang ketiga, kita harus mampu membangun peradaban yang unggul dan mulia.”* (Sambutan Presiden, 2011: 1). Banyak ahli pembangunan meyakini adanya korelasi positif antara kemajuan suatu masyarakat dengan karakter atau moralitas yang dimilikinya. Davidson dan Rees-Mogg (1997) menulis:

*All strong societies have a strong moral basis. Any study of the history of economic development shows the close relationship between moral and economic factors. Countries and groups that achieve successful development do so partly because they have an ethic that encourages the economic virtues of self-reliance, hard work, family and social responsibility, high savings, and honesty.*

Sejak sambutan Presiden SBY tersebut disampaikan, pembangunan karakter bangsa (*nation character building*) telah menjadi salah satu topik utama dalam berbagai pidato, diskusi, seminar, dan perbincangan publik yang melibatkan kalangan pemerintah dan masyarakat. Berbagai perbincangan dan pembahasan yang telah berlangsung tiba pada kesadaran kolektif bahwa untuk menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat, bangsa Indonesia perlu membangun kembali karakternya yang menghilang.

Dalam konteks kesadaran kolektif inilah pendidikan karakter bangsa mulai dilihat sebagai salah satu agenda strategis yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari semua komponen bangsa. Kementerian Pendidikan Nasional bahkan menjadikan pendidikan karakter sebagai kata kunci dalam tema Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2011, yaitu "Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan



Bangsa," dengan sub tema "Raih Prestasi, Junjung Tinggi Budi Pekerti." (Sambutan Presiden, 2011).

Pentingnya pendidikan karakter tidak luput dari perhatian Jenderal TNI George Toisutt, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Menurut beliau, "karakter bangsa saat ini merupakan harga mati karena perilaku menyimpang yang telah membudaya hanya dapat diberantas dengan mengubah pola pikir dan karakter . karakter bangsa bisa diperkuat, bila Indonesia ingin diakui oleh dunia. Tidak ada pilihan lagi."

Pernyataan sang Presiden mendapat respon yang sangat cepat dari kantor Kementerian Pendidikan Nasional. Tidak lama berselang, tepatnya pada bulan Mei 2011, Prof. Dr. Mansyur Ramli, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas, telah menandatangani terbitnya Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Beliau menjelaskan bahwa "pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila." Beliau juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang diprioritaskan "untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945" dan "sebagai dasar pembangunan pendidikan" yang secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Tujuan pendidikan karakter, menurut Kemendiknas (2011:7), adalah untuk "mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2)

membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.”

Kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter pada masa sekarang ini adalah reaktualisasi dari kesadaran yang sama pada masa awal kemerdekaan. Salah seorang tokoh awal kemerdekaan dan Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hadjar Dewantara, pada waktu itu mengingatkan pentingnya pendidikan karakter, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak gampang silau oleh budaya bangsa lain. “Dalam kita menerima dan menggunakan kebudayaan orang asing,” kata beliau, “kita harus berlandaskan dan berdiri sebagai suatu bangsa yang berpribadi, yang sanggup mempergunakan tiap- tiap barang baru dari manapun datangnya, agar berguna dan lebih memudahkan cara mencapai hidup salam dan bahagia” (Jalaludin, 2011: 3). Bagi Ki Hadjar Dewantara, nilai-nilai dari bangsa lain boleh diserap selama nilai-nilai tersebut memperkaya, tidak menggerogoti nilai-nilai luhur yang telah kita miliki. Beliau mengingatkan kita, “tinggalkanlah atau simpanlah adat yang sudah tidak sesuai dan merintangki kemajuan kita. Terimalah barang baru, dari bangsa manapun, yang dapat memperkaya perbendaharaan hidup kita (Jalaludin, 2011: 3).

Karena eratnya kaitan antara pendidikan karakter dan karakter bangsa, maka membenahi pendidikan karakter berarti membenahi kualitas bangsa. Masa depan satu bangsa tergantung pada karakter warganya (*the destiny of the nation depends on the character of the people living in it*) (<http://aplacethisworld.tumblr.com>). Karakter bangsa bukan sekedar masalah kedaulatan. Bukan pula sekedar masalah ekonomi. Bukan

tentang apa yang dibangun, tetapi tentang siapa yang membangun. Pembangunan bangsa adalah tentang pengutamaan manusia dan menomorduakan hal-hal lain. Pembangunan bangsa adalah tentang menomorsatukan karakter warganya (*It [nation building] is not just about sovereignty, but sovereignty and beyond. It is not just about economics, but economics and beyond. It is not what is built, but who builds it. Nation building is about people first, and everything else second. It is about a people's character first and foremost*) (<http://aplaceinthisworld.tumblr.com>).

Karena pendidikan karakter erat kaitannya dengan fungsi dan peran lembaga-lembaga pendidikan, maka membenahi pendidikan berarti juga membenahi kondisi dan mutu lembaga-lembaga pendidikan. Salah seorang filosof Inggris, Herbert Spencer mengingatkan: “*Education has for its object the formation of character*” (Arsyad, 2011: 10). Mussie Hailu juga mengingatkan: “*people expect schools to not only make children smart but to make them good, to turn out good citizens and leaders*” (Arsyad, 2011:10). “*Intelligence plus character,*” menurut Martin Luther King, “*... is the true goal of education.*” (Arsyad, 2001: 10).

### **Efektifitas Pendidikan Karakter**

Kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi memang sangat diperlukan untuk terlaksananya pendidikan karakter. Tetapi tanpa pola dan arah yang jelas serta strategi yang tepat, pendidikan karakter tidak akan berjalan efektif dan akan “tersesat” menuju “pendidikan tentang karakter, dimana peserta didik hanya akan dijejali dengan aktifitas kognitif untuk menimba ilmu tentang karakter, tanpa pengamalan, pengalaman dan habituasi. Hasilnya adalah orang-orang yang memiliki

pengetahuan yang luas tentang karakter, tetapi tidak memiliki karakter. Tantangan paling mendasar dalam pelaksanaan pendidikan karakter adalah melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang karakter, tetapi juga punya karakter.

Berikut ini adalah beberapa pemikiran yang diyakini dapat membuat pendidikan karakter berjalan efektif untuk menghantarkan peserta didik menjadi manusia-manusia yang berkarakter.

#### 1) Pola Terpadu (*Intergrated Character Education*)

Pendidikan karakter sebaiknya tidak monolitik atau dikemas dalam satu mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan dengan semua kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. Pendidikan karakter hendaknya menjadi inti dari semua program pendidikan atau mata pelajaran. Bagian paling esensial dari pendidikan karakter adalah “membangun karakter”, bukan membuat “Mata Pelajaran Pendidikan Karakter”.

Pengalaman panjang bangsa Indonesia memperlihatkan dengan jelas bahwa menyajikan pendidikan karakter secara monolitik akan terjebak pada pembelajaran parsial, bahwa persoalan karakter hanya menjadi *concern* pada satu mata pelajaran dan menjadi tanggung jawab guru yang menangani pelajaran tersebut. Akibatnya, masalah karakter tidak dianggap relevan dan tidak menjadi *concern* bagi guru-guru mata pelajaran lain. Ketika muncul persoalan moral atau karakter di kalangan peserta didik, maka hanya ada satu “kambing hitam”, yaitu guru mata pelajaran yang ada kaitannya dengan masalah karakter.

Pengalaman ini terjadi pada kasus Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganeraan, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Sejarah Nasional, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), PKn, dan Pendidikan Kewiraan. Meskipun disajikan di semua jenjang pendidikan, Pendidikan Agama juga belum memberikan kontribusi yang berarti pada pembangunan karakter bangsa, karena penyajiannya terlalu kognitif dan bersifat monolitik.

Dengan pola terpadu (*Intergrated Character Education*), maka pendidikan karakter diharapkan menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pendidik, apapun bidang studi atau pelajaran yang diajarkannya. Semua guru bidang studi berpartisipasi aktif dan menjadi teladan yang baik (*qudwah hasanah*) dalam menyukseskan pendidikan karakter. Ketika muncul persoalan karakter dalam kehidupan peserta didik, maka semua pendidik turut bertanggung jawab, bukan mencari-cari atau menunjuk-nunjuk guru bidang studi tertentu sebagai “kambing hitam.” Namun demikian, guru bidang studi agama memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, karena menurut Ibnu Miskawaih, “syariat agama merupakan faktor yang meluruskan karakter remaja, yang membiasakan mereka untuk melakukan perbuatan baik, sekaligus yang mempersiapkan diri mereka untuk menerima kearifan” (Arsyad, 2011: 14).

## 2) *Real Life Experiences*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, karakter adalah “perangai” yang tertanam atau melekat atau “menempel” pada diri seseorang, yang dapat secara spontan memunculkan perbuatan baik. Dengan pengertian ini maka “Pendidikan Karakter” bukanlah “Pendidikan tentang Karakter”, tetapi

merupakan proses edukasi untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada diri peserta didik dan membimbing atau melatihnya untuk dapat dan selalu bertindak atau menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian maka pendidikan karakter akan lebih efektif jika dikemas dalam bentuk pengalaman langsung (*real life experiences*), melalui proses habituasi, akulturasi, dan inkulturasi. Jika tidak dikemas dalam bentuk *real life experiences*, maka pendidikan karakter akan terperangkap dalam prosedur pembelajaran formal, yaitu penyajian materi, penugasan, dan penilaian. Dengan prosedur pembelajaran formal, maka tolok ukur efektifitas pendidikan karakter adalah frekwensi tatap muka dan nilai rapor atau nilai semester, bukan “perangai” atau “tabiat.”

Untuk dapat secara efektif membentuk “tabiat” atau “perangai”, maka pendidikan karakter perlu lebih menekankan “process”, bukan hanya “content” dan “contexts,” bukan hanya “text” Dengan kata lain, pendidikan karakter tidak cukup jika hanya dikemas dalam bentuk ceramah, pengarahan atau pidato-pidato. Pendidikan karakter memerlukan program-program yang riil, yang berkaitan dengan kehidupan nyata dan ditunjang oleh ilmu tingkah laku/perangai (*ilm al-suluk*), atau *tahzib al-akhlak* (falsafat ahlak), atau *al-hikmat al-‘amaliyyat* (pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan dan cara memperolehnya, agar jiwa menjadi bersih dan pengetahuan tentang kehinaan-kehinaan jiwa untuk mensucikannya).

Dengan landasan keilmuan yang kuat dan pengalaman langsung melalui proses habituasi, akulturasi, dan inkulturasi, pendidikan karakter akan dapat membentuk perilaku lahir dan batin warga negara, sehingga menjadi anggota masyarakat yang

memiliki keseimbangan antara kehidupan pribadi dan lingkungannya, menjunjung tinggi kehormatan, peduli, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

Dalam proses habituasi, akulturasi, dan inkulturasi, guru dituntut untuk tidak hanya menjadi “pengajar” dan teladan yang baik (*qudwah hasanah*), tetapi juga merangkap sebagai “pamong”, dengan fungsi utama sebagai tukang momong (pengasuh) yang memberi bimbingan dan membantu anak bertumbuh dan berkembang menurut kodrat bakatnya (Majelis Luhur Taman Siswa, dikutip dalam Jalaludin, 2011: 9). Inilah implementasi dari sistem among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, sistem yang bertitik tolak pada kesadaran bahwa anak didik telah memiliki potensi kodrati dan sebagai pamong, guru adalah pemberi motivasi (*hing madya mangun karsa*), pemberi teladan (*hing ngarsa sung tulada*), dan pemandu bakat (*tut wuri handayani*) (Jalaludin, 2011: 9).

Dalam khazanah pendidikan Islam, sosok pendidik yang ideal adalah Nabi Muhammad SAW. Salah satu kunci keberhasilan beliau dalam mendidik adalah keistimewaan dan kemuliaan akhlaknya, sehingga beliau diberi gelar “*al-shaadiqu al-amiin*” (yang benar lagi amanah). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata akhlak diartikan budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab (*al-akhlaq*) yang berrati perangai atau tabiat. *Akhlak* adalah bentuk jamak dari *khuluq*, yaitu “sesuai yang melekat dalam setiap diri manusia, darimanapun ia berasal, apapun warna kulit, jenis kelamin, suku, kebangsaan, agama dan sebagainya. (Muhammad, 2011: 8). Menurut definisi Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Muhammad (2011: 8), akhlak adalah “sifat (*hai-ah*) yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam

perbuatan secara mudah (reflektif), tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.”

### 3) *Tugas dan Tanggung Jawab Kolektif*

Sistem pendidikan modern mengenal tiga pusat atau lingkungan pendidikan, yaitu pendidikan formal dengan guru-guru sebagai unsur utama, pendidikan nonformal dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sebagai unsur utama, dan pendidikan informal dengan orang tua sebagai unsur utama. Para ahli pendidikan cenderung sepakat bahwa koneksitas dan integrasi tiga lingkungan tersebut dan sinergitas antara unsur-unsur yang terlibat di dalamnya sangat menentukan efektifitas pelaksanaan pendidikan. Pendidikan karakter akan efektif apabila dalam pelaksanaannya ada kolektifitas antara guru, orang tua, dan tokoh- agama atau masyarakat. Program-program atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan karakter harus direncanakan, dirancang, dan dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan seimbang di lingkungan formal, nonformal, dan informal.

Lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal dapat berbagi peran dan tanggung jawab dalam mengefektifkan pendidikan karakter, melalui penegakan kedisiplinan, pola pergaulan, pola pelayanan, pola kepemimpinan, pola pelayanan akademik dan administrasi, penataan dan suasana lingkungan kelas, kegiatan kemasyarakatan, dan tugas pekerjaan rumah. Di jalur pendidikan formal, pendidikan karakter hendaknya disajikan mulai jenjang PAUD hingga perguruan tinggi. Di jalur pendidikan nonformal, pendidikan karakter hendaknya disajikan dalam berbagai aktifitas organisasi atau lembaga sosial dan keagamaan. Di jalur



pendidikan informal, pendidikan karakter hendaknya disajikan dalam berbagai kegiatan atau acara keluarga.

Secara spesifik, lembaga-lembaga pendidikan formal dapat melakukan proses internalisasi nilai-nilai moral kebangsaan secara terencana dan sistematis. Lembaga-lembaga keagamaan dapat membekali, membimbing, dan menyadarkan umat akan kemajemukan, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Media massa dapat menyajikan publikasi yang membangkitkan rasa kebangsaan. Partai-partai politik dapat melakukan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai moral dalam proses politik dan agenda kebangsaan.

Dalam upaya kolektif tersebut hendaknya lembaga-lembaga pendidikan formal menjadi lokomotif bagi lembaga-lembaga pendidikan nonformal dan informal, agar pendidikan karakter dapat tersaji secara harmonis, linier, dan terintegrasi di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

#### 4) *Daya Dukung Lingkungan Fisik dan Non Fisik*

Menurut Campbell and Bond Huitt (1982), perkembangan karakter seseorang dipengaruhi oleh faktor *heredity* (gen atau turunan dari orang tua), pengalaman masa kecil, tauladan dari orang-orang yang lebih tua, pengaruh kelompok sepermainan (*peer influence*), lingkungan fisik dan sosial, media komunikasi, pelajaran yang diajarkan di sekolah dan institusi lain, dan situasi dan peran-peran khusus yang mendorong perilaku. Karena itu, pendidikan karakter akan berjalan efektif apabila ada lingkungan fisik dan nonfisik yang kondusif. Lingkungan atau suasana belajar yang kondusif dapat menjadi sumber inspirasi

penyadaran nilai bagi para peserta didik dan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan.

Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan karakter, maka nilai-nilai yang terkait dengan karakter positif harus menjadi basis penataan dan pengembangan tata lingkungan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Di lingkungan sekolah, misalnya, nilai-nilai karakter positif dapat divisualisasikan atau disosialisasikan melalui rumusan visi sekolah, kata-kata hikmah, ayat-ayat al-Qur'an, mutiara hadis, dan kaligrafi di tempat-tempat strategis, dengan desain yang menarik (*eye catching*). Dalam proses manajemen, nilai-nilai karakter positif dapat dieksperimenkan atau dicontohkan melalui penerapan pelayanan prima dan tata kelola yang baik (*good governance*), dengan para guru dan karyawan sebagai role model.

Jika dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, maka proses penataan lingkungan pendidikan yang kondusif akan mendorong terwujudnya *school culture* yang penuh makna bagi para peserta didik dan semua unsur yang terlibat dalam operasionalisasi sekolah. *School culture* akan berkembang secara perlahan-lahan apabila semua warga sekolah terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berkarakter, melalui proses perawatan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran serta lingkungan sekolah.

Dalam konteks ini maka pendidikan karakter tidak harus menjadi *written curriculum*, tetapi bisa berupa *hidden curriculum*, melalui proses pembiasaan (habitulasi) dalam bentuk *time management*, keberanian mengambil inisiatif, mematuhi etika, menjaga integritas, berfikir mendalam, kemauan belajar, komitmen, keinginan meraih sesuatu/motivasi, dorongan

energi/semangat meluap-luap, komunikasi lisan, kreatifitas/*out of box thinking*, kemampuan analisis, dapat mengatasi stress, manajemen diri (*self management*)/mengambil tanggung jawab (*taking responsibility*), problem solving, kerjasama dan gotong royong (*cooperation*), mudah beradaptasi dan bijak (*adaptability/flexibility*), team work, mandiri (*self reliance/independence*), dan mau mendengar (*listening*).

#### 5) *Standar Nasional & Konteks Lokal*

Karena tujuan akhir dari pendidikan karakter adalah untuk membangun karakter bangsa, maka pelaksanaan pendidikan karakter hendaknya didukung oleh standar yang jelas, yang disusun dan ditetapkan berlaku secara nasional. Selain untuk menjadi acuan bagi para pendidik, standar dan prosedur sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya praktek pendidikan karakter yang bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan bangsa. Pihak Kementerian Pendidikan Nasional dapat menyusun standar prosedur dan mengembangkan modul pendidikan karakter beserta teknik atau metode yang harus digunakan dan alat bantu visual (*visual aid*) yang diperlukan, agar materi dapat disajikan dengan menarik dan menyenangkan.

Meskipun mengacu pada standar nasional, pendidikan karakter hendaknya kontekstual dengan situasi, potensi, dan kebutuhan lokal. Pendidikan karakter dapat diperkaya dan diperkuat dengan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya atau kearifan lokal. Masing-masing daerah dapat menyusun modul pendidikan karakter yang kontekstual dengan potensi dan kebutuhan lokal, melalui kerjasama dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, para pendidik akan memiliki ruang kreatifitas dan improvisasi, untuk

mengembangkan pendidikan karakter yang benar-benar sesuai dengan situasi, kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Para pendidik dapat menggali materi, metode, dan pendekatan pendidikan karakter dari khazanah kehidupan sosial, budaya, dan agama di tingkat lokal yang sangat beragam. Materi pendidikan karakter dapat digali dari berbagai aktivitas atau tradisi keagamaan, seni, budaya, olahraga, ideologi, adat istiadat, dan sejarah. Dari khazanah keagamaan Islam, misalnya, pendidikan karakter dapat merujuk pada nilai-nilai *akhlak al karimah* yang telah menghiasi kehidupan para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Dalam lingkungan masyarakat yang religius seperti masyarakat Indonesia, nilai-nilai pendidikan karakter juga terdapat pada berbagai pemikiran filsafat, karya sastra, pepata, dan adat istiadat.

#### 6) *Kualifikasi dan Kompetensi Modal Insani*

Ada dua kategori modal insani yang berperan penting dalam proses penyelenggaraan semua kegiatan pendidikan, termasuk pendidikan karakter, yaitu tenaga pendidik yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan dan administrasi kependidikan.

Mengingat urgensi, ruang lingkup, dan tujuannya yang sangat spesifik serta pelaksanaannya yang membutuhkan kolektifitas dan sinergitas para pendidik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, maka proses penyiapan dan pelaksanaan pendidikan karakter harus terintegrasi dengan pola rekrutmen dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.

Tenaga pendidik dan kependidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan hendaknya dibekali dengan kualifikasi dan kompetensi khusus yang terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pendidikan karakter. Mereka hendaknya dibekali dengan wawasan dan ketrampilan khusus untuk dapat membentuk karakter para peserta didik.

#### 7) *Pemanfaatan ICT*

Menurut rumusan *United Nation Development Programme* (UNDP), *Information and Communication Technology* (ICT) adalah “seperangkat sumber daya dan peralatan teknologi yang digunakan untuk mengkomunikasikan, menciptakan, mendiseminasi, menyimpan, dan mengelola informasi,” seperti komputer, internet, teknologi penyiaran (radio dan televisi), dan telephone (Tinio, 2011: 2). Ketersediaan dan standar mutu sarana ICT di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan perlu mendapat perhatian, agar sarana ICT yang ada benar-benar dapat meningkatkan mutu pendidikan karakter.

Di tengah arus informasi yang mengalir deras dan semakin muda diakses, lembaga-lembaga pendidikan dapat memperkenalkan dan mempromosikan nilai-nilai, informasi, aktivitas, dan ketrampilan yang relevan dengan pendidikan karakter. Dengan dukungan ICT, pendidikan karakter dapat dilaksanakan berbasis internet, seperti dalam bentuk *Buku Elektronik*, *E-Learning*, *Blended Learning*, *Open Learning*, dan *Distance Learning*. Dengan demikian maka berbagai aktivitas pendidikan karakter dapat diselenggarakan di alam nyata (*on-siteschooling*) dan di alam maya (*cyber schooling*), dengan rancangan yang sesuai dengan tuntutan ICT, unik, menarik, dan bermanfaat.

Pemanfaatan ICT untuk tujuan pendidikan sudah menjadi salah satu strategi peningkatan mutu pendidikan nasional yang dijelaskan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### 8) *Sistemik dan Berkelanjutan (Sustainable)*

Pendidikan karakter sangat kompleks, sehingga memerlukan konsep yang jelas dan *time frame* yang panjang. Program-program pendidikan karakter harus dipersiapkan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan prosedur, sasaran, dan target yang jelas dan terukur. Jika dilaksanakan secara sporadis, dapat dipastikan bahwa pendidikan karakter tidak akan efektif. Para ahli pendidikan karakter mengingatkan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dilaksanakan secara tergesah-gesah : *“teaching characteristic is a slow process, but you finally get there.”* Tanpa sistem yang jelas dan kontinuitas, pendidikan karakter tidak akan efektif, karena pendidikan karakter bukan indoktrinasi dan bukan pula sekedar melatih ketrampilan. Pendidikan karakter adalah proses pembentukan perilaku dan kebiasaan menjalani kehidupan.

Pendidikan karakter mencakup pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak dan bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Kemendiknas, 2010). Pendidikan karakter bukan hanya sekedar menanamkan mana yang benar dan mana yang salah. Pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*), sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang

telah menjadi kepribadiannya. Pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik (Kemendiknas, 2010).

#### 9) Keseimbangan Tiga Ranah: Kognitif, Afektif, dan Psikomotor

Menurut Kevin Ryan (2001), “*character education is teaching students to know the good, love the good, and do the good. It is cognitive, emotional, and behavioural. It integrates head, heart, and hands. It places equal importance on all three.*” Pendidikan karakter akan efektif apabila dalam pelaksanaannya ada keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Penekanan pada aspek kognitif diperlukan, agar peserta didik dapat membuat pertimbangan moral (*value analysis*) dan mendiskusikan alasan-alasan tentang kedudukan nilai-nilai yang terkait dengan karakter melalui proses berfikir logis.

Penekanan pada aspek afektif diperlukan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk mengklarifikasi nilai-nilai (*clarifying values*) dalam rangka mengkaji perasaan, perbuatan, dan kesadaran mereka. Dengan memupuk kemampuan tersebut pendidikan karakter dapat mendorong terwujudnya sikap batin yang dapat secara spontan melahirkan perbuatan-perbuatan bernilai baik, untuk mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Selain itu, penekanan pada aspek afektif diperlukan agar pendidikan karakter menyentuh *innear capacity*, yaitu daya kreatifitas, kemandirian, inovasi, imajinasi, dan daya fikir. Menurut Colman (2003: 260), *inner capacity*

sangat diperlukan agar seseorang mampu menyelesaikan suatu tugas secara tuntas.

Penekatan pada aspek psikomotor diperlukan untuk memberikan pengalaman bertindak (*experiencing actions*) kepada para peserta didik melalui proses habituasi, agar mereka memiliki keberanian dan mendapat kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan moral. Pengalaman seperti ini dapat diberikan melalui berbagai kegiatan keorganisasian dan kerjasama, baik pada lingkup mikro (dalam lingkungan sekolah) maupun dalam lingkup makro (dalam lingkungan masyarakat luas). Selain dapat melatih peserta didik untuk melakukan perbuatan moral, pengalaman bertindak juga dapat mendorong mereka untuk secara terus menerus melakukan muhasabah atau introspeksi diri terkait moralitas mereka sebagai individu dan anggota kelompok atau masyarakat.

Keseimbangan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor hendaknya diwujudkan di semua perangkat pembelajaran, baik yang tercantum dalam teks kurikulum formal maupun yang tersembunyi di balik pola interaksi interpersonal di lingkungan sekolah (*hidden curriculum*). Menurut Pedoman Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendiknas (2011: 5), keseimbangan antara pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) adalah prasyarat bagi keberhasilan pendidikan karakter, karena hanya dengan keseimbangan tersebut dapat diwujudkan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Menurut Sayid Qutub, pendidikan karakter perlu menjaga keseimbangan antara pengembangan spiritual-perasaan, intelek-rasional, dan jasmaniyah (Arsyad, 2011: 20).



#### 10) *Transformatif*

Pendidikan karakter sebaiknya menerapkan pendekatan transformatif, tidak informatif. Program pendidikan karakter perlu dirancang sedemikian rupa, agar tidak sekedar melakukan transfer of knowledge, tetapi juga harus dapat melakukan transfer of values dan transfer of attitudes. Singkatnya, pendidikan karakter bukanlah “pendidikan tentang karakter,” tetapi merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku.





## SEKOLAH BUTUH GURU BERKUALITAS, BUKAN KURIKULUM BARU

*Satu orang guru bermutu yang hadir di tengah peserta didik jauh lebih berharga dari setumpuk teks kurikulum atau buku ajar yang dicetak dengan tinta emas*

### **Kurikulum 2013 sebagai Kurikulum “Berfikir”.**

**S**ETELAH MELALUI KONTROVERSI yang cukup panjang dan melelahkan, tepatnya tanggal 15 Juli 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi mengumumkan dimulainya penerapan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum 2013. Dengan kemunculan kurikulum baru tersebut maka dalam 10 tahun terakhir telah terjadi tiga kali pergantian kurikulum, yaitu pada tahun 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), pada tahun 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan Kurikulum 2013. Sejak awal kemerdekaan, Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang ke-11, karena sebelum KBK sudah delapan kali pemerintah melakukan penyusunan dan perubahan kurikulum, yaitu tahun 1947, Rencana Pelajaran Terurai; 1964, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar; 1968, Kurikulum Sekolah Dasar; 1973, Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP); 1975, Kurikulum Sekolah Dasar; 1984, Kurikulum 1984; 1994, Kurikulum 1994; dan 1997, Revisi Kurikulum 1994.

Penerapan Kurikulum 2013 adalah manifestasi dari keinginan Mendikbud dan jajarannya untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional. Secara legal formal, penerapan Kurikulum 2013 bertitik tolak pada hasil Rapat Kerja (Raker) Mendikbud dengan Komisi X DPR RI pada tanggal 27 Mei 2013 yang menyetujui penerapan Kurikulum 2013 dengan *dissenting opinion*. Sebagaimana dilaporkan oleh *Buletin Parlemenaria* (1 Juni 2013), hanya 6 dari 9 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menyetujui implementasi KK 2013, yaitu Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Tiga fraksi lainnya, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menolak. Fraksi-fraksi tersebut menolak penerapan Kurikulum 2013, karena menilai persiapan yang dilakukan oleh pihak Kemendikbud belum cukup memadai.

Raker tersebut juga memutuskan dana pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diajukan oleh Mendikbud sebesar Rp 1.153.240.976.000 dikurangi menjadi Rp 829.427.325.000.- Selanjutnya Raker menyetujui bahwa Kurikulum 2013 mulai diberlakukan pada tanggal 15 Juli 2013 di 6.325 sekolah di Indonesia. Untuk tahap awal, kurikulum tersebut hanya akan diterapkan di 10% Sekolah Dasar (SD) untuk kelas I dan IV, 20% jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kelas VII, dan 100 persen di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Lanjutan (SML) di kelas IX.

Karena besarnya dana operasional yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya, majalah *The Quality* (hlm. 18) menyebut KK 2013 sebagai kurikulum “super,” dan karena menurut Mendikbud kurikulum baru ini sangat menekankan pentingnya kemampuan penalaran, maka majalah *The Quality* (hlm. 18) juga menyebutnya kurikulum “berfikir”. Mendikbud menjelaskan dalam berbagai kesempatan bahwa KK 2003 berorientasi pada penguatan penalaran, bukan pada hafalan semata.

Dari beberapa kali penjelasan Mendikbud dapat diketahui bahwa KK 2013 terinspirasi oleh hasil survey *Trends in International Math and Science* yang dilaksanakan oleh Global Institute pada tahun 2007 yang hasilnya menunjukkan hanya 5 persen siswa Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran dan 78% siswa Indonesia dapat mengerjakan soal berkategori rendah yang hanya memerlukan hafalan. Tampaknya hasil survei tersebut telah membuat Mendikbud beserta jajarannya menyimpulkan bahwa kegagalan anak-anak Indonesia dalam bidang sains dan matematika disebabkan oleh faktor kurikulum.

Tulisan ini menilai kesimpulan tersebut terlalu tergesa-gesa dan simplistis (menyederhanakan masalah). Tulisan ini ingin menegaskan bahwa kemampuan penalaran peserta didik sebagaimana terlihat pada hasil survei *Trends in International Math and Science* tersebut tidak banyak ditentukan oleh karakteristik kurikulum, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kualitas guru-guru yang mengajar dan cara mereka memfungsikan kurikulum dan menyajikannya kepada peserta didik, serta bagaimana mereka memposisikan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dengan kata lain, penekanan pada menghafal atau menalar bisa diatur atau dirancang melalui desain metodologi dan strategi pembelajaran, tidak dengan mengubah, apalagi menggantikan kurikulum. Dengan cara pandang tersebut maka tulisan ini ingin menegaskan bahwa jawaban untuk problematika pendidikan kita saat ini bukanlah sebuah kurikulum yang baru, tetapi pembenahan kualitas guru.

### **Prestasi Peserta Didik Menurut Teori IPO**

Para ahli pendidikan, khususnya para pendukung teori IPO (*Input, Process, and Output*), sudah lama meyakini bahwa asesmen terhadap efektifitas program pendidikan tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang kurikulum saja, tetapi harus dilihat dalam tiga ranah masalah (*problem areas*), yaitu *input*, *proses*, dan *output*. Tiga ranah ini sangat kompleks dan satu sama lain saling berkait kelindan. *Input* yang baik memang diperlukan untuk dapat menghasilkan *output* yang baik. Tetapi tanpa *process* yang baik, *input* yang baik tidak akan dapat ditransformasikan menjadi *output* yang baik. Betapa banyak contoh kasus dimana anak-anak cerdas dan berbakat gagal mengembangkan potensi diri mereka karena potensi yang mereka miliki tidak diolah melalui proses pembelajaran yang baik. Sebaliknya, *input* yang seadanya (*mediocare*) atau bahkan bermasalah (*defected*) bisa bertransformasi menjadi *output* yang unggul dan berkualitas apabila proses transformasi tersebut dijalankan dengan baik oleh aktor yang berkompeten. Betapa banyak anak-anak yang sudah tertolak (*rejected*) dimana-mana dan dinilai penuh masalah (problematik) lalu menjelma menjadi sosok yang unggul dan berkarakter setelah melalui proses transformasi yang baik, dengan aktor pengendali yang

berkompeten dan bertanggung jawab. Aktor tersebut adalah guru yang bermutu, profesional, berdedikasi, dan bertanggung jawab. Mereka layak disebut guru-guru yang sukses.

Guru-guru yang sukses tersebut adalah guru-guru yang aktif, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mereka terlibat langsung dalam merancang program pembelajaran dan membahas serta mencari solusi terhadap berbagai problematika yang muncul dalam proses pembelajaran. Mereka memosisikan peserta didik sebagai mitra belajar, bukan sebagai objek pembelajaran. Mereka sendiri yang memutuskan materi apa yang perlu disajikan, bagaimana cara terbaik untuk menyajikannya, dan memandu peserta didik untuk menemukan cara terbaik untuk menyerap dan mengembangkan materi belajar. Guru-guru sukses tersebut tidak menjadikan diri mereka pasif seperti robot yang hanya mengandalkan panduan dan instruksi untuk bertindak.

Dalam skema IPO kurikulum adalah salah satu elemen input yang sangat penting. Banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*the heart of education*). Kurikulum yang “sehat” sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, karena tingkat kesehatan kurikulum akan mempengaruhi proses dan *output*. Tetapi betapapun sehatnya kurikulum tidak akan fungsional jika tidak ada aktor yang dapat memfungsikannya dengan baik, dan aktor tersebut adalah para pendidik atau guru. Sama halnya dengan jantung pada manusia, kurikulum memang harus sering-sering direview atau dievaluasi dan diadaptasikan agar selalu aktual, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada masa depan, tidak berorientasi ke masa lalu. Karena itu istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan adalah

“*curriculum development*,” (pengembangan kurikulum), bukan “*curriculum replacement*” (penggantian kurikulum).

Istilah “*development*” digunakan dengan asumsi bahwa proses pendidikan adalah proses berkelanjutan. Berbagai kekurangan yang terdapat pada kurikulum memang harus dibenahi melalui proses revisi atau adaptasi, tetapi bukan dengan penggantian. Menggantikan kurikulum adalah tindakan pedagogis yang akan membawa efek getar (*shocking effects*) yang terlalu dratis dan mengagetkan, bahkan bisa menimbulkan efek traumatik di kalangan pendidik dan peserta didik, karena bagi mereka kurikulum bukanlah seperti pakaian yang setiap waktu bisa diganti.

Bagi para pendidik dan peserta didik kurikulum adalah sumber energi yang menggerakkan pikiran, sikap, dan tindakan mereka. Hanya di Indonesia dimana para pemegang otoritas pendidikan “menggantikan” kurikulum dengan begitu mudahnya, sehingga negeri ini sudah mengenal 11 kurikulum. Menggantikan kurikulum seakan dipandang sebagai sebuah prestasi. Padahal penggantian kurikulum yang berkali-kali dan berulang-ulang itulah yang membuat sistem pendidikan kita “bantat,” tidak dapat berkembang, karena selalu mulai dari nol.

Dilihat dari namanya, Kurikulum 2013 adalah kurikulum “baru”, menggantikan Kurikulum Berbasis Satuan Pendidikan (KTSP). Tetapi apakah perubahan nama tersebut betul-betul substantif atau hanya semiotik? Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan ini jika kita belum melakukan review secara komprehensif terhadap Kurikulum 2013. Dari beberapa penjelasan yang kita terima, aspek paling substantive yang sering diklaim oleh pihak Kemdikbud dari pergantian kurikulum ini adalah pengurangan jumlah mata pelajaran melalui



penggabungan. Tetapi dalam banyak hal, Kurikulum 2013 tidak banyak berbeda dengan KTSP. Misalnya, menggunakan paradigma “berbasis kompetensi”; standar kompetensi yang sama; dan pendekatan belajar aktif (*active learning*).

Berapapun substansi yang berubah, kehadiran Kurikulum 2013 telah memberi kesan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia memiliki kurikulum baru, sehingga harus berbenah dan beradaptasi. Proses berbenah dan beradaptasi itu cukup merepotkan para pengelola sekolah dan guru-guru, sehingga cukup mengganggu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dapat diduga bahwa gangguan tersebut akan mempengaruhi efektifitas kegiatan pembelajaran.

*Success stories* di negara-negara yang mendapat predikat sistem pendidikan terbaik menunjukkan bahwa perkembangan mutu sistem pendidikan harus memiliki fondasi yang kokoh, dan fondasi yang kokoh itu adalah kebijakan-kebijakan pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan, termasuk kebijakan terhadap kurikulum. “Gonta ganti” kurikulum memang terdengar sensasional, tetapi tidak akan memberi dampak apapun terhadap kemajuan sistem pendidikan. Di Finlandia, dimana sistem pendidikan terbaik di dunia berada, tidak ada penggantian kurikulum dan atau kebijakan fundamental lainnya selama lebih dari 40 tahun. Begitupun di negara-negara lain dimana ada sistem pendidikan terbaik, seperti Korea Selatan.

### **Guru sebagai Faktor Penentu, Bukan Kurikulum**

Dalam proses pendidikan, kurikulum adalah salah satu unsur penting dari input. *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. *Input* dapat

berupa sumberdaya dan perangkat-perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai alat dan pemandu bagi berlangsungnya proses. Dalam sistem pendidikan, *input* terdiri dari tiga kategori, yaitu input mentah (*raw input*), input alat (*instrumental input*), dan input lingkungan (*environmental input*). Kurikulum adalah salah satu dari input alat dalam proses pembelajaran.

Proses pendidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi *output*. Dalam skala mikro (di tingkat sekolah), proses terkait dengan pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, kegiatan belajar mengajar, monitoring, dan evaluasi. Proses dikatakan bermutu jika pelaksanaannya terkoordinasi, serasi, dan terkoneksi dengan pemandu input, yaitu guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan lain-lain, untuk menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*joyful*), yang mendorong perkembangan potensi peserta didik. Kualitas proses pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan.

*Output* dalam sistem pendidikan adalah hasil, keluaran atau lulusan yang dihasilkan dari proses pembelajaran. *Output* pendidikan merefleksikan kinerja lembaga-lembaga pendidikan, misalnya, sekolah. Dengan kata lain, *output* adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau kinerja sekolah. Kualitas *output* merefleksikan kualitas, efektifitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, dan moralitas kinerja sekolah.

Dalam kegiatan pembelajaran, input, proses, dan output berinteraksi, saling melengkapi, dan saling mempengaruhi secara terus menerus guna mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, proseslah yang menentukan intensitas dan kualitas dari interaksi yang terjadi antara sesama input dan dalam proses

perubahan input menjadi output. Desain proses akan menentukan corak dari interaksi antara sesama input dan intensitas kegiatan peserta didik dalam mengembangkan potensi diri melalui aktifitas pencarian, pembentukan, dan pengembangan sikap serta perilaku.

Para ahli pendidikan memang mengakui bahwa kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*the heart of education*). Kondisi kurikulum banyak mempengaruhi kinerja sistem pendidikan. Tetapi kurikulum tidak berarti apa-apa jika tidak dijalankan melalui proses pembelajaran bermutu, dan di balik proses pembelajaran bermutu selalu ada guru bermutu. Guru adalah faktor yang menentukan (*determinant factor*) mutu proses pembelajaran.

Guru bermutu tidak bersifat teks book, tetapi selalu beradaptasi, berimprovisasi, dan berinovasi, untuk membuat proses pembelajaran berjalan dengan standard mutu yang diinginkan. Guru bermutu tidak melihat berbagai input pembelajaran, termasuk kurikulum, sebagai sesuai yang sempurna dan tidak memperlakukannya secara pasif. Dia selalu aktif dan kreatif mengembangkan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, agar peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh minat dan motivasi.

Guru bermutu adalah orang yang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berupaya mengembangkan potensi diri peserta didik secara maksimal. Dia bukanlah sosok pengajar sebagaimana di tempat-tempat kursus atau Bimbel pada umumnya, yang hanya mempunyai satu misi untuk menyampaikan materi pelajaran (*transfer of knowledge*) kepada murid. Dia adalah sosok pendidik yang mempunyai misi untuk memintarkan, mencerdaskan, dan memanusiakan peserta didik,

agar menjadi sosok yang berilmu, berkarakter, dan beradab. Guru bermutu tidak hanya memindahkan ilmu (*transfer of knowledge*), tetapi juga memindahkan nilai-nilai (*transfer of values*). Menurut UNESCO, para pendidik tidak hanya dituntut untuk dapat memandu peserta didik mengetahui sesuatu (*learning to know*), tetapi juga dituntut untuk dapat memandu mereka menjadi dirinya sendiri (*learning to be*), belajar hidup bersama (*learning to live together*), dan belajar mengenal Tuhan (*learning to know God*). Rumusan UNESCO tersebut adalah pengembangan dari apa yang disampaikan oleh John Dewey dalam bukunya, *Democracy and Education*, bahwa ada empat konsep pokok yang harus dilalui oleh seorang pembelajar untuk dapat menjadi manusia yang memiliki karakter dan berperilaku sehat, yaitu (1) *Learning to know*, (2) *Learning to do*, (3) *Learning to be*, dan (4) *Learning to live together*. Selanjutnya Jacques Delors (1996) dalam bukunya, *Learning: The Treasure Within*, menulis bahwa bagian esensial dari pendidikan dasar adalah penajarkan peserta didik tentang bagaimana menata kehidupan dengan ilmu pengetahuan, eksperimen, dan kultur pribadi (*how to improve their lives through knowledge, through experiment, and through the development of their own personal cultures*).

Beberapa perspektif tentang pembelajaran tersebut mengandung makna bahwa pendidikan hanya akan bermakna jika pembelajar tidak hanya memiliki kemampuan otak, tetapi juga memiliki kemampuan memaknai nilai-nilai dari belajarnya. Dalam studi Daniel Goleman, untuk dapat memahami nilai atau makna dari kehidupannya, seorang pembelajar dituntut untuk memiliki tidak aspek kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*), kecerdasan emosional (*emotional*

*quotient*), dan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*). Dalam konteks ini, sosok pendidik adalah unsur yang paling menentukan dalam proses pembelajaran, bukan kurikulum. Kurikulum memang penting, tetapi berbagai kelebihan kurikulum tidak banyak artinya jika tidak didukung oleh tenaga pendidik yang baik.

Dalam konstelasi tugas dan fungsi para pendidik yang begitu luas, strategis, dan menentukan, maka kurikulum, meskipun sangat penting, bukanlah unsur yang paling menentukan dalam proses pembelajaran. Adalah kurang tepat dan berlebihan jika kurikulum dituduh sebagai penyebab rendahnya prestasi peserta. Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap prestasi peserta didik adalah guru. Kemampuan guru menyajikan menu pelajaran sesuai dengan situasi, kondisi, dan minat peserta didik adalah hal terpenting dalam proses pembelajaran. Apapun kurikulumnya, kata Yohanes Surya (2013: 12), “... yang penting cara mengajar guru agar para siswanya mengerti.”

Menurut Surya (2013: 12), “*sebodoh apapun anak tersebut jika gurunya mampu mengajari siswanya dengan kreatif pasti akan sukses.*” “*Jika dipikirkan secara serius,*” menurut Kusnaryanto (2013: 21), “*akar permasalahan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia sebenarnya bukan terletak pada kurikulumnya tetapi SDM tenaga pendidik, sarana prasarana pendidikan dan pendidikan yang tidak merata antara di perkotaan dan pedesaan.*” *Input* yang baik, seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan kurikulum, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya, memang sangat diperlukan, tetapi tidak dapat secara otomatis meningkatkan mutu *output* pendidikan, karena mutu *output* pendidikan tergantung pada mutu proses yang ditempuh

dalam mengolah berbagai *input* yang ada, dan mutu proses pengolahan tersebut sangat ditentukan oleh figur seorang guru.

### **Apa yang Salah dengan KTSP?**

Menurut hemat penulis, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah salah satu produk pengembangan kurikulum terbaik yang pernah ada di Indonesia, yang memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan sangat relevan dengan realitas pendidikan di Indonesia yang sangat dinamis dan bervariasi.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, khususnya Pasal 36 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa “pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” dan “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.”

Selain itu, penyusunan KTSP juga berlandaskan pada (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi; (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan; dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.

Kita semua tentu ingat bahwa di dalam proses penyusunan dan penerapannya KTSP sangat minim kontroversi, karena sangat akseptabel di kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan di negeri ini. Tentu banyak alasan mengapa kurikulum tersebut begitu akseptabel, tetapi salah satu alasan yang penting bahwa karena KTSP sangat sesuai dengan keragaman situasi, kondisi, dan tingkat perkembangan pendidikan di tanah air.

Selain itu, KTSP menjembatani kepentingan nasional dan kepentingan lokal dalam bidang pendidikan. Meskipun disusun di tingkat lokal, KTSP merujuk pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Isi KTP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Proses penyusunannya melibatkan pihak sekolah, komite sekolah, dan pemerintah kabupaten/kota.

Unsur-unsur ini perlu dilibatkan dalam penyusunan KTSP dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.

4. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat sekitar.
5. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dan mencapai sasaran KTSP.
6. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
7. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat, serta mengkomunikasikannya dalam KTSP.

Dengan pola penyusunan yang partisipatif dan *bottom up*, KTSP diharapkan menjadi instrumen strategis bagi upaya untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, partisipatif, dan berprestasi. Dalam konteks ini maka KTSP adalah paradigma baru pengembangan kurikulum di Indonesia yang sejalan dengan semangat otonomi pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah, dalam rangka mendekatkan dan mengkrabkan kurikulum dengan pusat pembelajaran, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan KTSP, sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh “*full authority and responsibility*” dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan, dengan strategi, prioritas, dan target tertentu. Adapun pemerintah, dapat lebih fokus pada pengembangan agenda-



agenda staretgis yang lebih besar, yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Karena penyusunannya melibatkan guru, kepala sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, maka KTSP dapat merepresentasikan aspirasi pendidikan masyarakat sekitarnya. Proses penyusunan yang partisipatif adalah prasyarat bagi upaya pencapaian tujuan KTSP, yaitu untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan. Secara khusus, penerapan KTSP bertujuan untuk: (1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; (2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama; dan (3) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai.

Dengan visi dan pola penyusunannya yang partisipatif dan *bottom up*, maka KTSP sangat berbeda dengan kurikulum lain yang pernah ada di Indonesia. Kurikulum ini adalah kurikulum yang sangat unik, dengan empat ciri utama, yaitu: (1) memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia dan kekhasan daerah; (2) melibatkan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran; (3) mendorong guru agar bersikap mandiri dan kreatif; dan (4) memberi kebebasan kepada guru untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran.

Dengan segala karakteristik dan keunikannya tersebut, adalah tidak objektif apabila KTSP yang sudah berjalan lebih

kurang enam tahun tiba-tiba dibekukan dan digantikan, tanpa proses asesmen yang memadai. Seandainya memang ada terdapat kelemahan di dalam KTSP, adalah tugas kita semua untuk menyempurnakannya, bukan menggantinya. Harus diakui bahwa penerapan KTSP belum sepenuhnya efektif dan berhasil. Tetapi sangat penting untuk diketahui bahwa kendala utama dalam penerapan KTSP tidak terdapat pada KTSP itu sendiri, tetapi terdapat pada para guru.

Setelah berpuluh-puluh tahun terkoneksi dan terbiasa *nrimo* dan bertindak seperti robot dengan pola *top down* dalam penyusunan kurikulum, agaknya perlu waktu lebih lama bagi guru-guru kita untuk mengubah cara berfikir, cara bersikap, dan cara bekerja agar sesuai dengan tuntutan KTSP. Guru-guru yang sebelumnya terbiasa dengan sikap “terima beres” atau “nrimo”, tentu sangat kaget dan shock ketika dituntut untuk berpartisipasi aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Mereka yang sebelumnya hanya “siap mengajar”, dengan KTSP dituntut pula untuk siap menyusun silabus, mencari bahan rujukan, menyusun diktat, dan menulis buku ajar. Sebenarnya tidak terlalu sulit bagi guru-guru untuk beradaptasi dengan tuntutan KTSP tersebut, tetapi karena minimnya pelatihan dan adanya keengganan pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, untuk benar-benar menerapkannya, maka sangatlah berat bagi guru-guru untuk beradaptasi dengan perubahan paradigma kurikulum ala KTSP. Sekarang, alih-alih melatih guru-guru untuk beradaptasi dengan KTSP, Kemdikbud malah memperkenalkan kurikulum baru, dengan nama Kurikulum 2013

Hingga di sini jelaslah bahwa yang diperlukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia saat ini bukanlah mengganti KTSP atau

memperkenalkan kurikulum baru, tetapi menyempurnakan KTSP dan meningkatkan kompetensi guru untuk penerapannya, melalui sistem pelatihan yang terencana, terstruktur, relevan, terukur, dan berkelanjutan. Dana sebesar delapan ratus tiga puluh miliar rupiah yang disetujui Komisi X DPR RI untuk persiapan penerapan Kurikulum 2013 akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk menyempurnakan penerapan KTSP, khususnya untuk meningkatkan mutu guru, dengan mengembangkan sistem pendidikan, rekrutmen, dan pelatihan guru yang baik.

Meskipun tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, kurikulum tetap saja sebuah instrumen pendidikan. Sebaik apapun instrumen tersebut tidak akan membawa arti apapun jika tidak ada aktor yang dapat memahami dan memainkannya dengan baik, dan sang aktor itu tidak lain adalah guru. Guru yang bermutu dapat menutupi kekurangan kurikulum, tetapi kurikulum yang sempurna sekalipun tidak akan dapat menutupi kelemahan atau kealpaan seorang guru. Hanya kepada guru, bukan kepada kurikulum, kita dapat menyandarkan segala harapan yang kita ingin wujudkan melalui proses pendidikan. Satu orang guru bermutu yang hadir di tengah peserta didik jauh lebih berharga dari setumpuk teks kurikulum atau buku ajar yang dicetak dengan tinta emas.





## BEBERAPA CATATAN UNTUK PROGRAM SEKOLAH GRATIS

*Prinsip keadilan sangat diperlukan dalam konsep dan implementasi PSG, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumsel untuk mengakses pendidikan formal sangat bervariasi*

**P**ROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG) adalah wujud dari satu idealisme pendidikan yang sangat tinggi, yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pelayanan publik. Idealisme tersebut telah menempatkan Sumatera Selatan (Sumsel) di garda terdepan dalam upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dengan PSG 12 tahun, Sumsel telah melangkah jauh, melampaui provinsi lain, bahkan Depdiknas dalam memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

PSG juga merupakan satu bentuk kesadaran politik (*political awareness*) dan kemauan politik yang mulia (*noblepolitical will*) untuk menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda utama pelayanan masyarakat. Jika benar-benar menjadi kesadaran dan kemauan dari para pimpinan dan politisi di Sumsel serta didukung oleh pola implementasi yang baik, dalam jangka waktu tidak terlalu lama PSG akan membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan pendidikan di wilayah ini. Tetapi sebaliknya, jika PSG dipolitisasi dan hanya menjadi komoditi politik, maka dalam waktu tidak terlalu lama

juga, PSG akan menimbulkan masalah politik pendidikan yang serius, yang akan merugikan masyarakat Sumsel.

Sebagai suatu kebijakan publik (*public policy*), PSG tidak boleh bersifat simbolik, tetapi harus riil, benar-benar menyentuh hajat pendidikan masyarakat luas dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara adil (proporsional), objektif (tepat sasaran dan sesuai kondisi dan kebutuhan riil masing-masing anggota masyarakat), dan akademik (melibatkan pertimbangan-pertimbangan akademik).

Prinsip keadilan sangat diperlukan dalam konsep dan implementasi PSG, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumsel untuk mengakses pendidikan formal sangat bervariasi. Mengabaikan prinsip keadilan akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Prinsip objektifitas juga sama pentingnya agar PSG benar-benar riil dan membumi, sehingga tepat sasaran, dapat menyentuh bagian-bagian dari masyarakat yang memang menanggung beban pendidikan yang berat dan membutuhkan bantuan. Prinsip akademik diperlukan, agar PSG dapat memberikan kontribusi positif terhadap berkembangnya kultur akademik yang kompetitif dan tidak menjadi semacam bantuan sosial yang meninabobokkan.

Dalam perjalanannya yang baru seumur jagung, PSG layak diperhatikan secara seksama, agar program ini dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan (*sustainable*), dan agar dapat diketahui pada sisi apa program ini sudah memenuhi prinsip keadilan, objektifitas, dan akademik, dan pada sisi apa prinsip-prinsip tersebut belum terpenuhi.

Tulisan ini menyajikan beberapa catatan kritis terhadap konsep dan implementasi PSG dan merekomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai upaya berbagi (*sharing*) tentang PSG.

*Pertama*, dalam konsep dan implementasinya PSG kurang tepat sasaran. Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2009 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan PSG sama-sama menegaskan bahwan tujuan program ini adalah untuk “meringankan beban orang tua.” Ini berarti sasaran utama PSG adalah orang tua. Karena itu maka seharusnya dana PSG diberikan langsung kepada orang tua, tidak diintegrasikan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada pihak manajemen sekolah.

Untuk menghindari beban yang berlebihan pada APBD, pemerintah daerah dapat menentukan batas minimal dan maksimal dana bantuan yang diberikan kepada orang tua, sehingga “meringankan” beban mereka. Dengan cara ini, PSG akan memberikan manfaat langsung kepada orang tua dan tidak terganggu oleh status atau kasta kelembagaan sekolah. Selain itu, orang tua dapat mengirimkan putra putri mereka ke sekolah jenis apapun selama bantuan yang mereka terima mencukupi. Sejalan dengan batasan bantuan yang diberikan pada orang tua, dana sumbangan yang boleh diterima oleh sekolah-sekolah juga perlu dibatasi.

Dengan batasan seperti itu, PSG dapat meringankan beban orang tua tanpa mematikan kreatifitas para pengelola sekolah untuk berimprovisasi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Salah satu alasan utama dari penolakan sekolah-sekolah negeri untuk menolak PSG dengan memakai label SSN, RSBI, dan SBI adalah karena tidak ingin kehilangan kemampuan untuk melakukan improvisasi kegiatan, baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler (ekskul) yang dapat meningkatkan prestasi siswa. Sekolah-sekolah tersebut telah

berkembang dengan karakteristik dan reputasi masing-masing dengan mengandalkan kegiatan-kegiatan “plus” yang membutuhkan dana cukup besar. Kegiatan-kegiatan “plus” itulah yang membuat sekolah-sekolah tersebut diberi label “unggulan” oleh masyarakat. Jika kegiatan-kegiatan tersebut tiba-tiba dikurangi, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang dan reputasi mereka akan memudar.

Jika dana PSG tidak diberikan langsung pada orang tua dan jika sekolah-sekolah berlabel khusus tersebut tidak “dibatasi” maka pendidikan dasar dan menengah akan terjebak dalam elitisme dan kasta-kasta. Pada akhirnya, “yang pintar akan semakin pintar dan yang bodoh akan semakin bodoh.” Karena mutu pendidikan dapat menentukan kemampuan seseorang dalam melakukan mobilitas sosial, maka “yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin.”

*Kedua*, kurangnya pembahasan dan uji publik. Meskipun ide PSG sudah cukup lama berkembang, namun landasan hukumnya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2009 dipersiapkan secara sangat terburu-buru, tanpa proses pembahasan dan uji publik yang memadai. Bahkan ada sinyalemen bahwa proses pengesahan Perda PSG adalah salah satu yang tercepat di dunia.

Karena dipersiapkan secara agak terburu-buru, maka wajar jika dua landasan hukum tersebut banyak menuai kritikan. Andaikan ada proses pembahasan dan uji publik yang memadai, barangkali konsep PSG akan lebih jelas, adil, objektif, dan akademik dan proses implementasinya akan berjalan lebih lancar. Proses pembahasan dan uji publik yang cukup sangat diperlukan tidak hanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan



yang bersifat elementer, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan publik terhadap PSG. Masyarakat dan para *stakeholder* pendidikan akan memiliki *sense of belonging*, *sense of responsibility*, dan komitmen yang lebih baik terhadap PSG jika mereka menjadi bagian dari proses penyiapannya.

*Ketiga*, kebijakan berbasis otoritas (*authority based policy*). Suatu kebijakan publik (*public policy*) akan lebih *acceptable* dan *applicable* jika berdasarkan pada analisis kebutuhan (*need assessment*) dan hasil riset (*research based*). Menurut pengamatan penulis, pemunculan dan pengembangan ide PSG sangat bertumpu pada idealisme dan pemikiran pemegang otoritas politik, yaitu Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Otoritas politik Gubernur Alex Noerdin yang begitu besar dan kuat membuat beliau tidak menghadapi banyak kendala (*challenges*) dalam memperkenalkan dan menggolkan PSG, meskipun kurang dijustifikasi dengan hasil suatu analisis kebutuhan atau riset formal yang mendalam.

*Keempat*, kebijakan PSG cenderung *top down*. Karena figur Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang sangat dominan, PSG dapat terus berjalan meskipun muncul dari gagasan, tekad, dan komitmen Alex Noerdin dan meskipun berbagai kelompok kepentingan pendidikan (*educational interest groups*) kurang dilibatkan dalam proses pemantapan gagasan, tekad, dan komitmen tersebut. Kelompok-kelompok kepentingan pendidikan perlu diberi ruang lebih besar untuk turut urun rembuk dan mengekspresikan kepentingan-kepentingan mereka dalam mendesain PSG, tidak hanya dalam implementasinya, agar visi, misi, dan tujuan PSG menjadi milik bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Sumsel.

*Kelima*, kurang mengindahkan variasi kemampuan ekonomi orang tua. Pergub No. 31 Tahun 2009 menegaskan bahwa PSG bertujuan “meringankan beban orangtua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.” Dari rumusan tujuan ini dapat dipahami bahwa seharusnya yang berhak atas PSG adalah para orang tua yang memang “terbebani” oleh biaya pendidikan anak-anak mereka. Mereka yang tidak merasa atau dinilai tidak “terbebani” seharusnya memang tidak masuk dalam kategori peserta PSG. Sejauh ini belum dirumuskan ukuran-ukuran untuk kategori “terbebani,” sehingga pelaksanaan PSG masih bersifat “pukul rata,” mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat individual dan kontekstual.

Kategori “terbebani” dapat dilihat, misalnya, dari rasio antara penghasilan [pekerjaan] orang tua dan dana pendidikan yang harus dikeluarkan [dimana anak mereka bersekolah]. Tanpa ukuran yang bersifat personal dan kontekstual, PSG akan sangat tidak adil, karena akan banyak orang tua yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori “terbebani” turut menikmati PSG. Misalnya, orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha dengan penghasilan di atas Rp 20.000.000.- per bulan akan mendapatkan perlakuan sama dengan orang tua yang berprofesi sebagai tukang becak dengan penghasilan Rp. 20.000.- per hari jika anak-anak mereka terdaftar pada sekolah yang sama. Misal lainnya, seorang anak yang bersekolah di sekolah “biasa” mendapatkan bantuan dana dalam jumlah yang sama dengan apa yang diterima oleh seorang anak yang bersekolah di sekolah “unggulan.”

Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat individual dan kontekstual akan membuat PSG memenuhi kriteria adil, objektif dan akademik. Keadilan akan terwujud, karena PSG

memperlakukan orang tua secara proporsional. Objektifitas akan terwujud karena PSG memperlakukan orang tua sesuai kondisi riil atau tingkat “beban” yang mereka hadapi untuk mendanai pendidikan anak-anak mereka. Nilai-nilai akademik akan terpenuhi, karena PSG akan memberikan kesempatan kepada anak-anak berprestasi untuk turut berkompetisi di sekolah-sekolah unggul dengan biaya besar, sehingga dapat mencegah elitisme pendidikan.

*Keenam*, PSG mengabaikan perbedaan kebutuhan operasional antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Program Sekolah Gratis (PSG) ditolak oleh beberapa pengelola sekolah swasta dengan alasan dana tambahan dari APBD tidak cukup untuk operasionalisasi kegiatan sekolah. Ketidacukupan ini disebabkan beban dana operasional yang lebih besar dibanding sekolah negeri. Jika di sekolah-sekolah negeri sebagian besar dana investasi untuk sarana dan prasarana serta dana operasional, seperti gaji guru, telah dibayar oleh pemerintah, di sekolah-sekolah swasta dana investasi dan gaji guru sebagian besar mengandalkan dana partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk SPP, uang komite, atau uang pembangunan. Dalam konteks ini maka adalah tidak realistis jika bantuan dana operasional untuk sekolah-sekolah swasta disamakan dengan bantuan untuk sekolah-sekolah negeri. Jika dipaksakan, sekolah-sekolah swasta akan sulit berkembang dan akan berjalan dengan sikap *mediocare* (apa adanya). Kesenjangan negeri-swasta ini dapat dihindari jika dana PSG diberikan langsung kepada orang tua dalam bentuk subsidi atau voucher pendidikan, tidak tiintegrasikan dengan dana BOS.

Demikianlah beberapa catatan yang saya buat berdasarkan hasil telaah dan pengamatan saya yang masih sangat terbatas

terhadap konsep dan implementasi PSG. Semoga catatan-catatan ini memberikan *second opinion* bagi upaya mewujudkan PSG yang berkeadilan, objektif, akademik, dan berkelanjutan (*sustainable*).✍

# 14

## CATATAN AKHIR: SEBUAH REFLEKSI

**P**OLITIK PENDIDIKAN yang buruk telah menjadi penghambat utama perkembangan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia. Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan kita berkembang sangat lamban. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, kita masih merintis sekolah dan madrasah berstandar internasional, sementara para tetangga kita telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan beraatandar internasional.

Di jenjang pendidikan tinggi, belum satu pun universitas kita yang masuk daftar 100 universitas terbaik di dunia dan atau masuk daftar 27 perguruan tinggi terbaik di Asia menurut versi *Times Higher Education* tahun 2010. Kita masih berjuang untuk memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan melalui proses akreditasi dan sertifikasi. Kita masih dihadapkan pada kenyataan banyak terjadinya mal praktik pendidikan, rendahnya kompetensi tenaga pendiidk dan kependidikan, dan rendahnya kompetensi lulusan. Data yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 2009 memperlihatkan bahwa dari sekitar 11 juta pengangguran di Indonesia, sekiat 45% atau 5 juta adalah pengangguran terdidik atau pengangguran intelek, dan dari angka 5 juta tersebut, sekitar 1,4 juta adalah para sarjana.

Rendahnya komitmen para penguasa kita terhadap pendidikan juga terlihat pada penyediaan dana riset. Bandingkan dana riset yang dimiliki oleh perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan dana riset yang dimiliki oleh perguruan tinggi di negara-negara Asia lainnya. Pada tahun 2010, dana riset Institut Teknologi Bandung (ITB) hanya 4.000.000.- USD dan di National University of Singapore (NUS)'s tersedia 470.000.000.- USD. Untuk pengembangan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2000 pemerintah Malaysia menyediakan dana sebesar 25.000.000.- USD sementara untuk mendanai riset-riset unggulan kementerian riset dan teknologi Indonesia hanya menyediakan dana sebesar 27,500 USD. Seoul National University (SNU) setiap tahun menerima 50.000.000.- USD dari pemerintah Korea Selatan untuk mendorong aktivitas riset dan pada tahun 2010 setiap profesor di SNU mendapat suntikan dana sebesar 1,900 USD (*Campus Asia* October-December 2010: 81).

Studi politik pendidikan sangat diperlukan oleh para pelaku, pengamat, peneliti, dan pembuat kebijakan (policy maker) dalam bidang pendidikan, karena studi ini membantu kita memahami berbagai persoalan pendidikan dalam konteks yang tidak hanya terbatas pada lingkungan pagar sekolah, tetapi menjangkau konteks politik penyelenggaraan pendidikan. Melalui studi politik pendidikan pula, para ilmuwan dan pengamat pendidikan akan menyadari bahwa berbagai persoalan yang melanda dunia pendidikan tidak dapat dipahami dan dijelaskan dengan baik jika hanya dianalisis dalam konteks kuantitas dan kualitas input, proses, dan output pendidikan, tetapi perlu dianalisis dalam konteks hubungan antara dunia pendidikan dengan lingkungan sosial politik yang mengelilinginya.

Memahami kaitan erat antara pendidikan dan politik dan dampaknya terhadap kinerja sistem pendidikan dapat mendorong semua pemangku kepentingan pendidikan membangun politik pendidikan yang baik dan menghindari politik pendidikan yang buruk. Sebelum kita berhasil membangun politik pendidikan yang baik, selama itu pula sistem pendidikan kita tidak akan bekerja dengan baik. Jika kita sungguh-sungguh menginginkan kinerja sistem pendidikan yang baik, maka kita harus mulai dengan membangun politik pendidikan yang baik di tingkat micro maupun macro. Memang betul pembangunan pendidikan membutuhkan dana yang besar, SDM berkualitas, dan sarana yang memadai. Tetapi semua itu tidak akan berarti jika tidak ditopang oleh poltiik pendidikan yang baik. Para pemimpin harus menyadari bahwa dunia pendidikan sangat berarti bagi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terlalu sayang apabila dunia pendidikan dinodai oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.☞





## DAFTAR PUSTAKA

- AAUW Educational Foundation 1998. *Gender gaps: Where schools still fail our children*. Washington, D.C.: AAUW Educational Foundation.
- Allen, A. & Plank, D.N. 2005. School board election structure and democratic representation. *Educational Policy* 19(3): 510-527.
- Arsyad, Azhar 2011. "Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi." Makalah disajikan pada ACIS ke-11.
- Avolio, B. J. 2007. Promoting more integrative strategies for leadership and theory-building. *American Psychologist*, 62 (1), 25-33. DOI: 10.1037/0003-066X.62.1.25.
- Bacharach, S. B., & Lawler, E. J. 1980. *Power and Politics in Organizations: The Social Psychology of Conflict, Coalitions, and Bargaining*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Bailey, Stephen K. et al. 1962. *Schoolmen and Politics*. Syracuse, New York: Syracuse University Press.
- Ball, S. J. 1987. *The Micropolitics of the school: Towards a Theory of School Organization*. London: Methuen.
- Barry, B. 1974. "Review: Exit, voice, and loyalty". *British Journal of Political Science*. 4(1), 79-107.
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. 1991. "Agenda dynamics and policy subsystems". *Journal of Politics*, 53, 1044-1074.

- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. 1993. *Agendas and instability in American politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Becker, G. 1976. *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.
- Belenky, M.F., Clinchy, B., Goldberger, N., & Tarule, J. 1986. *Women's ways of knowing*. New York: Basic Books.
- Bem, S. 1993. *The lenses of gender*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Bentley, A. F. 1908. *The Process of Government: A Study of Social Pressures*. Chicago: University of Chicago Press.
- Berkman, M.B. & Plutzer, E. 2005. *Ten Thousand Democracies: Politics and Public Opinion in America's School Districts*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Berry, F. S., & Berry, W. D. (in press). "Innovation and diffusion models in policy research". In P. Sabatier (ed.), *Theories of the Policy Process (2nd ed.)* Boulder, CO: Westview; Gray, V. (1973). Innovation in the states: A diffusion study. *American Political Science Review*, 67(4), 1174-1185.
- Berry, J. M. 1984. *The Interest Group Society*. Boston: Little, Brown, and Co.
- Birch, A. H. 1975. "Economic models in political science: The case of "Exit, Voice, and Loyalty." In *British Journal of Political Science*. 5(1), 69-82.
- Blasé, J. J. 1991a. *The Politics of Life in Schools: Power, Conflict, and Cooperation*. Newbury Park, CA: Sage.

- Blasé, J.J. 1989. "The micropolitics of the school: The everyday political orientation of teachers toward open principals". *Educational Administration Quarterly*, 25(4), 377-407.
- Bohlin, Karen and D. Farmer, Kevin Ryan 2001. *Building Characters in Schools: Resource Guide*. California: Jossey Bass.
- Buletin Parlementaria*. Nomor: 773/VI/2013, 1/Juni 2013.
- Burns, P. 2003. "Regime theory, state government and a takeover of urban education". In *Journal of Urban Affairs*, 25(3), 285-303.
- Campbell, A., Converse, P., Miller, E., & Stokes, D. E. (1960). *The American Voter*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Campbell, V., & Bond, R. (1982). "Evaluation of a Character Education Curriculum". In D. McClelland (ed.), *Education For Values*. New York: Irvington Publishers.
- Cayne, Bernard S. et al (1988). *The New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Language*. Canadian Edition, New York: Lexicon Publications, Inc.
- Cibulka, J. F. 2001. "The changing role of interest groups in education: Nationalization and the new politics of education productivity". *Educational Policy*. 15(2), 12-40.
- Clark, W. R., Golder, M., & Golder, S. 2006, August. "Power and politics: Exit, voice, andloyalty revisited". Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, PA.
- Closson, D. 2006. The National Education Association, Retrieved November 7, 2007, from Probe Ministries at [www.probe.org](http://www.probe.org)

- Code, L. 1991. *What can she know?* New York: Ithaca, Cornell University Press.
- Cohen-Vogel, L. & Ingle, K. 2007. “When neighbors matter most: Innovation, diffusion and state policy adoption in tertiary education”. In *Journal of Education Policy*, 22 (3), 241 – 262.
- Cohen-Vogel, L. & McLendon, M. 2009. “New approaches to understanding federal involvement in education”, yang dimuat dalam karya D. Plank, G. Sykes, dan B. Schneider (Eds.), *Handbook of Education Policy Research. A Handbook for the American Educational Research Association*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Cohen-Vogel, L. & McLendon, M. 2009. New approaches to understanding federal involvement in education, dimuat dalam D. Plank, G. Sykes, and B. Schneider (Eds.), *Handbook of Education Policy Research. A Handbook for the American Educational Research Association*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Cohen-Vogel, L. & McLendon, M. 2009. “New approaches to understanding federal involvement in education”. In D. Plank, G. Sykes, and B. Schneider (Eds.), *Handbook of Education Policy Research. A Handbook for the American Educational Research Association*. Mahwah, NJ.
- Cohen-Vogel, L., Ingle, K., Albee, A., & Spence, M. 2008. The “spread” of merit-based college aid: Politics, policy consortia and interstate competition. *Educational Policy*, 22 (3), 339-362.
- Collins, P.H. 1990. *Black feminist thought*. Boston: Unwin Hyman.

- Collins, P.H. 1991. *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment*. New York: New York University Press.
- Colman, Simak 2003. *Dictionary of Psychology*. Oxford University Press.
- Conley, D.T. (Ed.). 2003. "Understanding university success: A report from standards for success, a project of the American Association of American Universities and the Pew Charitable trusts", Eugene: Center for Educational Policy Research, University of Oregon.
- Connell, R. W. 1987. *Gender & power*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Cooper, B. S., & Sureau, J. 2008. Teacher unions and the politics of fear in labor relations. In *Educational Policy* 22 (1) (pp. 86-105). Thousand Oaks, CA: Corwin Publishing.
- Cooper, B. S., Cibulka, J., & Fusarelli, B. 2008. *Handbook on education politics and policy*. Mahway, NJ: Routledge.
- Cooper, B.S. 1998. *Merging America's teacher's unions. American Education Annual-1998*. New York: Gale Press.
- Cooper, B.S., & Liotta, M. 2001. "Urban teachers' unions face their future: the dilemmas of organizational maturity". *Education and Urban Society*, 34 (1), 101-118.
- Cresswell, A. S. 1993. "Greece Central School District: Stepping back from the brink". In C.T. Kerchner & J. E. Koppich (Eds.), *A union of professionals: Labor relations and educational reform* (pp. 79-97). New York: Teachers College Press.

- Crick, B. 1959. *The American Science of Politics: Its Origins and Conditions*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Crick, B. 2000. *Essays on Citizenship*. London: Continuum.
- Cyert, R. M., & March, J. G. 1963. *A Behavioral Theory of the Firm*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- David, M. E. 1993. *Parents, gender, and education reform*. Cambridge, MA: Polity Press.
- DeBray-Pelot, E. 2007. "School choice and educational privatization initiatives in the 106th and 107th Congresses: An analysis of policy formation and political ideologies". *Teachers College Record*, 109,927–972.
- Djatnika, Rachmat 1996. *Sistem Etika Islami (Akhlaq Mulia)*. Jakarta: PustakaPanjimas.
- Dowding, K., John, P., Mergoupis, T., & Vugt, M. 2000." Exit, voice and loyalty: Analytical and empirical developments". *European Journal of Political Research*. 37, 469–495.
- Dowling, R. E. 1960. "Pressure group theory: Its methodological range". *American Political Science Review*, 65(4), 938-956.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: HarperCollins.
- Ehrensals, P. A. L., & First, P. F. 2008. "Understanding school board politics: Balancing public voice and professional power". In B. S. Cooper, J. G. Cibulka, & L. D. Fusarelli (Eds.), *Handbook of education politics and policy*, New York: Routledge, 73–88
- Eldredge, N., & Gould, S. J. 1972. "Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism". In T. Schopf (Ed.), *Models in Paleobiology*, San Francisco: Freeman: 82-115.

- Elis, R. 2006. *Intradistrict inequality in American public schools: Exit, voice and strategy*. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, PA.
- Etzioni, A. 1969. *The semi-professions and their organization*. New York: Free Press.
- Feuerstein, A. 2002. "Elections, voting, and democracy in local school district governance". In *Educational Policy* 16(1): 15-36.
- Fine, S. 1969. *Sit-down: The General Motors strike of 1936-1937*, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Foucault, M. (1991). *Discipline and Punish: the birth of a prison*. London, Penguin.
- Foucault, Michel (1998) *The History of Sexuality: The Will to Knowledge*, London, Penguin.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. Marshfield, MA: Pitman Publishing.
- Freeman, R. E., & Reed, D. L. 1983. Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. *California Management Review* 25(3), 88-106.
- Fusarelli (Eds.), *Handbook of Education Politics and Policy* (pp. 281-310). New York: Routledge.
- Fusarelli, L. D., & Cooper, B. S. 1999. Why the NEA and AFT sought to merge – and failed. *School Business Affairs*, 65 (4), 33-38.
- Garth-McCullough, R. 2007. More with less: Urban teacher experiences in a new small school. *Negro Educational Review*, 58(3/4), 253-271.

- Gibbs, P., Zopiatis, A., & Iacovidou, M. 2009. An exploratory use of the stakeholder approach to defining and measuring quality: The case of a Cypriot higher education institution. *Quality in Higher Education* 15(2), 147–165.
- Gica, D. G. 2009. Implementing a new Americans initiative. *Perspective: AYP Magazine*, 25(3), 285-303.
- Gilligan, C. 1982. *In a different voice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Goodson, J. R., McGee, G. W., Cashman, J. F. 1989, December. Situational leadership theory: A test of leadership prescriptions. *Group & Organization Studies*, 14 (4), 446-461.
- Gordon, M. F., & Louis, K. S. 2009. Linking parent and community involvement with student achievement: Comparing principal and teacher perceptions of stakeholder influence. *American Journal of Education* 116(1), 1–32.
- Gray, V. 1994. Competition, emulation, and policy innovation. In L. Dodd & C. Jillson (Ed.), *New Perspectives on American Politics* (pp. 230-248). Washington, DC: CQ Press.
- Harding, S. (Ed.). 1987. *Feminism and methodologies: Social sciences issues*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Harman, Grant 1974. *The Politics of Education: A Bibliographical Guide*, St Lucia, University of Queensland Press.
- Harman, Grant 1980. *Exploring Politics in Education: Some Barriers and Some Theoretical Considerations*. Centre for the Study of Higher Education, Parkville: The University of Melbourne.



- Harris, R. A., & Milkis, S. M. 1996. *The Politics of Regulatory Change: A Tale of Two Agencies (2nd ed.)* New York: Oxford University Press.
- Hauser, G. M., Choate, K., & Thomas, T. P. 2009. A two-year study of stakeholder perceptions associated with the transition from 8th grade to high school. *International Journal of Learning* 16(3), 315–326.
- Healy, M. 2007. School choice, brand loyalty and civic loyalty. *Journal of Philosophy of Education* 41(4), 743–756.
- Hirschman, A. O. 1970. *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hirschman, A. O. 1986. Exit and voice: An expanding sphere of influence. In A. O. Hirschman (Ed.), *Rival news of market society and other essays* (pp. 77–105). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hoyle, E. 1986. *The Politics of School Management*. London: Hodder & Stoughton.
- Hull, G.T., Scott, P.B., & Smith, B. (Eds.) 1982. *All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave*. New York: The Feminist Press at City University of New York.
- Iannaccone, L. 1975. *Education policy systems: A Study Guide for Educational Administrators*. Fort Lauderdale, FL: Nova University Press.
- Ingle, K., Cohen-Vogel, L. & Hughes, R. 2007. The public policy process among Southeastern states: Elaborating theories of regional adoption and hold-out behavior. *Policy Studies Journal*, 36 (1).

- Jalaluddin 2011. "Menggali Nilai-nilai Kearifan Lokal Sumatera Selatan untuk Pengayaan Pendidikan Karakter." Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Sumsel.
- Johnson, B. L. 2001. Micropolitical dynamics of education interests: A view from within. Retrieved February 26, 2009, from <http://exp.sasgepub.com/dgi/content/rfs/15/1/115>.
- Johnson, B. L. 2003. Those nagging headaches: Perennial issues and tensions in the politics of education field. *Educational Administration Quarterly*, 39 (1), 41-67.
- Kalbfleisch, P. (Ed.). 1995. *Gender, power, and communication in human relationships*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Kelly, S. Q. 1994. Punctuated change and the era of divided government. In L. Dodd & C. Jillson (Ed.), *New perspectives on American politics* (pp. 162-190). Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Kelso, L. 2007. *Karl Marx: The almost capitalist: Critique of Karl Mars's das capital*. Washington. DC: Center for Economic and Social Justice.
- Kementerian Pendidikan Nasional 2010. *Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter*.
- Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*.
- Keppler, J. 1994. *Monopolistic competition theory: Origins, results, and implications*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Kerchner, C.T., & Cooper, B.S. 2003. "Ravering tigers" under siege: Teacher union legitimacy and instructional turmoil. *Yearbook of the National Society for the Study of Education*. 102(1), 219-248.
- Kingdon, J. W. 1984. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston: Little, Brown.
- Kingdon, J. W. 1994. Agendas, ideas, and policy change. In L. Dodd & C. Jillson (Eds.), *New Perspectives on American Politics* (pp. 215-299). Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Kingdon, J. W. 1995, *Agendas, Alternatives, and Public Policies (2nd edition)* New York: Harper Collins.
- Kusnaryanto, Wijaya 2013. *Kurikulum 2013 Demi Kualitas Pendidikan Nasional*. Dalam The Quality Edisi 19, Mei 2013.
- Labaree, D. F. 2000 No exit: public education as an inescapably public good. In L. Cuban & D. Shipps (Eds.), *Reconstructing the Common Good in Education* (pp. 110–129). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Laver, M. 1976. Exit, voice, and loyalty revisited: The strategic production and consumption of public and private goods. *British Journal of Political Science*.6, 463–482.
- Lawrence Erlbaum dan McGuinn, P. J. 2006. *No Child Left Behind and the Transformation of Federal Education Policy, 1965-2005*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Lijphart, A. (1997). Unequal participation: Democracy's unresolved dilemma. *American Political Science Review* 91: 1-14.

- Lloyd, E. 1995. Feminism as a method: What scientists get that philosophers don't. *Philosophical Topics*. 23: 189-220.
- Lodge, M., & Steenbergen, M. (1995). The responsive voters: Campaign information and the dynamics of candidate evaluation. *American Political Science Review* 89: 309-326.
- Lugones, M. & Spelman, E. 1983. Have we got a theory for you! Feminist theory, cultural imperialism and the demand for "the woman's voice". *Women's Studies International Forum*, 6: 573-581.
- Lutz, F., & Iannacone, L. 1978. *Public Participation in School Decision Making*. Lexington: Lexington Press.
- M. Amir Ali, 2004, *Removing the Dichotomy of Sciences: A Necessity for the Growth of Muslims*. FutureIslam: A Journal of Future Ideology that Shapes Today the World Tomorrow. [http://www.futureislam.com/20050301/insight/amir\\_ali/removing\\_dichotomy\\_of\\_sciences.asp](http://www.futureislam.com/20050301/insight/amir_ali/removing_dichotomy_of_sciences.asp), 2004.
- Malen, B. 1995. The micropolitics of education: Mapping the multiple dimensions of power relations in school politics. *Journal of Education Policy*, 9 (5), 147 – 167.
- Marshall, C., & André-Bechely, L. 2008. Feminism and education politics: No longer for women only. In B.S. Cooper, J.G. Cibulka, L.D.
- Marshall, C., & Scribner, J. 1991. It's all political. *Education and Urban Society*, 23 (4). 347-355.
- Martin, R. C. 1962. *Government and the Suburban School*. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.
- Marx, K. 1887. *The communist manifesto* (S. Moore & F. Engels. Trans.) Moscow: Progress Publishers. Retrieved

December 1, 2009, from <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm>.

- McDermott, K. 2005, dimuat dalam MINT condition? "The politics of alternative certification and pay incentives for teachers in Massachusetts". *Educational Policy*, 19 (1), 44 – 62.
- McDermott, K. A. 1999. *Controlling Public Education: Localism versus Equity*. Lawrence, Kansas: University of Kansas Press.
- McLellan, D. 2007. *Marxism after Marx*. Basingstoke England: Palgrave MacMillan. Dalam A.M. Cresswell & M.J. Murphy (Eds.) *Education and collective bargaining: Readings in policy and research* (pp. 357-362). Berkeley, CA: McCutchan.
- McLendon, M. K., Hearn, J. C., & Deaton, R. 2006. Called to account: Analyzing the origins and spread of state performance-accountability policies for higher education. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 28 (1), 1 – 24.
- McLendon, M., & Cohen-Vogel, L. 2008. *Understanding educational policy-making in the American states: Lessons from political science*. Dalam B.S. Cooper, L. Fusarelli, and J. Cibulka (Eds.), *Handbook of Educational Politics and Policy*. Oxford, UK: Routledge, Taylor and Francis.
- McMahon, W. (2009). Education finance policy: Financing the non-market and social benefits. *Journal of Education Finance*, 32(2).
- McMahon, W. 2002. *Education and Development: Measuring the Social Benefits*. Oxford: Oxford University Press.

- McMahon, W. 2006. *Higher Education, Greater Good: The Private and Social Benefits of Higher Education*. Baltimore: MD.
- McMahon, W. 2007. Analysis of education externalities with applications to development in the US deep south, *Contemporary Economic Policy*.
- McMahon, W. 2009. *Higher Learning, Greater Good: The Private and Social Benefits of Higher Education*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Meier, K. 2002. A research agenda on elections and education. *Educational Policy*, 16(1): 219-230.
- Meier, K. J. & England, R.E. 1984. Black representation and educational policy: Are they related? *American Political Science Review* 78 (2): 392-403.
- Meier, K.J., Stewart, J., & England, R.E. 1989. *Race, Class, and Education: The Politics of Second Generation Discrimination*. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
- Mintrom, M. 1997. Policy entrepreneurs and the diffusion of innovation. *American Journal of Political Science*, 41 (3), 738-770.
- Mintrom, M. 2000. *Policy Entrepreneurs and School Choice*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Mintrom, M., & Vergari, S. 1998. Policy networks and innovation diffusion: The case of state education reforms. *The Journal of Politics*, 60 (1), 126 – 148.
- Mintzberg, H. 1983. *Power in and Around Organizations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Mooney, C. Z. 2001. Modeling regional effects on state policy diffusion. *Political Research Quarterly*, 54 (1), 103-124.
- Mooney, C. Z., & Lee, M. H. 1995. *Legislating Morality in the American States: The Case of Pre-Roe Abortion Regulation Reform*.
- Morgan, G. 1986. *Images of Organization*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mossberger, K., Stoker, G. 2001. The evolution of of urban regime theory: The challenge of conceptualization. *Urban Review*, 26(6), 810-835.
- Muhammad, Husein 2011. "Kyai, Pesantren dan Pembentukan Karakter Bangsa." Makalah disajikan pada ACUS ke-11.
- Nice, D. C. 1994. Policy innovation in state government. Ames, IA: Iowa State University Press..
- Northouse, P. G. 2007. *Leadership: Theory and practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Odegard, P. H. (ed.), 1967. Introduction, to A. F. Bentley, *The Process of Government*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Opfer, V. D., Young, T. V., & Fusarelli, L. D. 2008, Politics of interest: Interest groups and advocacy coalitions in American education. In Cooper, B. S., Cibulka, J. G., & Fusarelli, L.D., *Handbook on education politics and policy*. (pp. 195-216). New York & London: Routledge.
- Orr-Bement, D. M. 2002, November 21. "A theoretical perspective of the state policy process for higher education policy decisions". Paper presented at the annual meeting of the Association for the Study of Higher Education, Sacramento, CA.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Phillips, R. 2003. Stakeholder legitimacy. *Business Ethics Quarterly*13(1), 25–41.
- Phillips, R., Freeman, R. E., & Wicks, A. C. 2003. What stakeholder theory is not. *Business Ethics Quarterly*13(4), 479–502.
- Politikdidaktik Kurzgefasst, published by the Federal Centre for Political Education, Bonn 1994, S. 17
- Powell, B. 2008. Stakeholders' perception of who influences the decision-making processes in Ontario's public postsecondary education institutions. *Higher Education Research & Development* 27(4), 385–397.
- Rabinow, Paul (editor) (1991) *The Foucault Reader: An introduction to Foucault's thought*, London, Penguin.
- Rejai, M., Phillips, K. 2004, Winter. Leadership theory and human nature. *Journal of Political and Military Sociology*, 32 (2), 185-192.
- Robinson, S. E. 2004. Punctuated equilibrium, bureaucratization, and budgetary change in schools. *Policy Studies Journal*, 32, 25 – 39.



- Roshental, A. 1969. *Pedagogues and Power*. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.
- Ruch-Ross, H. S., Mason, M., William, D., & Cartland, J. 2008. Role sharing between evaluators and stakeholders in practice. *American Journal of Evaluation* 29(4), 460–477.
- Sachs, Jeffrey 2011. “Globalization’s Government.” Dalam *Jakarta Post*, 4 Oktober, hlm. 2.
- Salo, P. 2008. Decision-making as a struggle and a play. *Educational Management Administration & Leadership*, 35(4) London: Sage.
- Salsbury, R. H. 1990. The paradox of interest groups in Washington: More groups less clout. In A. King (Ed.), *The New American Political System* (2nd edition). (pp. 203-229). Washington, DC: AEI Press.
- Sambutan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hardiknas dan Harkitnas, Jakarta, 20 Mei 2011.
- Scribner & D. H. Layton (Eds.), *The Study of Education Politics* (pp. 147-168). Washington, D.C: Falmer.
- Shanker, A.L. 1976. Why teachers need the right to strike. Dalam A.M. Cresswell & M.J. Murphy (Eds.) *Education and collective bargaining: Readings in policy and research* (pp. 357-362). Berkeley, CA: McCutchan.
- Shippo, D. 2008. Urban regime theory and the reform of public schools: Governance, power and leadership, pp. 89-108. In Cibulka, J. G., Fusarelli, L. D., Cooper, B. S. (Eds.) (1998). *Handbook of education politics and policy*. New York: Routledge.

- Sims, C. H., & Miskel, C. G. 2001, March. The punctuated equilibrium of national reading policy: Literacy's changing images and venues. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA.
- Sims, C. H., & Miskel, C. G. 2003. The punctuated equilibrium of national reading policy: Literacy's changing images and venues. In W. Hoy & C. Miskel (Eds.), *Studies in leading and organizing schools* (hlm. 1 - 26). Greenwich, CT: Information Age.
- Sims, H. P., Faraj, S., Yun, S. 2009. When should a leader be directive or empowering?: How to develop your own situational theory of leadership. *Business Horizons*, 52, 149-158. DOI: 10.1016/j.bushor.2008.10.002.
- Skowronek, S. 1993. *The Politics Presidents Make: Leadership From John Adams to George Bush*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Souza, R., Voss, A. C. 2008. Contingency research in operations management practices. *Journal of Operations Management*, 26, 697-713. DOI: 10.1016/j.jom.2008.06.001.
- Spelman, E. 1988. *Inessential woman*. Boston: Beacon Press.
- Stoker, G. 1998. Regime theory and urban politics. In H. Judge, G. Stoker, & H. Wolman (Eds.), *Theories of urban politics* (3rd ed., pp. 54-71). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Stone, C. 1989. *Regime politics: Governing Atlanta, 1946-1988*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Surya, Yohanes, wawancara dengan Dimiyati, Vien 2013. "Kualitas Materi Ilmu Sains Menurun," dalam *Jurnal Nasional*, 13 Juni 2013.

- Syed M. Naquib al-Attas, 1978, *Islam and Scularism*, Angkatan Muda Belia Islam Malaysia, ABIM, Kuala Lumpur
- Syed M. Naquib al-Attas, 1980, *The Concept of Education in Islam*, Muslim Youth Movement of Malaysia, Kuala Lumpur
- The Quality*, Special Report. Edisi 19, Mei 2013.
- Thomas, C. S., & Hrebenar, R. 1992. Changing patterns of interest group activity. In M. P. Petracca (ed.), *The Politics Interests: Interests Groups Transformed*. (pp. 150-174). Boulder, CO: Westview Press.
- Thorne, B. 1999. *Gender play: girls and boys in school*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Tincher-Ladner, L. 2009. A best practice for selecting your QEP: Techniques for facilitating mission-based stakeholder involvement in the selection of the institutional quality enhancement plan. *Community College Journal of Research and Practice* 33(8), 622–625.
- Tinio, Victoria L. Tinio 2011. *ICT in Education*. ICT for Development United Nations Development Programme Bureau for Development Policy, New York.
- Tong, R. 1989 *Feminist thought: A comprehensive introduction*. Boulder, CO: Westview Press.
- True, J. L. 2000. Avalanches and incrementalism. *American Review of Public Administration*, 30, 3-18.; McLendon, M., & Cohen-Vogel, L. (2008). Understanding educational policy-making in the American states: Lessons from political science. In B.S. Cooper, L. Fusarelli, and J. Cibulka (Eds.), *Handbook of Educational Politics and Policy*. Oxford, UK: Routledge, Taylor and Francis.

- True, J. L., Jones, B. D., & Baumgartner, F. R. 1999. Punctuated-equilibrium theory. In P.A. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (pp. 97-115). Boulder, CO: Westview Press.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Pasal 36 ayat 1 dan 2)
- Usman Hassan, 2003, *The Concept of Ilm and Knowledge in Islam*, The Association of Muslim Scientists and Engineers
- Vroom, V.H., Jago, A.G. 2007, January. The role of the situation in leadership. *American Psychologist*, 62 (1), 17-24. DOI: 10.1037/0003-066X.62.1.17.
- Walker, J. L. 1969. The diffusion of innovations among the American states. *American Political Science Review*, 67, 1174 – 1185.
- Weis, L. & Fine, M. (Eds.). 1993. *Beyond silence voices: Class, race, and gender in United States schools*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Wilson, C. 2000. Policy regimes and policy change. *Journal of Public Policy*, 20, 247-274.
- Wilson, D. 2009. Exit, voice and quality in the English education sector. *Social Policy & Administration*. 43(6), 571–584.
- Wing, A.K. (Ed.) 1997. *Critical race feminism: A reader*. New York: New York University Press.
- Wolfinger, R. E., & Rosenstone, S. J. (1980). *Who votes?* New Haven, CT: Yale University Press.
- Yunus, Mahmud 1942. *Attarbiyatu wa al-Ta'lim*, Jilid 1. Padang Panjang: Al-Maktabah al-Sa'diyah.

*<http://aplaceinthisworld.tumblr.com/post/172091858/character-building-is-nation-building>*

*[http://id.wikisource.org/wiki/Karakter-karakter\\_bangsa](http://id.wikisource.org/wiki/Karakter-karakter_bangsa)*



## Biodata Penulis



**MUHAMMAD SIROZI**, dipanggil Sirozi, adalah Guru Besar Ilmu Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan sejak tahun 1987, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah. Dia lahir di Curup, Bengkulu, pada tanggal 16 September 1962. Pada tahun 1987 Sirozi menyelesaikan studi S1 (Drs.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah.

Pada tahun 1992, dia menyelesaikan studi S2 (Master of Arts) pada jurusan Social Anthropology di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Pada tahun 1998, Sirozi menyelesaikan studi S3 (Philosophy Doctor) pada jurusan Educational Policy di Faculty of Educcaion, Monash University, Melbourne-Australia. Saat ini Sirozi menetap di Palembang bersama istrinya, Eni Zahara, dan tiga buah hati mereka, Imtiyazi Nabila, Izzaty Zephaniah, dan Muhammad Fazal Rizvi. Pada tahun 2004 Sirozi terpilih menjadi salah satu dari 32 anggota tim riset (*New Century Scholars*) dari 28 negara yang disponsori oleh pihak Fulbright untuk meneliti trend dan dampak globalisasi terhadap perkembangan sistem pendidikan tinggi di berbagai negara.

Sejak tahun 2007 Sirozi telah memiliki sertifikat sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Pada tahun 2008 diaterpilih sebagai Ketua Dewan Pendidikan

Sumatera Selatan. Minat keilmuan Sirozia dalah pada kajian-kajian politik pendidikan, globalisasi pedidikan, dan manajemen pendidikan.